



**SALINAN**

**GUBERNUR SULAWESI BARAT**  
**PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT**  
**NOMOR 3 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI SULAWESI BARAT**  
**TAHUN 2020-2040**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**GUBERNUR SULAWESI BARAT,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2040;

**Mengingat** :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 51);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 68);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 95);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 85);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 nomor 2, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 99).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT  
dan  
GUBERNUR SULAWESI BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN  
INDUSTRI PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2020-2040.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Barat
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat
3. Kabupaten adalah Kabupaten di wilayah Provinsi Sulawesi Barat.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengelola bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri, sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
7. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional, yang selanjutnya disingkat RIPIN adalah pedoman bagi Pemerintah dan pelaku Industri dalam perencanaan dan pembangunan Industri.
8. Kebijakan Industri Nasional, yang selanjutnya disingkat KIN adalah arah dan tindakan untuk melaksanakan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional.
9. Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat RPIP adalah penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program pembangunan industri provinsi untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
10. Industri Unggulan adalah industri yang ditetapkan menjadi prioritas yang berperan penting sebagai penggerak utama (*prime mover*) pertumbuhan perekonomian di Daerah.

BAB II  
MAKSUD, ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai Pedoman:

- a. Perangkat Daerah dan instansi terkait dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan industri;

- b. Pemerintah Kabupaten dalam penyusunan RPIP; dan
- c. Pelaku industri dan masyarakat dalam membangun sektor industri.

### Pasal 3

RPIP diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepentingan nasional;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kepastian berusaha;
- d. pemerataan persebaran;
- e. persaingan usaha yang sehat; dan
- f. keterkaitan industri.

### Pasal 4

RPIP bertujuan untuk:

- a. menata potensi sumber daya industri Daerah Provinsi;
- b. menentukan sasaran, strategi, dan rencana aksi pembangunan industri Daerah Provinsi;
- c. mewujudkan industri Daerah Provinsi yang mandiri, berdaya saing, berkesinambungan dan berwawasan lingkungan;
- d. mewujudkan pemerataan pembangunan industri provinsi guna memperkuat ekonomi Daerah Provinsi dan memperkuat ketahanan nasional; dan
- e. meningkatkan kemakmuran dan kesadaran masyarakat Daerah Provinsi secara merata dan berkeadilan.

### Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. industri unggulan provinsi;
- b. jangka waktu;
- c. pelaksanaan;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. pembiayaan; dan
- f. peran aktif masyarakat

### Pasal 6

Industri unggulan dikembangkan dengan pendekatan kewilayahan yang mendasarkan pada potensi sumber daya nasional di Daerah.

### Pasal 7

- (1) Industri Unggulan yang menjadi prioritas dalam RPIP, yaitu :
- a. industri pengolahan kakao;
  - b. industri pengolahan kelapa;
  - c. industri pengolahan kopi;
  - d. industri pengolahan tekstil dan tenun;



e. industri pengolahan gula aren; dan

f. industri pengolahan ikan.

- (2) Selain Industri Unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikembangkan industri lain yang potensial.

### BAB III

#### JANGKA WAKTU RPIP

##### Pasal 8

- (1) RPIP ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yaitu tahun 2020-2040.
- (2) RPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali setiap 5 (lima) tahun.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan kebijakan industri dalam RPJPD, RPJMD, RTRW dan/atau RIPIN, RPIP dapat ditinjau kembali sewaktu-waktu.

##### Pasal 9

- (1) RPIP sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (1) memuat:
- a. pendahuluan;
  - b. gambaran kondisi Daerah Provinsi;
  - c. visi dan misi pembangunan serta tujuan dan sasaran pembangunan industri;
  - d. strategi dan program pembangunan industri; dan
  - e. penutup.
- (2) RPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### BAB V

#### PELAKSANAAN

##### Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pembangunan industri Provinsi.
- (2) Dalam melaksanakan program pembangunan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pemangku kepentingan.
- (3) Penyelenggaraan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan para pemangku kepentingan diatur dengan Peraturan Gubernur.

##### Pasal 11

- (1) Pengembangan industri unggulan Provinsi harus memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah menyiapkan sumber daya manusia untuk masyarakat dalam upaya akses kesempatan kerja pada industri unggulan Provinsi.

- (3) Pemerintah Daerah mendorong kemitraan usaha mikro, kecil dan menengah dengan industri unggulan Provinsi skala besar.

## BAB VI

### PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 12

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP).
- (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan pelaksanaan RPIP diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### Pasal 13

- (1) Gubernur melaporkan hasil pelaksanaan RPIP kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Menteri yang membidangi urusan perindustrian paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun pada bulan Juni dan Desember.
- (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melaporkan hasil pelaksanaan RPIK kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Menteri yang membidangi urusan Perindustrian paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun pada bulan Juni dan Desember.
- (3) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit meliputi pertumbuhan sektor industri, kontribusi industri non migas terhadap Produk Domestik Regional Bruto, nilai ekspor produk industri, jumlah tenaga kerja di sektor industri, nilai investasi sektor industri dan pelaksanaan program pembangunan dan pengembangan industri yang meliputi sumber daya industri, sarana dan prasarana industri dan pemberdayaan industri.

## BAB VII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 14

Pendanaan pelaksanaan RPIP dibebankan kepada:

- a. anggaran pendapatan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

### PERAN AKTIF MASYARAKAT

#### Pasal 15

- (1) Masyarakat berperan aktif dalam penyelenggaraan RPIP Tahun 2020-2040.
- (2) Peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

- (1) Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju  
pada tanggal 14 Juni 2021  
Gubernur Sulawesi Barat,

ttd

M. ALI BAAL MASDAR

Diundangkan di Mamuju  
pada tanggal 14 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

MUHAMMAD IDRIS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2021 NOMOR 3  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT (3-89/2021)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

ARIANTO,AP,MM

Pangkat: Pembina Utama Muda IV/c

NIP.: 19740112 199311 1 001

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI SULAWESI BARAT  
TAHUN 2020–2040

## I. UMUM

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari Negara lain yang lebih dahulu maju.

Sulawesi Barat memiliki banyak komoditas unggulan, baik dari sektor pertanian, pertambangan, maupun perikanan, di antaranya yang menonjol adalah kakao, kelapa dalam, murbei, gula aren, ikan dan lain-lain. Sesuai dengan potensi sumberdaya alam Provinsi Sulawesi Barat, industri utama yang dikembangkan untuk menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah adalah industri pengolahan kakao, kelapa dalam, tekstil dan tenun, gula aren, ikan yang merupakan komoditi utama daerah.

Dalam rangka memperkuat dan memperjelas peran pemerintah daerah dalam pembangunan industri nasional, perlu disusun perencanaan pembangunan industri provinsi yang sistematis, komprehensif, dan futuristik dalam wujud Rencana pembangunan Industri Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019-2039.

Penyusunan RPIP Sulawesi Barat Tahun 2019-2039 mengacu pada rencana induk pembangunan industri Nasional (RIPIN) dan Kebijakan Industri Nasional (KIN). RPIP disusun dengan memperhatikan: potensi sumber daya industri daerah; Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten; dan keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan pembangunan Industri di Kabupaten serta kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan di Sulawesi Barat.

Penyusunan RPIP selain dimaksudkan untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dimaksudkan untuk mempertegas keseriusan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian, yaitu:

- a. Meningkatkan laju pertumbuhan dan kontribusi sektor industri daerah dalam mendorong ekonomi kerakyatan.
- b. Meningkatkan nilai tambah komoditas/produk melalui hilirisasi agro dan meningkatkan volume, varian dan nilai ekspor produk-produk industri.
- c. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja daerah kedalam sektor Industri.
- d. Meningkatkan arus investasi ke daerah melalui sektor Industri.
- e. Mewujudkan iklim industri daerah yang kondusif dan mampu menjamin keberlangsungan eksistensi industri daerah dan menarik tumbuh berkembangnya industri-industri baru.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 106

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT  
NOMOR : 3 TAHUN 2021  
TANGGAL : 14 JUNI 2021  
TENTANG : RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI SULAWESI  
BARAT TAHUN 2020-2040.

---

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Saat ini, isu utama, urgen dan kekinian berkaitan dengan permasalahan pembangunan di sektor perindustrian adalah bagaimana mengatasi dan mengurai permasalahan pembangunan industri seperti masih lemahnya daya saing industri nasional, belum kuat dan belum dalamnya struktur industri nasional, masih terkonsentrasinya kegiatan industri di Pulau Jawa, dan belum optimalnya regulasi pemerintah dalam mendukung kemajuan sektor industri.

Solusi alternatif yang sementara dijalankan dalam rangka meningkatkan sinergitas secara komprehensif Pembangunan Industri Agro antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah Kementerian Perindustrian RI telah menyusun Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 sebagai amanat Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Sedangkan setiap Gubernur/Bupati/Walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP)/ Kabupaten/Kota (RPIK) sesuai amanat Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menyusun dokumen Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Sulawesi Barat Tahun 2017-2037 dengan tetap mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 dan Kebijakan Industri Nasional (KIN) serta Pengembangan Kompetensi Industri (KID) Sulawesi Barat 2012-2015 dalam rangka mewujudkan visi pembangunan industri nasional “Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh”.

Dalam RIPIN 2015-2035, Provinsi Sulawesi Barat termasuk salah satu Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI). Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014-2034, terdapat Kawasan industri merupakan kawasan yang potensial dimanfaatkan untuk kegiatan industri yang meliputi :

- a. kawasan industri skala besar berupa agroindustri pengolahan komoditi hasil-hasil pertanian, perkebunan dan peternakan direncanakan pengembangannya di Belang Belang, dan industri pengolahan hasil tambang batubara dan besi di Kambunong;
- b. kawasan industri skala menengah berupa agroindustri pengolahan hasil-hasil perkebunan kakao direncanakan pengembangannya di Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamuju Tengah, dan Kabupaten Mamuju;
- c. kawasan aglomerasi industri skala menengah pengolahan kelapa sawit di Kabupaten Mamuju Utara, Kabupaten Mamuju Tengah, dan Kabupaten Mamuju; dan
- d. kawasan industri perikanan berupa pengolahan komoditas hasil perikanan direncanakan pengembangannya di Palipi Kabupaten Majene dan Kabupaten Polewali Mandar.

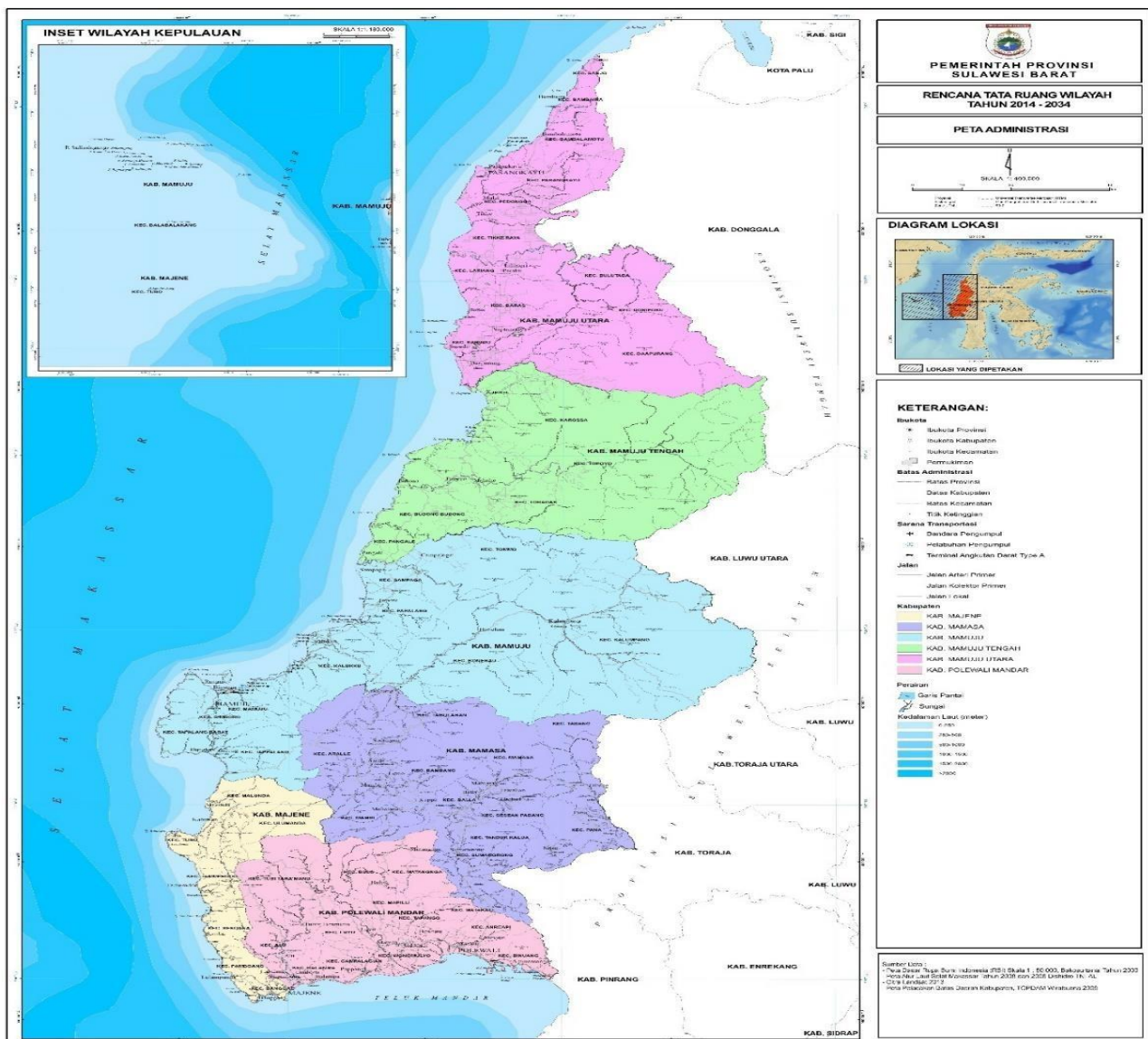


Pemerintah saat ini telah berupaya untuk melakukan pengembangan Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus yang berada di Belang-Belang, Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju seiring dengan RTRWP Sulawesi Barat 2014-2034 yang telah menentukan Matabe sebagai kawasan strategis pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Posisi strategis Matabe di selat Makassar sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), serta penentuan kawasan Belangbelang sebagai kawasan terpadu pelabuhan, Bandar udara, stasiun KA barang, industri, perdagangan, pergudangan dan petikemas. Inti sentra pertumbuhan ekonomi Matabe nantinya adalah *Eco-Industrial-Park* (EIP) dan *Special Economic Zone* (SEZ/KEK) Belang-Belang.

Secara geografis, Sulawesi Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian Barat Sulawesi. Provinsi Sulawesi Barat terletak pada posisi  $0^{\circ}12'-3^{\circ}38'$  Lintang Selatan dan  $118^{\circ}43'15''-119^{\circ}54'3''$  Bujur Timur. Luas wilayah Sulawesi Barat adalah berupa daratan seluas  $16.787,18 \text{ km}^2$ .

Wilayah administrasi Provinsi Sulawesi Barat terdiri dari 6 wilayah kabupaten, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 39 tahun 2015 luas daratan masing-masing kabupaten/kota, yaitu: Kabupaten Majene ( $947,84 \text{ km}^2$ ), Kabupaten Polewali Mandar ( $1.775,65 \text{ km}^2$ ), Kabupaten Mamasa ( $3.005,88 \text{ km}^2$ ), Kabupaten Mamuju ( $4.999,69 \text{ km}^2$ ), Kabupaten Mamuju Utara ( $3.043,75 \text{ km}^2$ ), serta Kabupaten Mamuju Tengah ( $3.014,37 \text{ km}^2$ ), sebagaimana disajikan pada Gambar 1.1.

**Gambar 1.1 Peta Wilayah Administrasi Provinsi Sulawesi Barat**



Sumber : RTRW Prov. Sulbar 2014-2034

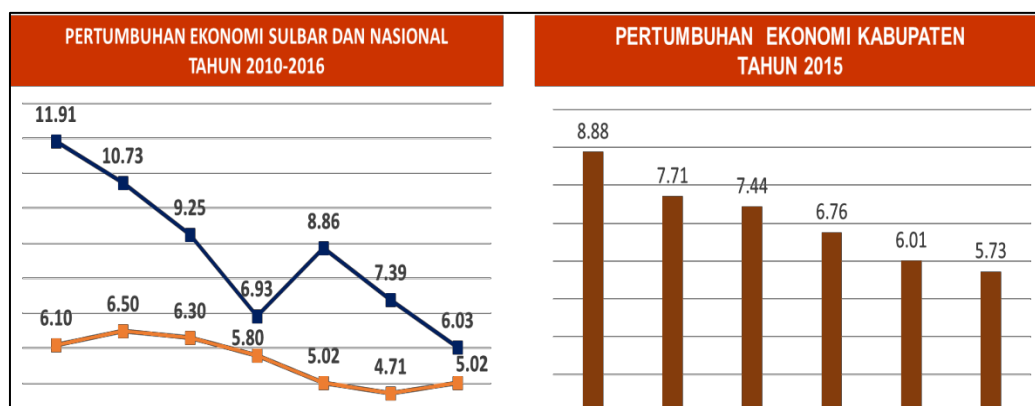
Penduduk Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2016 sebanyak 1.306.478 jiwa yang terdiri atas 655.452 jiwa penduduk laki-laki dan 651.026 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2015, penduduk Sulawesi Barat mengalami pertumbuhan sebesar 1,90 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin Tahun 2016 penduduk laki- laki terhadap penduduk perempuan sebesar 100,68.

Kepadatan penduduk di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 mencapai 77 jiwa/km<sup>2</sup> dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 4,5 orang. Kepadatan Penduduk di 6 kabupaten cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kabupaten Polewali Mandar dengan kepadatan sebesar 211 jiwa/km<sup>2</sup> dan terendah di Kabupaten Mamuju Tengah sebesar 41 jiwa/km<sup>2</sup>.

Trend pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Barat 2010-2016 relatif berfluktuasi, namun secara umum menunjukkan perkembangan yang meningkat yaitu rata-rata 9,18%. Angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2010-2016 berturut-turut adalah 11,91%, 10,73%, 9,25%, 6,93%, 8,88% dan 7,39%. Sedangkan pertumbuhan ekonomi secara Nasional 2011-2016 adalah 6,10%, 6,50%, 6,30%, 5,80%, 5,02%, 4,71% dan 5,02%. Hal ini berarti, pertumbuhan ekonomi Nasional masih berada di bawah angka Provinsi Sulawesi Barat. Trend pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Barat 2010-2016 sebagaimana disajikan pada Gambar 1.2.

**Gambar 1.1**

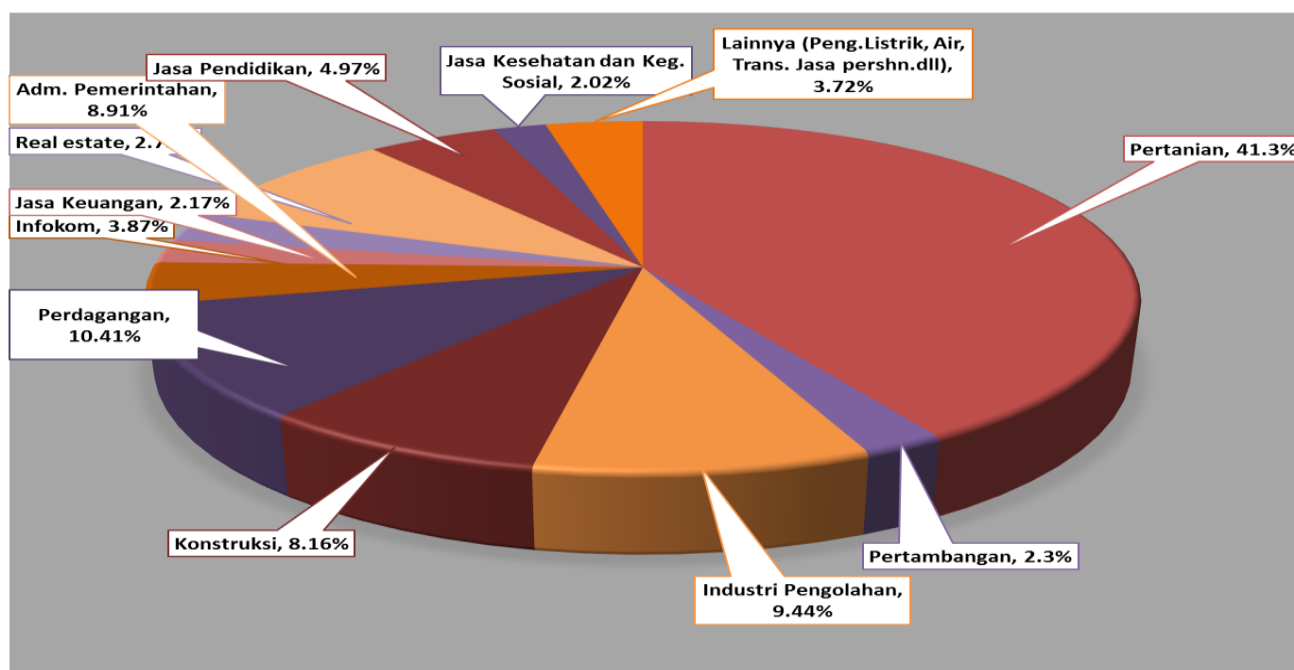
**Trend Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 – 2016**



Sumber : RPMD Provinsi Sulawesi Barat, 2017-2022

Data dan fakta berkaitan dengan struktur perekonomian Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 menurut lapangan usaha, bahwa menunjukkan kontribusi sektor pertanian, perikanan dan kehutanan terhadap total PDRB Provinsi Sulawesi Barat sebesar 41,30 %. Sedangkan sektor industri pengolahan berkontribusi terhadap total PDRB Provinsi Sulawesi Barat hanya sebesar 9,44% saja. Hal ini berarti, sektor industri pengolahan sudah saat didorong dan ditumbuhkembangkan sebagai pilar utama pergerakan ekonomi kerakyatan daerah. Struktur Perekonomian Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 menurut Lapangan Usaha sebagaimana disajikan pada Diagram 1.1.

**Diagram 1.1**  
**Struktur Ekonomi Sulawesi Barat tahun 2016**



Sumber : Badan Pusat Statistik 2016

Provinsi Sulawesi Barat memiliki banyak komoditas unggulan, baik dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan, di antaranya yang dominan adalah kakao, kelapa dalam, gula aren dan jagung. Sesuai dengan potensi sumberdaya alam Provinsi Sulawesi Barat, industri utama yang akan dikembangkan untuk menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah adalah industri pengolahan kakao, kelapa dalam, gula aren dan jagung yang merupakan komoditi utama daerah.

Pengembangan industri komoditas utama dan komoditas unggulan lainnya di Provinsi Sulawesi Barat belum sepenuhnya sesuai dengan harapan. Berbagai kendala menjadi permasalahan utama pembangunan industri di Provinsi Sulawesi Barat. Permasalahan utama ini yaitu:

- a. pengembangan sektor hulu belum optimal bersinergi dengan pengembangan sektor industri, sehingga kontribusi sektor industri terhadap PDRB masih rendah;
- b. sumber daya manusia pada sektor hulu dan sektor industri masih kurang dan harus ditingkatkan, juga pengorganisasian yang belum sepenuhnya mampu mengeksplorasi sumber daya;
- c. pengembangan produk bernilai tambah masih sangat terbatas dan terpaku pada beberapa jenis produk antara (produk setengah jadi tertentu), belum berkembang sesuai dengan potensinya dan belum sampai pada kompetensi spesifik daerah;
- d. infrastruktur yang belum memadai dalam mendukung pengembangan industri lebih lanjut, sehingga belum tumbuh dan berkembangnya IKM yang melakukan kegiatan ekspor;
- e. wilayah pengembangan kawasan industri yang telah direncanakan belum sepenuhnya terealisasi.

Menyikapi permasalahan di atas, maka menjadi penting dan mendesak adanya perencanaan pembangunan industri Provinsi Sulawesi Barat yang mampu menguraikan dan memberi solusi serta memecahkan berbagai permasalahan di atas dan memberi dampak pada pembangunan sektor industri di Provinsi Sulawesi Barat yang lebih maju dan mandiri.

Namun, pendekatan perencanaan dan implementasi yang parsial, hanya akan berdampak parsial juga, bahkan dalam jangka waktu tertentu kemudian

hilang, dan tidak lagi berdampak pada pembangunan industri. Demikian juga pendekatan perencanaan dan implementasi yang seremonial, tidak memberikan pengaruh kontinuitas yang justru sangat diperlukan dalam pengembangan dunia industri. Pendekatan sektoral semata, akan memutus rangkaian suplai yang berdampak pada tidak sinerginya rantai pasok dan berakibat hingga hancurnya industri. Pendekatan perencanaan yang harus dilakukan dalam menyusun Rencana Pembangunan Industri adalah pendekatan perencanaan yang komprehensif. Komprehensif berarti memperhatikan rantai pasok dan distribusi, dan memperhatikan dalam setiap tahapannya kebutuhan industri yang harus dipenuhi, kemudian menyusun program-program/rencana aksi yang relevan. Untuk itu. Makna komprehensif yaitu terbangunnya *forward-linkage* yang kuat antar sektor yang terkait.

Komprehensif berarti memperhatikan rantai pasok dan distribusi, dan memperhatikan dalam setiap tahapannya kebutuhan industri yang harus dipenuhi, kemudian menyusun program-program/rencana aksi yang relevan. Untuk itu. Makna komprehensif yaitu terbangunnya *forward-linkage* yang kuat antar sektor yang terkait.

Di sisi lain, dengan memperhitungkan keterbatasan kapasitas Pemerintah khususnya dalam pendanaan untuk mencakup seluruh komoditas dan jenis industrinya, maka perencanaan pembangunan industri ini harus fokus pada komoditas dan jenis industri terpilih, sehingga kapasitas yang ada dapat diarahkan secara lebih padu pada komoditas dan jenis industri ini. Namun menjadi sangat penting untuk memilih komoditas dan jenis industrinya yang menjadi fokus dalam perencanaan ini, karena harus dipilih komoditas dan jenis industri yang berdampak pendorong paling besar dalam perekonomian wilayah dan yang dapat menjadi trigger bagi komoditas dan jenis industri lainnya.

Sebagai konsekuensi logis, maka harus fokus dalam pemilihan komoditas dan jenis industrinya yang betul-betul berdampak paling besar dalam perekonomian wilayah dan yang dapat menjadi trigger bagi komoditas dan jenis industri lainnya, dimana paling tidak dibutuhkan dua hingga tiga komoditas adalah ideal.

Menyikapi pentingnya adanya perencanaan pembangunan industri di Provinsi Sulawesi Barat dan dengan paling tidak merujuk pada 2 pendekatan di atas, maka dilakukan penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Provinsi Sulawesi Barat ini. Di samping secara fakta diperlukan adanya dokumen perencanaan pembangunan industri yang komprehensif dan fokus, penyusunan perencanaan pembangunan industri ini juga merupakan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, tertuang tujuan pembangunan industri secara nasional yaitu dalam rangka mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing dan maju untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Perwujudannya dilakukan melalui pembangunan sumberdaya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan industri, dan tindakan pengamanan dan penyelamatan industri.

Menumbuhkembangkan potensi industri di daerah adalah mengacu pada tujuan pembangunan industri ini, di antaranya diwujudkan dalam pembangunan sarana dan prasarana industri melalui pembangunan infrastuktur industri dan perwilayahan industri.

Secara lebih khusus, dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 ini menyebutkan bahwa setiap Gubernur menyusun Rencana Pembangunan Industri Daerah (RPIDA) Provinsi atau disebut juga dengan Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP). Rencana Pembangunan

Industri Provinsi yang dibuat harus mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) dan Kebijakan Industri Nasional (KIN). Selanjutnya Rencana Pembangunan Industri Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi dan evaluasinya dilakukan oleh Pemerintah.

Rencana Pembangunan Industri Provinsi disusun paling sedikit dengan memperhatikan:

- a. potensi sumber daya industri daerah;
- b. rencana tata ruang wilayah provinsi dan/atau rencana tata ruang wilayah provinsi; dan
- c. keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan pembangunan Industri di provinsi serta kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan.

Dokumen RPIP merupakan prioritas dari Gubernur di bidang pembangunan industri yang akan dilaksanakan oleh Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) provinsi terkait, melalui program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis OPD. Rancangan RPIP disusun oleh Gubernur, sedangkan rancangan Renstra-OPD disusun oleh pimpinan masing-masing OPD Provinsi. Rancangan RPIP ditelaah oleh konsisten dengan RPJMD provinsi dan berkoordinasi dengan Menteri Perindustrian untuk menelaah konsistensi RPIP dengan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional.

## **B. Dasar Hukum**

Dasar hukum penyusunan RPIP Provinsi Sulawesi Barat ini antara lain, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, khususnya Pasal 10 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap Gubernur menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi, dan Pasal 1a ayat (4) yang menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Industri Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi; dan
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

## **C. Sistematika Penulisan**

Sistematika RPIP Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2037 mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110 Tahun 2015, tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Provinsi/Kabupaten/Kota, dengan sistematika sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Menguraikan secara kualitatif mengenai aspek geografi, demografi, ekonomi, industri, potensi dan permasalahan utama pembangunan industri dan pentingnya rencana pembangunan industri Provinsi/Kabupaten/Kota

#### **B. Dasar Hukum**

#### **C. Sistematika Penulisan**

## II. GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI

### A. Kondisi Daerah

Menguraikan secara kuantitatif aspek geografi, aspek demografi, serta aspek infrastruktur seperti jalan, pelabuhan bandar udara, air, dan listrik, aspek pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan dan kontribusi sektor industri, kontribusi masing-masing sektor industri, jumlah unit usaha setiap sektor industri, ekspor dan impor produk industri (minimum tiga tahun terakhir)

### B. Sumber Daya Industri

Menguraikan sumber daya manusia sektor industri, sumber daya alam sebagai bahan baku dan energi, lembaga diklat dan litbang serta pembiayaan industri.

### C. Sarana dan Prasarana

Menguraikan pengelolaan lingkungan, lahan Industri berupa Kawasan Industri dan/atau kawasan peruntukan Industri, fasilitas jaringan energi dan kelistrikan, fasilitas jaringan telekomunikasi, fasilitas jaringan sumber daya air, fasilitas sanitasi, fasilitas jaringan transportasi dan infrastruktur penunjang seperti lembaga uji, kawasan berikat, kawasan pergudangan.

### D. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah

Menguraikan sentra IKM, unit pelayanan teknis (UPT), jumlah tenaga penyuluh lapangan (TPL), konsultan IKM, dan pusat-pusat promosi pengembangan IKM

## III. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

### A. Visi dan Misi Pembangunan Daerah

### B. Tujuan Pembangunan Industri Provinsi/Kabupaten/Kota

C. Sasaran Pembangunan Industri Provinsi/Kabupaten/Kota Meliputi Pertumbuhan sektor industri, Kontribusi industri nonmigas terhadap PDRB, Nilai ekspor produk industri, Jumlah tenaga kerja di sektor industri, Nilai Investasi sektor industri.

## IV. STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA

### A. Strategi Pembangunan Industri

Pernyataan yang mengintegrasikan pendekatan dan langkah-langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan industri melalui program-program indikatif.

### B. Program Pembangunan Industri

#### 1. Penetapan, Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan Provinsi/Kabupaten/Kota

Penentuan industri unggulan provinsi/kabupaten/kota berdasarkan pendekatan kompetensi inti industri daerah dan mengacu kepada industri prioritas nasional, serta sasaran dan program pengembangan Industri Unggulan Provinsi/Kabupaten/Kota.

#### 2. Pengembangan Perwilayahan Industri



Program-program yang terkait dengan pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Industri, dan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah.

### 3. Pembangunan Sumber Daya Industri

Program-program yang terkait pengembangan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam untuk industri, pengembangan teknologi industri, pengembangan inovasi dan kreativitas industri, serta dukungan pembiayaan industri

### 4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Program-program yang terkait pengembangan pengelolaan lingkungan, lahan Industri berupa Kawasan Industri dan/atau kawasan peruntukan Industri, fasilitas jaringan energi dan kelistrikan, fasilitas jaringan telekomunikasi, fasilitas jaringan sumber daya air, fasilitas sanitasi, fasilitas jaringan transportasi, sistem informasi industri, serta infrastruktur penunjang standardisasi industry.

### 5. Pemberdayaan Industri

Program-program yang terkait pengembangan IKM mencakup perumusan kebijakan dan pengembangan kelembagaan, penumbuhan wirausaha baru dan pemberian fasilitas bagi IKM.

## V. PENUTUP

Menguraikan ringkasan keterkaitan Bab I s/d Bab IV dan harapan-harapan dalam mensukseskan implementasi rencana pembangunan industri.

**BAB II**  
**GAMBARAN KONDISI DAERAH**  
**TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI**

**A. Kondisi Daerah**

**1. Aspek Geografi**

Provinsi Sulawesi Barat berada di sebelah barat pulau Sulawesi yang terletak pada posisi 0012' - 3038' Lintang Selatan dan 118043'15"-119054'3" Bujur Timur (Sulbar Dalam Angka, BPS, 2016). Luas wilayah Sulawesi Barat adalah berupa daratan seluas 16.787,18 km<sup>2</sup> sedangkan luas wilayah laut sebesar 20.342 km<sup>2</sup> dengan panjang garis pantai sebesar 677 km serta jumlah pulau- pulau kecil sebanyak 40, dimana terdiri atas 69 Kecamatan, 575 Desa dan 71 Kelurahan.

Adapun batas administrasi wilayah Provinsi Sulawesi Barat sebagai berikut

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar

Sejak awal berdirinya, Provinsi Sulawesi Barat telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan salah satunya dalam bidang pemerintahan, dimana pada awal pembentukan Provinsi Sulawesi Barat yang terdiri dari 5 (lima) kabupaten, hingga pada tahun 2013 terjadi pemekaran yaitu Kabupaten Mamuju Tengah dari Induk Kabupaten Mamuju, sehingga jumlah kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat menjadi 6 (enam) kabupaten, antara lain sebagai berikut :

1. Kabupaten Majene dengan Ibu Kota Majene. Terletak pada posisi 2<sup>o</sup>38' 45 LS - 3<sup>o</sup> 38' 15" LS dan 118<sup>o</sup> 45' 00" BT - 119<sup>o</sup> 4' 45" LS, dengan jarak ke ibu kota provinsi 143 Km.
2. Kabupaten Polewali Mandar dengan Ibu Kota Polewali. Terletak pada posisi 3<sup>o</sup> 4' 10" LS - 3<sup>o</sup> 32' 00" LS dan 118<sup>o</sup> 40' 27" BT - 119<sup>o</sup> 29' 41" BT, dengan jarak ke ibu kota provinsi 199 Km
3. Kabupaten Mamasa dengan Ibu Kota Mamasa. Terletak pada posisi 2<sup>o</sup> 39' 216" LS - 3<sup>o</sup> 19' 288" LS dan 119<sup>o</sup> 0' 216" BT - 119<sup>o</sup> 38' 144" BT, dengan jarak ke ibu kota provinsi 292 km
4. Kabupaten Mamuju dengan Ibu Kota Mamuju terletak pada posisi 2<sup>o</sup> 8' 7" LS - 2<sup>o</sup> 57' 50" LS dan 117<sup>o</sup> 3' 57" BT - 119<sup>o</sup> 51' 17" BT.
5. Kabupaten Mamuju Utara dengan Ibu Kota Pasangkayu. Terletak pada posisi 0<sup>o</sup> 40' 10" LS - 1<sup>o</sup> 50' 12" LS dan 119<sup>o</sup> 25' 26" BT - 119<sup>o</sup> 50' 20" BT, dengan jarak ke ibu kota provinsi 276 km.
6. Kabupaten Mamuju Tengah sebagai Daerah Otonom Baru (DOB) dengan Ibu Kota Tobadak. Terletak pada posisi 1<sup>o</sup> 43' 33" LS - 2<sup>o</sup> 18' 54" LS dan 119<sup>o</sup> 7' 35" BT - 119<sup>o</sup> 52' 18" BT, dengan jarak ke ibu kota provinsi sebesar 115 km.

**Tabel 2.1**

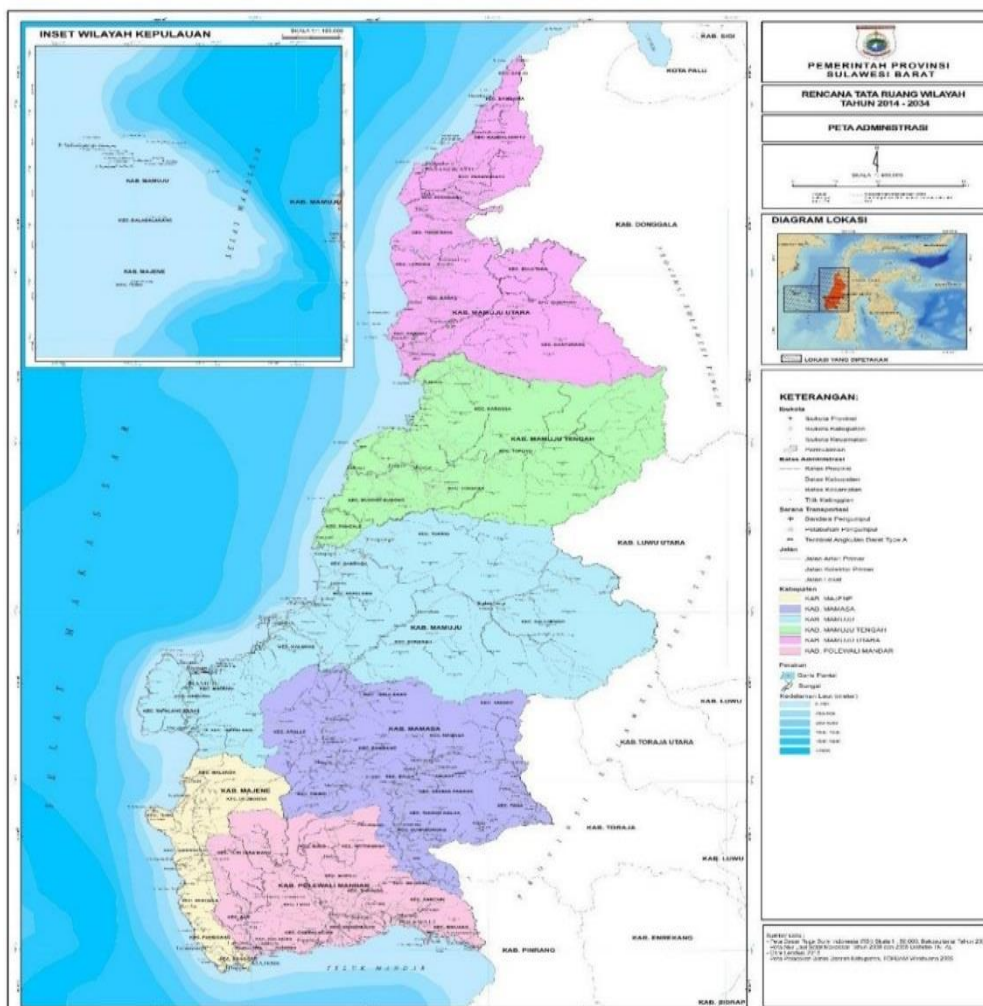
**Luas Wilayah Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat**

NO	KABUPATEN	LUAS (KM <sup>2</sup> )	PERSENTASE TERHADAP LUAS SULAWESI BARAT
1.	Majene	947.84	5.65
2.	Polewali Mandar	1.775.65	10.58
3.	Mamasa	3.005.88	17.91
4.	Mamuju	4.999.69	29.78
5.	Mamuju Utara	3.043.75	18.13
6.	Mamuju Tengah	3.014.37	17.96

Sumber : BPS, Sulawesi Barat Dalam Angka 2016

Kabupaten dengan luas wilayah terbesar adalah Kabupaten Mamuju dengan luas 4.999,69 Km<sup>2</sup> atau sekitar 29,78 persen terhadap luas Provinsi Sulawesi Barat, sedangkan kabupaten dengan luas wilayah terkecil yaitu Kabupaten Majene dengan luas sekitar 947,84 km<sup>2</sup> atau hanya sebesar 5,65 persen terhadap luas Provinsi Sulawesi Barat. Untuk mengetahui wilayah administrasi Provinsi Sulawesi Barat secara jelas dapat dilihat pada gambar peta berikut ini :

**Gambar 2.1**  
**Peta Administrasi Provinsi Sulawesi Barat**



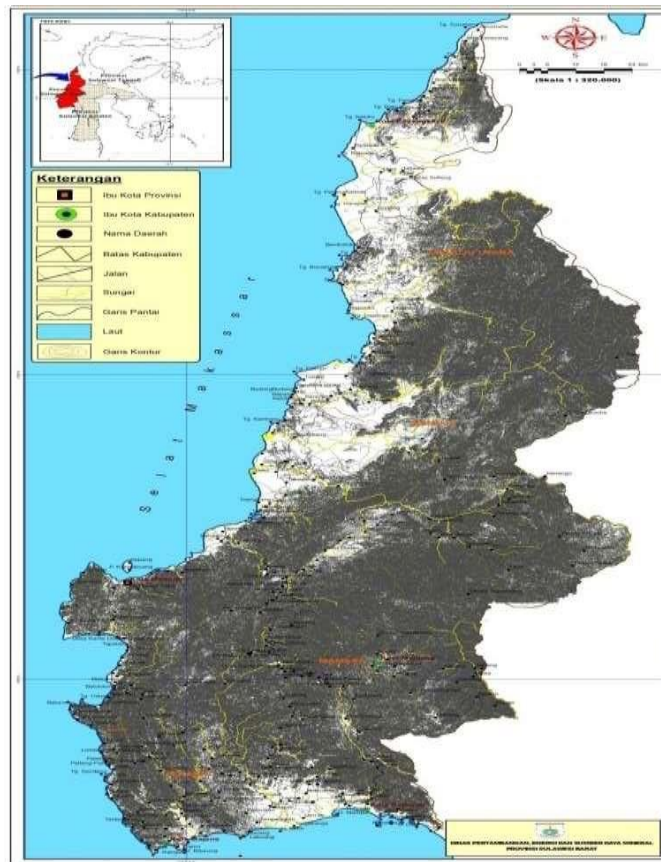
**a) Topografi**

Provinsi Sulawesi Barat memiliki Topografi yang bervariasi, dari datar, berbukit sampai bergunung. Wilayah dengan kondisi topografi yang datar dapat dijumpai di sebagian besar Kabupaten Polewali Mandar dan Mamuju Utara sedangkan Mamuju, Majene dan Mamasa adalah berbukit sampai bergunung. Sulawesi Barat juga merupakan daerah pegunungan sehingga memiliki banyak aliran sungai yang cukup besar dan berpotensi untuk dikembangkan.

Jumlah gunung di Sulawesi Barat sekitar 193 buah yang tersebar di beberapa kabupaten. Gunung tertinggi adalah Gunung Ganda Dewata dengan ketinggian 3.037 meter di atas permukaan laut yang menjulang tegak di Kabupaten Mamuju. Satuan pegunungan menempati wilayah paling luas yaitu sekitar 70 persen dari total luas wilayah dan umumnya menempati bagian tengah ke timur dengan bentuk memanjang utara-selatan, lembah-lembah yang terbentuk merupakan wilayah yang curam. Peta Topografi dan Jumlah Gunung dan Nama Gunung Tertinggi di Provinsi Sulawesi Barat disajikan pada Gambar dan Tabel berikut.

**Gambar 2.2**

**Peta Topografi Provinsi Sulawesi Barat**



Sumber : RTRW Prov. Sulbar 2014-2034

**Tabel 2.2**

**Jumlah Gunung dan Nama Gunung Tertinggi Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat**

NO	Kabupaten	Jumlah Gunung	Nama Gunung Tertinggi	Ketinggia Gunung (meter)
1.	Majene	11	Seteng	1 001
2.	Polewali Mandar	28	Tetuh	1 448
3.	Mamasa	31	Mambulilling	2 873
4.	Mamuju	109	Ganda Dewata	3 037
5.	Mamuju Utara	14	Pandabatu	284

Sumber: BPS, Sulawesi Barat Dalam Angka 2015

**b) Geologi**

Geologi di Sulawesi Barat disusun dari beberapa jenis batuan, yaitu batuan sedimen, malihan, gunung api dan terobosan. Umurnya berkisar antara Mesozoikum sampai Kuartar. Urutan stratigrafi batuan tersebut dimulai dari yang tertua ke yang muda adalah batuan Malihan Kompleks Wana (TRw) yang terdiri sekis, genes, filit dan batusabak. Satuan ini dijumpai pada lembar Mamuju dan Lembar Pasang kayu yang diduga berumur lebih tua dari Kapur dan tertindih tak selaras oleh Formasi Latimojong (Kls) dibagian timur memanjang utara-selatan wilayah Sulawesi barat. Formasi ini terdiri dari filit, kuarsit, batu

lempung malih, dan pualam. Satuan batuan ini berumur Kapur. Formasi Latimojong ditindih tak selaras Formasi Toraja pada bagian timur wilayah mamuju dan mamasa yang terdiri dari batu pasir kuarsa, konglomerat kuarsa, kuarsit, serpih dan batu lempung yang umumnya berwarna merah atau ungu, setempat dijumpai batubara. Formasi ini mempunyai mempunyai Anggota Rantepao (Tetr) yang terdiri dari batu gamping numulit berumur Eosen Tengah – Eosen Akhir. Sedangkan pada wilayah pasang kayu formasi Latimojong di tindih tidak selaras batuan gunung api Formasi Lamasi (Toml) dan Formasi Talaya. Formasi Lamasi bersusunan andesit-dasit berumur Oligosen- Miosen Awal. Formasi Talaya bersusunan andesit-basal berumur Miosen Awal- Miosen Akhir. Formasi Lamasi menindih tidak selaras Formasi Toraja yang berumur Oligosen Akhir.

Miosen Awal, yang merupakan Batuan gunung api beranggotakan Batu gamping (Tomc), tertindih selaras oleh Formasi Riu (Tmr) yang terdiri dari batu gamping napal. Formasi Riu berumur Miosen Awal – Miosen Tengah dan tertindih tak selaras oleh Formasi Sekala (Tmps) dan Batuan Gunung api Talaya (Tmtv). Formasi Sekala terdiri dari grewake, batu pasir hijau, napal dan batu gamping, bersisipan tufa dan lava yang tersusun oleh andesit – basal. Formasi ini berumur Miosen Tengah – Pliosen dan berhubungan menjemari dengan Batuan Gunungapi Talaya. Batuan Gunungapi Talaya terdiri dari breksi, lava dan tufa yang tersusun oleh andesit – basal. Batuan ini mempunyai Anggota Tuf Beropa (Tmb) dan menjemari dengan Batuan Gunung api Adang (Tma), terutama yang disusun oleh leusit - basal.

Sedangkan Pada bagian barat wilayah Kab. Mamuju Utara didominasi oleh batuan sedimen Formasi Lariang (Tmpl) dan Formasi Pasang kayu (TQp). Formasi ini merupakan endapan molase terdiri dari konglomerat, batupasir dan batulempung. Batuan berumur Miosen Tengah – Miosen Akhir dan mempunyai hubungan ketidak selarasan dengan batuan yang lebih tua di bawahnya dan juga batuan yang lebih muda di atasnya termasuk Formasi Pasangkayu. Formasi Pasangkayu terdiri dari batu pasir dan batu lempung, setempat ditemukan batu gamping dan konglomerat. Umur formasi ini adalah Pliosene dan ditindih secara tidak selaras oleh satuan aluvial (Qa) yang berumur holosen dan mendominasi bagian barat.

Batuan Gunungapi Adang berhubungan menjemari dengan Formasi Mamuju (Tmm) yang berumur Miosen Akhir. Formasi Mamuju terdiri atas napal, batupasir gampingan, napal tufaan dan batugamping pasiran bersisipan tufa. Formasi ini mempunyai Anggota Tapalang (Tmmt) yang terdiri dari batugamping koral, batugamping bioklastik dan napal yang banyak mengandung moluska. Formasi Lariang terdiri dari batupasir gampingan dan mikaan, batulempung, bersisipan kalkarenit, konglomerat dan tufa. Formasi ini berumur Miosen Akhir-Pliosen Awal.

Pada bagian timur wilayah Sulawesi barat disusun oleh batuan terobosan batolit granit (Tmpi) dengan penyebaran yang cukup luas menerobos semua satuan yang lebih tua (mendominasi bagian utara timur laut atau daerah Mamasa). Batuan ini terdiri dari granitik, diorit, riolit dan setempat gabro. Batuan terobosan berbentuk batolit ini diduga berumur Pliosen. K arah tenggara wilayah Mamasa, batuanya didominasi oleh batuan epiklastik gunungapi Formasi Loka (Tml). Formasi ini terdiri atas batupasir andesitan, konglomerat, breksi dan batu lanau. Batuan ini mempunyai umur Miosen Tengah – Miosen Akhir. Pada bagian tengah ditempati oleh batuan gunung api Walimbong (Tmpv) yang terdiri atas lava dan breksi. Penyebaran batuan ini cukup luas dan menyebar hingga ke arah tenggara. Batuan ini diduga berumur Mio-Pliosen. Diwilayah Mamuju jumpai batuan Tufa Barupu (Qbt) yang terdiri dari tufa dan lava, yang diduga berumur Pliosen.

Sedangkan di bagian barat wilayah Sulawesi barat pada umumnya di susun oleh endapan sedimenter dimana di wilayah mamuju tersingkap Formasi Budongbudong (Qb) yang terdiri dari konglomerat, batupasir, batulempung dan batugamping koral (Ql). Endapan termuda di Lembar ini adalah endapan kipas aluvium (Qt) pantai dan antar gunung. Sedangkan wilayah Majene dan Polewali Mandar tersusun dari batuan sedimen dari Formasi Mandar. Batuan tersebut terdiri atas batupasir, batu lanau dan serpih serta lensis batubara. Hasil penanggalan menunjukkan bahwa umur formasi ini Miosen Akhir. Selain Formasi Mandar (Mamuju), pada bagian barat juga ditemukan batuan sedimen klastik lainnya (Formasi Mapi/Tmpm) yang tersusun oleh batu pasir, batu lempung, batu gamping pasiran dan konglomerat. Umur dari satuan ini adalah Miosen Tengah - Pliosen.

Proses tertonik yang pernah terjadi wilayah Sulawesi Barat menyebabkan pemalihan pada kelompok batuan Kompleks Wana (TRw) dan Formasi Latimojong. Perlipatan dan pensesaran pada batuan berumur Eosen Formasi Toraja dan batuan Berumur Miosen Formasi Lariang (Tmpl), pembentukan batuan sedimen molase Formasi Pasangkayu (TQp). Dalam fase tetonik yang berbeda juga menyebabkan perlipatan dan pensesaran pada kelompok batuan vulkanik seperti Formasi Lamasi (Toml), Formasi Talaya (Tmtv), Formasi Sekala (Tmps).

Secara stratigrafi, kelompok batuan tertua pada Mandala Sulawesi Barat bagian tengah berupa kompleks batuan Metamorf dan endapan plynch Formasi Latimojong (Kls). Secara umum Formasi ini mengalami pemalihan lemah- sedang ; terdiri atas serpih, filit, rijang, marmer dan kuarsit dengan ketebalan tidak kurang dari 1000 m serta diintrusi oleh batuan granitic hingga basaltic baik berbentuk stock ataupun retas . Umur Formasi ini diperkirakan Kapur Akhir dan diendapkan pada lingkungan laut dalam. Bergman, dkk (1996) membagi Sulawesi Bagian Barat menjadi 3 kelompok tektonik yaitu :

- a. Foldbelt aktif dimana batuan vulkanik yang berumur Pliosen-Miosen menyebar hingga ke selat Makassar
- b. Central belt yang terdiri dari Formasi Latimojong sebagai basemen, paparan karbonat dan batuan sedimen klasti yang berumur oligo-eosen, sub marin vulkanik yang berumur Miosen.
- c. Akresi ophiolit kompleks Lamasi berumur Kapur-Paleogen.

Proses tektonik yang pernah terjadi di wilayah ini menyebabkan pemalihan pada kelompok batuan Kompleks Wana (TRw) dan Formasi Latimojong. Perlipatan dan pensesaran pada batuan vulkanik seperti Formasi Lamasi (Toml), Formasi Talaya (Tmtv), Formasi Sekala (Tmps).

Kelompok Toraja terdiri atas Formasi Bonehau yang terendapkan pada lingkungan laut terbuka. Formasi Kalumpang yang terdiri dari batulempung, batubara, batupasir kaya kuarsa dan sedikit batuan vulkanik menindih tak selaras Formasi Bonehau. Formasi Kalumpang terendapkan pada lingkungan transisi hingga fluvial. Diatas Formasi tersebut terendapkan Formasi Rantepao yang didominasi oleh batugamping berumur Eosen . Pada bagian atas dari kelompok Toraja ini adalah Formasi Batio yang berumur Oligosen dan tersusun oleh napal. Kelompok batuan ini dominan terendapkan pada lingkungan laut dan pada saat bagian barat Sulawesi memisah (rifting) dari Kalimantan.

Kelompok Lariang terletak tidak selaras dengan kelompok Toraja di bawahnya. Kelompok Lariang ini terdiri atas Formasi Tabiora yang juga didominasi oleh napal. Diatas Formasi ini terendapkan secara selaras Formasi Lisu yang berumur Miosen Atas. Pada Formasi ini terlihat adanya peningkatan kandungan klastik kasar ke arah selatan. Kelompok batuan ini umumnya tersusun oleh endapan-endapan laut dimana materialnya sebagian berasal dari batuan yang lebih tua. Kelompok batuan tersebut mengalami deformasi sebelum terbentuknya kelompok Pasangkayu. Batuan Kelompok Formasi Pasangkayu



berumur Plio- Pleistesen dan didominasi oleh konglomerat yang kaya akan kuarsa. Batuan ini terendapkan pada daerah cekungan foreland pada saat orogenesis ke arah timur.

### c) Hidrologi

Sejumlah sungai yang tergolong besar mengalir wilayah Sulawesi Barat, dengan jumlah aliran terbanyak di Kabupaten Polewali Mandar yaitu 5 (lima) aliran sungai. Sungai terpanjang tercatat ada 2 (dua) sungai yakni Sungai Saddang yang mengalir Kabupaten Tana Toraja, Enrekang, Pinrang dan Polewali Mandar serta Sungai Karama yang berada di wilayah Kabupaten Mamuju, dengan panjang masing-masing sekitar 150 km.

**Tabel 2.3**  
**Sungai Utama Menurut Panjang dan Aliran Sungai di Sulawesi Barat**

No.	Nama Sungai	Panjang	Lokasi
1.	Saddang	150	Tanah Toraja, Enrekang, Pinrang, Polewali Mandar
2.	Matakali	28	Polewali Mandar
3.	Mambi	95	Polewali Mandar
4.	Mandar	90	Polewali Mandar
5.	Manyamba	28	Majene
6.	Malunda	38	Majene
7.	Kaluku	32	Mamuju, Polewali Mandar
8.	Karama	150	Mamuju

Sumber: BPS Sulawesi Barat Dalam Angka 2015

Daerah Aliran Sungai di Sulawesi Barat merupakan ekosistem dengan tingkat kepentingan sangat tinggi dan menjadi isu sentral. Ini terjadi karena Sulawesi Barat dominan dibangun oleh wilayah dengan topografi bergunung dengan curah hujan tinggi, dijejali begitu banyak sungai besar. Sementara

wilayah-wilayah dengan topografi datar yang menjadi andalan perekonomian masyarakat Sulawesi Barat merupakan kawasan/dataran pengaruh banjir dan sedimentasi sungai-sungai besar. Karena itu, ekosistem dan daya dukung wilayah datar ditentukan oleh kualitas ekosistem DAS-DAS besar yang mempengaruhinya. Berdasarkan itu, mudah dipahami bahwa arahan pengembangan ekologi DAS perlu dirancang dengan baik.

Daerah Aliran Sungai (DAS) harus dilihat sebagai ekosistem yang perlu dijaga kualitas dan keberlanjutan fungsinya (misalnya untuk menjaga daya dukung sumberdaya DAS dan kehidupan manusia), sekaligus sebagai kawasan pengembangan ekonomi. Aspek ini juga dibahas pada Rencana Pengembangan Kawasan Lindung dan Penentuan Kawasan Strategis Kepentingan SDA. Pengembangan ekologi DAS harus terintegrasi dengan pengembangan fungsi ekonominya, seperti PLTA, air irigasi dan fungsi-fungsi lain, tidak bisa jalan sendiri-sendiri.

Pengembangan DAS kedepan hendaknya dilakukan dengan pertimbangan prioritas yang mengacu pada pengendalian lahan kritis dengan kegiatan seperti reboisasi, Penghijauan, Pembinaan pertanian berbasis konservasi, penggalangan partisipasi masyarakat dalam perhutanan desa. Perlindungan terhadap aktifitas pengrusakan hutan melalui pengawasan yang ketat terhadap aktifitas penebangan liar, Pengetatan pemberian izin bagi masyarakat atau instansi yang akan mengelola kawasan hutan. DAS DAS yang perlu mendapat prioritas adalah Karama, Mamuju, Budong-Budong, Karossa dan Mapilli yang memiliki tingkat kekritisian yang besar.

#### d) Klimatologi

Iklim sangat berpengaruh terhadap keadaan lingkungan, khususnya terhadap siklus hidrologi, sumberdaya tanah, air dan tanaman. Umumnya, ketersediaan air bagi kepentingan makhluk hidup di atas permukaan tanah sangat ditentukan oleh keadaan iklim dan ekosistemnya. Berada di bawah pengaruh iklim tropis dengan curah hujan tinggi, seringkali terjadi pencucian hara dan translokasi partikel-partikel tanah, baik secara lateral yang membawanya ke daerah aliran, maupun vertikal pada tubuh tanah dari horison atas ke horison tanah di bawahnya.

Iklim di wilayah Sulawesi Barat umumnya tropis karena dilalui juga garis khatulistiwa serta mempunyai kelembaban udara yang relatif tinggi. Sebagai daerah yang memiliki pinggir pantai, yang berhadapan langsung dengan Selat Makassar, maka Sulawesi Barat memiliki pola suhu udara yang bergantung kepada musim angin laut. Pada tahun 2015 suhu udara di Sulawesi Barat berkisar antara 20,70 °C hingga 35,60 °C dengan rata-rata suhu udara sekitar 27,70 °C, Sedangkan kelembaban udara dalam setahun berkisar antara 67 persen sampai dengan 81 persen. Pemantauan suhu udara di Sulawesi Barat, terpantau oleh Stasiun Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yang berada di Kabupaten Majene.

**Tabel 2.4**  
**Rata-rata Suhu dan Kelembaban Udara Menurut Bulan**  
**di Provinsi Sulawesi Barat, 201**

NO	BULAN	SUHU UDARA (°C)			KELEMBABAN UDARA (%)		
		MAKS	MIN	RATA-RATA	MAKS	MIN	RATA-RATA
1.	Januari	33,7	23,0	27,5	97	54	79
2.	Februari	33,4	23,6	27,8	95	52	79
3.	Maret	32,0	24,5	27,6	97	52	81
4.	April	32,3	24,8	28,0	97	55	81
5.	Mei	32,7	23,6	27,2	97	63	77
6.	Juni	32,5	22,8	26,7	98	64	67
7.	Juli	32,0	21,8	27,1	97	56	78
8.	Agustus	33,0	22,0	27,2	92	45	73
9.	September	34,4	20,7	27,0	92	37	68
10.	Oktober	35,6	22,4	29,0	98	40	70
11.	November	34,8	24,6	29,1	95	48	74
12.	Desember	34,6	23,0	28,4	97	55	79

Sumber : BPS Sulawesi Barat Dalam Angka 2016

Pada Tahun 2015, Sulawesi Barat memiliki jumlah hari hujan tertinggi terjadi dibulan Januari yaitu 24 hari hujan dan terendah pada bulan September yang tidak ada hari hujan.

**Tabel 2.5**  
**Keadaan Curah Hujan, Angin dan Penyinaran Matahari pada Stasiun**  
**Meteorologi di Majene Menurut Bulan Tahun 2013-2015**

No	Bulan	Penyinaran Matahari (%)	Curah Hujan(mm)	Hari Hujan (hari)	Kecepatan Angin Rata-rata (Km/Jam)
1	Januari	56	213	24	4
2	Februari	70	48	10	3
3	Maret	75	133	20	3
4	April	74	235	18	3
5	Mei	86	20	9	5

6	Juni	45	36	12	4
7	Juli	90	13	3	6
8	Agustus	95	3	3	6
9	September	89	0	-	5
10	Oktober	93	68	8	5
11	November	84	58	1	2
12	Desember	68	26	1	3
<b>Rata-rata</b>		<b>77,0</b>	<b>90,83</b>	<b>11,17</b>	<b>4,08</b>
2014		59,8	91,40	12,75	3,92
2013		69,3	140,18	16,5	4,17
November		84	58	12	2
Desember		68	263	15	3
<b>Rata-rata</b>		<b>77,0</b>	<b>90,83</b>	<b>11,17</b>	<b>4,0</b>
2014		59,8	91,40	12,75	3,92
2013		69,3	140,18	16,5	4,17

Sumber : BPS Sulawesi Barat Dalam Angka 2016

Curah hujan terbesar berada pada bulan Desember yaitu sebesar 263 mm/hari serta bulan april sebesar 235 mm/hari. Besarnya intensitas curah hujan berbeda-beda tergantung dari lamanya curah hujan dan frekuensi kejadiannya. Intensitas curah hujan yang tinggi pada umumnya berlangsung dengan durasi pendek dan meliputi daerah yang tidak luas. Hujan yang meliputi daerah luas, jarang sekali dengan intensitas tinggi, tetapi dapat berlangsung dengan durasi cukup panjang. Adapun jenis jenis hujan berdasarkan besarnya curah hujan (definisi BMKG), diantaranya yaitu hujan kecil antara 0 – 21 mm per hari, hujan sedang antara 21 – 50 mm per hari dan hujan besar atau lebat di atas 50 mm per hari.

#### e) Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah sebagaimana yang sudah dikajidalam Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi Sulawesi Barat Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Kawasan Budidaya di Sulawesi Barat dengan luasan sebesar 10.168,88 Ha.

Pengembangan Kawasan pada beberapa sektor harus sesuai dengan Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi berdasarkan RTRW, hal itu untuk menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang wilayah provinsi, menghindari penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, menjaga keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang, sebagai alat pengendali pengembangan kawasan, mencegah dampak pembangunan yang merugikan; dan untuk melindungi kepentingan umum.

#### (1) Kawasan Hutan Produksi

Luas Hutan Produksi di Sulawesi Barat sebesar 4.387,27 km<sup>2</sup>, terdiri dari hutan produksi terbatas 3.343,93 km<sup>2</sup>, hutan produksi biasa 769,10 km<sup>2</sup> dan hutan produksi dapat dikonversi 274,24 km<sup>2</sup>. Kawasan hutan produksi ini selain pernah dimanfaatkan sebagai kawasan Hak Pengusahaan Hutan (HPH), juga sebagian telah dikonversi oleh rakyat sebagai lahan budidaya tanaman

perkebunan (terutama kakao dan sawit, khususnya di Kabupaten Mamuju, mamuju tengah, dan Mamuju Utara). Pada bekas areal HPH, banyak dari kawasan ini yang belum dihutankan kembali, hanya dibiarkan terlantar setelah kayunya diambil. Sebagian dari kawasan ini termasuk dalam wilayah yang tergolong rawan longsor atau menjadi wilayah tangkapan air dari DAS krusial, sehingga perlu direhabilitasi. Rencana pengembangan Hutan produksi berdasarkan arahan RTRW Prov. Sulbar terdiri atas :

- a. Kawasan Hutan Produksi yang terdapat di wilayah Kabupaten Mamuju, Mamuju Tengah dan Kabupaten Mamuju Utara,
- b. Kawasan Hutan Produksi Terbatas yang terdapat di wilayah Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Utara, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Majene, Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamasa.
- c. Kawasan hutan produksi konversi, yang terdapat di wilayah Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Mamuju Utara dan Kabupaten Mamasa.

## **(2) Kawasan Pertanian**

Sulawesi Barat berada pada iklim tropis, dimana kondisi ini menjadikan Sulawesi Barat sangat potensial terhadap pengembangan sektor pertanian, hal ini juga didukung oleh potensi lahan pertanian seluas 1.429,29 km<sup>2</sup> dan lahan perkebunan seluas 3.969,32 km<sup>2</sup> yang ada di Sulawesi Barat. Pengembangan kawasan pertanian berdasarkan arahan RTRW Sulawesi Barat tahun 2014-2034 adalah sebagai berikut :

- a. Kawasan yang berpotensi untuk budidaya komoditi unggulan tanaman pangan alternatif padi sawah dan palawija berada di Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Mamuju Utara dan Kabupaten Majene;
- b. Kawasan potensil budidaya tanaman pangan unggulan Holtikultura di Kabupaten Mamasa;
- c. Kawasan Pertanian berkelanjutan (sawah beririgasi teknis, yang dipaduselaraskan dengan perencanaan dan manajemen DAS dengan lokasi Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Utara, Kabupaten Mamuju Tengah, dan Kabupaten Polewali Mandar;
- d. Kawasan potensil budidaya komoditi unggulan perkebunan sawit di Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah dan Kabupaten Mamuju Utara;
- e. Kawasan potensil budidaya komoditi unggulan perkebunan Kakao di Seluruh kabupaten di wilayah Prov.Sulbar;
- f. Kawasan potensil budidaya komoditi unggulan perkebunan Kelapa di Kabupaten Kabupaten Polewali Mandar, Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah, Mamuju Utara dan Kabupaten Majene;
- g. Kawasan potensil budidaya komoditi unggulan perkebunan jeruk di Kabupaten Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah dan Mamuju Utara;
- h. Kawasan potensil budidaya komoditi unggulan perkebunan kopi arabika, robusta dan teh di kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamasa;
- i. Kawasan potensil budidaya komoditi unggulan tanaman obat dan aromatika (nilam) di Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamuju Tengah.

## **(3) Kawasan perikanan**

Sulawesi Barat berada di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP.713). Alur Pelayaran Internasional (ALKI-II), dengan luas Wilayah Laut ± 20.342 Km<sup>2</sup>. Secara geografis, Sulawesi Barat berbatasan langsung dengan Selat Makassar di sebelah barat. Potensi Perikanan Tangkap sebesar 929.700 ton/tahun dan hanya sekitar 10 (sepuluh) persen saja yang telah dimanfaatkan. Potensi Lahan Perikanan Budidaya sebesar 74.300 Ha (Budidaya Laut 20.300 Ha, Budidaya Tambak 30.000 Ha dan Budidaya Air Tawar 24.000 Ha. Lahan Perikana

Budidaya Termanfaatkan Seluas 24.748,9 Ha terdiri dari 13.769 Ha budidaya tambak, 8.478 Ha Budidaya air tawar dan 2.501,5 Ha Budidaya laut (DKP Prov. Sulbar 2016). Kondisi ini memberi peluang yang cukup potensial

untuk pengembangan sub sektor perikanan. Berdasarkan arahan pengembangan wilayah dalam RTRW Provinsi Sulawesi Barat maka kawasan perikanan terbagi atas :

- a. Kawasan tambak udang dan ikan bandeng terdapat di Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Mamuju Utara dan Kabupaten Majene;
- b. Kawasan budidaya perikanan air tawar terdapat di Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamasa;
- c. Kawasan budidaya rumput laut dan ikan laut yang berada di Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamuju Utara;
- d. Kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palipi (Majene), Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) di Banggae Majene, Kasiwa (Mamuju), Lantora, Campalagian (Polewali Mandar) dan Salotambung (Majene) beserta area pemanfaatan di wilayah lautnya.

#### **(4) Kawasan Peternakan**

Kawasan Peternakan berdasarkan arah pengembangan wilayah di RTRW Provinsi Sulawesi Barat antara lain :

- a. Kawasan pengembangan peternakan kambing yang meliputi Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Majene;
- b. Kawasan pengembangan peternakan sapi yang meliputi kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah dan Kabupaten Mamuju Utara.

#### **(5) Kawasan Pertambangan**

Provinsi Sulawesi Barat merupakan salah satu Provinsi yang kaya akan sumberdaya alam diantaranya galian logam meliputi emas, biji besi, perak dll. serta potensi akan minyak dan gas bumi yang tersebar di beberapa wilayah di Sulawesi Barat. Berdasarkan arahan RTRW terkait pengembangan kawasan pertambangan diantaranya yaitu :

- a. Kawasan potensil tambang galian logam yang tersebar di beberapa kabupaten antara lain tambang emas (Kabupaten Mamuju, Kabupaten Majene, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Mamuju Utara dan Kabupaten Mamasa); tambang biji besi (Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Majene, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah dan Kabupaten Mamasa); tambang galena (Kabupaten Mamuju, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamasa dan Kabupaten Mamuju Utara); tambang perak (Kabupaten Mamuju, Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamasa); tambang mangan (Kabupaten Mamuju, Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamasa).
- b. Kawasan potensial tambang galian industri meliputi : tambang mika (kabupaten Mamuju, Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamasa); Tambang gypsum (Kabupaten Polewali Mandar); Tambang Sulfat (Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Polewali Mandar); tambang zeolit (Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamasa); tambang Pasir Kuarsa (Kabupaten Mamasa).
- c. Kawasan potensil tambang minyak dan gas bumi (Migas), Blok Suremana, Blok Pasangkayu dan sebagian Blok Kuma di Kabupaten Mamuju Utara; sebagian Blok Kuma di Kabupaten Mamuju Utara, Blok Budong-Budong dan

Blok Karama di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamuju Tengah; Blok Malunda dan Blok Karana di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene, blok sebuku di pulau lerelerekang Kabupaten Majene; Blok South Mandar dan dan Blok Mandar yang sebagian di Kabupaten Majene dan sebagian lagi di Kabupaten Polewali Mandar; tambang batubara (Kabupaten Mamuju, Kabupaten Majene, Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamuju Utara.

## **(6) Kawasan Industri**

Paradigma baru pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh pergeseran kegiatan usaha-usaha primer ke sekunder hingga ke tersier, untuk lebih meningkatkan nilai tambah, dalam hal ini pengembangan industri. Salah satu ciri daerah yang sudah maju ditandai oleh dominannya kontribusi penciptaan nilai tambah pada kategori industri dibanding kategori lainnya. Pengolahan hasil-hasil komoditas pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan serta disamping pertambangan dan Gas yang menjadi potensi di Sulawesi Barat, jelas akan sangat mendukung pengembangan industri yang secara nyata akan berdampak pada peningkatan lapangan kerja, pengurangan pengangguran dan Kemiskinan serta pertumbuhan ekonomi. Rencana pengembangan industri baik skala besar maupun skala kecil telah termuat dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Barat tahun

2014-2034. Arah pengembangan industri tersebut antara lain :

- a. Kawasan industri skala besar diantaranya agroindustri pengolahan komoditi hasil-hasil perkebunan, peternakan dan perikanan direncanakan pengembangannya di Belang-Belang, dan industri pengolahan hasil tambang batubara dan besi di Kambunong.
- b. Kawasan industri skala menengah, agroindustri pengolahan hasil-hasil perkebunan selain kelapa sawit direncanakan pengembangannya di Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah dan Kabupaten Polewali Mandar.
- c. Kawasan aglomerasi industri skala menengah pengolahan kelapa sawit, di Kabupaten Mamuju Tengah, dan Kabupaten Mamuju.
- d. Kawasan Industri Perikanan berupa pengolahan komoditas hasil perikanan direncanakan pengembangannya di Palipi Kabupaten Majene dan Kabupaten Polewali Mandar.

Pemerintah saat ini telah berupaya untuk melakukan pengembangan Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus yang berada di Belang-Belang, Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju seiring dengan RTRWP Sulawesi Barat 2014-2034 yang telah menentukan Matabe sebagai kawasan strategis pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Posisi strategis Matabe di selat Makassar sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), serta penentuan kawasan Belangbelang sebagai kawasan terpadu pelabuhan, Bandar udara, stasiun KA barang, industri, perdagangan, pergudangan dan petikemas. Inti sentra pertumbuhan ekonomi Matabe nantinya adalah *Eco-Industrial-Park* (EIP) dan *Special Economic Zone* (SEZ/KEK) Belang-Belang.

## **2. Aspek Demografi**

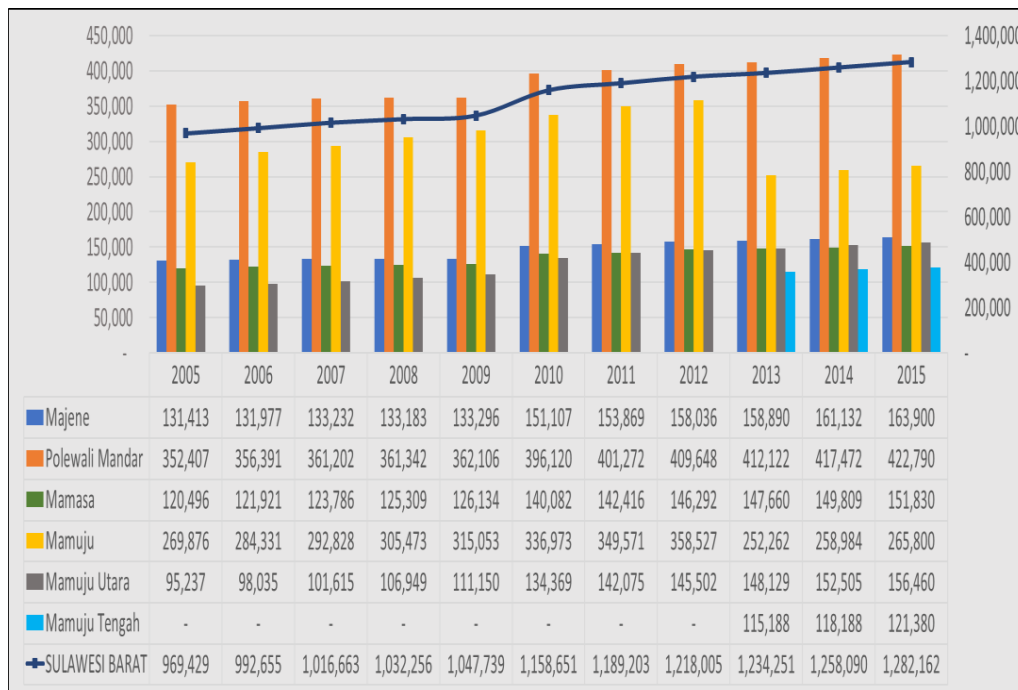
### **a) Jumlah Penduduk**

Provinsi Sulawesi Barat dengan luas wilayah 16.787,18 Km<sup>2</sup> memiliki jumlah penduduk sekitar 1.282.162 jiwa (BPS tahun 2015), dengan rincian penduduk laki-laki sebanyak 643.118 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 639.044 jiwa dengan rasio jenis kelamin sebesar 100,64 artinya penduduk laki-



laki lebih banyak kurang lebih sekitar 1 (satu) persen dari penduduk perempuan. Adapun kepadatan penduduk sebesar 76 jiwa/Km<sup>2</sup>.

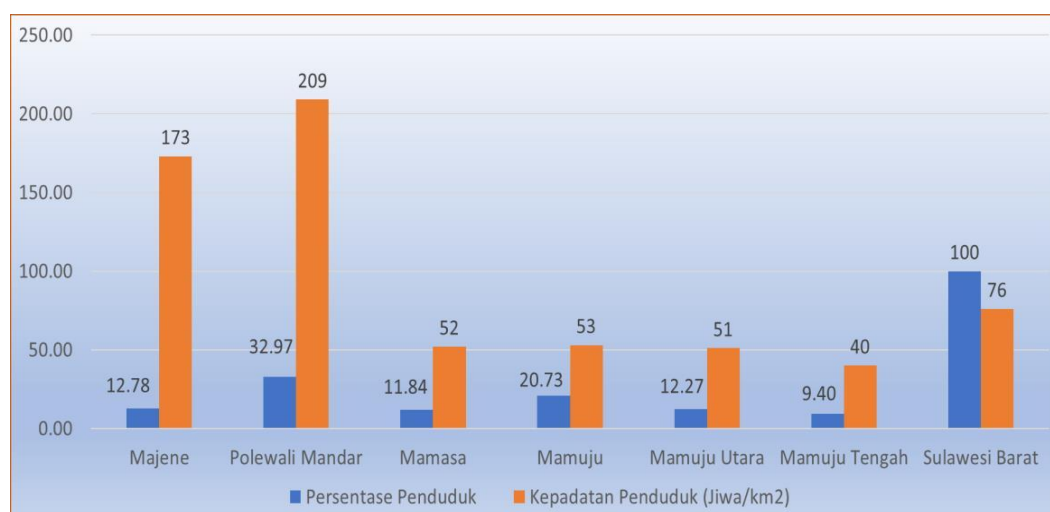
**Grafik 2.1**  
**Jumlah Penduduk Sulawesi Barat tahun 2005 – 2015**



Sumber: Sulbar Dalam Angka Berbagai seri (2005-2016)

Penduduk terbesar berada di Kabupaten Polewali Mandar sebesar 32,97 persen dan terkecil di Kabupaten Mamuju Tengah sebesar 9,40 persen dari total penduduk di Sulawesi Barat. Kepadatan Penduduk di 6 kabupaten cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kabupaten Polewali Mandar dengan kepadatan sebesar 209 jiwa/km<sup>2</sup>, selanjutnya Kabupaten Majene sebesar 172 jiwa/km<sup>2</sup>, Kabupaten Mamuju 53 jiwa/km<sup>2</sup>, Kabupaten Mamasa 52 jiwa/km<sup>2</sup>, Kabupaten Mamuju Utara sebesar 51 km<sup>2</sup> serta terendah di Kabupaten Mamuju Tengah sebesar 40 jiwa/km<sup>2</sup>.

**Grafik 2.2**  
**Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten dan Provinsi Tahun 2015**



Sumber: Sulbar Dalam Angka 2016

Penduduk di Sulawesi Barat didominasi oleh penduduk yang beragama Islam yaitu sebesar 1.075.026 jiwa atau sekitar 83,84 persen dari total penduduk, kemudian Kristen Protestan sebesar 189.522 jiwa atau 14,78 persen serta agama yang minoritas yaitu Budha dan Kongfutsu dengan jumlahnya di bawah satu persen. Adapun gambaran jumlah penduduk menurut agama seperti yang tampak pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.6**  
**Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Kabupaten**  
**di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015**

NO	Kabupaten	Jumlah Penduduk					
		Islam	Katholik	Protestan	Hindu	Budha	Kongfutsu
1	Majene	157 825	165	200	19	50	3
2	Polewali Mandar	399 551	2 144	10 682	781	165	-
3	Mamasa	38 701	7 473	113 167	17.468	-	-
4	Mamuju	323 442	4 280	54 428	7 628	390	-
5	Mamuju Utara	155 507	3 453	11 045	8 245	-	-
6	Mamuju Tengah	-	-	-	-	-	-
<b>Sulawesi Barat</b>		<b>1 075 026</b>	<b>17 515</b>	<b>189 522</b>	<b>34 141</b>	<b>605</b>	<b>3</b>

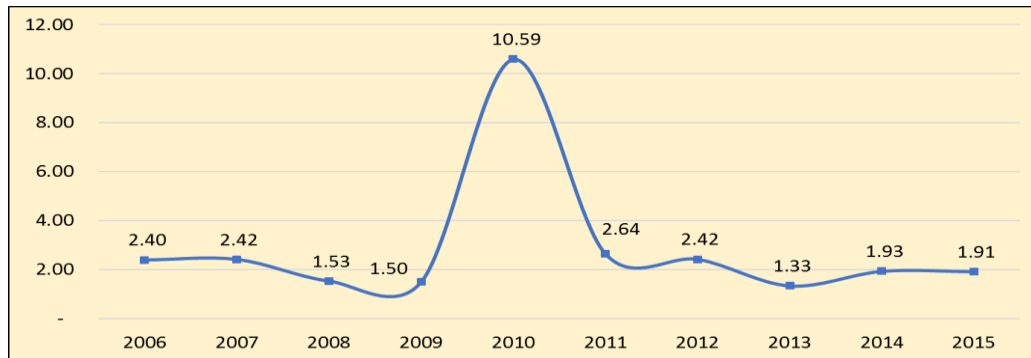
Sumber: Sulbar Dalam Angka, BPS 201

#### **b) Laju Pertumbuhan Penduduk**

Sejak dibentuk pada tahun 2004 jumlah penduduk di Provinsi Sulawesi Barat terus mengalami peningkatan, sebagai daerah otonom yang mempunyai potensi pengembangan kedepan, tentunya menjadi daya tarik penduduk daerah lainnya untuk berpindah ke Sulawesi Barat. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, laju pertumbuhan penduduk mengalami fluktuasi. Pada tahun 2006 laju pertumbuhan penduduk di Sulawesi Barat sebesar 2,40 persen naik menjadi 10,59 persen pada tahun 2010, ini merupakan laju pertumbuhan tertinggi selama dibentuknya Sulawesi Barat. Kemudian pada tahun 2015 laju pertumbuhan penduduk kembali mengalami penurunan sebesar 1,91 persen. Untuk kategori kabupaten pada tahun 2015 laju pertumbuhan tertinggi terdapat di Kabupaten Mamuju Tengah sebesar 2,70 persen disusul Mamuju sebesar 2,63 persen, Mamuju Utara 2,60 persen, Majene 1,72 persen, Mamasa 1,35 persen serta Kabupaten Polewali Mandar dengan laju pertumbuhan penduduk terendah yaitu sebesar 1,27 persen.

Kabupaten Mamuju Tengah dengan laju pertumbuhan penduduk tertinggi dikarenakan Kabupaten Mamuju tengah sebagai daerah otonomi baru sebagai sasaran migrasi masuknya penduduk dari luar, terlebih dengan ketersediaan lahan yang masih sangat luas untuk digarap. Sebaliknya Kabupaten Polewali Mandar dengan pusat pertumbuhan penduduk di Sulawesi Barat mengalami perlambatan pertumbuhan penduduk yakni hanya 1,27 persen yang disebabkan oleh keterbatasan lahan dan kepadatan penduduk yang besar yaitu 209 jiwa/km<sup>2</sup>.

**Grafik 2.3**  
**Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Sulawesi Barat**  
**Tahun 2006 – 2015**

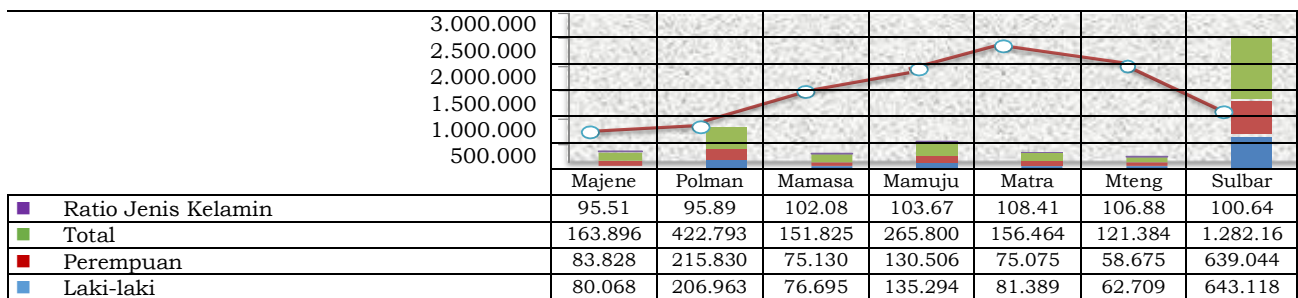


Sumber: Badan Pusat Statistik 2016 (diolah)

**c) Rasio Jenis Kelamin**

Penduduk di Sulawesi didominasi oleh laki-laki dimana perbandingan rasionya sebesar 100,64. Ratio jenis kelamin tiap kabupaten juga berbeda dimana untuk kabupaten Majene dan Kabupaten Polewali Mandar mempunyai ratio jenis kelamin dibawah dari nilai 100 (seratus) masing-masing sebesar 95,51 dan 95,89 artinya bahwa untuk setiap seratus penduduk perempuan hanya ada 95 atau 96 penduduk laki-laki atau dengan kata lain penduduk perempuan lebih banyak dari penduduk laki-laki. Jumlah rasio terbesar berada di Kabupaten Mamuju Utara yang sebesar 108,41, sedangkan untuk kabupaten lainnya dengan nilai ratio lebih besar dari seratus, seperti yang tampak pada table berikut ini.

**Grafik 2.4**  
**Jumlah Penduduk menurut jenis kelamin**  
**dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat**



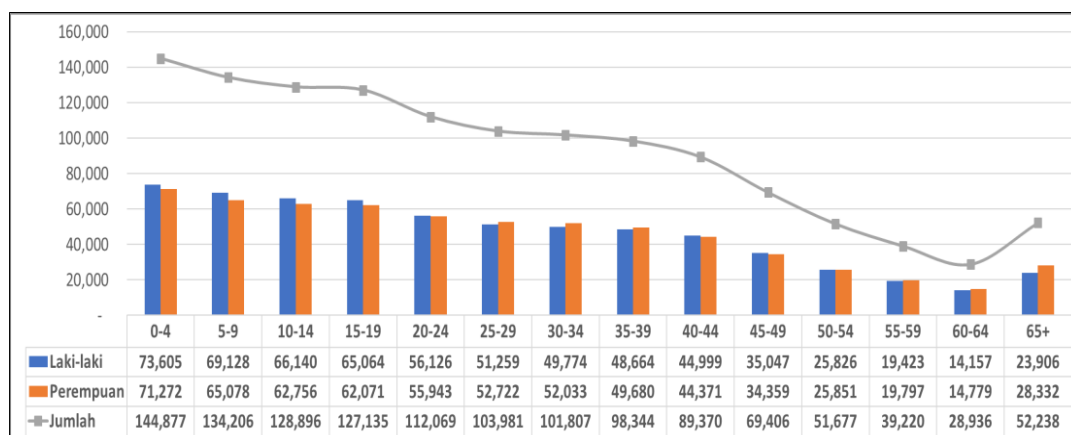
Sumber: Sulbar Dalam Angka, BPS 2016

**d) Struktur Usia Penduduk**

Struktur Usia penduduk di Sulawesi barat dimana angka terbesar berada pada kelompok usia muda dimana angka menunjukkan rasio ketergantungan penduduk usia muda yang cukup tinggi, disajikan pada Grafik berikut.

**Grafik 2.5**

**Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Sulawesi Barat, 2015**



Sumber: Sulbar Dalam Angka, BPS 2016

**3. Aspek Infrastruktur a) Fasilitas Jalan**

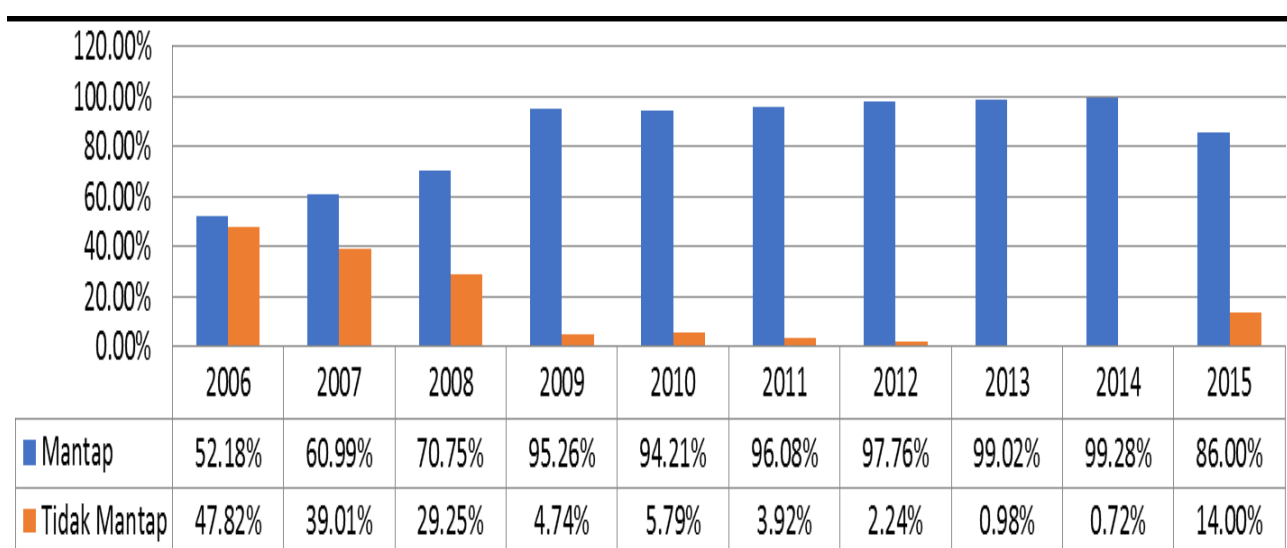
Jalan merupakan prasarana angkutan darat yang penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Secara umum panjang jalan nasional di Sulawesi Barat tahun 2013 sekitar 602,78 km, dengan kondisi baik 453,34 km, kondisi sedang 144,86 km, kondisi rusak 3,88 km dan rusak berat 0,7 km. Penjelasan berkaitan dengan kondisi prasarana angkutan darat secara detail diuraikan sebagai berikut.

**(1) Jalan Nasional**

Penurunan Kondisi kemantapan tahun 2014 ke 2015 diakibatkan adanya penambahan ruas jalan baru (RUAS SALUBATU – MAMBI - MALA’BO – MAMASA - BATAS TATOR dan RUAS POLEWALI – TABONE – MALA’BO) sepanjang 191.189 km dengan kondisi rusak ringan dan rusak berat, sebagaimana Grafik dan Tabel berikut.

**Grafik 2.6**

**Kondisi Jalan Nasional di Sulawesi Barat Tahun 2006-2016**



Tabel 2. 7

**Ruas Jalan Nasional di Sulawesi Barat Tahun 2016  
(SK. NO.290/KPTS/M/2015)**

NOMOR RUAS		N A M A R U A S	PANJANG ( KM )	JAP ( KM )	JKP-1 ( KM )
001		SURUMANA (BTS. PROV. SULTENG) - PASANG KAYU	51.19		51.19
002		PASANG KAYU – BARAS	54.62		54.62
003		BARAS – KAROSSA	48.23		48.23
004		KAROSSA – TOPOYO	54.67		54.67
005		TOPOYO – TARAILU	41.27		41.27
006		TARAILU – KALUKU	43.84		43.84
007		KALUKU - BTS. KOTA MAMUJU	28.53		28.53
007	11	K JLN. POROS KALUKU (MAMUJU)	1.25		1.25
007	12	K JLN. HASANUDDIN (MAMUJU)	1.31		1.31
008		BTS. KAB. MAJENE – MAMUJU	37.03	37.03	
008	11	K JLN. AHMAD YANI (MAMUJU)	0.41	0.41	
008	12	K JLN. KS. TUBUN (MAMUJU)	0.72	0.72	
008	13	K JLN. URIP SUMOHARJO (MAMUJU)	0.69	0.69	
008	14	K JLN. SUDIRMAN (MAMUJU)	1.24	1.24	
008	15	K JLN. GATOT SUBROTO (MAMUJU)	1.28	1.28	
009		TAMERODDO - BTS. KAB. MAMUJU	50.89	50.89	
010		BTS. KOTA MAJENE - TAMERODDO	42.79	42.79	
010	11	K JLN. A. YANI (MAJENE)	3.82	3.82	
010	12	K JLN. GATOT SUBROTO (MAJENE)	1.35	1.35	
011		BTS. KOTA POLEWALI - BTS. KOTA MAJENE	42.78	42.78	
011	11	K JLN. SUDIRMAN (MAJENE)	2.32	2.32	
011	12	K JLN. HASANUDDIN (MAJENE)	2.13	2.13	
011	13	K JLN. M. YAMIN (POLEWALI)	2.80	2.80	
012		BTS. PROV. SULSEL - BTS. KOTA POLEWALI	14.07	14.07	
012	11	K JLN. ANDI DEPU (POLEWALI)	3.38	3.38	
012	12	K JLN. TENGGU UMAR (POLEWALI)	3.70	3.70	
012	13	K JLN. A. YANI (POLEWALI)	1.76	1.76	
013		SALUBATU – KALUKU	28.11		28.11
014		SALUBATU – MAMBI	45.63		45.63
015		MAMBI – MALABO	27.09		27.09
016		MALABO – MAMASA	13.50		13.50
017		MAMASA - BTS. SULSEL	37.95		37.95
018		MALABO – TABONE	27.09		27.09
019		TABONE – POLEWALI	45.73		45.73
<b>TOTAL PANJANG JALAN NASIONAL</b>			<b>763.17</b>	<b>213.17</b>	<b>550.00</b>

Sumber : Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar

## (2) Jalan Provinsi

Dari tabel di bawah, digambarkan kondisi jalan provinsi tahun 2011 dengan kondisi baik sebesar 13,32 persen, sedangkan di tahun 2017 meningkat menjadi 26,90 persen. Hal itu menggambarkan bahwa pembangunan infrastruktur dasar khususnya jalan provinsi telah menunjukkan hasil yang mengembirakan. volume jalan provinsi tahun 2011 dengan kondisi sedang sebesar 40,71 persen, sedangkan di tahun 2016 turun 38,40 persen.

Penurunan tersebut berarti bahwa perbaikan jalan provinsi dari kondisi sedang beralih menjadi kondisi baik. Sedangkan untuk kondisi jalan provinsi tahun 2011 dengan kondisi rusak berat sebesar 45,97 persen, mengalami penurunan di tahun 2017 sebesar 40,60 persen. Panjang jalan provinsi tahun 2011 mengalami penurunan pada tahun 2017 yang disebabkan

adanya ruas jalan provinsi yang telah ditetapkan menjadi jalan nasional yaitu ruas Polewali – Tabone – Malabo dan Ruas Salubatu – Mambi – Malabo – Mamasa – Batas Toraja Utara. Adapun status jalan yang ada di Sulawesi Barat antara lain Jalan Provinsi, Jalan Strategis Provinsi serta jalan Strategis Nasional yang juga masih menjadi kewenangan Provinsi.

**Tabel 2. 8**

**Kondisi Jalan Provinsi di Sulawesi Barat Tahun 2006-2016**

INDIKATOR	2011	%	2017	%
Kondisi Baik	65.00	13,32	73,78	21,10
Kondisi Sedang	198.72	40,71	133,92	38,30
Kondisi Rusak Berat	224.38	45,97	141,97	40,60
<b>JUMLAH</b>	<b>488,1</b>		<b>349.67</b>	

Sumber : Bappeda Bidang Fispra 201

**Tabel 2.9**

**Ruas Jalan Provinsi (Kolektor Primer) Sulawesi Barat**

NOMOR RUAS				NAMA RUAS	PANJANG (Km)	KABUPATEN
Lama		Baru				
001	5	001	5	BATUISI – BATAS TORAJA	44,64	MAMUJU
003	1	002	1	LAMPA(MAPILLI) – MATANGNGA	45,68	POLMAN
003	2	002	2	MATANGNGA – KEPPE	31,10	POLMAN
004	1	003	1	SALUTAMBUNG - UREKANG	36,46	MAJENE
004	2	003	2	UREKANG – MAMBI	18,58	MAMASA
005	1	004	1	TIKKE - BTS SULTENG	9,50	MAMUJU UTARA
<b>JUMLAH</b>					<b>185,96</b>	

Sumber : Bappeda Bidang Fispra 201

**Tabel 2.10**

**Ruas Jalan Strategis Provinsi Sulawesi Barat**

NOMOR RUAS				NAMA RUAS	PANJANG	KABUPATEN
Lama		Baru			(km)	
007	2	002	3	PIRIANG – MAPILLI	48,14	POLMAN
008	2	002	4	TIBUNG-ALU	24,69	POLMAN
008	3	002	5	ALU-TINAMBUNG	14,79	POLMAN
010	1	002	7	SALEPPA-PUAWANG	6,46	POLMAN
010	2	002	8	PUAWANG-KATITTING	6,85	POLMAN



007	1	003	3	LOMBONGAN (TALAMBALAO) – PIRIANG	27,29	MAJENE
008	1	003	4	PALLANG PALLANG-TIBUNG	13,50	MAJENE
009	1	003	5	PAMBOANG-SUMARRANG	18,58	MAJENE
009	2	003	6	SUMARRANG-GALUNG LOMBOK	14,38	MAJENE - POLMAN
		004	2	AKSES PELABUHAN PASANGKAYU	5,50	MAMUJU UTARA
		005	1	TABONE – NOSU	27,50	MAMASA
		005	2	NOSU – PANA	26,70	MAMASA
		005	3	PANA - MAMULLU - MANIPI BARRU	10,00	MAMASA
		005	4	AKSES BANDARA SUMARORONG	1,757	MAMASA
		006	1	TOBADAK (BENTENG) - TOBADAK VII	21,00	MAMUJU TENGAH
		006	2	TOBADAK VII - TOBADAK VIII (BTS TOMMO)	13,19	MAMUJU TENGAH
		006	3	AKSES PELABUHAN BUDONG-BUDONG	14.20	MAMUJU TENGAH

Sumber : Bappeda Bidang Fispra 2017

**Tabel 2.11**  
**Ruas Jalan Strategis Nasional Provinsi Sulawesi Barat**

NOMOR RUAS				NAMA RUAS	PANJANG (Km)	KABUPATEN
Lama		Baru				
001	1	001	1	SALUBATU - BONEHAU	28,70	MAMUJU
001	2	001	2	BONEHAU - KALUMPANG	21,97	MAMUJU
001	4	001	3	KALUMPANG BATUISI	15,74	MAMUJU
		001	4	BATUISI - BTS LUWU UTARA	42,30	MAMUJU
		001	6	JL. MARTADINATA - SUMARE (RANGAS) - BTS. TAPALANGBARAT	55,00	MAMUJU
				<b>JUMLAH</b>	<b>163,71</b>	

Sumber : Bappeda Bidang Fispra 2017

## b) Fasilitas Pelabuhan

Aktivitas Bongkar Muat Barang di dominasi oleh jenis muatan produk sawit yang terdiri dari minyak sawit dan biji sawit, namun berdasarkan data di atas terlihat bahwa dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 aktivitas bongkar muat untuk minyak sawit mengalami penurunan setiap tahunnya. Berbeda dengan jenis biji sawit yang mengalami kenaikan setiap tahunnya. Hal ini mengindikasikan bahwa lebih banyak sawit yang langsung di kirim dalam bentuk biji sawit tanpa adanya pengolahan pada beberapa turunan sawit. Jenis muatan yang terbesar selanjutnya yaitu Hewan yang biasanya banyak di kirim

ke beberapa daerah seperti Kalimantan untuk keperluan hari-hari besar disajikan pada Tabel berikut.

**Tabel 2.12**  
**Aktivitas Muat Pelabuhan Menurut Jenis Muatan**  
**di Provinsi Sulawesi Barat 2011-2015**

Jenis Muatan	Satuan	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
Minyak Sawit	Ton	335,620	407,614	468,094	236,358	141,965
Biji Sawit	Ton	42,650	511,630	75,466	69,690	84,205
Karang	M3	3,240	22,216	14,651	8,656	4,226
PKO	Ton	9,102	3,000	-	-	-
Jagung	Ton	6,130	7,732	10,479	12,552	10,438
Mobil	Unit	2,759	3,354	2,851	1,885	1,870
Motor	Unit	1,162	1,545	1,432	2,047	1,300
Hewan	Ekor	17,313	21,651	22,508	21,071	29,810
Barang Campuran	Ton	369	5,613	1,132	7,493	45,333
Pisang	Ton	108	54	132	104	672

Sumber : Sulawesi Barat Dalam Angka, BPS 2016

**Tabel 2.13**  
**Aktivitas Bongkar Pelabuhan Menurut Jenis Muatan**  
**di Provinsi Sulawesi Barat 2011-2015**

Jenis Muatan	Satuan	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
Semen	Ton	50,922	51,550	62,637	66,514	129,783
Kayu	M3	569	339	205	94	97
Ikan	Ton	1,968	1,995	1,495	-	819
Tali Bekas	Ton	32	19	7	7	-
Mobil	Unit	2,451	2,633	1,914	94	1,364
Motor	Unit	1602	2074	1864	94	1564
Hewan	Ekor	3	-	-	-	1,093
Barang Campuran	Ton	292	5,598	11,984	19,166	13,076
Pupuk	Ton	23,333	12,767	4,120	9,100	16,792

Sumber : Sulawesi Barat Dalam Angka, BPS 2016

Untuk Kategori aktivitas bongkar di pelabuhan didominasi oleh jenis muatan semen, yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hal ini mengindikasikan bahwa terjadi geliat pembangunan infrastruktur di Sulawesi Barat. Jenis muatan yang kedua yaitu pupuk yang banyak didatangkan

dari daerah lainya untuk menunjang tanaman pertanian dan perkebunan yang ada di Sulawesi Barat.

**Tabel 2.14**  
**Aktivitas Pelayaran dan Jumlah Penumpang Menurut Bulan**  
**Di Provinsi Sulawesi Barat tahun 2015**

Bulan	Pelayaran	Penumpang (Orang)	
		Berangkat	Datang
Januari	178	1 892	1 719
Februari	182	1 318	1 021
Maret	260	1 554	1 521
April	295	1 737	1 704
Mei	265	1 489	1 679
Juni	194	2 074	1 731
Juli	194	3 234	3 423
Agustus	220	2 374	1 832
Septeber	256	1 408	1 569
Oktober	234	1 988	2 020
November	229	1 599	1 848
Desember	195	1 532	2 188
<b>Jumlah</b>	<b>2.702</b>	<b>22.199</b>	<b>22.255</b>

Sumber : Sulawesi Barat Dalam Angka, BPS 2016

### c) Fasilitas Bandar Udara

Dalam rangka meningkatkan konektivitas antar wilayah di Pulau Sulawesi dan mendukung peningkatan daya saing di Sulawesi Barat, telah dikembangkan 2 (dua) bandara untuk peningkatan konektivitas tersebut yaitu bandara Tampa Padang dan bandara Sumarorong untuk mendukung destinasi pariwisata di Kabupaten Mamasa.

Dari tabel di bawah, menjelaskan bahwa fasilitas Bandara Tampapadang Mamuju selalu mendapat perhatian serius dari Pemerintah. Dari segi fisik telah terjadi penambahan Landasan Pacu dari 790 meter pada tahun 2005 menjadi 2,500 meter pada Tahun 2016. Dengan penambahan panjang tersebut maka Bandara Tampapadang hingga kini telah dapat didarati oleh pesawat boing sekelas Garuda.

**Tabel 2.15**  
**Kondisi Bandara Tampa Padang**

URAIAN	2005	2016
<b>LANDAS PACU (RUNWAY)</b>	790 M X 23 M	2.500 M x 45 M
<b>APRON</b>	60 M X 40 M	150 M x 40 M
<b>TAXIWAY</b>	75 X 15 M2	2 x 75 M x 18 M
<b>OVERRUN</b>	-	2 x 30 M x 30 M
<b>BAHU (SHOULDER)</b>	-	2.040 M x 60 M
<b>JENIS PESAWAT</b>	CASA-212	WINGS ATR, GARUDA BOMBARDIR

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Sulawesi Barat

**Tabel 2.16**  
**Kondisi Bandara Sumarorong**

URAIAN	2011	2016
LANDAS PACU (RUNWAY)		Tahap Pengerjaan 1200 M x 30 M
APRON		650 M x 40 M
TAXIWAY		80 M x 15 M

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Sulawesi Barat

Mobilitas penduduk melalui bandara Tampa Padang selama tahun 2012-2015 mengalami peningkatan sebagaimana tergambar pada tabel di bawah ini. Untuk mendukung daerah destinasi wisata di Kabupaten Mamasa maka Pemerintah Provinsi juga membangun Bandara Sumarorong yang berfungsi sebagai penghubung daerah wisata dari Bali, Sumarorong, Tana Toraja. Bandara ini telah beroperasi dan saat ini melayani rute Makassar- Sumarorong tiga kali seminggu.

**Tabel 2.17**  
**Aktifitas Bandara Tampa Padang Mamuju**  
**Tahun 2012-2015**

Tahun	Pesawat (Unit)		Penumpang (Orang)		Bagasi (Ton)	
	Tiba	Berangkat	Tiba	Berangkat	Bongkar	Muat
2012	613	613	25.752	27.772	150.676	125.692
2013	499	499	23.610	25.043	122.950	108.080
2014	700	700	28.644	27.453	134.510	108.174
2015	1.132	1.132	39.403	43.115	192.932	233.244

Sumber : BPS Sulawesi Barat Tahun 2016

Selain bandara yang telah berfungsi baik, pemerintah juga mengembangkan Pelabuhan Laut sebagai upaya mendukung jalur poros maritim yang telah dicanangkan Pemerintah Pusat. Berikut ini adalah aktifitas pelayaran yang telah berlangsung di Sulawesi Barat

Pada tahun 2015, arus penerbangan di Bandara Tampa Padang dan Sumarorong Mamasa tercatat pesawat yang datang dan berangkat masing-masing 1.132 penerbangan. Jumlah penerbangan ini membawa penumpang sebanyak 43.115 orang yang berangkat dan penumpang datang 39.403 orang, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut.

**Tabel 2.18**  
**Lalu Lintas Pesawat, Penumpang dan Bagasi Angkutan Udara di Bandar**  
**Udara Tampa Padang Mamuju dan Sumarorong Mamasa, Tahun 2015**

Bulan	Pesawat (Unit)		Penumpang (Orang)		Bagasi (Kg)	
	Berangkat	Datang	Berangkat	Datang	Muat	Bongkar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Januari	63	63	1882	1727	9774	8244
Februari	43	43	1866	1772	10137	8240
Maret	85	85	2811	3047	24198	17644
April	112	112	3695	3190	17609	16366
Mei	106	106	3858	3718	21413	15747
Juni	104	104	3833	3487	19143	14766
Juli	106	106	3617	3525	23143	17488
Agustus	103	103	4774	3278	18759	23735
September	113	113	4156	3897	23545	18545
Oktober	76	77	3315	3028	17841	13922

November	105	104	4452	4179	24032	18938
Desember	116	116	4856	4555	23650	19303
<b>Sulawesi Barat</b>	<b>1132</b>	<b>1132</b>	<b>43115</b>	<b>39403</b>	<b>233244</b>	<b>192932</b>

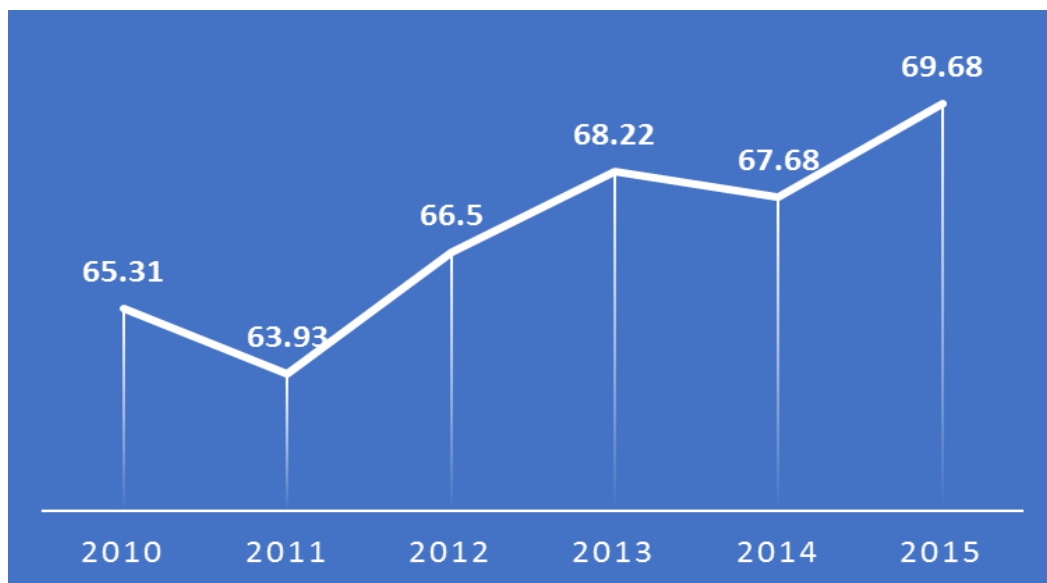
Sumber : Sulawesi Barat Dalam Angka, BPS 2016

#### d) Fasilitas Sumber Air Minum

Akses rumah tangga ke sumber air minum bersih seringkali menjadi indikator kesehatan masyarakat karena fungsi air itu sendiri yang merupakan kebutuhan pokok. Tahun 2015 akses terhadap air minum bersih telah dapat dinikmati oleh lebih dari dua pertiga penduduk Sulawesi Barat. Kondisi ini semakin baik dibandingkan tahun sebelumnya.

**Grafik 2.7**

#### **Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Bersih di Sulawesi Barat tahun 2010-2015**



Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat, menunjukkan bahwa semua sungai di Sulawesi Barat pada tahun 2016 ini mengalami pencemaran. Hal ini disebabkan oleh penurunan kualitas lingkungan, baik yang diakibatkan oleh peristiwa alam maupun oleh pencemaran dari aktivitas manusia. Sungai dengan tingkat pencemaran tertinggi berada di Sungai Mamasa, semua penduduk yang bermukim di sepanjang sungai membuang limbahnya ke sungai khususnya limbah cair rumah tangga ditambah lagi dengan hewan ternak peliharaan dari warga berada di sepanjang sungai, mengalirkan limbah cairnya langsung ke badan sungai. Proses ini secara tidak langsung mengakibatkan tingginya tingkat pencemaran dari parameter Fecal Coli dan Total Coli. Secara total pencemaran sungai yang ada Sulawesi Barat berada pada status ringan sebesar 69, status sedang sebanyak 34 serta status yang memenuhi sebesar 5 seperti yang tampak pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.19**  
**Indeks Kualitas Air Sulawesi Barat**

No.	Nama Sungai	Σ Titik	Frekuensi	Status Pencemaran			
				Memenuhi	Ringan	Sedang	Berat
1	Lariang	6	5	0	15	15	0
2	Poelwali	6	5	0	18	12	0
3	Mamasa	7	5	4	25	6	0
4	Majene	1	1	0	1	0	0
5	Mamuju	3	2	1	10	1	0
<b>Jumlah</b>				<b>5</b>	<b>69</b>	<b>34</b>	<b>0</b>

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sulbar 2017

### e) Fasilitas Listrik

Provinsi Sulawesi Barat memiliki 11 (sebelas) alur sungai besar yang berpotensi untuk pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) seperti pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Pembangkit Listrik Tenaga Mini (PLTM) dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH). Dan potensi Energi Baru Terbarukan yang lain seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Bayu/Angin (PLTB), Biomassa, dan Panas Bumi. Penegembangan ketenagalistrikan Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana disajikan pada Tabel berikut.

**Tabel 2.20**  
**Kondisi Infrastruktur Ketenagalistrikan**

<b>A. INFRASTRUKTUR PEMBANGKIT</b>			
No	Pembangkit	Daya Terpasang (MW)	Daya Mampu (MW)
1	PLTD Pasangkayu 8 Unit @ 1.800 KW	12,600	0,715
2	PLTD Baras 5 Unit @ 440 KW	1,760	0,210
3	PLTM Bonehau 2 x 2.000 KW	4	4
4	PLTM Budong-Budong 2 x 1.000 KW	2	2
5	PLTM Kalukku 2 x 700 KW	1,5	1,5
6	PLTM Balla 2 x 350 KW	0,700	0,700
7	PLTD Mambi 2 Unit @ 100 KW	0,240	0,220
8	PLTD Babana 3 Unit @ 40 KW	0,120	0,111
9	PLTD Topoyo 6 Unit @ 600 KW	0,360	0,360
10	PLTD Karossa 5 Unit @ 390 KW	1,950	0,313
11	PLTD Sarjo 2 Unit @ 140 KW	0,240	0,123
<b>Total</b>		<b>25.47</b>	<b>10.252</b>
<b>B. INFRASTRUKTUR GARDU INDUK</b>			
NO	Gardu Induk (GI)	Daya Terpasang (MW)	Daya Mampu (MW)
1	Mamuju	45	50
2	Majene	18	18
3	Polewali Mandar	45	24
<b>Total</b>		<b>108</b>	<b>92</b>

**Tabel 2.21.**  
**Kondisi Pembangunan Jaringan Listrik**

No	Infrastruktur Jaringan	Satuan	Jumlah
1	Jaringan Tegangan Menengah (JTM)	Kms	2.099,29
2	Jaringan Tegangan Rendah (JTR)	Kms	1.733,22
3	Trafo Distribusi	Unit	2.093

**Tabel 2.22.**  
**Kondisi Desa Berlistrik dan Desa Belum Berlistrik**

Kabupaten	Desa Berlistrik			Desa Belum Berlistrik		
	Kec	Kel	Desa	Kec	Kel	Desa
Mamuju	11	12	88	1	-	17
Mamuju Utara	12	4	59	-	-	5
Mamuju Tengah	5	-	54	-	-	8



Polewali Mandar	16	23	144	-	-	12
Majene	8	20	62	-	-	6
Mamasa	17	13	168	5	4	99
<b>TOTAL</b>	<b>69</b>	<b>72</b>	<b>575</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>147</b>

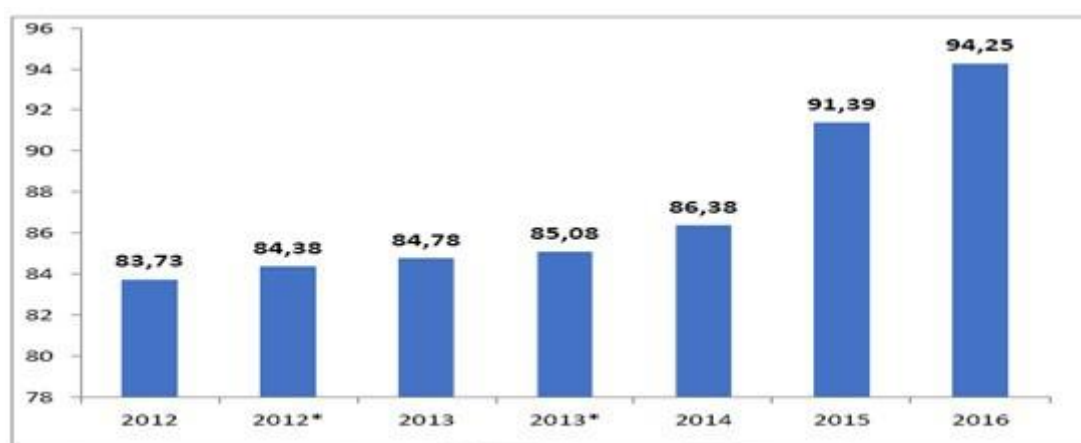
**Tabel 2.23**  
**Ratio Elektrifikasi**

Kabupaten	Ratio Elektrifikasi	Ratio Desa Berlistrik
Mamuju	72.9 %	83.0 %
Mamuju Tengah	44.0 %	85.2 %
Mamuju Utara	44.0 %	92.1 %
Majene	84.6 %	92.7 %
Polewali Mandar	84.4 %	92.8 %
Mamasa	28.0 %	43.1 %
<b>TOTAL</b>	<b>66.1 %</b>	<b>75.9 %</b>

**Tabel 2.24**  
**Perkembangan Ratio Elektrifikasi Provinsi Sulawesi Barat 2006-2016**

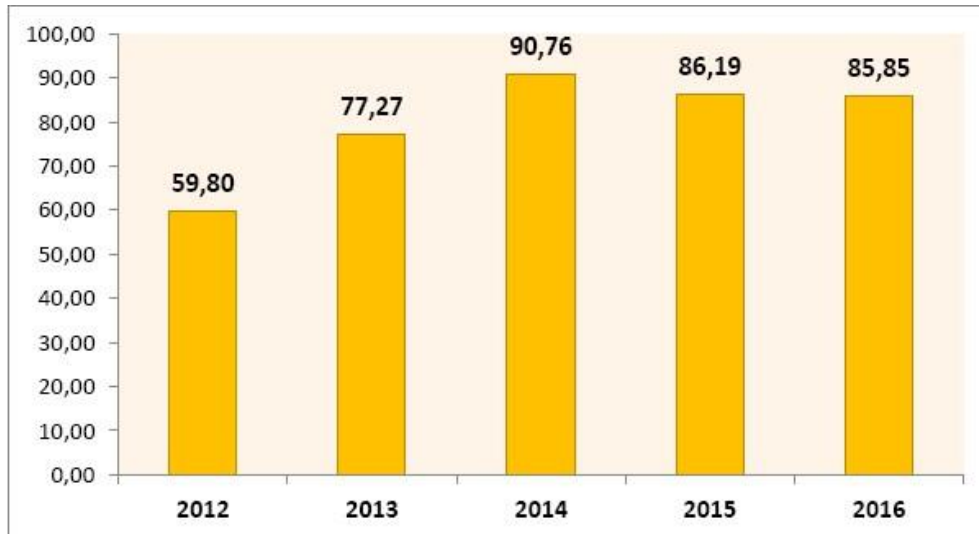
2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
33.26	36.28	46.62	55.98	57.36	46.37	52.04	55.52	60.41	64.63	68

**Grafik 2.8**  
**Persentase Rumah Tangga menurut Provinsi dan Sumber Penerangan dari Listrik, 2012-2016**



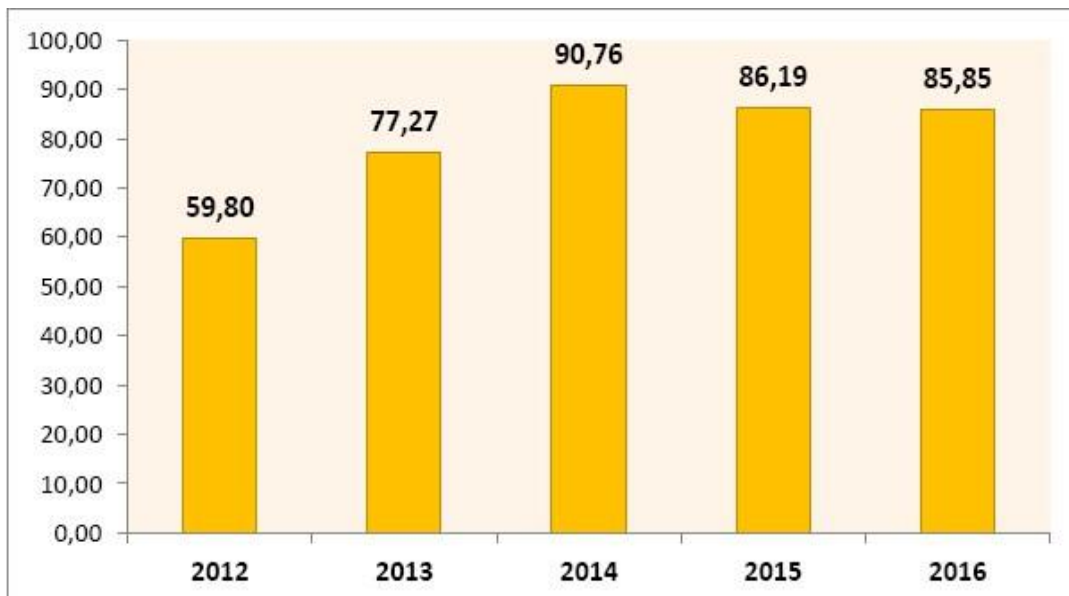
Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Prov. Sulawesi Barat

**Grafik 2.9**  
**Rasio Ketersediaan Daya Listrik (%)**



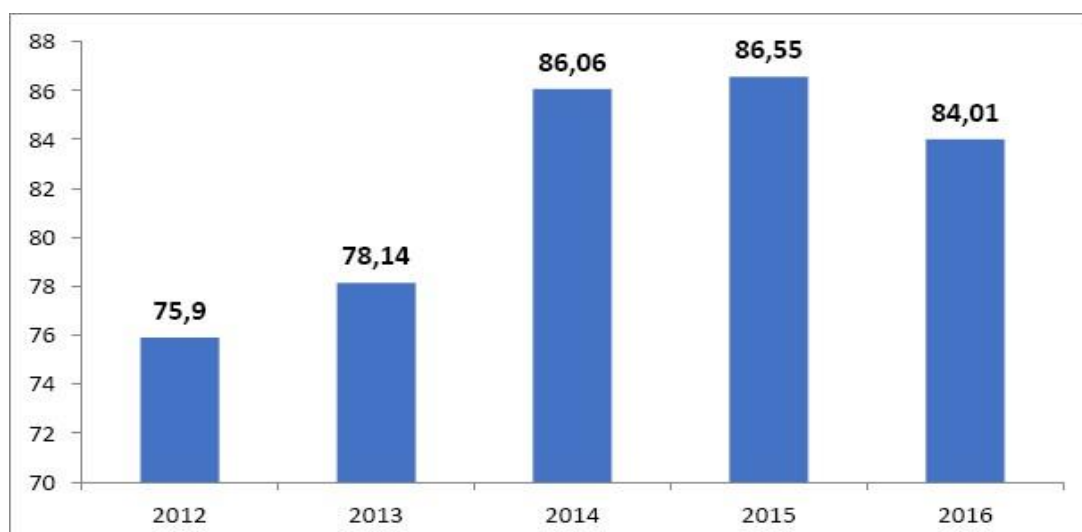
Sumber : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sulawesi Barat

**Grafik 2.10**  
**Persentase Rumah Tangga yang menggunakan Listrik (%)**



Sumber : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sulawesi Barat

**Grafik 2.11**  
**Persentase Rumah Tangga yang menggunakan Listrik (%)**



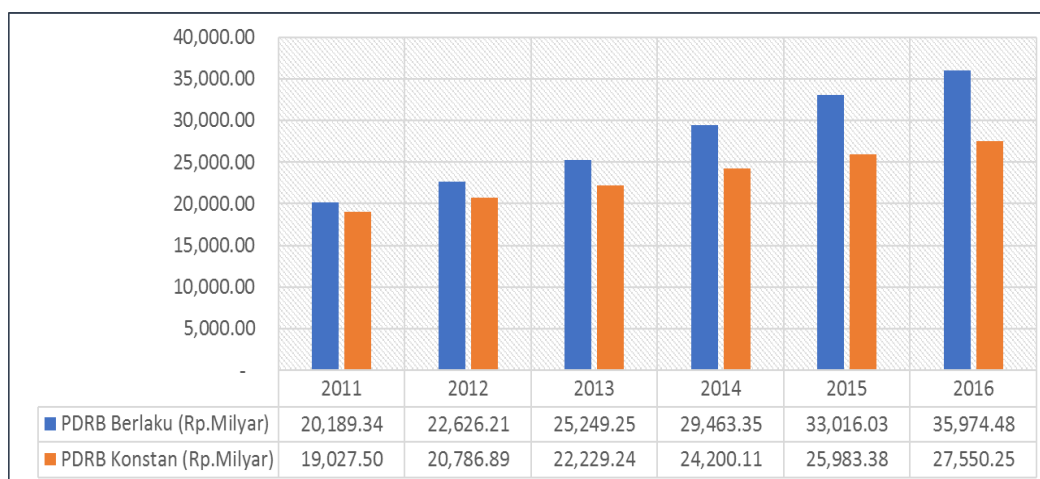
Sumber : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sulawesi Barat

#### 4. Aspek Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator yang menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan ekonomi suatu wilayah dapat ditunjukkan dengan Indikator PDRB. Pada bagian ini akan dipaparkan lebih mendalam aspek kesejahteraan dan pemerataan ekonomi yang mencakup: PDRB, Pertumbuhan Ekonomi, struktur perekonomian, inflasi, pendapatan per kapita serta produktifitas tenaga kerja.

Salah satu indikator yang digunakan untuk memberi gambaran makro mengenai kemajuan suatu wilayah adalah dengan memperhatikan perubahan PDRB, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Seiring dengan pertumbuhan penduduk, nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Perekonomian Sulawesi Barat 2016 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai 35.974,48 milyar Rupiah atau terjadi peningkatan sekitar 8,96 persen dibandingkan dengan keadaan tahun sebelumnya, dan atas dasar harga konstan sebesar 27.550,25 milyar rupiah.

**Grafik 2.12**  
**Nilai PDRB Sulawesi Barat Tahun 2011-2016**



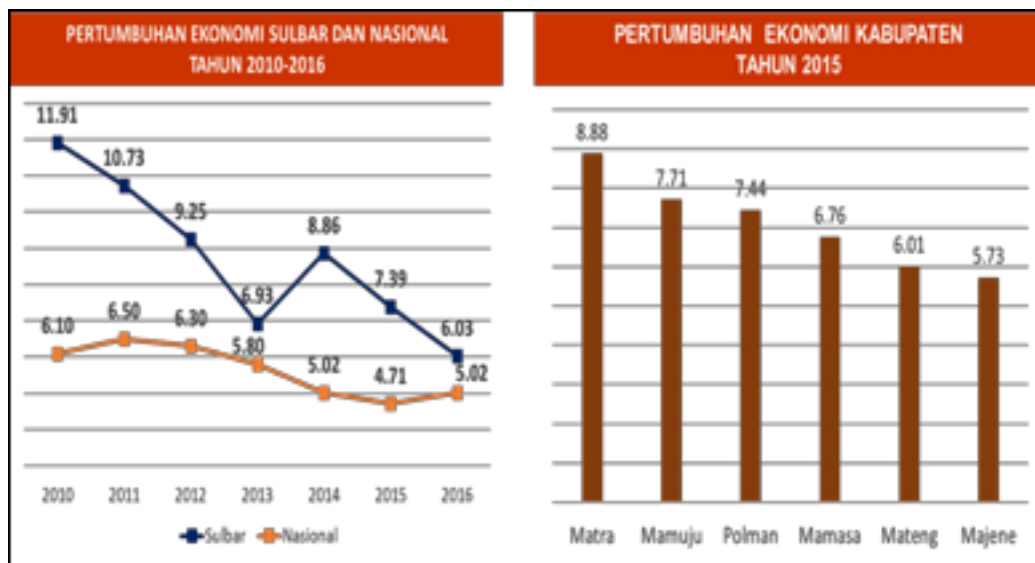
Sumber: BPS Sulawesi Barat 2016

Pertumbuhan ekonomi mencerminkan perkembangan aktivitas perekonomian suatu daerah pada suatu waktu tertentu. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi menunjukkan semakin berkembangnya aktivitas perekonomian. Akan tetapi, capaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi hendaknya bukan sebatas pada capaian saja, akan tetapi dari tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini dapat mencerminkan pencapaian tingkat kesejahteraan masyarakat, seperti ketersediaan lapangan kerja, perkembangan indeks harga yang relatif terkontrol dan sebagainya.

Sejak terbentuknya Provinsi Sulawesi Barat, pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan yang cukup menggembirakan, namun masih selalu berfluktuasi setiap tahunnya hingga pada tahun 2016 sebesar 6,03 persen. Meskipun berfluktuasi dan terjadi penurunan seiring penurunan pertumbuhan ekonomi secara nasional, pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Barat masih lebih tinggi di atas pertumbuhan rata-rata nasional yaitu sebesar 5,02 persen pada tahun 2016. Masih tingginya pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat tersebut dari angka rata-rata nasional disebabkan oleh konsistensi pemerintah dalam memperbaiki iklim investasi di daerah serta semakin pesatnya kinerja pertumbuhan ekonomi di berbagai bidang seperti perkebunan, pertanian, pertambangan jasa industri dan lainnya. Secara

regional Pulau Sulawesi, Sulawesi Barat menempati pertumbuhan ekonomi terendah di bawah Sulawesi Utara sebesar 6,17 persen sedangkan yang tertinggi adalah Sulawesi Tengah dengan pertumbuhan 9,98 persen. Selanjutnya secara berurutan adalah Sulawesi Selatan 7,41 persen, Gorontalo 6,52 persen, Sulawesi Tenggara 6,51 persen.

**Grafik 2.13**  
**Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Barat**  
**Tahun 2010 – 2016**



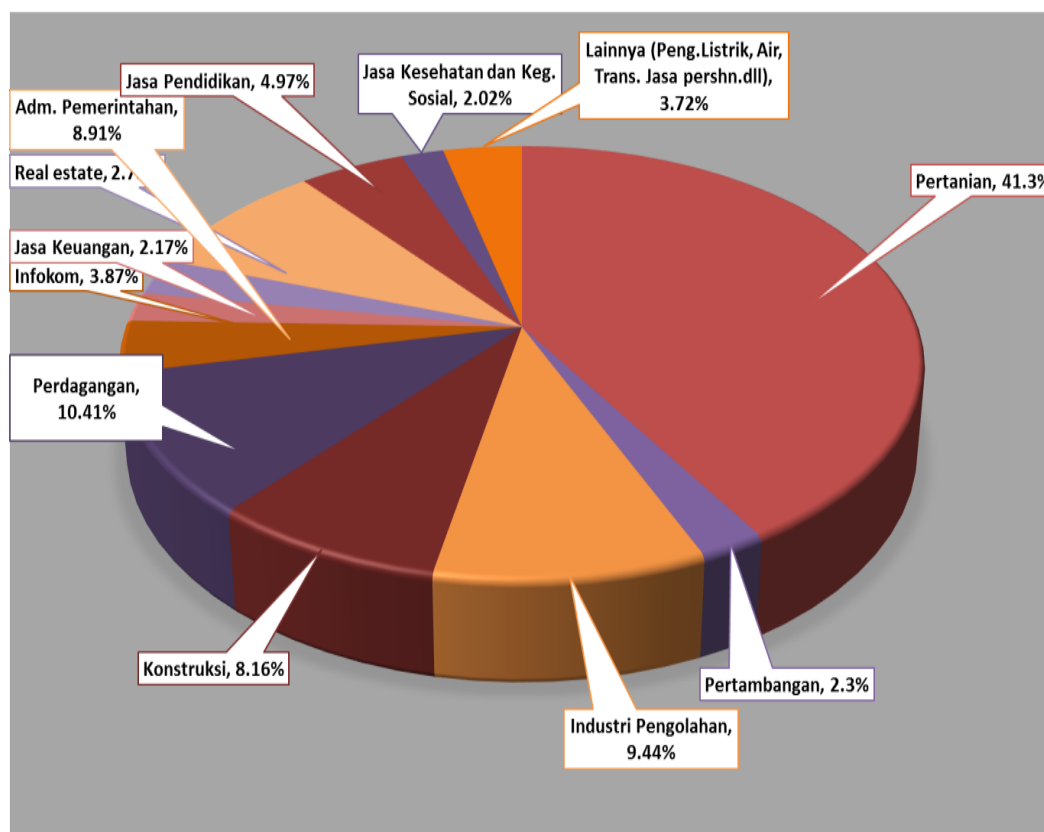
Sumber: BPS Sulawesi Barat, 2016

Pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Barat masih berfluktuasi namun masih tumbuh dengan positif. Kabupaten Mamuju Utara dengan tingkat pertumbuhan yang tertinggi dari seluruh kabupaten yang ada di Sulawesi Barat sebesar 8.88 persen (tahun 2015). Ketimpangan pertumbuhan antara kabupaten lainnya juga tergolong tinggi, angka pertumbuhan ekonomi Mamuju utara ditopang oleh komoditi perkebunan dan industri sawit yang ada di daerah tersebut. Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Barat pada tahun 2016, kategori pengadaan listrik dan gas merupakan lapangan usaha yang memiliki pertumbuhan tertinggi sebesar 19,66 persen.

Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat tidak lagi dapat mencapai di atas 10% dimana angka pertumbuhan tinggi dibutuhkan bagi daerah baru untuk terus berkembang dan berkontribusi lebih terhadap perekonomian nasional.

Perlambatan yang terjadi ditengarai oleh perekonomian yang hanya mengandalkan satu sektor saja dan tidak disertai proses peningkatan nilai tambah yang signifikan.

**Diagram 2.1**  
**Struktur Ekonomi Sulawesi Barat tahun 2016**



Sumber : Badan Pusat Statistik 2016

Struktur perekonomian Sulawesi Barat pada tahun 2016 didominasi oleh lapangan usaha utama yaitu pertanian, kehutanan dan perikanan yang sebesar 41,30 persen. meskipun jenis lapangan usaha ini masih mendominasi, semakin mengalami trend penurunan, data tahun 2013 sebesar 47,44 persen yang diakibatkan adanya peralihan jenis usaha di masyarakat yang beralih ke sektor lainnya seperti industri pengolahan, perdagangan, dll.

**Tabel 2.25**  
**Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Berdasarkan Lapangan Usaha**  
**Provinsi Sulawesi Barat 2011 s/d 2016**

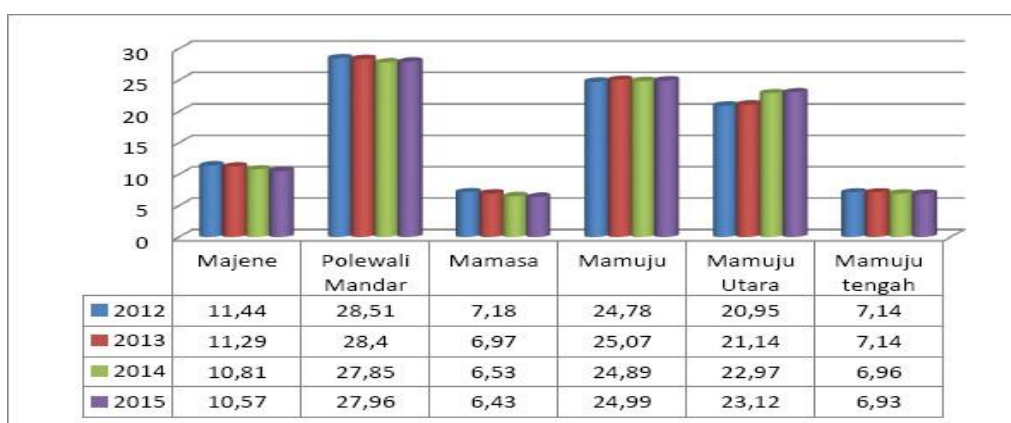
LAPANGAN USAHA	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8,40	7,32	5,71	5,93	5,74	3,69
Pertambangan dan Penggalian	12,13	11,77	10,60	8,04	8,06	10,05
Industri Pengolahan	14,90	6,79	7,09	35,68	11,15	-3,34
Pengadaan Listrik , Gas	12,85	17,28	13,15	13,21	8,29	19,66
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah da Daur Ulang	29,97	12,40	12,77	6,46	9,23	8,51
Konstruksi	9,96	7,74	10,09	8,11	8,84	10,85
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,08	7,71	8,15	7,10	5,22	4,58
Transportasi dan Pergudangan	8,10	5,39	6,37	7,39	7,20	5,01

Penyedia Akomodasi dan Makan Minum	15,84	7,48	7,61	6,53	4,69	8,13
Informasi dan Komunikasi	9,09	9,89	11,11	7,20	10,87	9,21
Jasa Keuangan	20,75	15,53	5,40	3,77	6,26	14,56
Real Estate	5,03	2,79	4,38	4,14	5,01	4,99
Jasa Perusahaan	14,76	6,86	7,16	3,01	7,63	4,62
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	19,05	20,37	7,15	6,16	12,02	16,42
Jasa Pendidikan	18,01	16,77	6,94	4,02	6,29	12,66
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	16,68	16,59	5,63	6,05	6,01	12,49
Jasa Lainnya	5,12	9,27	6,72	8,92	7,14	7,86
<b>PERTUMBUHAN PDRB</b>	<b>10,73</b>	<b>9,25</b>	<b>6,93</b>	<b>8,86</b>	<b>7,39</b>	<b>6,03</b>

Sumber : Sulbar Dalam Angka Berbagai seri (2011-2016), BPS

Sektor pertanian, merupakan sektor mata pencaharian utama penduduk Sulawesi Barat. Sektor ini hanya berkontribusi sebesar 3,69 persen pada tahun 2016, mengalami penurunan dari tahun 2015. Pertumbuhan sektor industri pengolahan mengalami kontraksi pada tahun 2016 sebesar 3,69 persen dari tahun 2015 sebesar 11,15 persen. Berdasarkan kabupaten, Polewali Mandar merupakan daerah dengan kontribusi tertinggi yaitu sebesar 27,96 persen dan Mamasa dengan kontribusi terendah sebesar 6,43 persen pada tahun 2015. Presentase kontribusi terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Barat dapat dilihat pada grafik berikut.

**Grafik 2.14**  
**Kontribusi PDRB Kabupaten terhadap total PDRB Tahun 2012-2015**



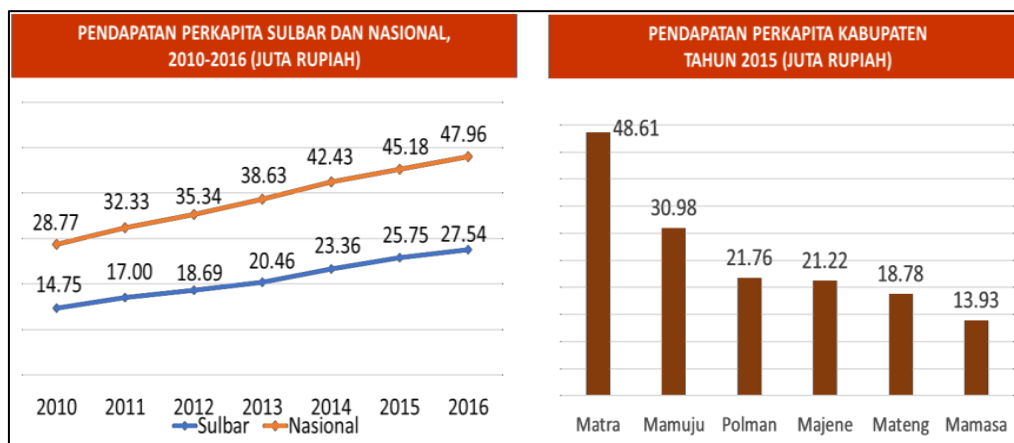
Sumber : BPS, Indikator Strategis Sulawesi Barat Tahun 2011-2015

Indikator kesejahteraan suatu daerah adalah angka pendapatan per kapita yang merupakan ukuran yang paling dapat diandalkan untuk melihat tingkat kesejahteraan suatu daerah. Hal ini disebabkan, karena pendapatan per kapita telah mencakup faktor jumlah penduduk sehingga secara langsung menunjukkan tingkat kemakmuran, sementara komponen pendapatan lainnya seperti GNP, GDP, dan lain sebagainya belum menunjukkan tingkat kemakmuran masyarakat secara langsung karena tidak memperhitungkan faktor jumlah penduduk.



Pendapatan perkapita Provinsi Sulawesi Barat dari tahun ketahun terus mengalami kenaikan walaupun masih berada di bawah rata-ratanasional. Pada tahun 2010 pendapatan perkapita Sulawesi Sulawesi Barat sebesar 14,75 juta meningkat sebesar 27,54 juta pada tahun 2016 dan masih jauh dibawah rata-rata nasional yang sebesar 47,96 persen. Rasio Pendapatan Perkapita antara Sulbar dan Nasional tahun 2010 sebesar 51,27 persen meningkat tahun 2016 sebesar 57,43 persen. Untuk wilayah kabupaten, terjadi Ketimpangan PDRB yang tinggi antar Kabupaten dimana Mamuju Utara sebesar 48,61 juta dan Mamasa hanya sebesar 13,93 juta rupiah. Tingginya pendapatan perkapita masyarakat namun tidak secara rill menunjukkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pendapatan perkapita Provinsi Sulawesi Barat disajikan pada Grafik berikut.

**Grafik 2.15**  
**Pendapatan Perkapita Provinsi Sulawesi Barat tahun 2010-2016**



Sumber : BPS Prov. Sulawesi Barat, 2016

## 5. Jumlah Unit Usaha Sektor Industri

Sektor industri Sulawesi Barat berkontribusi sebesar 10 persen terhadap pembentukan PDRB provinsi. Keberadaan industri di suatu daerah menjadi indikator kemajuan suatu daerah. Pembangunan sektor industri di Sulawesi Barat mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini terlihat dari banyaknya investor di bidang jasa, manufaktur, dan pertanian dan perkebunan untuk mengembangkan jenis usaha tersebut. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui usaha kecil rakyat, antara lain kualitas SDM bidang usaha industri kecil yang masih rendah, tingkat kesejahteraan masyarakat lokal yang rendah, modal usaha yang belum tersedia, serta strategi pemasaran terhadap jenis usaha belum tersedia. Peran pemerintah terhadap industri kecil adalah bagaimana menumbuhkan iklim usaha dengan menerapkan peraturan perundangan dan kebijakan yang meliputi aspek pendanaan, sarana prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang, serta dukungan kelembagaan. Jumlah Industri/Perusahaan dan Tenaga Kerja di Sulawesi Barat tahun 2010-2015 disajikan pada Tabel berikut.

**Tabel 2.26**  
**Jumlah Industri/Perusahaan dan Tenaga Kerja**  
**di Sulawesi Barat Tahun 2010-2015**

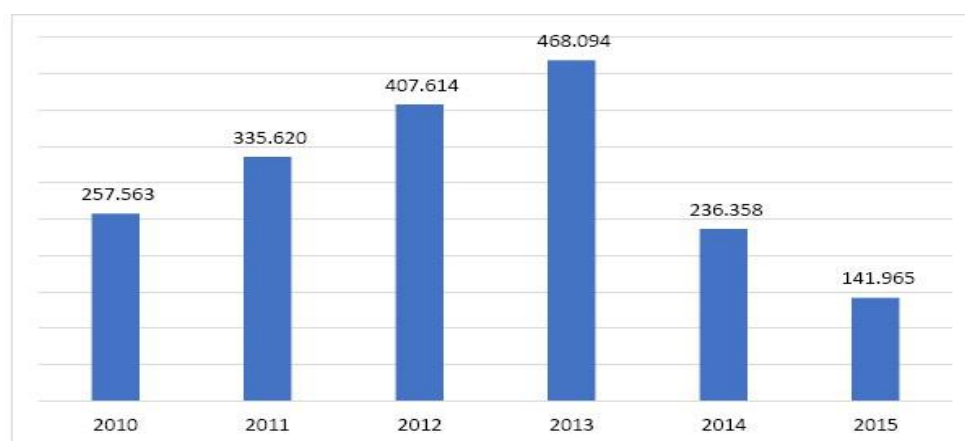
Kabupaten	Jumlah Perusahaan, Tenaga Kerja											
	Perusahaan					Tenaga Kerja						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Majene	5,006	138	138	210	210	265	11,218	998	998	492	492	2,033
Polewali Mandar	4,554	127	127	1,563	1,563	4,186	8,491	800	800	5,470	5,470	8,512
Mamasa	1,907	697	697	591	591	459	1,795	1,703	1,703	1,727	1,727	1,500
Mamuju	1,446	183	183	585	585	548	3,690	911	911	1,795	1,795	1,701
Mamuju Utara	215	380	380	415	415	474	1,733	4,624	4,624	1,171	1,171	2,386
Mamuju Tengah	-	-	-	-	273	273	-	-	-	-	508	508
Sulawesi Barat	13,128	1,525	1,525	3,364	3,364	6,205	26,927	9,036	9,036	10,655	10,655	16,640

Sumber: Badan Pusat Statistik Sulawesi Barat 2016

## 6. Ekspor Produk Industri

Kondisi geografis Sulawesi Barat cukup strategis sebagai jalur perdagangan baik nasional maupun internasional. Posisi tersebut berpotensi pengembangan kerja sama perdagangan antar pulau antara Sulawesi dan Kalimantan. Posisi Sulawesi Barat yang strategis karena berada tepat di tengah jalur lintas Sulawesi memiliki akses terhadap pelabuhan dan perdagangan internasional dan domestik. Sampai saat ini Sulawesi Barat belum memiliki pelabuhan ekspor, sehingga data ekspor yang saat ini bisa digunakan melalui BPS hanya merupakan catatan-catatan bongkar muat di pelabuhan dan di bandar udara. Pelabuhan-pelabuhan yang ada di Sulawesi Barat mencatat bahwa selama tahun 2010-2015 komoditi yang diekspor dari Sulawesi Barat diantaranya adalah produk hortikultura, produk perikanan, dan perkebunan. Crude Palm Oil (CPO) yang merupakan salah satu produk dari hasil pengolahan sawit.

**Grafik 2.16**  
**Perkembangan Ekspor CPO Melalui Pelabuhan**  
**di Sulawesi Barat Tahun 2010-2015**



Sumber: Badan Pusat Statistik Sulawesi Barat 2016

CPO Sulawesi Barat sudah diekspor ke luar negeri. Catatan tertinggi terjadi pada tahun 2013 nilai ekspor CPO mencapai 468.094 ton. Namun dua tahun terakhir jumlahnya menurun, hal ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya faktor cuaca dan faktor harga yang masih tidak stabil. Selain CPO, barang lain yang juga diangkut melalui pelabuhan antara lain biji sawit, karang dan jagung. Berat biji sawit yang dimuat melalui pelabuhan selama tahun 2015 sebanyak 82,2 ton. Informasi bongkar muat menunjukkan bahwa terjadi trend peningkatan yang sangat signifikan pada jumlah bongkar semen di Sulawesi

Barat. Artinya bahwa aktivitas pembangunan infrastruktur di Sulawesi Barat masih sangat agresif.

## B. Sumber Daya Industri

Provinsi Sulawesi Barat memiliki potensi sumber daya industri meliputi tenaga kerja sektor industri, sumber daya alam sebagai bahan baku, lembaga diklat dan litbang serta investasi industri. Perkembangan sumber daya industri tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

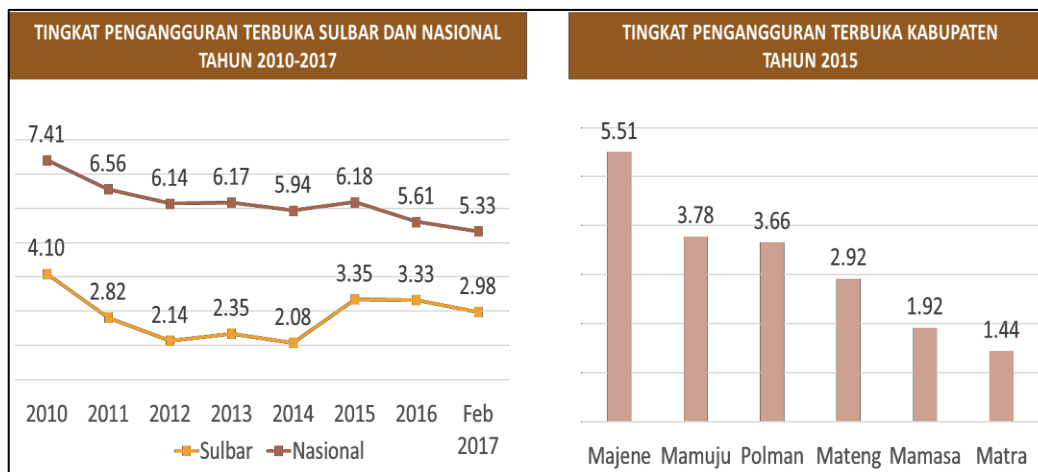
**Tabel 2.27**  
**Perkembangan Sumber Daya Industri Tahun 2016**

No.	Sumber Daya Manusia	Tahun 2016
1	Tenaga Kerja Sektor Industri (orang)	16.640
2	Pemanfaatan sumber daya alam terbarukan sebagai bahan baku:	
	a. Kakao (Ton)	83.566,48
	b. Kelapa dalam (Ton)	35.540,24
	c. Kopi (Ton)	537,41
	d. Gula aren (Ton)	412,16
	e. Murbei (Ton)	450.000
	f. Ikan (Ton)	929.700
3	Lembaga Pendidikan	
	a. Sekolah Menengah Kejuruan	
	- Jumlah (Unit Pendidikan)	129
	- Kapasitas (orang)	25235
4	Jumlah lembaga Pelatihan (unit pelatihan)	2
5	Jumlah lembaga LITBANG (unit litbang)	1
6	Jumlah Investasi Industri (Rp.Milyar) akumulatif hingga 2018	649.662

### 1. Sumber Daya Manusia Industri

Pembangunan ketenagakerjaan Sulawesi Barat ditinjau dari indikator tingkat penganggur terbukanya (TPT) menunjukkan angka yang rendah apabila dibandingkan dengan angka TPT nasional yakni sebesar 3,33 persensedangkan nasional 5,61 persen (Sakernas bulan Agustus 2016) sedangkan data BPS tahun 2016 menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan Sulawesi Barat mencapai 11,19 persen. Hal ini menunjukkan bahwa TPT yang rendah belum berdampak signifikan dalam penurunan tingkat kemiskinan.

**Grafik 2.17**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi dan Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat**



**Tabel 2.28**  
**Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama**  
**di Provinsi Sulawesi Barat tahun 2013-2017**

Keterangan	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Total Penduduk Berumur 15 tahun ke Atas</b>	833,239	856,255	877,444	897,964	908.506
<b>Bekerja</b>	523,960	595,797	595,905	624,182	622.641
<b>Pengangguran</b>	12,515	12,649	20,644	21,489	19.132
<b>Angkatan Kerja</b>	536,475	608,446	616,549	645,671	641.773
<b>Bukan Angkatan Kerja</b>	296,764	247,809	260,895	252,293	266.283
<b>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)</b>	2.33	2.08	3.35	3.33	2,98
<b>Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPA)</b>	66.82	71.06	70.27	71.9	70,68

Jumlah penduduk yang bekerja pada bulan Februari 2017 sebanyak 622,641 ribu orang, atau sebesar 97,02 persen dari angkatan kerja di Sulawesi Barat. Jika dibandingkan dengan tahun 2016, penduduk yang bekerja di Sulawesi Barat berkurang sebanyak 1,541 ribu orang atau turun 0,25 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada bulan Februari 2017 sebesar 2,98 persen, artinya dari sekitar 100 penduduk yang termasuk angkatan kerja, 3 orang diantaranya adalah pengangguran. Angka ini naik jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2016 dimana pada saat itu TPT-nya sebesar 3,33 persen. Dari sekitar 622,641 ribu orang yang bekerja, hanya sekitar 330,8 ribu (53,13 persen) diantaranya yang merupakan pekerja penuh dan sebanyak 291,8 ribu (46,87 persen) merupakan pekerja tidak penuh. Untuk melihat perkembangan tingkat pengangguran dari tahun ke tahun dapat diketahui dari gambar di bawah ini.

Komposisi penduduk yang bekerja berdasarkan lapangan usaha pada keadaan Februari 2017 masih menempatkan sektor pertanian sebagai sektor penyerap tenaga kerja terbesar di Sulawesi Barat. Hal ini tercermin dari banyaknya pekerja di sektor ini, yaitu sebanyak 299,0 ribu orang atau 48,02 persen dari total jumlah penduduk yang bekerja. Adapun urutan berikutnya adalah sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan yang mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 109,6 ribu orang atau sekitar 17,60 persen, kemudian diikuti sektor perdagangan yang menyerap tenaga kerja sebanyak 94,6 ribu orang atau sekitar 15,19 persen.

**Tabel 2.29**  
**Persentase dan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja**  
**menurut lapangan pekerjaan utama di sulawesi barat tahun 2016-2017**

Lapangan Pekerjaan Utama	Februari 2016	Agustus 2016	Februari 2017	Persentase Februari 2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pertanian	312 867	310 605	298 979	48,02
Industri	49 242	49 587	53 243	8,55
Konstruksi	52 908	53 971	32 307	5,19
Perdagangan	99 598	82 761	94 605	15,19
Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	92 343	92 170	109 570	17,60
Lainnya *)	17 150	35 088	33 937	5,45
<b>Total</b>	<b>624 108</b>	<b>624 182</b>	<b>622 641</b>	<b>100,00</b>

Sumber : BPS Sulawesi Barat, 2017

Berdasarkan tabel di atas february 2016 ke Pebruari 2017, semua sektor lapangan usaha yang dominan di Sulawesi Barat mengalami penurunan jumlah pekerja kecuali sektor industri dan perdagangan. Sektor-sektor tersebut adalah sektor pertanian berkurang sebanyak 13,9 ribu orang disusul sektor konstruksi turun sebanyak 20,6 ribu orang, dan sektor perdagangan sebanyak 5,0 ribu orang. Disi lain, penyerapan tenaga kerja pada sektor industri naik sebanyak 4 ribu orang dan sektor jasa meningkat sebanyak 17 ribu orang.

Perbandingan antara jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja diperoleh rasio penduduk yang bekerja. Rasio penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja di Provinsi Sulawesi Barat selama tahun 2013-2016 mengalami fluktuasi setiap tahun. Rasio penduduk yang bekerja pada tahun 2013 adalah 97,67 persen naik di tahun 2014 sebesar 97,92 dan kembali menurun pada tahun 2016 menjadi 96,67 persen. Dari angka tersebut, terdapat 96,67 persen dari angkatan kerja yang ada memperoleh kesempatan kerja, sedangkan sisanya 3,33 persen masih mencari kerja atau pengangguran.

**Tabel 2.30**  
**Rasio Penduduk yang bekerja**

No.	Keterangan	Satuan	Tahun			
			2013	2014	2015	2016
1.	Penduduk yang bekerja	Jiwa	523,960	595,797	595,905	624,182
2.	Angkatan Kerja	Jiwa	536,475	608,446	616,549	645,671
3.	Rasio Penduduk yang	%	97.67	97.92	96.65	96.67

Sumber : Badan Pusat Statistik

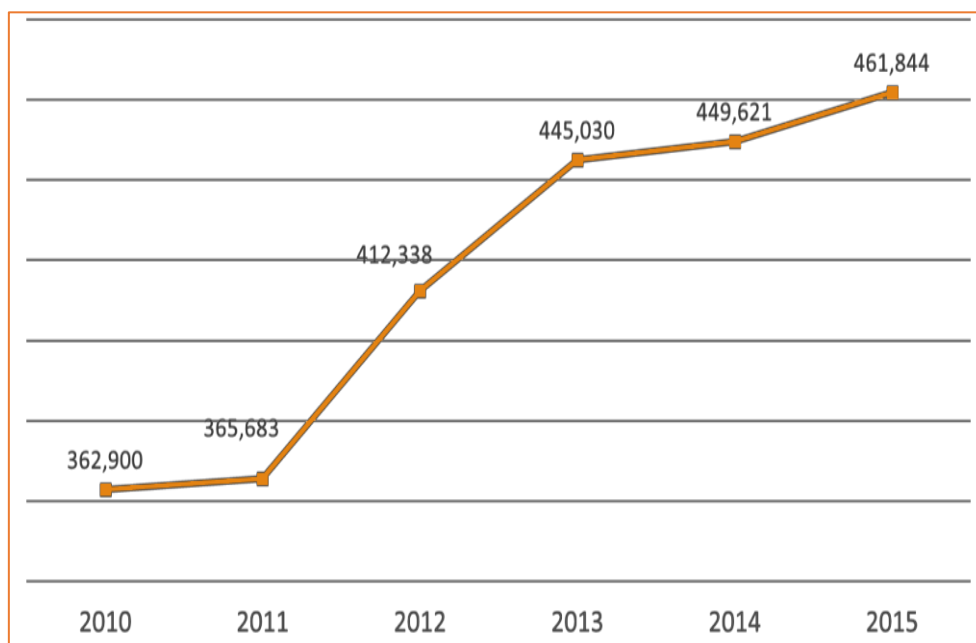
## 2. Sumber Daya Alam

Provinsi Sulawesi Barat berada pada iklim tropis, dimana kondisi ini menjadikan Sulawesi Barat sangat potensial terhadap pengembangan sektor pertanian. Sektor pertanian juga merupakan tulang punggung perekonomian di Sulawesi Barat. Sulawesi Barat merupakan daerah dengan basis aktivitas perekonomian pada sektor agraris. Hal ini terlihat dari nilai tambah dari aktivitas sektor pertanian yang sangat berkontribusi terhadap nilai PDRB Sulawesi Barat. Dominasi kategori pertanian selain dari penciptaan nilai tambah, juga nampak dari penyerapan tenaga kerja yang dominan pada kategori pertanian. Pada tahun 2016, tenaga kerja yang terserap di sektor pertanian mencapai 298,9 ribu orang atau sekitar 48 (empat puluh delapan) persen penduduk yang bekerja pada sektor pertanian. Olehnya itu, keberadaan kategori pertanian di Sulawesi Barat sebagai penggerak roda perekonomian harus senantiasa tetap mendapat perhatian dari pemerintah dan pihak-pihak terkait agar kedepannya kategori ini tidak sebatas pada penciptaan nilai tambah saja.

### a) Tanaman Pangan

Beberapa tahun terakhir produksi tanaman pangan Provinsi Sulawesi Barat terus meningkat. Produksi padi khususnya jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya terus mengalami peningkatan seperti yang terlihat pada grafik di bawah.

**Grafik 2.18**  
**Perkembangan Produksi Padi di Sulawesi Barat (Ton) Tahun 2010 – 2015**



Sumber : BPS Sulawesi Barat Dalam Angka Tahun 2015

Selain padi, perkembangan beberapa sub sektor tanaman pangan lainnya terus mengalami peningkatan setiap tahunnya namun ada juga yang mengalami fluktuasi pada beberapa komoditi seperti pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.31**  
**Produksi dan Pengembangan Subsektor Tanaman Pangan**  
**Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 – 2015**

Komoditas	Tahun (Ha)				
	2011	2012	2013	2014	2015
<b>1. Padi</b>					
Luas Panen (ha)	76.347	83.796	91.195	94.351	93.470
Produksi (ton)	365.683	412.338	445.030	449.621	461.844
Produktivitas (ku/ha)	47,90	49.21	48,8	47,7	49
<b>2. Jagung</b>					
Luas Panen (ha)	17.372	25.141	26.781	24.341	20.752
Produksi (ton)	82.995	122.554	128.327	110.665	100.811
Produktivitas (ku/ha)	47,78	48.75	47,9	45,5	49
<b>3. Ubi Kayu</b>					
Luas Panen (ha)	2.881	2.598	231	1.420	1.109
Produksi (ton)	46.368	48.265	13.439	29.902	24.984
Produktivitas (ku/ha)	165,46	185,78	583,0	210,6	225
<b>4. Ubi Jalar</b>					
Luas Panen (ha)	1.805	1.483	803	531	755
Produksi (ton)	20.407	16.589	11.486	5.880	8.749
Produktivitas (ku/ha)	113,06	111,86	143,0	110,7	116



<b>5. Kacang Tanah</b>					
Luas Panen (ha)	873	741	482	376	327
Produksi (ton)	1.230	1.001	590	502	329
Produktivitas (ku/ha)	14,09	13,51	12,2	13,4	10
<b>6. Kedelai</b>					
Luas Panen (ha)	1.764	2.021	942	3.410	4.106
Produksi (ton)	2.433	3.222	1.181	3.998	4.218
Produktivitas (ku/ha)	13,79	15,94	12,5	11,7	10

Tabel di atas, menunjukkan bahwa setiap tahunnya cakupan luas panen padi di Sulawesi Barat terus mengalami kenaikan, hal ini sejalan dengan produksi padi yang terus mengalami kenaikan terutama dari tahun 2011. Hal berbeda terjadi pada tahun 2015, dimana luas area panen padi pada tahun tersebut justru mengalami penurunan tetapi produksi padi di Sulawesi Barat tetap mengalami kenaikan. Salah satu faktor yang diharapkan menjadi pemicu hal tersebut adalah adanya Modernisasi di sektor pertanian, dimana produksi padi tidak lagi bergantung pada luasan lahan tetapi lebih pada penerapan teknologi terkini mulai dari pembibitan, pengolahan lahan, sampai pada proses panen. Modernisasi ini diharapkan dapat terus meningkatkan nilai tukar petani dan pada akhirnya akan berdampak pada naiknya tingkat kesejahteraan petani di Sulawesi Barat. Namun yang perlu diwaspadai adalah maraknya alih fungsi lahan terutama lahan pertanian ke lahan komoditas perkebunan seperti sawit, lahan untuk peruntukan perumahan ataupun peruntukan lainnya.

#### **b) Kelautan dan Perikanan**

Provinsi Sulawesi Barat berada di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP.713). Alur Pelayaran Internasional (ALKI-II), dengan luas Wilayah Laut ± 20.342 Km<sup>2</sup>. Secara geografis, Sulawesi Barat berbatasan langsung dengan Selat Makassar di sebelah barat. Potensi Perikanan Tangkap sebesar 929.700 ton/tahun dan hanya sekitar 10 persen saja yang telah dimanfaatkan. Potensi Lahan Perikanan Budidaya sebesar 74.300 Ha (Budidaya Laut 20.300 Ha, Budidaya Tambak 30.000 Ha dan Budidaya Air Tawar 24.000 Ha. Lahan Perikanan Budidaya Termanfaatkan Seluas 24.748,9 Ha terdiri dari 13.769 Ha budidaya tambak, 8.478 Ha Budidaya air tawar dan 2.501,5 Ha Budidaya laut (DKP Prov. Sulbar 2016). Kondisi ini memberi peluang yang cukup potensial untuk pengembangan sub sektor perikanan.

**Tabel 2.32**  
**Produksi Perikanan Budidaya**  
**Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015**

<b>Kabupaten</b>	<b>Laut</b>	<b>Tambak</b>	<b>Kolam</b>
Majene	-	376,06	61,77
Polewali mandar	12.360,00	12.559,00	508,00
Mamasa	-	-	411,42
Mamuju	35.064,00	2.188,19	15,40
Mamuju Utara	-	4.953,90	827,05
Mamuju Tengah	6.316,00	12.457,32	58,00
<b>Sulawesi Barat</b>	<b>53.740,00</b>	<b>32.529,51</b>	<b>1.881,64</b>

*Sumber: BPS Sulawesi Barat Dalam Angka 2016*

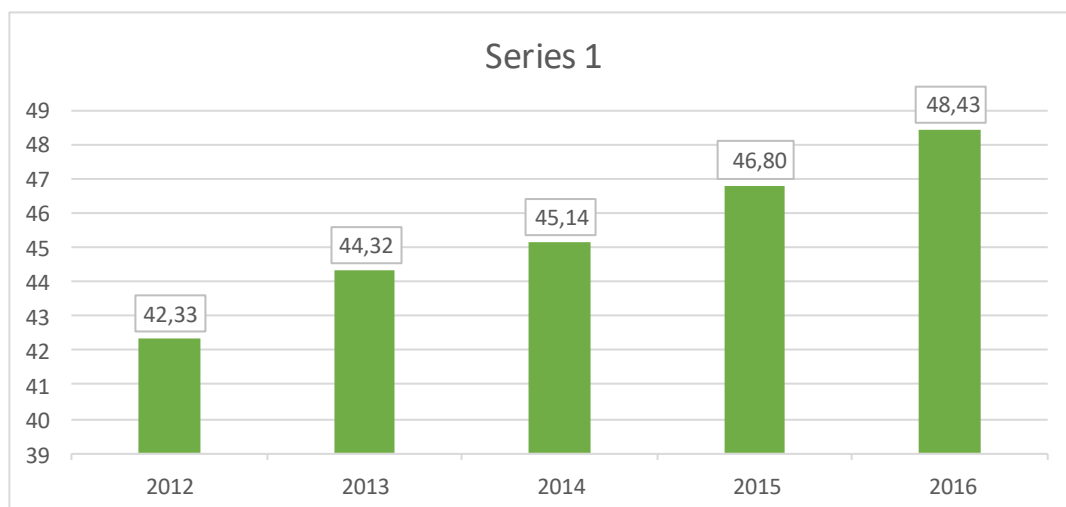
Pada tahun 2015, produksi perikanan budidaya Sulawesi Barat sebanyak 86 ribu ton. Produksi tersebut berasal dari hasil pembudidayaan di laut sekitar 53 ribu ton, air payau 32 ribu ton dan di air tawar 1 ribu ton. Produksi perikanan ini mengalami peningkatan pada semua jenis budidaya, peningkatan jumlah yang paling banyak terjadi pada perikanan laut yang produksinya mencapai 53 ribu ton.

**Tabel 2.33**  
**Capaian Bidang Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat**  
**Tahun 2013-2016**

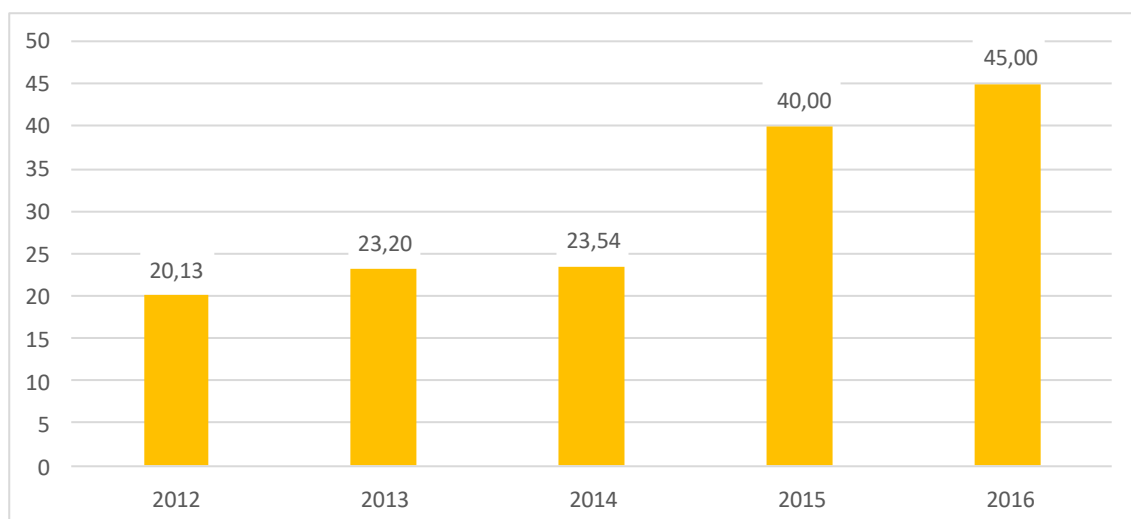
INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN 2013	CAPAIAN 2014	CAPAIAN 2015	CAPAIN 2016
Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	45,810.00	46,717.40	55,759.30	64,334.90
Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	55,067.81	67,548.70	89,729.96	121,650.40
Produksi Olahan (Ton)	1,230.00	1,325.00	3,338.00	4.320.00
Komoditi Ekspor Hasil Perikanan (Ton)	1,820.00	1,890.00	2,438.00	2.763.00
Konsumsi Ikan (Kg)	45.14	46.80	47.57	48,43
Jumlah UPI bersertifikat SKP (Unit)	1.00	1.00	1.00	1.00
Pendapatan Rata-rata Nelayan (Rp/bln/org)	1,150,000.0	1,100,000.0	1,300,000.0	1,390,000.
Pendapatan Rata-rata Pembudidaya Ikan (Rp/bln/org)	1,450,000.0	1,400,000.0	1,600,000.0	1,700,000.
Pendapatan Pengolahan dan Pemasaran Ikan (Rp/bln/org)	700,000.0	878,000.00	1,200,000.0	1,362,480.
Kawasan Konservasi (Ha)	147,307.00	147,307.00	147,307.00	154,00
Jumlah Pulau-pulau Kecil yang Dikelola (pulau)	2.00	3.00	2.00	3.00
Persentase Penyelesaian Tidak Pidana KP Secara Akuntabel dan Tepat Waktu (%)	16.60	16.60	16.60	16,60

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulbar

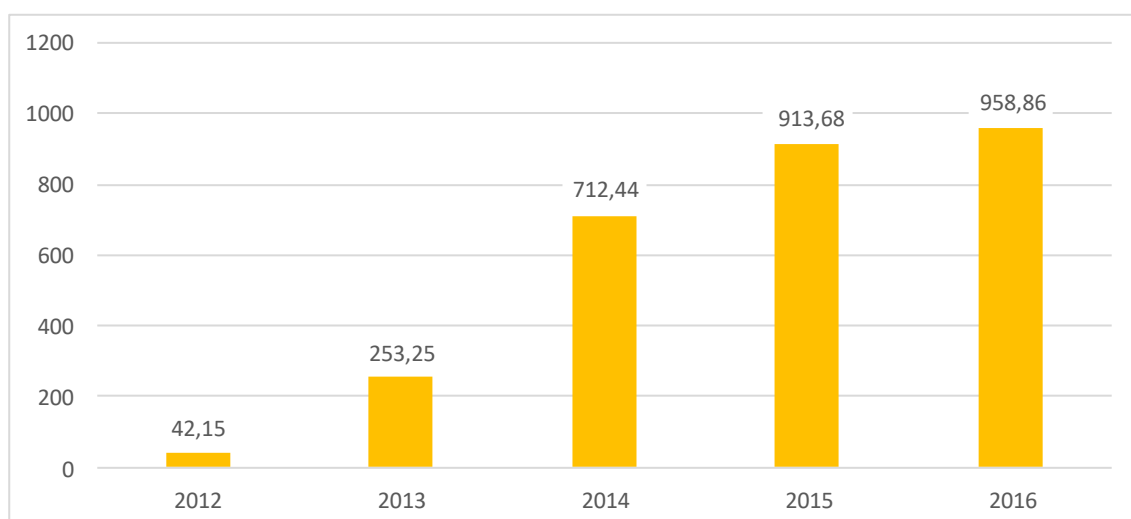
**Grafik 2.19**  
**Persentase Konsumsi Ikan (%) Prov. Sulawesi Barat**



**Grafik 2.20**  
**Persentase Cakupan Bina Kelompok Nelayan**



**Grafik 2.21**  
**Produksi Perikanan Kelompok Nelayan (Ton)**



**c) Peternakan**

Komoditas peternakan Sulawesi Barat cukup beragam mulai dari ternak kecil, besar, unggas dan lainnya. Ternak besar masih menjadi salah satu komoditas yang banyak diusahakan oleh petani di Sulawesi Barat. Sapi Potong adalah salah satu yang paling besar jumlahnya yakni mencapai 86.953 ekor, populasi kambing sekitar 225.766 ekor dan unggas yang umumnya adalah ayam kampung sekitar 4.696.726 ekor.

**Tabel 2.34**  
**Populasi dan Produksi Peternakan se-Provinsi Sulawesi Barat**  
**Tahun 2012 – 2015**

Komoditas	2012	2013	2014	2015
<b>1. Populasi</b>				
Populasi Sapi Potong	79.905	82.058	83.699	86.953
Populasi Sapi Perah	48	44	56	-

Populasi Kerbau	8.652	7.467	7.791	7.805
Populasi Kambing	217.925	219.755	223.962	225.766
Populasi Kuda	6.996	4.894	4.999	4.545
Populasi Babi	132.475	127.888	143.647	131.839
Populasi Ayam Ras	876.889	1.850.319	1.028.947	1.893.731
Populasi Ayam Kampung	5.188.649	4.599.946	5.304.177	4.696.726
Populasi Itik	956.319	429.981	433.889	466.512
<b>2. Produksi</b>				
Produksi Daging Sapi Potong	3.053.367	2.910.875	2.082.366	1.987.995
Produksi Daging Kerbau	150.361	145.699	156.710	134.923
Produksi Daging Kambing	467.522	273.187	279.586	271.543
Produksi Daging Kuda	-	-	-	300
Produksi Daging Babi	619.573	342.056	377.687	334.779
Produksi Daging Ayam Ras	795.294	1.678.148	933.204	1.758.254
Produksi Daging Ayam	5.593.364	4.958.742	5.717.904	4.951.006
Produksi Daging Itik	599.612	269.598	272.049	272.609

Sumber: BPS Sulawesi Barat Dalam Angka 2016

#### d) Perkebunan

Potensi lahan yang cukup baik sangat menunjang usaha perkebunan di Sulawesi Barat, terdapat beberapa komoditi perkebunan yang ada dan sangat potensial. Adapun produksi berbagai tanaman perkebunan seperti pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.35**  
**Produksi Tanaman Perkebunan Menurut Kabupaten dan Jenis Tanaman**  
**Di Provinsi Sulawesi Barat (ton), 2015**

KABUPATEN	KELAPA	KELAPA SAWIT	KOPI	LADA	KAKAO	AREN	SAGU
Majene	7.544,50	-	42,00	2,80	7.111,00	12,03	180,50
Polewali Mandar	18.756,50	-	69,38	45,00	31.969,46	386,74	1.918,31
Mamasa	0,71	-	406,65	-	8.383,00	12,00	327,00
Mamuju	3.422,27	30.017,80	19,25	19,80	20.824,13	1,39	786,00
Mamuju Utara	5.578,96	697.858,25	0,13	-	5.922,39	-	49,85
Mamuju Tengah	237,30	69.875,45	-	-	9.356,50	-	-
<b>Sulawesi Barat</b>	<b>35.540,24</b>	<b>797.751,50</b>	<b>537,41</b>	<b>67,60</b>	<b>83.566,48</b>	<b>412,16</b>	<b>3.261,66</b>

Sumber: BPS Sulawesi Barat Dalam Angka 2016

Salah satu komoditi potensial perkebunan yang menjadi andalan di Sulawesi Barat adalah Kakao. Pada tahun 2015, produksi kakao Sulawesi Barat mencapai 83.566,48 ton. Jika dilihat menurut kabupaten, nampak jika Kabupaten Polewali Mandar dan Mamuju menjadi sentra dari komoditi ini dengan produksi masing-masing mencapai 31.969,46 ton dan 20.824,13 ton. Produksi di kedua kabupaten ini hampir mencapai setengah produksi di Sulawesi Barat. Namun secara statistik terjadi penurunan produksi kakao dari tahun sebelumnya, sehingga dibutuhkan kebijakan dari pemerintah baik pusat

maupun daerah terutama pada pengembangan program kakao berkelanjutan yang telah digagas saat ini. Komoditi lain yang memiliki produksi yang cukup banyak adalah kelapa dalam. Pada tahun 2015, produksi kelapa dalam di Sulawesi Barat mencapai 35.540,24 ton. Persebaran kelapa dalam paling banyak terdapat di Kabupaten Polewali Mandar hingga 18.756,50 ton, kemudiandiikuti oleh Majene yang sebesar 7.544,50 ton. Kelapa dalam yang cukup potensial di Sulawesi Barat memberikan peluang untuk pengembangan industri hasil olahan kelapa dalam. Berbagai komoditi di atas tentunya ditunjang oleh luas lahan yang cukup luas dan pengembangannya masih dapat dilakukan. Luas lahan masing- masing komoditi tersebut seperti yang disajikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.36**  
**Luas Lahan Tanaman Perkebunan Menurut Kabupaten dan Jenis Tanaman Di Provinsi Sulawesi Barat (Ha), 2015**

KABUPATEN	KELAPA	KELAPA SAWIT	KOPI	LADA	KAKAO	AREN	SAGU
Majene	9.091,50	-	383,50	13,50	13.184,50	123,95	96,00
Polewali Mandar	23.198,49	-	383,78	420,43	49.167,77	867,32	977,21
Mamasa	31,00	-	5.647,00	-	15.499,00	239,00	183,00
Mamuju	5.825,50	3.790,00	40,00	71,50	41.076,05	85,00	393,00
Mamuju Utara	4.955,75	41.167,74	1,00	36,80	12.801,00	56,80	32,90
Mamuju Tengah	1.435,00	16.202,21	-	-	21.966,00	-	-
<b>Sulawesi Barat</b>	<b>44.537,24</b>	<b>61.159,95</b>	<b>6.455,28</b>	<b>542,23</b>	<b>153.694,32</b>	<b>1.372,07</b>	<b>1.682,11</b>

Sumber: BPS Sulawesi Barat Dalam Angka 2016

#### e) Hortikultura

Pengembangan tanaman hortikultura di Provinsi Sulawesi Barat memiliki potensi yang sangat besar, karena didukung kondisi alam di sebagian wilayah di Sulawesi Barat sangat cocok untuk pengembangannya. Dari tahun 2014 - 2015, beberapa komoditas tanaman hortikultura mengalami peningkatan produksi, sebagaimana pada tabel berikut.

**Tabel 2.37**  
**Komoditas Tanaman Sayuran di Sulawesi Barat tahun 2014-2015**

Kabupaten	TAHUN 2014		TAHUN 2015	
	Luas panen	Produksi	Luas Panen	Produksi
	(ha)	(ton)	(ha)	(ton)
<b>Majene:</b>				
Bawang Merah	45	420,70	25	158,70
Cabai	483	1.490,70	237	599,60
Kentang	-	-	-	-
Kubis	1	6,8	-	-

Petsai	27	83,70	19	39,00
<b>Polewali Mandar</b>				
Bawang Merah	40	107,10	47	275,40
Cabai	129	358,20	81	492,00
Kentang	-	-	1	0,20
Kubis	-	-	1	0,20
Petsai	77	192,7	72	255,50
<b>Mamasa</b>				
Bawang Merah	2	2,70	3	1,00
Cabai	22	85	13	48,80
Kentang	1	5,00	2	25,00
Kubis	9	10.40	8	3.30
Petsai	68	187.00	70	14.60
<b>Mamuju</b>				
Bawang Merah	7	7.60	10	2.00
Cabai	171	543	121	436.10
Kentang	-	-	-	-
Petsai	62	234.20	37	104.00
<b>Mamuju Utara</b>				
Bawang Merah	4	3.2	4	4.20
Cabai	109	412.70	52	236.70
Kentang	-	-	-	-
Kubis	-	-	-	-
Petsai	18	21.90	2	13.70
<b>Mamuju Tengah</b>				
Bawang Merah	1	0.4	1	0.20
Cabai	177	673.90	127	490.20
Kentang	-	-	-	-
Kubis	-	-	-	-
Petsai	56	81.10	50	88.30

Sumber: Sulawesi Barat Dalam Angka 2016

#### f) Kehutanan

Salah satu program unggulan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat adalah pengembangan komoditi Murbei untuk mendukung industri pengolahan tekstil dan tenun. Untuk mendukung program ini, dimana Gubernur Provinsi Sulawesi Barat telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 3201-01-02/222/SET, Tanggal 25 Januari 2019, Tentang Penggunaan Poduk Lokal, dimana isi Surat Edaran yang dimaksud sebagai berikut.

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Menteri Perindustrian N0.15/M-IND/PER/02/2011 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan untuk memberdayakan pelaku IKM Rotan di Provinsi Sulawesi Barat, maka diharapkan kepada Saudara untuk menghimbau para Kepala UPT dan Kepala Sekolah Lingkup OPD Saudara agar dapat menggunakan produk olahan lokal IKM Rotan yang ada di Sulawesi Barat dalam pengadaan Meubelair dan menggunakan Kain Sutera Lokal Sulawesi Barat satu hari sebagai pakaian seragam sekolah dalam enam haari sekolah.

Dengan adanya Surat Edaran Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, maka dipandang bahwa program pengembangan komoditi murbei untuk



mendukung pengembangan unggulan industri pengolahan tekstil dan tenun laik untuk dijalankan.

Lokasi pengembangan Murbei di Provinsi Sulawesi Barat yaitu Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Utara.

Adapun profil komoditi murbei yang dikelola Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana disajikan sebagai berikut.

**Tabel 2.38**  
**Kondisi Terkini Persuteraan Alam di Provinsi Sulawesi Barat, 2018**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>KONDISI SAAT INI</b>				<b>KET.</b>
<b>I PRODUKSI KAIN/SARUNG</b>						
1	LOKASI (DUSUN/DESA/KEC)	1. Renggeang/Renggeang/Limbooro				AKTIF
2	BERAPA KELOMPOK/ORANG	PEMINTAL	2	5	ORANG	AKTIF/TDK AKTIF
		PENENUN	40	50	ORANG	
3	JUMLAH ALAT	PINTAL	2	6	UNIT	BAIK/RUSAK
		TENUN	20	50	UNIT	
4	JUMLAH PRODUKSI /BLN	KAIN	60	150	MTR/KG	
		SARUNG	60	150	LEMBAR	
5	LAMA PROSES PRODUKSI	KAIN	7 s/d 10	5 s/d 7	HARI/MTR	
		SARUNG	7s/d10		HARI/LEMBAR	
6	KEBUTUHAN BENANG (KG/METER)	KAIN	15	35	Kg/Mtr	
		SARUNG	15	35	Kg/Mtr	
7	SUMBER BAHAN BAKU	KOKON	Lokal	lokal	(LOKAL/BELI)	
		BENANG	Lokal	lokal	(LOKAL/BELI)	
<b>II PRODUKSI KOKON</b>						
1	RUMAH ULAT BESAR	2			UNIT	belum ada
2	UKURAN	7 x 10			M2	
3	RUMAH ULAT KECIL	4			UNIT	baru 1 ada (KTH.Batu Mengnganga)
4	UKURAN	4 x 7			M2	
5	RAK PEMELIHARAAN	35			BUAH	tradisional
6	ALAT PENGOKONAN	6			BUAH	
7	JUMLAH KEBUTUHAN TELUR PER BULAN	36			BOKS	beli
8	SUMBER/ ASAL USUL TELUR	luar			LOKAL/LUAR	soppeng, wajo, balai sutera, impor
9	HARGA PEMBELIAN/ BOKS	130.000 s/d 550.000			luar	ulat impor dari cina (Rp.550.000)
10	JUMLAH TELUR/ BOKS	25			butir	
11	PRODUKSI KOKON/ BOKS	3 s/d 4			KG	normal
12	LAMA PROSES PRODUKSI KOKON	30			hari	DARI TELUR SD KOKON
13	JUMLAH PETANI / PEKERJA	36			ORANG	belum cukup untuk 2 KTH.
<b>III PAKAN ULAT</b>						
1	LUAS LAHAN TANAMAN PAKAN	100 Ha	PRODUKTIF	TDK PRODUKTIF		
2	DUSUN/DESA/KEC	1.	2	3	HA	KTH. Renggeang

		Renggeang/ Limboro				Mandiri
		2. Renggeang/1 imboro	2	2	HA	KTH. Batu Mengnganga
3	KEMAMPUAN PRODUKSI PAKAN		4500		KG/Ha	dalam 1 x panen per 3bulan
4	PERIODIK PANEN PAKAN	BERAPA KALI	3		KALI	DALAM SETAHUN
		BULAN APA SAJA	6 bulan pertama		3 bulan sekali	6 bulan dari penanaman pertama
5	JUMLAH TENAGA KERJA		24	10	ORANG	Penyedia pakan yg tersedia
<b>IV</b>	<b>TENAGA PENDAMPING</b>					
1	TENAGA PENYULUH		1	0	ORANG	2 lokasi
2	NON PENYULUH		0	0	ORANG	
<b>V</b>	<b>SARANA PRASARANA PENUNJANG</b>					
1	air PDAM		2		UNIT/BU AH	belum ada
2	Embung		2		UNIT/BU AH	belum ada
<b>TAMBAHKAN INFORMASI LAIN :</b>						
1	Desa Salarri ada lahan tidak produktif 5 Ha lahan Pemda Polman, ada KTH Bukit Gading tidak aktif, penenun ada bahan bakunya beli dari luar					
2	Desa Tammangale ada lahan tidak produktif 7 Ha, 3 Ha Eks Lahan Balai Persuteraan dan 4 Ha lahan masyarakat, KTH Sitangngar tangngaran tdk aktif. Penen bahan baku benang sutera beli dari luar					
<i>Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Polewali Mandar, 2018</i>						

### 3. Lembaga Pendidikan

Lembaga pendidikan di Provinsi Sulawesi Barat terdiri atas lembaga pendidikan formal, non formal dan informal. Lembaga pendidikan formal terdiri atas Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), sampai dengan Perguruan Tinggi (PT).

Lembaga pendidikan non formal terdiri atas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), Lembaga kursus dan lain sebagainya. Sedangkan untuk pendidikan non formal, terdiri atas pelatihan-pelatihan atau seminar dan juga pendidikan kilat (Diklat).

Terkait dengan bidang industri, pendidikan yang disyaratkan tidak menuntut adanya spesifikasi tertentu. Sehingga, tenaga kerja yang ada dari berbagai latar belakang pendidikan dapat terlibat di sektor industri. Akan tetapi, guna membantu berkembangnya industri, para pekerja (buruh) paling tidak disyaratkan berpendidikan minimal SD agar paham baca, tulis dan hitung. Berbeda halnya dengan tenaga administrasi yang mensyaratkan pendidikan yang lebih tinggi seperti SMA atau Diploma. Hal ini terkait dengan beban kerja yang lebih rumit. Selain itu, pendidikan yang tinggi juga akan mendorong terciptanya motivasi dalam pembangunan industri. Guna menambah keahlian, banyak sekali kegiatan yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun pihak swasta. Seperti pelatihan berkala yang sering diberikan oleh Dinas Pertanian melalui Balai Pelatihan Pertanian (BPP) dengan sasaran petani untuk menambah *hard skill* dan *soft skill*.

### 4. Lembaga Penelitian dan Pengembangan

Dalam rangka mendorong dan memajukan industri di Provinsi Sulawesi Barat, penggunaan teknologi mutlak dilakukan. Akan tetapi, teknologi yang ada

seringkali sulit diakses oleh masyarakat. Dengan demikian, keberadaan Provisi Sulawesi Barat, terdapat banyak LITBANG kerjasama yang memberikan advokasi dan fasilitasi, di antaranya adalah Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat (BPTP Sulbar), Balai Penelitian Serealia Maros, Universitas Hasanuddin, Unsulbar dan Unaman, Dinas terkait, pihak swasta dan lain sebagainya.

Balai Penelitian Serealia Maros misalnya, terus menerus melakukan pengembangan teknologi pertanian. Hal ini sangat sesuai dengan potensi yang ada di Provisi Sulawesi Barat. Dengan teknologi yang ada diharapkan produksi komoditas pertanian di Provisi Sulawesi Barat dapat meningkat dan juga pelaku usaha tani dapat melakukan usaha tani mereka secara efektif dan efisien. Dari Perguruan Tinggi seperti Universitas Hasanuddin dan Unsulbar dan Unasman, disiplin ilmu yang ditawarkan sangat beragam, sehingga inovasi dan teknologi yang terkait dengan industri akan jauh lebih beragam.

Disamping keberadaan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat (BPTP Sulbar) untuk memfasilitasi teknologi di sektor pertanian juga terdapat dua Balai Latihan Kerja yaitu terdapat di kabupaten Mamuju dan Majene untuk menangani masalah ketenagakerjaan di Provisi Sulawesi Barat.

Umumnya proses diseminasi inovasi dan teknologi dapat dilakukan melalui berbagai cara. Antara lain, ceramah, penyuluhan, seminar, pelatihan sampai dengan bimbingan teknis. Upaya diseminasi dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan pelaku industri. Keberadaan Litbang secara langsung telah membantu pelaku industri. Melalui teknologi baru, pelaku diharapkan dapat mengembangkan industri mereka.

## **5. Pembiayaan Industri**

Pembiayaan (*financing*) memiliki definisi sebagai pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun orang lain. Pembiayaan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank, lembaga kredit kepada nasabah. Sedangkan, menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan bahwa Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Terkait dengan pembiayaan sektor industri, pembiayaan merupakan hal yang mutlak dilakukan. Tidak semua pelaku industri memiliki kemandirian finansial sehingga mereka memerlukan bantuan pembiayaan dari berbagai lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan yang ada di Provisi Sulawesi Barat antara lain Bank, koperasi dan lembaga pengkreditan. Bank tersebut baik bank pembangunan daerah, bank negara, bank swasta sampai ke bank pengkreditan rakyat. Bank daerah seperti Bank Pembangunan Daerah (BPD) Provisi Sulsebar. Bank negara antara lain Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Mandiri.

Salah satu jenis pembiayaan bagi pelaku industri adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dari sekian banyak bank yang ada, bank yang memberi bantuan KUR cukup terbatas. KUR adalah skema kredit/pembiayaan modal kerja dan atau investasi yang khusus diperuntukkan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK) di bidang usaha produktif dan layak (*feasible*), namun mempunyai keterbatasan dalam pemenuhan persyaratan yang ditetapkan Perbankan (belum *bankable*) (TNPK, 2015). Bank-bank tersebut antara lain Bank Mandiri, Bank BRI, dan Bank BNI. Keunggulan KUR sendiri adalah kemudahan dalam pengajuan kredit dan juga rendahnya bunga. Hal ini tentu akan sangat

membantu pelaku industri di Provinsi Sulawesi Barat yang umumnya merupakan pelaku industri kecil dan menengah.

Jenis dan Jumlah Bank yang terdapat di Provinsi Sulawesi Barat disajikan pada Tabel berikut.

**Tabel 2.39.**  
**Jenis dan Jumlah Bank dan Cabangnya**  
**Tahun 2012 s.d 2016 Provinsi Sulawesi Barat**

NO	Sektor	Jumlah				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Bank Pemerintah Pusat	39	55	55	55	55
1.1.	Bank Pemerintah Daerah	7	7	7	7	8
1.2.	Bank Swasta Nasional	9	11	12	12	17
Jumlah		52	73	74	74	83

*Sumber : Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Barat, Tahun 2016*

Selain bank lembaga pembiayaan juga dapat berbentuk koperasi. Koperasi Aktif adalah koperasi yang dalam dua tahun terakhir mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) atau koperasi yang dalam tahun terakhir melakukan kegiatan usaha di Provinsi Sulawesi Barat.

Meningkatnya perekonomian suatu daerah tidak terlepas dari peran serta dari lembaga keuangan non bank seperti koperasi. Sesuai dengan prinsipnya bahwa koperasi sebagai salah satu soko guru perekonomian. Secara institusi, pada tahun 2015 jumlah koperasi di Sulawesi Barat sebanyak 1.036 unit. Terdiri dari 735 koperasi aktif dan 301 koperasi tidak aktif, seperti disajikan pada

Tabel berikut.

**Tabel 2.40.**  
**Jumlah Koperasi Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015**

Kabupaten	Keaktifan		
	Aktif	Tidak Aktif	Jumlah
1. Majene	90	20	110
2. Polewali Mandar	243	62	305
3. Mamasa	68	73	141
4. Mamuju	200	58	258
5. Mamuju Utara	76	50	126
6. Mamuju Tengah	58	38	96
<b>Sulawesi Barat</b>	<b>735</b>	<b>301</b>	<b>1 036</b>

*Sumber : Sulawesi Barat Dalam Angka, BPS 2016*

Jumlah Koperasi di Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2015 sebesar 1.036 unit yang terdiri dari 735 koperasi aktif dan 301 koperasi yang tidak aktif. Banyaknya koperasi yang tidak aktif selain disebabkan oleh rendahnya informasi, akses pasar dan pembiayaan, juga disebabkan Sumberdaya Manusia para pelaku koperasi yang masih sangat minim.

Semakin besar jumlah persentase ini maka akan semakin besar pelayanan penunjang yang dimiliki daerah dalam menggerakkan perekonomian melalui berbasis industri.

Lembaga keuangan mikro (LKM) adalah lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan (*deposits*), kredit (*loan*), pembayaran sebagai transaksi jasa (*payment service*) serta *money transfer* yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil. LKM memiliki fungsi sebagai lembaga yang memberikan berbagai jasa keuangan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil. Jumlah BPR/KLM di Provinsi Sulawesi Barat disajikan pada Tabel berikut.

**Tabel 2.41.**  
**Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah Besar Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat tahun 2016**

Usaha	Lapangan UMK	UMB	Jumlah Distribusi (%)	
			(4)	(5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Majene	19.757	108	19.865	14,35
Polewali Mandar	54.534	265	54.799	39,59
Mamasa	12.419	36	12.455	9,00
Mamuju	23.922	340	24.262	17,53
Mamuju Utara	16.799	86	16.885	12,20
Mamuju Tengah	10.099	54	10.153	7,33
<b>Jumlah</b>	<b>137.530</b>	<b>889</b>	<b>138.419</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Sulawesi Barat Dalam Angka, BPS 2016

**Tabel 2.42.**  
**Jumlah Tenaga Kerja Menurut Skala Usaha dan Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat tahun 2016**

Lapangan Usaha	UMK	UMB	Jumlah	Distribusi (%)
Majene	41.955	2.609	44.564	15,30
Polewali Mandar	94.580	4.432	99.012	33,99
Mamasa	27.263	835	28.098	9,65
Mamuju	52.734	6.202	58.936	20,23
Mamuju Utara	35.106	2.475	37.581	12,90
Mamuju Tengah	22.124	963	23.087	7,93
<b>Jumlah</b>	<b>273.762</b> <b>(93,99)</b>	<b>17.516</b> <b>(6,01)</b>	<b>291.278</b> <b>(100,00)</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Sulawesi Barat Dalam Angka, BPS 2016

**Tabel 2.43.**  
**Capain Indikator Pembangunan Bidang Koperasi dan UKM Di Provinsi Sulawesi Barat**

No.	URAIAN KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Presentase Koperasi Aktif (unit)	73,29%	73,27%	74,61%	75,22%	70,85%

2	Jumlah BPR/LKM	2 BPR/LKM	2 BPR/LKM	2 BPR/LKM	2 BPR/LKM	2 BPR/LKM
3	Jumlah UKM Non BPR/LKM	9745	13155	19995	29792	38150
4	Usaha Mikro dan Kecil (Keg.Expo)	10 UKM	10 UKM	8 UKM	8 UKM	5 UKM

Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Prov. Sulawesi Barat, 2016

Semakin banyak jumlah BPR/LKM akan menunjukkan semakin besar kapasitas pelayanan pendukung yang dimiliki daerah dalam mendukung pendanaan UKM melalui BPR/LKM pada sektor industri.

Selain lembaga pembiayaan di atas juga terdapat lembaga pembiayaan swasta lainnya, seperti; FIF, Adira Finance, WOM Finance, dan lain sebagainya. Keberadaan lembaga swasta juga dinilai membantu keberadaan industri. Pembiayaan yang mudah membuat pelaku industri dapat segera memperoleh dana segar untuk kelanjutan usaha. Harapannya, dengan adanya lembaga pembiayaan ini industri kecil dan menengah dapat tumbuh dengan pesat dan dapat memberi manfaat tidak hanya bagi pelaku usaha namun juga bagi masyarakat luas.

## 6. Investasi Industri

Kegiatan Penanaman Modal (investasi) adalah kegiatan yang turut berperan sangat penting dalam perekonomian, karena PMDN maupun PMA dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi wilayah baik daerah nasional bahkan regional. Dengan penanaman modal juga diharapkan meningkatkan lapangan pekerjaan dan mengentaskan kemiskinan.

Potensi sumber daya alam yang berada di Provinsi Sulawesi Barat menjadi daya tarik tersendiri bagi para investor untuk melakukan investasi di Sulawesi Barat. Pemerintah harus menangkap peluang tersebut salah satunya dengan membuka regulasi yang mudah dalam proses pengurusan investasi. Investor yang berminat terhadap pengembangan perekonomian Sulawesi Barat, tidak hanya berasal dari dalam negeri akan tetapi diminati juga oleh investor asing.

Pada kurun waktu 2012-2016, jumlah investor yang menanamkan modalnya di Provinsi Sulawesi Barat mengalami perkembangan yang berfluktuasi. Berdasarkan data dari BKPM & P2T Provinsi Sulawesi Barat, jumlah investor sebanyak 47 pada tahun 2012 mengalami kenaikan hingga pada tahun 2014 sebesar 516 investor dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2016 sebesar 50 investor, hal yang menarik bahwa pada tahun tersebut, jumlah investor yang kecil namun mempunyai nilai investasi yang sangat besar yaitu 10,52 triliun rupiah.

Keberadaan investor di Sulawesi Barat, turut memberi andil dalam perekonomian, hal ini nampak dari adanya penyerapan tenaga kerja yang cukup besar yaitu 38.574 orang dengan rasio daya serap tenaga kerja pada tahun 2016 sebesar 30 orang.

**Tabel 2.44.**  
**Kinerja Bidang Penanaman Modal**  
**di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012-2016**

Uraian	Realisasi Capaian Tahun Ke-				
	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN / PMA)	47 Investor	391 Investor	516 Investor	318 Investor	50 Investor
Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional PMDN/PMA	3.1 Trilyun	5 Trilyun	4.4 Trilyun	6.8 Trilyun	10.52 Trilyun
Jumlah Perizinan dan	0 Izin/Non Izin	0 Izin/Non Izin	0 Izin/Non Izin	0 Izin/Non Izin	0 Izin/Non Izin



Non Perizinan yang diterbitkan					
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	111	44	28	26	30
Lama Proses Perizinan (Rata- rata)	3 Hari	3 Hari	3 Hari	1 Hari	1 Hari
Jumlah PERDA yang Mendukung iklim Usaha	-	-	-	-	Sampai saat ini peraturan yang mendukung investasi khususnya terkait PTSP masih sebatas peraturan gubernur belum peraturan daerah

Sumber : BKPM & P2T Prov. Sulbar

**Tabel 2.45.**  
**Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri berdasarkan sektor usaha**  
**Triwulan I 2017**

NO	SEKTOR	JUMLAH PROYEK	REALISASI INVESTASI	PENYERAPAN TENAGA KERJA	
				INDONESIA	ASING
<b>I</b>	<b>Sektor Primer</b>				
1	Tanaman pangan & Perkebunan	69	26,260,499,565,032	32,813	8
2	Peternakan	10	1,180,000,000		
3	Kehutanan	13	276,573,644,407	24	
4	Perikanan	3	605,000,000		
5	Pertambangan	56	563,873,750,000	484	
<b>II</b>	<b>Sektor Sekunder</b>				
1	Industri Makanan	18	649,661,769,309	1605	
2	Industri tekstil	39	5,950,000,000	6	
3	Industri barang dari kulit	10	840,000,000		
4	Industri kayu	22	3,118,000,000	96	
5	Industri kertas & percetakan	9	1,140,000,000	12	
6	Industri kimia & farmasi	4	1,420,000,000		
7	Industri karet & plastik	5	570,000,000		
8	Industri mineral non logam	6	835,000,000		
9	Industri Logam, mesin & elektronika	23	3,240,000,000		
10	Industri instrument kedokteran, presisi, optik dan jam	20	18,424,317,000		
11	Industri kendaraan bermotor & alat transportasi lai	49	29,492,201,000		
12	Industri lainnya				
<b>III</b>	<b>Sektor Tersier</b>				
1	Listrik, gas dan air	14	22,853,000,000	84	
2	Konstruksi	271	2,049,664,128,799	2065	
3	Perdagangan	231	27.213.700.000	534	
4	Hotel & Restoran	25	59.344.000.000	206	

5	Transportasi & Gudang	7	3.925.000.000	9	
6	Perumahan & Kawasan Industri	17	221.352.268.463	596	
7	Jasa Lainnya	352	6.843.527.954.173	528	
Jumlah			37.045.303.298.183	39.062	8

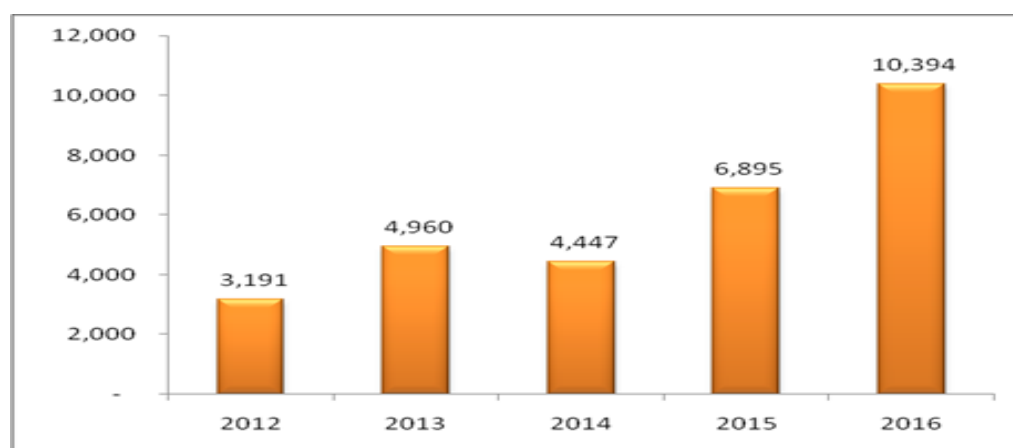
**Tabel 2.46**  
**Realisasi Penanaman Modal Asing berdasarkan Perusahaan dan Bidang Usaha Triwulan I 2017**

NO	NAMA PERUSAHAAN	NOMOR & TANGGAL PENDAFTARAN/I ZIN PRINSIP/IZIN USAHA	BIDANG USAHA	REALISASI INVESTASI	PENYERAPAN TENAGA KERJA	
					INDONESIA	ASING
<b>I Kab. Majene</b>						
1	PT. PEARL OIL	-	Tambang Minyak	55,900,000,000	44	
2	PT. PTT Exploration And Produksi Company Limited	-	Tambang Minyak	53,490,000,000	43	
<b>Jumlah I</b>				<b>109,390,000,000</b>	<b>87</b>	
<b>II Kab. Polewali Mandar</b>						
1	PT. Isco Polman Resources	18/PMA/2007 (Persetujuan Bupati No. 257/2009 Tanggal 21/1/2009	Perdagangan Besar Ekspor	33,082,144,251	81	
2	PT. Hong Thai Nusantara Energi	797/1/PMA/2008	Pertambangan & Perdagangan Ekspor	40,000,000,000	-	
3	PT. Hanman Siamaseyang	No.698/1/IP/PMA/2014 Tanggal 10 Maret 2014	Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup	3,250,000,000		
<b>Jumlah II</b>				<b>73,082,144,251</b>	<b>81</b>	<b>5</b>
<b>III Kab. Mamuju</b>						
1	PT. SBI Energy Indonesia	324/1/IP/1/PMA/212 Tanggal 22/03/2012	Pertambangan Batubara	38,001,700,530	200	10
2	PT. EZER Energy	96/1/IP/1/PMA/2012 Tanggal 21/02/2012	Jasa Pertambangan & Perdagangan Besar	20,000,000,000	15	-
3	PT. Rekind Daya Mamuju	No. 2032/1/IP-PB/PMA/2014 Tanggal 21/07/2014	Pembangkitan Tenaga Listrik	84,515,428,080	25	
4	PT. XL Axiata Tbk.	No. 7/1/IU-PP/PMA/2014 Tanggal 25 November 2014	Telekomunikasi Tanpa Kabel	34,633,760,882		
<b>Jumlah III</b>				<b>177,150,889,492</b>	<b>240</b>	<b>10</b>
<b>IV Kab. Mamuju Tengah</b>						
1	PT. Bio Energi Indoko Korea Selatan	875/1/PMA/2009 Tanggal 23/07/2009	Perusahaan HTI	24,950,000,000	98	
2	PT. Max Prima Coal	337/1/PMA/2008 Tanggal 11/3/2008	Pertambangan Umum serta Perdagangan Ekspor/Inpor	8,000,000,000	17	-
3	PT. Tattely TGS Novec Gematera	-	Tambang Minyak	56,460,000,000	-	-
4	PT. Stat Oil Asa Norwegia dan Pertamina	-	Tambang Minyak	44,370,000,000	-	-
5	PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri	287/1/IP/1/PMA/2011 Tanggal 10/05/2011	Perkebunan Kelapa Sawit	284,620,668,133	762	
<b>Jumlah III</b>				<b>418,400,668,133</b>	<b>877</b>	
<b>IV Mamuju Utara</b>						
1	PT. EXON MOBILE	-	Tambang Minyak	54,400,000,000	-	-
2	PT. MARATON INTERNATIONAL	-	Tambang Minyak	48,070,000,000	-	-
3	PT. CONNOCO	-	Tambang Minyak	51,860,000,000	-	-

	PHILIPS OIL					
4	PT. Tattely TGS Novec Gematera		Tambang Minyak	55,960,000,000	-	-
5	PT. Stat Oil Asa Norwegia dan Pertamina		Tambang Minyak	43,870,000,000	-	-
<b>Jumlah IV</b>				<b>254,160,000,000</b>	-	-
1	PT. Agro Lino Sejahtera	No.654/1/IP/PMA/2015 Tanggal 2 April 2015	Pertanian Tanaman untuk bahan minuman	13,285,000,000	4	
<b>Jumlah V</b>				<b>13.285.000.000</b>		
<b>Jumlah I II III IV dan V</b>				<b>1.045.468.701.876</b>	<b>1289</b>	<b>21</b>

Sumber : BKPMMD dan P2T Prov. Sulbar

## Grafik 2.22 Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)



Sumber : BKPMMD dan P2T Prov. Sulbar

### C. Sarana dan Prasarana

#### 1. Pengelolaan Lingkungan

Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat, menunjukkan bahwa semua sungai di Sulawesi Barat pada tahun 2016 ini mengalami pencemaran. Hal ini disebabkan oleh penurunan kualitas lingkungan, baik yang diakibatkan oleh peristiwa alam maupun oleh pencemaran dari aktivitas manusia. Sungai dengan tingkat pencemaran tertinggi berada di Sungai Mamasa, semua penduduk yang bermukim di sepanjang sungai membuang limbahnya ke sungai khususnya limbah cair rumah tangga ditambah lagi dengan hewan ternak peliharaan dari warga berada di sepanjang sungai, mengalirkan limbah cairnya langsung ke badan sungai. Proses ini secara tidak langsung mengakibatkan tingginya tingkat pencemaran dari parameter Fecal Coli dan Total Coli. Secara total pencemaran sungai yang ada Sulawesi Barat berada pada status ringan sebesar 69, status sedang sebanyak 34 serta status yang memenuhi sebesar 5 seperti yang tampak pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.47.**  
**Indeks Kualitas Air Sulawesi Barat**

No.	Nama Sungai	Σ Titik	Frekuensi	Status Pencemaran			
				Memenuhi	Ringan	Sedang	Berat
1	Lariang	6	5	0	5	15	0

2	Poelwali	6	5	0	18	12	0
3	Mamasa	7	5	4	25	6	0
4	Majene	1	1	0	1	0	0
5	Mamuju	3	2	1	10	1	0
<b>Jumlah</b>				<b>5</b>	<b>69</b>	<b>34</b>	<b>0</b>

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sulbar 2017

**Tabel 2.48**  
**Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Pekerjaan Umum**

No.	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk (%)	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Pekerjaan Umum				
		TAHUN	TAHUN	TAHUN	TAHUN	TAHUN
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk (%)	0,45	4,69	4,60	5,37	5,16
	- Jumlah daya tampung TPS	5.467,38	57.900,38	57.900,38	68.792,38	68.792,38
	- Jumlah Penduduk (Jiwa)	1.218.005	1.234.251	1.258.090	1.282.162	1.333.982

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sulbar 2017

**Tabel 2.49**  
**Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Lingkungan Hidup**

NO	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2012	2013	2014	2015	2016
1	Persentase penanganan sampah	39,63	39,05	39,27	40,26	39,23
2	Persentase penduduk berakses air minum	22,65	22,65	37,91	56,70	40,90
3	Persentase Luas pemukiman yang tertata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Persentase Pencemaran status mutu air	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
5	Persentase Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air	2,13	6,93	8,12	10,68	21,83
6	Persentase Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal	16,67	16,67	32,84	32,33	28,50
7	Persentase Tempat pembangunan sampah (TPS) per satuan penduduk (TPS)	17,46	16,61	17,16	17,16	17,52
8	Persentase Penegakan hukum lingkungan	100	100	75	100	75

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Prov.Sulbar

## 2. Lahan Industri

Berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2014, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014-2034, terdapat Kawasan industri merupakan kawasan yang potensial dimanfaatkan untuk kegiatan industri yang meliputi:

- kawasan industri skala besar berupa agroindustri pengolahan komoditi hasil-hasil pertanian, perkebunan dan peternakan direncanakan

- pengembangannya di Belang belang, dan industri pengolahan hasil tambang batubara dan besi di Kambunong;
- b. kawasan industri skala menengah berupa agroindustri pengolahan hasil-hasil perkebunan kakao direncanakan pengembangannya di Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamuju Tengah, dan Kabupaten Mamuju;
  - c. kawasan aglomerasi industri skala menengah pengolahan kelapa sawit di Kabupaten Mamuju Utara, Kabupaten Mamuju Tengah, dan Kabupaten Mamuju; dan
  - d. kawasan industri perikanan berupa pengolahan komoditas hasil perikanan direncanakan pengembangannya di Palipi Kabupaten Majene dan Kabupaten Polewali Mandar.

Dalam rangka mendorong dan mendukung sector industri, maka pemerintah saat ini telah berupaya untuk melakukan pengembangan Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus yang berada di Belang-Belang, Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju seiring dengan RTRWP Sulawesi Barat 2014-2034 yang telah menentukan Matabe sebagai kawasan strategis pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Posisi strategis Matabe di selat Makassar sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), serta penentuan kawasan Belangbelang sebagai kawasan terpadu pelabuhan, Bandar udara, stasiun KA barang, industri, perdagangan, pergudangan dan petikemas. Inti sentra pertumbuhan ekonomi Matabe nantinya adalah Eco-Industrial-Park (EIP) dan Special Economic Zone (SEZ/KEK) Belang-Belang.

### **3. Fasilitas Jaringan Energi dan Kelistrikan**

Fasilitas dan energi merupakan hal yang sangat krusial dalam sektor industri. Produksi akan sulit dilakukan apabila tidak terdapat fasilitas dan energi yang memadai. Oleh sebab itu, keberadaan fasilitas dan energi memiliki posisi penting. Apabila tidak dipikirkan secara matang maka hal ini akan berpotensi menjadi masalah yang menghalangi pengembangan sektor industri. Rencana pengembangan sistem jaringan energi di Provinsi Sulawesi Barat terdiri atas:

- a. Pembangkit listrik;
- b. Jaringan transmisi tenaga listrik;
- c. Depo Bahan Bakar Minyak (BBM); dan d. Jaringan pipa gas.

Pembangkit listrik ini meliputi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Mambi, PLTD Babana, PLTD Topoyo, PLTD Karossa, PLTD Baras, PLTD Pasangkayu, PLTD Sarjo, Pembangkit Listrik Tenaga Hidrogen (PLTH) Mamuju, Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Karama, Pembangkit Listrik Tenaga Geotermal (PLTG) Mamasa dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Bonehau, PLTU Mamuju, Pembangkit Listrik Tenaga Mini/Mikro Hidro (PLTMH) menyebar di wilayah Sulawesi Barat.

Jaringan transmisi tenaga listrik tegangan tinggi ini meliputi; wilayah Pinrang – Polewali Mandar, Polewali Mandar – Majene, Majene – Kota Mamuju, Kota Mamuju – Topoyo, Topoyo – Pasangkayu, Pasangkayu – Palu; tegangan menengah meliputi: Polewali Mandar – Mamasa. Depo BBM ini meliputi Depo BBM Kabupaten Mamuju, Depo BBM Kabupaten Majene.

Depo Bahan Bakar Gas (BBG) dan Jaringan pipa gas pada kawasan potensi ekonomi Mamuju, Majene, Polewali Mandar dan Mamuju Utara.

Rincian rencana pengembangan sistem jaringan energi baru terbarukan sebagaimana disajikan pada Tabel berikut.

**Tabel 2.50**  
**Potensi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)**

No	Nama Sungai	Lokasi Desa/Kecamatan/Kabupaten	Kapasitas (MW)
1	Kalukku	Tarailu/Kalukku/Mamuju	110
2	Mandar	Masuni/Tubbi/ Polman	81
3	Masupu	Masupu/Bulo/ Polman	78
	<b>Total</b>		<b>269</b>

**Tabel 2.51**  
**Potensi Pembangkit Listrik Tenaga Mini (PLTM)**

No	Nama Sungai	Desa/KEC/Kabupaten	Daya (MW)
1	Budong-budong	Budong-Budong/Mateng	6.40
2	Kalumpang	Kalumpang/Kalumpang/Mamuju	10.90
3	Karataun	Karataun/Kalumpang/Mamuju	10
4	Bulo	Kondobulo/Kalumpang/Mamuju	8
5	Pekkaru/Siraun	Siraun/Kalumpang/Mamuju	7
6	Mandar	Taramanu/Tutar/Polman	12.80
7	Mayamba	Manyamba/Sendana/Majene	3.70
8	Balla	Balla/Balla/Mamasa	1.0
9	Banea	Banea/Sumarorong/Mamasa	3.0
10	Pana	Pana/Pana/Mamasa	3.5
11	Tabang	Tabang/TabangMamasa	3.5
12	Bumal	Bumal/Bumal/Mamasa	3.4
13	Arambi	Arambi/Aralle/Mamasa	9.15
14	UluMambi	UluMambi/Bambang/Mamasa	3.75
15	Bambang	Bambang/Bambang/Mamasa	5,2
16	Mahalaan	Mahalaan/Mahalaan/Mamasa	5.2
17	Kalukku	Tarailu/Kalukku/Mamuju	1.0
18	Kali Mamuju	Mamuju/Mamuju	4.0
19	Taparia	Takandean/Tapalang/Mamuju	3.0
20	Salu Muni	Leling/Toomo/Mamuju	1.0
21	Kondo bulo	Kondobulo/Kalumpang/Mamuju	2.0
22	Lembang Matama	LembangMatama/Tuura/Polman	2.0
<b>Jumlah Total Pontensi</b>			<b>104.3 MW</b>



**Tabel 2.52**  
**Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) & Pembangkit Listrik Tenaga Mini (PLTM)**

<b>NAMA PEMBANGKIT</b>	<b>LOKASI: DESA/KEC/KAB</b>	<b>DAYA (MW)</b>	<b>KETERANGAN</b>
PLTA Tumbuan Mamuju	Karama/Kalumpang/Mamuju	450	PT. KALLA GROUP Tahap konstruksi : Pekerjaan akses jalan : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Target Pengerjaan jalan 110 Km (Jalan Rabat Beton) mulai 2013</li> <li>• Pembongkaran jalan 34 km jalan poros Kalumpang – Tambing-Tambing Pelebaran jalan 35 km Salubatu–Kalumpang</li> <li>• Pembuatan 14 jembatan 2017</li> </ul> Perizinan : <ul style="list-style-type: none"> <li>• IPPKHL (Kementerian LHK) 2012</li> <li>• Izin lingkungan 2012</li> <li>• IUKU (Gubernur Sulbar) 2012 Masuk RUPTL 2016.</li> </ul> <i>Completion Off Date 2024.</i>
PLTU Mamuju	Belang-Belang/Kalukku/Mamuju	2 x 25	PT.Rekind Daya Energi Tahap Konstruksi sbb: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Project Initiation: Feb 2013-Mei 2014</li> <li>• Project Execution: Ags 2014–Jl 2017</li> <li>• Power Plant Operation: Des 2017</li> </ul> Hingga bulan Januari 2017 progres pembangunan PLTU Mamuju mencapai <b>82,77%</b>
PLTA Pokko	Mesakada/Messawa	110	PT.PLN (Persero) Tahap Pra Study
PLTA Lariang	Ompi/Lariang/ Matra	129	PT. Tinauka Tahap Survey
PLTA B.Budong	B.Budong/Mateng	125	PT.Pembangkit Tirta Nusa (I Prinsip)
PLTA Mapilli	Mapilli/Polman	130	PT. Energi Tirta Bumi (Izin Prinsip)
PLTM Salu Aralle	Salu Aralle/Mamasa	7,1	PT. Sulbar Energi Aralle (I Prinsip)
PLTM Ulumanda	Ulumanda/Mambi	9.15	PT. Sulbar Energi (Izin Prinsip)
PLTM Salu Mambi	Masoso/Mambi	5.2	PT. Sulbar Energi Mambi (Izin prinsi)
PLTM Salu Aralle	Buntu Malaka/ Aralle	3.4	PT. Sulbar Energi Aralle (I Prinsip)
PLTM S. Mahalaan	S. Mahalaan/Aralle	5.25	PT.Sulbar Energi Mahalaan (I Prinsip)

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah membangun Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di berbagai daerah terpencil di Kabupaten sebanyak 272 Unit. Dan dibuktikan dengan ditetapkannya Provinsi Sulawesi Barat sebagai Daerah Penerima Penghargaan Energi Prabawa 2012 dari Pemerintah Pusat melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia pada tanggal 12 Oktober 2012. Penghargaan tersebut karena Pemerintah Sulawesi Barat berjasa luar biasa mengimplementasikan peran, tanggung jawab dan wewenang utama Pemerintah Provinsi sebagai penggerak perubahan dalam mewujudkan kebijakan konservasi dan diversifikasi energi Nasional melalui pembangunan infrastruktur Desa Mandiri Energi dan PLTMH dengan capaian ratio elektrifikasi 80% dan desa berlistrik 72% yang berdampak

besar terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan rincian disajikan pada Tabel berikut.

**Tabel 2.53**  
**Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)**

Kabupaten	PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro)					
	APBN/ APBD			Swadaya/PNPM/PPK		
	Unit	Daya (KW)	(KK)	Unit	Daya (KW)	(KK)
Mamasa	13	179.2	1281	228	2.915.5	17.951
Mamuju	6	118	642	12	159.6	2463
Mamuju Utara	1	6.6	100	-	-	-
Polewali Mandar	2	75	350	11	268	1.403
Majene	1	30	100	4	64.5	354
<b>JUMLAH</b>	<b>22</b>	<b>400.8</b>	<b>2428</b>	<b>255</b>	<b>3.407.6</b>	<b>22.171</b>

Sulawesi Barat memiliki dua musim yaitu kemarau dan penghujan. Musim kemarau terjadi pada bulan Juni sampai dengan September dan musim penghujan pada bulan November sampai Maret, arus angin bertiup dari Australia dan Desember sampai dengan Maret, sehingga memungkinkan mengembangkan **Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)**

**Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)**

**Tabel 2.54**

**Rata - rata Penyinaran Matahari Kawasan Timur Indonesia**

Bulan	Rata-rata Penyinaran Matahari	Bulan	Rata-rata Penyinaran Matahari
Januari	5,2	Juli	5,3
Februari	5,6	Agustus	6,4
Maret	5,3	September	7,0
April	6,1	Oktober	6,7
Mei	6,4	November	6,0
Juni	5,3	Desember	5,0

Rata - rata Penyinaran Matahari Kawasan Timur Indonesia Dapat Menghasilkan daya Sebesar 5,86 Kw/M<sup>2</sup>. Hari

Kecepatan Angin hampir di seluruh kabupaten di Sulawesi Barat umumnya merata setiap bulannya, yaitu berkisar 3 hingga 8 km/jam sangat potensial untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) dengan daya 0,5 MW sampai dengan 1 MW, sebagaimana disajikan pada table berikut.

**Tabel 2.55**  
**Kecepatan Angin hampir di seluruh kabupaten di Sulawesi Barat**

<b>Lokasi Desa/Kec/Kab.</b>	<b>Koordinat</b>	<b>Rata-Rata Km/Jam</b>
Karema/Simboro/Mamuju	2° 40'54,3" & 118 ° 52'17,7"	10.53
Sumare/Simboro/Mamuju	2 ° 40'2,4" & 118 ° 51'1,9"	19.89
Tarailu/Sampaga/Mamuju	2 ° 18'10,4" & 119 ° 10'6,9"	11.95
Tabolang/Topoyo/Mateng	2 ° 1'18,5" & 119 ° 19'41,7"	13.96
Karossa/Mamuju Tengah	1 ° 50'39,4" & 119 ° 24'3,6"	9.42
Salukali/Baras/Mamuju Utara	1 ° 34'12,8" & 119 ° 19'33,9"	9.98
Pasangkayu/Mamuju Utara	1 ° 21'30,0" & 119 ° 10'30,0"	8.47
Tube/Majene	3 ° 5'27,5" & 118 ° 49'41,8"	13.29
Banggae/Majene	3 ° 32'43,0" & 118 ° 59'52,3"	15.39
Tinambung/Polewali Mandar	3 ° 30'51,5" & 119 ° 1'49,7"	13.54
Polewali/Polewali Mandar	3 ° 26'19,9" & 119 ° 20'57,9"	10.97

#### **4. Fasilitas Jaringan Telekomunikasi**

Keberlangsungan kawasan industri sangat bergantung dengan jaringan telekomunikasi yang baik dan terintegrasi. Fungsi dari jaringan telekomunikasi adalah untuk memperlancar proses komunikasi antar sektor yang terkait. Jaringan telekomunikasi di Provinsi Sulawesi Barat telah tersedia telepon, telepon selular, telegram, ORARI, televisi, radio, jaringan internet dan kantor pos. Adapun program pembangunan prasarana telekomunikasi di Provinsi Sulawesi Barat, antara lain :

Rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi di Provinsi Sulawesi Barat meliputi:

- a. Jaringan mikro digital meliputi batas Provinsi Sulawesi Selatan - Polewali, Ibukota Kabupaten Polewali Mandar – Wonomulyo – Majene, ibukota Kabupaten Majene – Mamuju, ibukota Kabupaten Mamuju - Belang-Belang, Ibukota Kabupaten Mamuju Tengah– Topoyo - Pasangkayu, Ibukota Kabupaten Mamuju Utara – perbatasan Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah.
- b. Sistem Stasiun Telepon Otomat (STO) meliputi: STO Mamuju, STO Polewali, STO Wonomulyo, STO Majene, STO Mamasa, STO Tobadak dan STO Pasangkayu.
- c. Interkoneksi antar pusat-pusat kegiatan baik di dalam wilayah internal provinsi maupun dengan wilayah luar direncanakan menggunakan sistem jaringan komunikasi dan informasi baik menggunakan sistem konvensional dengan kabel maupun sistem nir-kabel.

untuk mendukung sistem interkoneksi tersebut diarahkan rencana pengembangan jaringan kabel telepon mengikuti pola jalan, sedangkan sistem telekomunikasi nir-kabel didukung dengan menara- menara penerima dan pemancar yang ditempatkan pada bukit-bukit di dekat ibukota provinsi dan di dekat ibukota kabupaten/kecamatan yang diarahkan penggunaan menara secara bersama.

Rincian rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi disajikan pada Tabel berikut.

**Tabel 2.56**  
**Rincian Panjang Jaringan Mikro Digital**

No.	Lokasi
1.	Batas Provinsi Sulawesi Selatan - Polewali (Kabupaten Polewali
2.	Mandar)
3.	Polewali - Wonomulyo (Kabupaten Polewali Mandar)
4.	Wonomulyo - Majene (Kabupaten Majene)
5.	Majene - Mamuju, (Kabupaten Mamuju), Mamuju - Belang-Belang (Kabupaten Mamuju)
6.	Belangbelang - Tobadak (Kabupaten Mamuju Tengah)
7.	Tobadak - Pasangkayu (Kabupaten Mamuju Utara)
8.	Pasangkayu (Kabupaten Mamuju Utara) - perbatasan Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah.

**Tabel 2.57**  
**Rincian Rencana Pengembangan Stasiun Telepon Otomatis**

No.	Nama STO.	Nama Kabupaten/Kota	Kapasitas (SST.)
1.	Mamuju	Mamuju	12.000
		Polewali Mandar	8.400
2.	Polewali Majene Mamasa Tobadak Pasangkayu	Majene	5.000
		Mamasa	3.000
		Mamuju Tengah	5.000
		Mamuju Utara	5.000

## 5. Fasilitas Jaringan Sumber Daya Air

Rencana pengembangan sistem jaringan pengelolaan sumberdaya air (SDA) di Provinsi Sulawesi Barat meliputi :

- Wilayah Sungai (WS);
- Bendung;
- Daerah irigasi (DI);
- Pantai; dan
- Instalasi pengolahan air bersih penyediaan dan pengelolaan air baku, baik air permukaan maupun air tanah;

Pengembangan sistem jaringan pengelolaan SDA pada Wilayah Sungai (WS), terdiri atas:

- WS Kaluku - Karama sebagai WS lintas Provinsi Sulawesi Barat - Sulawesi Selatan meliputi: DAS Saddang, DAS Karama, DAS Malunda, DAS Mandar, DAS Babalalang, dan DAS Mapilli;
- WS Saddang meliputi DAS Saddang, DAS Mamasa, DAS Galanggang, dan DAS Bone-Bone;
- WS Karama meliputi DAS Karama, DAS Budong Budong, DAS Karossa, dan DAS Mamuju.
- WS Palu - melintasi 3 provinsi, yaitu Sulawesi Tengah - Sulawesi Selatan - Sulawesi Barat. WS Palu - Lariang meliputi : DAS Palu, DAS Lariang, DAS Minti, DAS Rio, DAS Letawa, DAS Bambaيرا, dan DAS Surumana.

Pengembangan sistem jaringan pengelolaan SDA pada Bendung, terdiri atas: Sekka-Sekka di Kabupaten Polewali Mandar dan Tommo di Kabupaten Mamuju.

Pengembangan dan Pengelolaan Daerah Irigasi (DI) meliputi:

- a. DI kewenangan pusat meliputi: DI Maloso – Sekkasekka (Kabupaten Polewali Mandar), DI Maloso – Sekkasekka Kanan (Kabupaten Polewali Mandar) dan DI Maloso Sekkasekka Kiri II (Kabupaten Polewali Mandar);
- b. DI kewenangan provinsi meliputi: DI Papalang (Kabupaten Mamuju), DI Sampaga (Kabupaten Mamuju), DI Tommo (Kabupaten Mamuju) DI Tobadak (Kabupaten Mamuju Tengah), DI Tandung (Kabupaten Polewali Mandar) dan DI Lakejo (Kabupaten Polewali Mandar).

Pengembangan sistem jaringan pengelolaan SDA pada Pantai, terdiri atas: Pantai di Kabupaten Polewali Mandar, Pantai di Kabupaten Majene, Pantai di Kabupaten Mamuju, Pantai di Kabupaten Mamuju Tengah, dan Pantai di Kabupaten Mamuju Utara.

Pengembangan sistem jaringan pengelolaan SDA pada Instalasi Pengolahan Air Bersih (IPA) penyediaan dan pengelolaan air baku, baik air permukaan maupun air tanah yang tersebar pada beberapa cekungan air tanah yang potensial di wilayah Provinsi Sulawesi Barat meliputi Cekungan Air Tanah (CAT) Pasangkayu, CAT Dapurang, CAT Sampaga dan CAT Polewali terdiri atas: IPA Polewali, IPA Wonomulyo dan IPA Campalagian di Kabupaten Polewali Mandar; IPA Mamasa di Kabupaten Mamasa; IPA Majene di Kabupaten Majene; IPA Mamuju, IPA Belang-Belang; IPA Tobadak, IPA Topoyo di Kabupaten Mamuju Tengah, dan IPA Pasangkayu di Kabupaten Mamuju Utara.

Rincian rencana pengembangan sistem jaringan pengelolaan sumberdaya air disajikan pada Tabel berikut.

**Tabel 2.58**  
**Wilayah Sungai (WS) Lintas Provinsi**

No.	Nama WS	Nama DAS	Nama Kabupaten/Kota
1.	WS Palu-Lariang	Lariang Minti Rio Letawa Bambaira Surumana	Mamuju Utara Sulbar- Sulfeng Mamuju Utara Sulbar-Sulfeng Mamuju Utara Sulbar-Sulfeng Mamuju Utara Sulbar- Sulfeng Mamuju Utar
2.	WS Kaluku-Karama	Saddang Karama Malunda Mandar Babalalang Mapilli	Mamasa SulBar-SulSel Mamuju Majene Majene Mamuju Polewali Mandar
3.	WS Saddang	Saddang Mamasa Galanggang Bone- Bone	Mamasa Sulbar-Sulsel Mamasa Polewali Mandar Mmauju
4.	WS Karama	Karama Budong-budong Karossa Mamuju	Mamuju Mamuju Tengah Mamuju Tengah Mamuju

**Tabel 2.59**  
**Rincian Bendung Nasional**

No.	Nama Bendung	Nama Kabupaten/Kota	Pelayanan (ha.)
1.	Sekka-Sekka	Polewali Mandar	12.400
2.	Tommo	Mamuju	2.500

**Tabel 2.60**  
**Daerah Irigasi (DI.) Utuh Kabupaten / Kota (Kewenangan Pusat)**

No.	Nama Daerah Irigasi (DI.)	Nama Kabupaten/Kota	Luas (ha.)
1.	DI Maloso – Sekkasekka	Polewali Mandar	12.163
2.	DI Maloso – Sekkasekka Kanan		3.090
3.	DI Maloso – Sekkasekka Kiri II		9.073
<b>TOTAL PROVINSI SULAWESI BARAT</b>			<b>24.326</b>

**Tabel 2.59**  
**Daerah Irigasi (DI.) Utuh Kabupaten / Kota (Kewenangan Provinsi)**

No.	Nama Daerah Irigasi (DI.)	Nama Kabupaten/Kota	Luas (ha.)
1.	DI Papalang	Mamuju	1.005
2.	DI Sampaga	Mamuju Tengah	1.240
3.	DI Tommo		2.500
4.	DI Tobadak		1.880
5.	DI Lakejo	Polewali Mandar	1.265
6.	DI Tandung		1.000
7.	DI Bantalaka	Mamuju Utara	1.200
<b>TOTAL PROVINSI SULAWESI BARAT</b>			<b>10.090</b>

**2.62**

**Tabel Rincian Pantai Nasional**

No.	Nama Kabupaten / Kota	Panjang Garis Pantai (km.)
1.	Polewali Mandar	94,3
2.	Majene	113,9
3.	Mamuju	179,1
4.	Mamuju Tengah	89,3
5.	Mamuju Utara	140,9
	<b>Total</b>	<b>617,5</b>

**Tabel 2.63**  
**Rincian Rencana Pengembangan Pantai Provinsi**

No.	Nama Kabupaten/Kota	Panjang Garis Pantai (km.)	Luas Wil. Laut
1.	Polewali Mandar	94,3	435,45
2.	Majene	113,9	971,47
3.	Mamuju	179,1	2892,29
4.	Mamuju Tengah	89,3	491,79
5.	Mamuju Utara	140,9	974,32
<b>Jumlah Total</b>		<b>617,5</b>	<b>5765,34</b>



**Tabel 2.64****Rincian Rencana Pengembangan Instalasi Pengolahan Air Bersih (IPA)**

No.	Nama IPA	Nama Kabupaten/Kota
1.	Polewali Wonomulyo	Polewali Mandar
2.	Campalagian Mamasa	Mamasa
3.	Majene	Majene Mamuju Mamuju
4.	Mamuju	Mamuju Tengah
5.	Belang-Belang Topoyo Mamuju	Mamuju
6.	Pasangkayu	Mamuju Utara

**6. Fasilitas Sanitasi**

Rencana pengembangan sistem jaringan sanitasi di Provinsi Sulawesi Barat meliputi:

- rencana sistem perpipaan air limbah kawasan perkotaan terpadu industri, perdagangan, pergudangan, peti kemas, pelabuhan, bandara, stasiun kereta api dan terminal barang dan terminal penumpang MATABE diarahkan ke sistem pengolahan limbah di MATABE.
- rencana Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) terpadu diarahkan pembangunannya di kawasan perkotaan terpadu MATABE, terutama pengelolaan limbah Industri, baik untuk limbah padat, cair maupun B3.
- lokasi IPAL terpadu tidak jauh dari kawasan industri agar dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem pengelolaan limbah.
- rencana instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) kawasan perkotaan terpadu MATABE dan sekitarnya diarahkan ke IPLT di MATABE.

**7. Fasilitas Jaringan Transportasi**

Perencanaan pengembangan sistem jaringan transportasi di Provinsi Sulawesi Barat dijelaskan sebagai berikut.

Untuk jaringan jalan di provinsi disusun dengan memperhatikan : pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional maupun jalan provinsi dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi;

- ketentuan pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan nasional maupun jalan provinsi;
- penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional maupun jalan provinsi yang memenuhi ketentuan daerah pengawasan jalan. Untuk terminal di provinsi disusun dengan memperhatikan :
- penentuan lokasi terminal dilakukan dengan memperhatikan rencana kebutuhan terminal yang merupakan bagian dari rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
- penetapan lokasi terminal dilakukan dengan memperhatikan: tingkat aksesibilitas pengguna jasa angkutan; kesesuaian lahan dengan rencana tata ruang, wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota;
- pembangunan terminal harus dilengkapi dengan: rancang bangun; buku kerja rancang bangun, rencana induk terminal, analisis dampak lalu lintas dan analisis mengenai dampak lingkungan;
- setiap penyelenggara terminal wajib menyediakan fasilitas utama yang meliputi: jalur keberangkatan, jalur kedatangan, ruang tunggu penumpang, tempat naik turun penumpang, tempat parkir kendaraan, papan informasi, kantor pengendali terminal, dan loket serta fasilitas penunjang lainnya yang meliputi fasilitas untuk penyandang cacat, fasilitas kesehatan, fasilitas

umum, fasilitas peribadatan, pos kesehatan, pos polisi, dan alat pemadam kebakaran;

- g. pengelolaan dana preservasi jalan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip berkelanjutan, akuntabilitas, transparansi, keseimbangan, dan kesesuaian.
- h. setiap kendaraan bermotor umum dalam trayek wajib singgah di terminal yang sudah ditentukan, kecuali ditetapkan lain dalam izin trayek.

Perencanaan pengembangan sistem jaringan jalur kereta api disusun dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dilakukan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasi;
- b. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian;
- c. pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api;
- d. untuk perlintasan antara jaringan jalur kereta api dengan jalan akan menggunakan sistem *Fly Over* dan *Underpass*;
- e. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api.

Perencanaan pengembangan sistem jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan disusun dengan memperhatikan:

- a. keselamatan dan keamanan pelayaran;
- b. ketentuan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai dan penyeberangan;
- c. ketentuan pelarangan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai dan penyeberangan; dan
- d. pembatasan pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai dan penyeberangan.

Perencanaan pengembangan sistem jaringan untuk wilayah pelabuhan disusun dengan memperhatikan:

- a. Pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan harus memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan.
- b. Pemanfaatan ruang di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perencanaan pengembangan sistem jaringan untuk alur pelayaran disusun dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan ruang pada badan air di sepanjang alur pelayaran dibatasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pemanfaatan ruang pada kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di sekitar badan air di sepanjang alur pelayaran dilakukan dengan tidak mengganggu aktivitas pelayaran.

Perencanaan pengembangan sistem jaringan untuk pelabuhan umum disusun dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan
- b. ketentuan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut; dan
- c. pembatasan pemanfaatan ruang di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan harus

mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perencanaan pengembangan sistem jaringan bandara udara untuk penerbangan disusun dengan memperhatikan pembatasan pemanfaatan ruang udara yang digunakan untuk penerbangan agar tidak mengganggu sistem operasional penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk bandar udara umum disusun dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional bandar udara;
- b. pemanfaatan ruang di sekitar bandar udara sesuai dengan kebutuhan pengembangan bandar udara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. batas-batas kawasan keselamatan operasional penerbangan (KKOP) dan batas kawasan kebisingan.

## **8. Infrastruktur Penunjang Kawasan Pergudangan**

Strategi pengembangan penataan ruang dengan memperhatikan apa yang dituangkan dalam kebijakan penataan ruang berkaitan dengan kawasan pergudangan terdiri atas:

- a. Pusat Kegiatan Nasional Promosi (PKNp) Mamuju (Ibukota Kabupaten Mamuju) – Tampapadang - Belang Belang (MATABE) yang potensial berfungsi sebagai pusat kegiatan terpadu kepelabuhanan, kebandarudaraan, industri, perdagangan, pergudangan, peti kemas dan pariwisata;
- b. Mengembangkan dan memantapkan sistem jaringan penghubung sentra sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan, pertambangan dengan kawasan industri, kawasan pergudangan, pasar, kawasan perdagangan, pelabuhan, terminal dan bandara;
- c. Pembangunan terminal barang, berupa terminal truk yang lokasinya pada kawasan terpadu industri, pergudangan, perdagangan dan pelabuhan Belang-Belang, dan mempunyai akses tinggi ke Stasiun kereta api dan Bandar Udara Tampapadang.
- d. Kawasan terpadu pelabuhan, industri, pergudangan dan perdagangan Belang-Belang sebagai pusat pengolahan komoditi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan serta sebagai *outlet* dan pintu masuk komoditi dari dan ke seluruh wilayah Sulawesi Barat serta wilayah perbatasan provinsi tetangga;
- e. Untuk mendukung MP3EI sesuai dengan potensi wilayah Provinsi Sulawesi Barat maka dikembangkan kawasan terpadu pelabuhan, bandara, industri, perdagangan, pergudangan dan peti kemas Mamuju– Tampapadang – Belangbelang (MATABE) di Kabupaten Mamuju; dan

Pemerintah saat ini telah berupaya untuk melakukan pengembangan Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus yang berada di Belang-Belang, Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju seiring dengan RTRWP Sulawesi Barat 2014-2034 yang telah menentukan Matabe sebagai kawasan strategis pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Posisi strategis Matabe di selat Makassar sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), serta penentuan kawasan Belangbelang sebagai kawasan terpadu pelabuhan, Bandar udara, stasiun KA barang, industri, perdagangan, pergudangan dan petikemas. Inti sentra pertumbuhan ekonomi Matabe nantinya adalah Eco-Industrial-Park (EIP) dan Special Economic Zone (SEZ/KEK) Belang-Belang.

#### D. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM)

Pemberdayaan IKM dilakukan melalui penguatan sentra IKM, unit pelayanan teknis (UPT), peningkatan jumlah dan kualitas tenaga penyuluh lapangan (TPL), konsultan dan penyediaan pusat-pusat promosi pengembangan IKM. Perkembangan pemberdayaan IKM di Provinsi Sulawesi Barat tahun 2016 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.65**  
**Perkembangan Pemberdayaan IKM Tahun 2016**

No	Kelembagaan	Jumlah
1	Jumlah IKM (Sentra)	87
2	UPT (unit)	1
3	TPL (orang)	14
4	Konsultan (orang)	-
5	Pusat promosi (unit)	1

Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Prov. Sulawesi Barat, 2016

#### 1. Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM)

Kondisi geografis Provinsi Sulawesi Barat yang terdiri dari pegunungan, perbukitan, daratan dan perairan yang luas menjadikan kabupaten ini memiliki potensi sumberdaya alam yang melimpah. Sumberdaya alam yang dimiliki dapat menghasilkan produk dari sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan air tawar, dan sumber daya pariwisata. Sentra IKM di Provinsi Sulawesi Barat berada tersebar, yang paling mudah ditemui adalah sentra industri pertanian. Sentra agroindustri terdapat di semua Kabupaten. Kemudian, industri kecil diarahkan sebagai industri penunjang industri besar, industri sedang dan kegiatan pariwisata. Jumlah sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Provinsi Sulawesi Barat tahun 2016 sebanyak 87 unit, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut.

**Tabel 2.66**  
**Jenis Industri Kecil Menengah Kabupaten Majene**  
**Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016**

No	Jenis Industri	Komoditi	Jenis Produksi	Kapasitas Produksi		Jumlah Usaha (Unit)	Tenaga Kerja	
				Jumlah	Satuan		LK	PR
1	Industri Pengolahan & Pengawetan Lainnya Untuk Ikan	Ikan	ABON IKAN	137,060	Kg	17	39	102
2	Industri Kue	Terigu	Kue kering, Roti, kue tradisional	211,900	Kg	5	3	20
3	Bengkel las	Besi	Pagar, Jendela	190	Unit	2	6	
4	Industri Kapal/Perahu	Kayu	Kapal/Perahu	467	Buah	24	215	
5	Industri Minyak Makan Kelapa	Kelapa Dalam	Minyak Goreng	1,109,136	Liter	20	59	124
6	Industri Furnitur Dari Kayu /Bambu	Kayu/Bambu	Meubel	15,877	Unit	41	246	
7	Industri Penggergajian kayu	Kayu	Balok	3,620	Meter Kubik	7	37	114
8	INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK DAN SEJENISNYA	PISANG/Bawang/KENTANG/UBI	KRIPIK, KRUPUK	72,270	Kg	4	5	13
9	Industri Gula Merah	Aren, Nira	Gula merah	44	Ton	15	34	30
10	INDUSTRI MENJAHIT PAKAIAN	Kain dan Benang	Baju dan Celana	57,120	Stel	26	31	134
11	Industri Pengolahan Rotan	Rotan	Rotan Polis	634	Batang	4	27	
12	Industri Alat Potong & Perkakas Tangan yang Digunakan Dalam Rumah Tangga	Besi	Parang	27,364	Buah	8	81	
13	Industri Batu Batamik/Kera Dari Tanah Liat	Tanah Liat	Batu Merah	7,261,000	Buah	28	292	80

Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Prov. Sulawesi Barat, 2016

**Tabel 2.67**  
**Jenis Industri Kecil Menengah Kabupaten Polewali Mandar**  
**Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016**

No	Jenis Industri	Komoditi	Jenis Produksi	Kapasitas Produksi		Jumlah usaha (unit)	Tenaga Kerja	
				Jumlah	Satuan		LK	PR
1	INDUSTRI KAKAO	Kakao	CHOKLAT (CENDY-CENDY)			2	10	1
2	Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras	Gaba	Beras	100	Ton	10	54	
3	Industri Pengolahan & Pengawetan Lainnya Untuk Ikan	Ikan	ABON IKAN	4,200	Kg	22	9	144
4	INDUSTRI PENGHARAMAN/PENGERINGAN IKAN	Ikan	IKAN KERING	78,400	Kg	40	27	69
5	Industri Kue	Terigu	Kue kering,Roti,kue tradisional	1,445,000	Kg	176	46	422
6	Bengkel las	Besi	Pagar,Jendela			199	223	
7	Industri Pengerjaan Kayu	Kayu	Balok	600	Meter Kubik	7	18	
8	INDUSTRI BARANG ANYAMAN	Bambu,Rotan	Keranjang Bambu,Rotan	9,780	Buah	21	50	49
9	INDUSTRI KOPRA	Kelapa Dalam	Kopra	745	Ton	38	96	
10	Industri pertenunan	Benang	Kain sarung dan baju	182,622	Stel	1951	196	2270
11	INDUSTRI MENAJAHIT PAKAIAN	Kain dan Benang	Baju dan Celana	1,243,200	Stel	91	23	87
12	Industri Minyak Makan Kelapa	Kelapa Dalam	Minyak Goreng	96,236	Liter	147	190	206
13	Industri Furnitur Dari Kayu	Kayu	Meubel	3,266	Unit	314	306	
14	Industri Pembuatan Tempe	Kedelai	Tempe	79,617	Ton	72	131	114
15	Industri Pembuatan Tahu	Kedelai	Tahu	2,217	Ton	35	167	45
16	INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA	PISANG/NANGKA/KENTANG/UBI	KRIPIK,KRUPUK,PEYE	11,370	Kg	42	36	322
17	Industri Gula Merah	Aren,Nira	Gula merah	171	Ton	1351	1888	1634
18	INDUSTRI ARANG	Tempurung	Arang	217	Ton	6	45	17

Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Prov. Sulawesi Barat, 2016

**Tabel 2.68**  
**Jenis Industri Kecil Menengah Kabupaten Mamasa**  
**Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016**

No	Jenis Industri	Komoditi	Jenis Produksi	Kapasitas Produksi		Jumlah Usaha (Unit)	Tenaga Kerja	
				Jumlah	Satuan		LK	PR
1	Industri Kue	Terigu	Kue tradisional	38,600	Biji	7	11	15
2	Industri perkakas Rumah Tangga	Besi	Parang,cangkul,pisau	7,982	Buah	60	158	6
3	Industri Barang Anyaman Rotan dan Bambu	Bambu,Rotan	Bakul dan tikar	9,780	Buah	21	50	49
4	Industri Iripik	Ubi	iripik	5,814	Lembar	50	151	72
5	Industri pertenunan	Benang, karung poni	Baju,Celana,Selendang,sassangan	442,252	Lembar	110	37	266
6	Industri Batu bata	Tanah liat	Batu Merah	349,730	Biji	14	64	3
7	Industri pengolahan dan penggilingan kopi	kopi	kopi bubuk	33,561	Liter	43	112	
8	Industri Furnitur Dari Kayu	Kayu	Meubel	52,534	Unit	151	525	
9	Industri Pembuatan Tempe dan tahu	Kedelai	Tempe dan tahu	46,090	Ton	4	4	

Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Prov. Sulawesi Barat, 2016

**Tabel 2.69**  
**Jenis Industri Menengah Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016**

No	Jenis Industri	Komoditi	Jenis Produksi	Kapasitas Produksi		Jumlah Usaha (Unit)	Tenaga Kerja	
				Jumlah	Satuan		LK	PR
1	INDUSTRI Pengupasan dan pembersihan kakao	Kakao	kakao biji	1,650	Ton	5	28	1
2	Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras	Gaba	Beras	13,138	Ton	19	76	
3	Industri Pengolahan & Pengawetan Lainnya Untuk Ikan	Ikan	Abon ikan	2,970	Kg	4	1	4
4	INDUSTRI PENGHARAMAN/PENGERINGAN IKAN	Ikan	Ikan kering	8,270	Kg	19	16	19
5	Industri Kue	Terigu	Roti	109,550	Bungkus	16		43
6	Bengkel las	Besi	Pagar,Jendela	525	Unit	37	61	
7	Industri Kapal dan perahu	Kayu	Kapal dan perahu	192	Buah	7	29	
8	Industri Pengolahan Rotan	Rotan	Rotan polis dan fitrik	3,200	Ton	2	76	
9	INDUSTRI KOPRA	Kelapa Dalam	Kopra	14,094	Ton	12	28	
10	Industri pertenunan	Kain Tenun ikat	Kain selon	673	Lembar	35		112
11	INDUSTRI MENAJAHIT PAKAIAN	Kain dan Benang	Baju dan Celana	27,676	Stel	44	62	43
12	Industri Minyak Makan Kelapa	Kelapa Dalam	Minyak Goreng	98,170	Botol	39	4	43
13	Industri Furnitur Dari Kayu	Kayu	Meubel	14,733	Set	47	207	4
14	Industri Pembuatan Tempe	Kedelai	Tempe	4,2	Ton	4	10	
15	Industri Pembuatan Tahu	Kedelai	Tahu	2,217	Ton	35	167	45
16	INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA	PISANG/KENTANG/UBI/ Rumpu Laut	KRIPIK,KRUPUK,PEYE	19,080	Bungkus	7	10	14
17	Industri Gula Merah	Aren, Nira	Gula merah	45	Ton	72	107	63

Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Prov. Sulawesi Barat, 2016



**Tabel 2.70**  
**Jenis Industri Kecil Menengah Kabupaten Mamuju Utara**  
**Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016**

No	Jenis Industri	Komoditi	Jenis Produksi	Kapasitas Produksi		Jumlah Usaha (unit)	Tenaga Kerja	
				Jumlah	Satuan		LK	PR
1	Industri Pengolahan & Pengawetan Lainnya Untuk Ikan	Ikan	ABON IKAN	31,240	kg	6	9	14
2	INDUSTRI BARANG DARI SEMEN	Semen dan Pasir	Gipsum	378,000	biji	10	21	
3	INDUSTRI PENCETAKAN UMUM	Mesin, Kertas, Tinta	Foto copy, brosur	47,400	Lembar	7	13	2
4	INDUSTRI BARANG ANYAMAN/Kerajinan	Rotan, Batok kelapa, Lidi	Keranjang Rotan, hiasan	460	buah	6	10	
5	INDUSTRI KOPRA	Kelapa Dalam	Kopra	745	Ton	38	98	
6	Industri pertenunan	Benang	Kain sarung dan baju	1,959	Lembar	45	196	91
7	INDUSTRI MENJAHIT PAKAIAN	Kain dan Benang	Baju dan Celana	7,152	stel	33	6	53
8	Industri Minyak Makan Kelapa	Kelapa Dalam	Minyak Goreng	837,770	Liter	82	27	219
9	Industri Furnitur Dari Kayu	Kayu	Meubel	6,201	Unit	76	283	
10	Industri Pembuatan Tempe/Tahu	Kedelai	Tempe/Tahu	144,370	Kg	34	24	63
11	INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENSINYA	Pisang, Nangka, Ubi, Terigu	KRIPIK, KRUPUK, PEYE	194,000	bungkus	23	17	46
12	Industri Gula Merah	Aren, Nira	Gula merah	19,300	Ton	11	11	22
13	INDUSTRI BARANG LOGAM LAINNYA YTDL	Besi	Parang, Pisau	3,325	buah	7	18	
14	INDUSTRI AIR MINUM DAN AIR MINERAL	Air	Air Minum Isi Ulang	17,696,000	Galon	10	15	
15	INDUSTRI MINYAK ATSIRI	Nilam	Minyak Nilam	180,000	Liter	9	15	

Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Prov. Sulawesi Barat, 2016

**Tabel 2.71**  
**Jenis Industri Kecil Menengah Kabupaten Mamuju Tengah**  
**Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016**

No	Jenis Industri	Komoditi	Jenis Produksi	Kapasitas Produksi		Jumlah usaha (unit)	Tenaga Kerja	
				Jumlah	Satuan		LK	PR
1	Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras	Gaba	Beras	1,080	Ton	2	6	2
2	Industri Kue	Sagu	Kue tradisional	190,680	Biji	30	3	27
3	Bengkel las	Besi	Pagar, Jendela	14,475	Unit	13	33	5
4	Industri kerajinan dari kulit kerang	Kulit Kerang	Kerajinan Kulit Kerang	171,942	buah	30	11	19
5	Industri kerajinan dari Bambu	Bambu	Hiasan Bambu	10,800	buah	2	2	1
6	Industri roti	Terigu	roti	415,920	bungkus	2		6
7	Industri Tepung	Ubi	Tepung ubi	3,120	bungkus	1		2
8	INDUSTRI MENJAHIT PAKAIAN	Kain dan Benang	Baju dan Celana	1,243,200	Stel	91	23	87
9	Industri Minyak Makan Kelapa	Kelapa Dalam	Minyak Goreng	96,236	Liter	147	190	206
10	Industri Furnitur Dari Kayu dan Bambu	Kayu dan Bambu	Meubel	1,934	Unit	5	18	0
11	Industri Pembuatan Tempe dan Tahu	Kedelai	Tempe	766,080	buah	4	4	5
12	INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK	Ubi	KRIPIK, KRUPUK	267,900	bungkus	9	3	9
13	Industri Gula Merah	Aren, Nira	Gula merah	115	Ton	95	98	60
14	Industri kacang telur	Kacang dan Tepung	Kacang Telur	54,580	bungkus	15	3	12
15	Industri dodol	Pisang	dodol pisang	720	bungkus	1		3

Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Prov. Sulawesi Barat, 2016

## 2. Tenaga Penyuluh Lapangan (TPL)

Penyuluh sebagai diseminator inovasi dan teknologi memiliki fungsi utama untuk menyampaikan informasi baru dan mendidik masyarakat agar mau, tahu dan mampu menggunakan pengetahuan baru mereka dalam membantu permasalahan yang sedang dihadapi. Kawasan industri di suatu wilayah akan sangat memerlukan tenaga penyuluh lapang untuk menghubungkan para pemilik inovasi dan teknologi baik dengan pelaku industri dan jugamasyarakat. Penyuluh yang ada di lapangan tidak terbatas pada penyuluh bidang tertentu, namun terkait dengan sektor industri penyuluh yang dibutuhkan di antaranya penyuluh pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan (tergabung menjadi penyuluh pertanian).

Penyuluh pertanian berinduk di BP4K Provinsi Sulawesi Barat dan kemudian tersebar pada UPT BP3K di masing-masing kabupaten. Provinsi Sulawesi Barat yang terdiri dari enam kabupaten membutuhkan banyak penyuluh untuk selalu siap di lapangan. Selain penyuluh pertanian, dibutuhkan juga penyuluh IKM yang dipersiapkan sebagai calon wirausahawan dan pembina IKM (Kementerian Perindustrian) melalui Program Beasiswa pada unit pendidikan di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Di Provinsi Sulawesi Barat sampai pada saat ini baru memiliki sebanyak **14 Tenaga Penyuluh Lapangan** yang tersebar di Kabupaten Polewali Mandar 2 orang, Mamuju 2 orang, Mamuju Utara 1 orang, Mamuju Tengah 3 orang dan Majene 6 orang, sedangkan TPL di Kabupaten Mamasa belum ada.

Hal ini seperti ini perlu mendapat perhatian bagi Pemerintah Daerah untuk merekrut TPL khusus untuk mendukung dan mendorong berkembangnya IKM baik dari segi sarana prasarana dan juga tenaga ahli pendukung.

### **3. Konsultan**

Konsultan adalah orang yang memberikan dukungan dan informasi untuk membantu dalam menjalankan industri. Konsultan akan memberikan masukan atas usaha yang dijalankan, seperti kemungkinan risiko, proyeksi laba-rugi, penjualan dan lain sebagainya. Keberadaannya dinilai penting untuk membantu terbentuknya industri-industri baru dan menjaga kestabilan industri agar senantiasa berjalan. Akan tetapi, di Provinsi Sulawesi Barat sulit menemui konsultan lokal. Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya konsultan. Sehingga saat masyarakat membutuhkan konsultan mereka umumnya akan pergi ke ibukota provinsi untuk mencari dukungan konsultan. Oleh sebab itu, pemerintah setempat ke depannya diharapkan mampu menyediakan tenaga konsultan untuk membantu para pelaku industri dan calon pelaku industri agar tercipta IKM yang sehat dan dapat berkontribusi positif bagi pembangunan daerah.

### **4. Pusat Promosi**

Promosi sebagai salah satu sarana pemasaran memiliki kedudukan penting. Fungsi dari promosi adalah untuk memperkenalkan kepada khalayak mengenai produk-produk yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. Diharapkan dengan mengetahui dan mengenal produk industri, pasar akan dapat menerima dan volume penjualan meningkat. Keberadaan pusat promosi sendiri merupakan upaya dari pemerintah untuk mengkonsentrasikan upaya pengenalan produk kepada masyarakat. Pusat promosi umumnya sudah berada dalam sentra industri, dan juga dapat didirikan di luar sentra industri.

Di luar Provinsi Sulawesi Barat juga terdapat banyak event- event seperti Sulawesi Barat Fair, Jakarta Fair dan berbagai event lain yang dapat diikuti oleh pelaku industri. Di Provinsi Sulawesi Barat sendiri terdapat pusat kerajinan yaitu Dekranasda Provinsi Sulawesi Barat. Guna mendukung promosi produk daerah, pusat-pusat promosi harus digiatkan agar masyarakat semakin mengenal dan mencintai produk industri lokal.



**BAB III**  
**VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**  
**PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI SULAWESI BARAT**

**A. Visi dan Misi Pembangunan Daerah**

1. Visi dan Misi Pembangunan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Barat

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), telah menetapkan Visi Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022. Visi dan Misi Pembangunan Daerah adalah:

*“Sulawesi Barat Maju dan Malaqbi”*

Kemudian ditetapkan lima Misi dalam rangka pencapaian Visi tersebut dengan mempertimbangkan dan memperhatikan potensi, kondisi dan permasalahan serta tantangan dan peluang dalam rentang lima tahun. Lima Misi dimaksud sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

1. Membangun Sumber Daya Manusia Berkualitas, Berkepribadian dan Berbudaya.
2. Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Modern, dan Terpercaya.
3. Membangun dan Memperkuat Konektivitas Antar Wilayah Berbasis Unggulan Strategis.
4. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inovatif dan Berdaya Saing Tinggi.
5. Mendorong Pengarusutamaan Lingkungan Hidup untuk Pembangunan Berkelanjutan.

Dalam pembangunan ekonomi dibidang perindustrian, tertuang secara khusus dalam Misi ke-3, dan didukung dengan Misi ke-4 serta ke-5, semuanya dimaksudkan untuk tujuan mewujudkan perekonomian yang kokoh dan tingkat kesejahteraan sosial masyarakat Provinsi Sulawesi Barat yang baik.

Untuk tujuan dan sasaran yang berkaitan dengan rencana pembangunan industri Provinsi Sulawesi Barat disajikan pada tabel berikut

**Tabel 3.1.**  
**Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan**  
**Provinsi Sulawesi Barat 2017-2022**

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja Sasaran						Kondisi Akhir 2022
			Kondisi Awal (2016)	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>Misi 3 : Membangun dan Menguatkan Konektivitas antar Wilayah Berbasis Unggulan Strategis,</b>									
Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur untuk mendorong produktivitas wilayah dan konektivitas antar wilayah	Meningkatnya kapasitas Infrastruktur dalam menunjang perekonomian daerah, mobilitas penduduk, serta penukiman dan perumahan	Tingkat kemantapan jalan provinsi (proporsi panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap (%))	59,40	64,68	69,72	75,62	84,65	90,95	95,20
		Jumlah angkutan penumpang melalui terminal (angkutan)	419.034	431.605	444.553	457.890	471.627	485.776	500.349
		Jumlah Kapal melalui Dermaga pelabuhan (Kapal dan volume barang)	68.179 474.570 Ton	70.224 488.807 Ton	72.331 503.471 Ton	74.501 518.576 Ton	76.736 534.132 Ton	79.038 550.156 Ton	81.410 566.661 Ton
		Jumlah pengguna bandara (Orang dan volume barang)	104.886 236.972 kg	108.032 244.081 kg	111.273 251.404 kg	114.611 258.945 kg	118.050 266.714 kg	121.591 274.715 kg	125.240 282.957 kg
		Rasio elektrifikasi (Angka rasio)	84	86	88	90	92	94	96
		% masyarakat yang memperoleh akses air bersih	69,68	75	80	85	90	95	100
		% rumah layak huni (%)	84,25	87	90	93	95	97	100
% rumah bersantitas baik (%)	51,43	59,55	66,89	74,46	83,07	92,55	100		
<b>Misi 3 : Membangun dan Menguatkan Konektivitas antar Wilayah Berbasis Unggulan Strategis,</b>									
	Meningkatnya konektivitas antara wilayah pulau kecil dengan daratan utama dan antara desa dengan kota dalam mengurangi disparitas wilayah	Jumlah pulau yang mencapai perbaikan sarana perhubungan dengan daratan utama (pulau)	10 Pulau	12 Pulau	14 Pulau	16 Pulau	18 Pulau	20 Pulau	20 Pulau
		% desa tertinggal	85	80	72	61	54	46	30
<b>Misi 4 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inovatif dan Berdaya Saing Tinggi,</b>									
Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan peningkatan daya saing berbasis ekonomi lokal	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi berkualitas	Pertumbuhan ekonomi (%)	6,03	6,8 - 7,1	7,1 - 7,4	7,3 - 7,6	7,8 - 8,1	7,9 - 8,2	8,0 - 8,3
		PDRB/kapita (Rp/jt)	27,54	29,73	31,83	34,05	36,21	38,38	40,54
		Angka kemiskinan (%)	11,19	10,47	10,19	9,91	9,62	9,34	9,06
		Tingkat pengangguran terbuka	3,33	3,14	2,96	2,77	2,58	2,41	2,23
		Laju inflasi (%)	2,23	3,58	3,23	2,89	2,54	2,19	1,84
		Gini ratio	0,37	0,35	0,34	0,33	0,33	0,32	0,32
	Meningkatnya daya saing ekonomi lokal	Jumlah desa yang memiliki Produk Unggulan	45	47	62	77	92	107	122
	Nilai Ekspor Komoditi Unggulan (ribu USD)	321.973	360.493	391.935	423.377	454.819	486.261	517.703	
<b>Misi 5 : Mendorong Pengarusutamaan Lingkungan Hidup untuk Pembangunan Berkelanjutan</b>									
Memelihara daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan sumberdaya alam	Terpeliharanya daya dukung dan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kajian Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	68,76	69	70	71	72	73	75
		% Tingkat penurunan emisi gas rumah kaca	12	12,5	13	13,5	14	14,5	15
	Terwujudnya pelestarian fungsi hutan dan pemantapan kawasan hutan	Jumlah dan % unit KPH yang operasional (Unit)	7 58,3	7 58,3	9 75	9 75	11 91,6	12 100	12 100
		Luas kawasan perhutanan sosial yang tercadangkan (Ha)	0	0	10.000	20.000	30.000	45.000	55.000
	Luas kawasan hutan yang menjadi milik masyarakat melalui fasilitasi tora (tanah obyek reforma agraria) (Ha)	0	0	6.000	12.000	18.000	24.000	30.000	

Sumber : RPJMD Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017-2022

Berdasarkan pertimbangan inilah pembangunan industri di Provinsi Sulawesi Barat dilakukan dengan berbasis pada sumber daya potensial (unggulan) daerah. Disamping peningkatan produksi primer, potensi

sumberdaya daerah ini juga diarahkan untuk peningkatan nilai tambah melalui investasi sektor sekunder untuk mengolah hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan dan sektor primer lainnya.

Penyusunan RPIP mengikuti bangun dari RPJP, dan diselaraskan dengan bangun RPJMD. Sehingga RPIP Provinsi Sulawesi Barat ini juga disusun dengan berbasis pada sumber daya potensial (unggulan) daerah dan peningkatan produksi primer yang diarahkan untuk peningkatan nilai tambah industri. Output utama dari dokumen RPIP ini adalah rencana yang tersusun dalam pembangunan industri jangka panjang dan jangka menengah yang telah didesain program-program untuk diturunkan pada rencana kerja tahunan atau Renja. Berdasarkan penyusunan ini, diperoleh Prioritas Pembangunan Industri dan Indikasi Rencana Program Pembangunan Industri Prioritas, selanjutnya ditetapkan indikator kinerja pembangunan industri.

Baik visi, misi maupun strategi dalam RPIP ini semuanya mengarahkan pada pembangunan industri yang maju dan berdaya saing termasuk untuk pembangunan industri di daerah yang berbasis pada potensi keunggulan sumberdaya masing-masing daerah.

Berdasarkan pertimbangan visi dan misi perindustrian nasional 2015-2019, RPJMD Provinsi Sulawesi Barat 2017-2022, maka disusun Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Industri di Provinsi Sulawesi Barat berkaitan dengan Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Sulawesi Barat 2020-2040 sebagai berikut.

## 2. Visi dan Misi Pembangunan Industri Provinsi Sulawesi Barat

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi industri daerah mencerminkan gambaran aspirasi industri dimasa depan dan inspirasi untuk mendapatkan yang solusi terbaik dalam pencapaian hasil pembangunan industri yang direncanakan dalam RPIP ini.

Dengan memperhatikan visi misi pembangunan daerah, visi, misi dan strategi pembangunan industri nasional, serta visi misi pembangunan industri daerah, maka Visi Pembangunan Industri Provinsi Sulawesi Barat 2020-2040 adalah:

**“Industri Unggul Terkemuka, Inovatif, Kompetitif dan Berwawasan  
Lingkungan Menuju Peningkatan Ekonomi Kerakyatan”**

Industri yang unggul terkemuka berarti industri di Provinsi Sulawesi Barat tumbuh dan berkembang dan mampu menciptakan nilai tambah ekonomi yang besar dari pengolahan komoditas-komoditas utama daerah yang bersumber pada sumberdaya alam lokal.

Industri yang kompetitif, artinya mewujudkan struktur ekonomi yang tangguh dan kuat utamanya sektor industri dan perdagangan dengan peningkatan peran serta masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dalam pemanfaatan SDM dan Potensi Lokal/SDA yang ada di Provinsi Sulawesi Barat, sehingga mampu bertahan dan eksis dalam menghadapi globalisasi ekonomi.

Industri yang Inovatif, adalah selalu melakukan inovasi atau terobosan terobosan baru dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan IKM dan para pelaku usaha.

Provinsi Sulawesi Barat terkemuka, berarti pembangunan industri di Provinsi Sulawesi Barat dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Provinsi Sulawesi Barat. Kontribusi ini tidak hanya bersifat langsung dari tumbuhnya industri pengolahan komoditas-komoditas utama daerah dalam RPIP ini dan perannya dalam

memanfaatkan sumberdaya alam yang dimiliki masyarakat, sehingga industri ini berkontribusi langsung kepada kesejahteraan masyarakat secara lebih luas, namun juga kontribusi yang bersifat tidak langsung. Tumbuhnya dan berkembangnya industri utama akan menjadi *trigger* tumbuh dan berkembangnya industri lainnya serta secara umum akan menggerakkan perekonomian daerah.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Penjabaran untuk Visi di atas dalam Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Provinsi Sulawesi Barat ini dituangkan dalam beberapa Misi yang ada relevansi dengan lainnya dan disusun dalam rangka mewujudkan visi tersebut, pembangunan industri Provinsi Sulawesi Barat mengemban misi sebagai berikut:

1. Menumbuhkembangkan industri komoditas unggulan daerah, terkemuka, kompetitif, kreatif, inovatif berbasis ekonomi kerakyatan.
2. Menumbuhkan dan mengoptimalkan hilirisasi industri agro secara terpadu untuk meningkatkan nilai tambah dan kompetensi industri daerah.
3. Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah dan mengembangkan iklim yang kondusif bagi investasi sektor industri secara komprehensif mendukung peningkatan dan pemerataan ekonomi kerakyatan Provinsi Sulawesi Barat.

Misi ini sejalan dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Barat yang telah diuraikan di atas, dan sudah mencakup dan mengarahkan pembangunan industri sebagaimana rumuskan. Misi ini juga sesuai dengan rumusan RPIP yang menitikberatkan pada pengembangan aspek Industri dan komoditas industri unggulan yang terpilih sebagai komoditas basis industri. Misi pembangunan industri ini merupakan pemicu penting dalam memberikan kerangka sasaran pembangunan industri yang ingin dicapai yaitu dalam menentukan jalan yang akan ditempuh untuk merealisasikan Visi.

## **B. Tujuan Pembangunan Industri Provinsi Sulawesi Barat**

Tujuan pembangunan industri adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi, melaksanakan Misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan industri. Tujuan diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing Misi pembangunan industri daerah di atas.

Dengan memperhatikan visi misi pembangunan daerah serta visi, misi dan strategi pembangunan industri nasional, maka Tujuan Pembangunan Industri Provinsi Sulawesi Barat adalah:

1. Meningkatkan laju pertumbuhan dan kontribusi sektor industri daerah dalam mendorong ekonomi berbasis kerakyatan.
2. Meningkatkan nilai tambah komoditas/produk melalui hilirisasi industri agro dan meningkatkan volume, varian dan nilai ekspor produk-produk industri.
3. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja daerah kedalam sektor industri.
4. Meningkatkan arus investasi ke daerah melalui sektor industri.
5. Mewujudkan iklim industri daerah yang kondusif yang mampu menjamin keberlangsungan eksistensi industri daerah dan menarik tumbuh berkembangnya industri-industri baru.

### C. Sasaran Pembangunan Industri Provinsi Sulawesi Barat

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur dan rasional untuk dapat diwujudkan. Sasaran ini bisa merupakan target pencapaian yang diharapkan, yang pada hakekatnya merupakan penegasan kembali misi secara lebih detil, terukur, dan lebih tergambar dengan jelas yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kerangka kinerja pembangunan secara keseluruhan.

Sesuai dengan tujuan pembangunan industri di atas, maka diformulasi dan ditetapkan sasaran dalam perencanaan pembangunan industri Provinsi Sulawesi Barat 2020-2040 sebagai berikut :

1. Meningkatnya laju pertumbuhan sektor industri daerah dalam mendorong ekonomi berbasis kerakyatan.
2. Meningkatnya kontribusi sektor industri daerah terhadap PDRB dalam mendorong ekonomi berbasis kerakyatan.
3. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja daerah kedalam sektor industri.
4. Meningkatnya arus investasi ke daerah melalui sektor industri.
5. Terwujud dan terciptanya nilai ekspor sektor industri.

Sesuai dengan tujuan di atas, maka ditetapkan sasaran dalam perencanaan pembangunan industri Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana disajikan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2  
Sasaran Pembangunan Industri  
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2040

No	Sasaran	Tahun 2019	Tahun				
			2020	2025	2030	2035	2040
1.	Pertumbuhan sektor industri non migas (%)	7,41	7,50	10,50	12,82	13,30	15,94
2.	Kontribusi industri non migas terhadap PDRB (%)	9,53	9,56	13,34	15,68	17,15	20,61
3.	Jumlah tenaga kerja di sektor industri non migas (orang)	43.595	43.600	61.033	85.446	119.624	167.474
4.	Nilai investasi sektor industri (M.Rp)	649,662	649,700	3.724,37	6.807,68	9.900,56	12.004,13
5.	Ekspor sektor industri (M.Rp.)	107,50	107,99	172,00	275,00	440,00	704,00

Sumber : Dielaborasi dari Berbagai Sumber, 2020

Sasaran program pembangunan industri komoditi industri unggulan pengolahan hasil kakao, kelapa dalam, kopi, tekstil, gula aren dan ikan yang didesain dalam Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sulawesi Barat 2020-2040 sebagaimana disajikan pada Tabel 3.1. sangat ditentukan adanya dukungan dan komitmen serius dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Untuk itu, maka perlu ditumbuhkembangkan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Stabilitas politik dan ekonomi yang mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Barat antara 7,52% - 10,00% per tahun;
- 2) Perkembangan ekonomi nasional dan global yang dapat mendukung pertumbuhan ekspor nasional khususnya produk industri;
- 3) Iklim investasi dan pembiayaan yang mendorong peningkatan investasi di sektor industri;
- 4) Ketersediaan sarana dan prasarana yang dapat mendukung peningkatan produksi dan kelancaran distribusi;
- 5) Kualitas dan kompetensi SDM industri berkembang dan mendukung peningkatan penggunaan teknologi dan inovasi di sektor industri;
- 6) Kebijakan terkait pemanfaatan sumber daya alam yang mendukung pelaksanaan program hilirisasi industri secara optimal; dan
- 7) Koordinasi antar OPD/lembaga dan stakeholder terkait serta peran aktif dunia usaha dalam pembangunan industri.

Komitmen terhadap pencapaian sasaran program pembangunan industri komoditi industri unggulan yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sulawesi Barat 2020-2040 harus menjadi perhatian serius semua *stakeholder*, terutama OPD Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Kelautan dan Perikanan dan Dinas Peternakan Provinsi Sulawesi Barat

## **BAB IV**

### **STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI SULAWESI BARAT**

#### **A. Strategi Pembangunan Industri**

##### **1. Strategi Pembangunan Industri Provinsi Sulawesi Barat**

Pembangunan industri di Provinsi Sulawesi Barat dengan berbagai potensinya menghadapi berbagai kendala, sebagaimana telah dirumuskan pada pembahasan utamanya yaitu:

- a. pengembangan sektor hulu belum optimal bersinergi dengan pengembangan sektor industri, sehingga kontribusi sektor industri terhadap PDRB masih rendah;
- b. sumberdaya manusia pada sektor hulu dan sektor industri masih kurang dan harus ditingkatkan, juga pengorganisasian yang belum sepenuhnya mampu mengeksplorasi sumberdaya;
- c. pengembangan produk bernilai tambah masih sangat terbatas dan terpaku pada beberapa jenis produk antara (produk setengah jadi tertentu), belum berkembang sesuai dengan potensinya dan belum sampai pada kompetensi spesifik daerah;
- d. infrastruktur yang belum memadai dalam mendukung pengembangan industri lebih lanjut, sehingga belum tumbuh dan berkembangnya IKM yang melakukan kegiatan ekspor;
- e. wilayah pengembangan kawasan industri yang telah direncanakan belum sepenuhnya terealisasi.

Untuk mencapai Visi, melaksanakan Misi dan untuk menjawab permasalahan pembangunan industri ini, diperlukan strategi yang tepat. Strategi ini juga untuk mencapai Sasaran yang telah ditentukan dalam pembangunan industri Provinsi Sulawesi Barat, yang dilakukan melalui berbagai program yang paling tidak meliputi pembangunan sumber daya industri; pembangunan sarana dan prasarana industri; kerjasama dengan lembaga baik di dalam maupun di luar negeri dan antar pemerintah daerah dalam pengembangan industri; pengembangan perwilayahan industri; pemberdayaan IKM; serta perijinan dan pajak daerah yang menunjang pembangunan industri. Program-program tersebut dilakukan melalui strategi sebagai berikut:

- a. Penguatan pasokan bahan baku industri yang berkualitas dan sustainable;
- b. Menumbuh-kembangkan industri pengolahan sumberdaya unggulan yang meliputi kakao, kelapa dalam, kopi, gula aren, tekstil dan ikan dengan struktur industri yang kuat dan berdaya saing;
- c. Mengembangkan kompetensi industri daerah pada tiap-tiap komoditas basis industri unggulan;
- d. Dukungan penguatan SDM, kelembagaan pelaku usaha dan konektivitas yang kuat pada struktur industri antar satuan unit usaha;
- e. Perbaiki iklim usaha industri yang kondusif dan bertanggung-jawab;
- f. Kerjasama antar institusi terkait (pusat-daerah, lembaga penelitian, dan sebagainya);
- g. Terbangun peningkatan infrastruktur dan fasilitas penting untuk tumbuh dan berkembangnya industri termasuk aksesibilitas pada sumber-sumber bahan baku dan pemasaran;
- h. Mewujudkan Kawasan Industri sesuai perencanaan.



## 2. Keterkaitan Visi, Misi dan Strategi Pembangunan Industri Provinsi Sulawesi Barat

Visi, Misi dan Strategi merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dan berhubungan satu dengan yang lain. Strategi yang disusun adalah untuk mencapai visi dan misi pembangunan industri. Oleh karena itu Visi, Misi dan Strategi adalah saling terkait satu sama lain. Keterkaitan antara Visi Pembangunan Industri Provinsi Sulawesi Barat dengan Misi dan Strategi adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Keterkaitan Visi, Misi dan Strategi Pembangunan Industri Di Provinsi Sulawesi Barat 2020-2040**

<b>Visi: Industri Unggul Terkemuka, Inovatif, Kompetitif dan Berwawasan Lingkungan Menuju Peningkatan Ekonomi Kerakyatan 2020</b>			
<b>Misi</b>		<b>Strategi</b>	
1	Menumbuhkembangkan industri komoditas unggulan daerah, terkemuka, kompetitif, kreatif, inovatif berbasis ekonomi kerakyatan.	1	Penguatan pasokan bahan baku industri yang berkualitas dan sustainable.
		2	Menumbuh-kembangkan industri pengolahan sumberdaya unggulan yang meliputi kakao, kelapa dalam, kopi, gula aren, tekstil dan ikan dengan struktur industri yang kuat dan berdaya saing.
2	Menumbuhkan dan mengoptimalkan hilirisasi industri agro secara terpadu untuk meningkatkan nilai tambah dan kompetensi industri daerah	3	Mengembangkan kompetensi industri daerah pada tiap-tiap komoditas basis industri unggulan.
		4	Dukungan penguatan SDM, kelembagaan pelaku usaha dan konektivitas yang kuat pada struktur industri antar satuan unit usaha.
3	Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah dan mengembangkan iklim yang kondusif bagi investasi sektor industri secara komprehensif mendukung peningkatan dan pemerataan ekonomi kerakyatan di Provinsi Sulawesi Barat.	5	Perbaiki iklim usaha industri yang kondusif dan bertanggung-jawab.
		6	Kerjasama antar institusi terkait (pusat-daerah, lembaga penelitian, dsb.).
		7	Terbangun peningkatan infrastruktur dan fasilitas penting untuk tumbuh dan berkembangnya industri termasuk aksesibilitas pada sumber-sumber bahan baku dan pemasaran.
		8	Mewujudkan Kawasan Industri sesuai perencanaan.

Khusus untuk strategi ketiga, hilirisasi industri agro lanjutan yang dipilih dan dikembangkan diharapkan akan sampai hingga menjadi kompetensi industri provinsi. Strategi ini merupakan strategi pokok dengan dasar untuk mengurai kendala utama pembangunan industri di Provinsi Sulawesi Barat, dan karenanya menjadi acuan dalam penjabaran rincian program-program pembangunan industri di Provinsi Sulawesi Barat.

### B. Program Pembangunan Industri

Pembangunan sumber daya industri dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia industri; pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sumber daya alam; pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri;

pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi; penyediaan sumber pembiayaan.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian bahwa penyusunan RPIP adalah sesuai dengan sumberdaya unggulan daerah, maka dianalisis dan ditetapkan terlebih dahulu industri-industri unggulan provinsi yang masuk dalam RPIP ini.

### 1. Penetapan, Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan Provinsi

Penetapan industri unggulan Provinsi Sulawesi Barat dilakukan melalui beberapa fase dan analisis. Penetapan ini diawali dengan identifikasi sektor unggulan yang memberikan kontribusi terbesar pada ekonomi daerah. Kemudian dilanjutkan dengan tahapan kedua yaitu pemilihan *long list* komoditas unggulan dari sektor/sub-sektor unggulan dan sektor/ sub-sektor lainnya. Pada tahap ketiga dilakukan pemilihan *short list* komoditas unggulan dan dilanjutkan tahapan keempat yaitu penentuan komoditas unggulan prioritas yang akan masuk sebagai komoditas basis dalam RPIP ini dan tahap kelima penentuan industri unggulan provinsi.

#### a) Tahap 1: Analisis Sektor Unggulan Provinsi

Sebagai provinsi dengan luasan wilayah yang sangat besar, Provinsi Sulawesi Barat memiliki berbagai sumberdaya alam yang besar dan sebagiannya sangat potensial dikembangkan industrinya. Untuk menggambarkan daya saing sektoral dan keberadaan sektor basis di dalamnya dapat dilakukan melalui beberapa analisis komparasi sektoral. Diantara analisis yang dapat digunakan adalah analisis indeks LQ (*Location Quotient*), analisis *shift share*, diuraikan berikut. Masing-masing analisis ini menggunakan data pendapatan wilayah yang diperbandingkan dengan wilayah yang lebih luas (akumulatif beberapa wilayah) sebagai referensinya, atau daerah bawah yang dibandingkan dengan daerah atas, seperti wilayah provinsi terhadap nasional.

Menurut Richardson dalam Adisasmita (2005), analisis basis ekonomi adalah berkenaan dengan identifikasi pendapatan basis. Bertambah banyaknya kegiatan basis dalam suatu wilayah akan menambah arus pendapatan ke dalam wilayah bersangkutan, yang selanjutnya menambah permintaan terhadap barang atau jasa di dalam wilayah tersebut, sehingga pada akhirnya akan menimbulkan kenaikan volume kegiatan non basis.

PDRB Provinsi dalam 3 tahun terakhir sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4.3, menunjukkan sektor unggulan yang berkontribusi terbesar dalam perekonomian Provinsi Sulawesi Barat adalah sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, sektor Perdagangan, dan sektor Industri. Untuk lebih mendalami daya saing sektoral dalam peran ekonominya di Provinsi Sulawesi Barat dibandingkan dengan peran masing-masing sektor secara nasional, maka dilakukan analisis-analisis pendekatan sektoral. Kedua analisis dalam hal ini adalah LQ dan *Shift Share* dihitung berdasarkan besaran kontribusi sektoral dalam PDRB ADHK Provinsi Sulawesi Barat dibandingkan dengan PDRB ADHK Nasional (Tabel 4.3). PDRB ADHK Nasional dan Provinsi Sulawesi Barat masing-masing sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Lapangan Usaha**  
**Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Provinsi Sulawesi Barat (Juta Rp)**  
**Tahun 2014 – 2016**

No	Lapangan Usaha (Industri)	Tahun			Jumlah	Rata-rata
		2014	2015	2016		
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9.753.263,93	10.313.540,46	10.734.075,86	30.800.880,25	10.266.960,08
2	Pertambangan dan Penggalian	516.092,02	557.671,43	618.417,09	1.692.180,54	564.060,18

3	Industri Pengolahan	2.668.880,41	2.966.345,93	2.893.312,33	8.528.538,67	2.842.846,22
4	Pengadaan Listrik, Gas	14.532,39	15.737,41	18.831,76	49.101,56	16.367,19
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	39.225,01	42.845,64	45.520,03	127.590,68	42.530,23
6	Konstruksi	1.849.890,14	2.013.372,10	2.231.871,85	6.095.134,09	2.031.711,36
7	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.460.907,06	2.589.470,25	2.719.540,13	7.769.917,44	2.589.972,48
8	Transportasi dan Pergudangan	394.256,80	422.634,59	447.081,93	1.263.973,32	421.324,44
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	59.358,40	62.144,14	67.944,88	189.447,42	63.149,14
10	Informasi dan Komunikasi	1.038.432,53	1.151.336,03	1.257.955,35	3.447.723,91	1.149.241,30
11	Jasa Keuangan	478.877,64	508.835,48	584.628,20	1.572.341,32	524.113,77
12	Real Estate	687.127,21	721.579,41	764.451,62	2.173.158,24	724.386,08
13	Jasa Perusahaan	21.418,01	23.051,21	24.117,10	68.586,32	22.862,11
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.994.855,53	2.215.244,36	2.504.076,67	6.714.176,56	2.238.058,85
15	Jasa Pendidikan	1.280.765,49	1.361.373,46	1.509.771,26	4.151.910,21	1.383.970,07
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	482.948,53	511.950,94	572.498,28	1.567.397,75	522.465,92
17	Jasa lainnya	454.823,92	487.299,31	530.672,71	1.472.795,94	490.931,98
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>		<b>24.195.655,02</b>	<b>25.964.432,15</b>	<b>27.524.767,05</b>		
<b>Rata-Rata</b>		<b>1.423.273,82</b>	<b>1.527.319,54</b>	<b>1.619.103,94</b>		

Sumber : Sulawesi Barat Dalam Angka, 2016

**Tabel 4.3**  
**Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Nasional (Juta Rp) Tahun 2014 – 2016**

No	Lapangan Usaha (Industri)	Tahun			Jumlah	Rata-rata
		2014	2015	2016		
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.129.052.700,00	1.171.445.800,00	1.210.955.500,00	3.511.454.000,00	1.170.484.666,67
2	Pertambangan dan Penggalian	794.489.500,00	767.327.200,00	774.593.100,00	2.336.409.800,00	778.803.266,67
3	Industri Pengolahan	1.854.256.700,00	1.934.533.200,00	2.016.876.900,00	5.805.666.800,00	1.935.222.266,67
4	Pengadaan Listrik, Gas	94.047.200,00	94.894.800,00	100.009.900,00	288.951.900,00	96.317.300,00
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6.882.500,00	7.369.000,00	7.634.600,00	21.886.100,00	7.295.366,67
6	Konstruksi	826.615.600,00	879.163.900,00	925.040.300,00	2.630.819.800,00	876.939.933,33
7	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.177.297.500,00	1.207.164.500,00	1.255.760.800,00	3.640.222.800,00	1.213.407.600,00
8	Transportasi dan Pergudangan	326.933.000,00	348.855.900,00	374.843.400,00	1.050.632.300,00	350.210.766,67
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	257.815.500,00	268.922.400,00	282.823.400,00	809.561.300,00	269.853.766,67
10	Informasi dan Komunikasi	384.475.600,00	421.769.800,00	459.208.100,00	1.265.453.500,00	421.817.833,33
11	Jasa Keuangan	319.825.500,00	347.269.000,00	378.279.400,00	1.045.373.900,00	348.457.966,67
12	Real Estate	256.440.200,00	266.979.600,00	279.500.500,00	802.920.300,00	267.640.100,00
13	Jasa Perusahaan	137.795.300,00	148.395.500,00	159.321.700,00	445.512.500,00	148.504.166,67
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	296.329.700,00	310.054.600,00	319.965.000,00	926.349.300,00	308.783.100,00
15	Jasa Pendidikan	263.685.000,00	283.020.100,00	293.887.600,00	840.592.700,00	280.197.566,67
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	91.357.100,00	97.465.800,00	102.490.200,00	291.313.100,00	97.104.366,67
17	Jasa lainnya	134.070.100,00	144.904.200,00	156.507.500,00	435.481.800,00	145.160.600,00
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>		<b>8.351.368.700,00</b>	<b>8.699.535.300,00</b>	<b>9.097.697.900,00</b>		
<b>Rata-Rata</b>		<b>491.256.982,35</b>	<b>511.737.370,59</b>	<b>535.158.700,00</b>		

Sumber : Nasional Dalam Angka, 2016

## i) Analisis LQ

LQ (*Location Quotient*) adalah salah satu indikator yang dapat menggambarkan keberadaan sektor basis di suatu daerah. LQ telah diakomodasi dari Miller & Wright (1991), Isserman (1997), dan Ron Hood (1998). Menurut Hood (1998) *Location Quotient* adalah suatu alat pengembangan ekonomi yang lebih sederhana dengan segala kelebihan dan keterbatasannya. LQ merupakan salah satu pendekatan yang umum digunakan dalam model ekonomi basis sebagai langkah awal untuk memahami sektor kegiatan yang dianggap menjadi pemicu pertumbuhan.

Indeks LQ adalah suatu indikator sederhana yang dapat menunjukkan kekuatan atau besar kecilnya peranan suatu sektor dalam suatu daerah dibandingkan dengan daerah atasnya atau wilayah referensinya. (Daryanto, Arif, 2010). Metode ini berguna untuk menentukan sektor unggulan dan sektor non-unggulan dengan cara menghitung perbandingan antara pendapatan di sektor *i* pada daerah bawah terhadap pendapatan total semua sektor di daerah bawah dengan pendapatan di sektor *i* pada daerah atas terhadap total semua sektor di daerah atasnya.

Daerah bawah dan daerah atas yang dimaksud adalah daerah administratif (Glasson *dalam* Tarigan, 2005), misalnya penelitian atau analisis ini dilakukan pada tingkat kota, maka daerah daerah bawahnya adalah kota dan atasnya adalah provinsi. Maka analisis LQ untuk Provinsi Sulawesi Barat, daerah bawahnya adalah provinsi dan atasnya adalah nasional. Dalam hal ini, LQ yang diukur adalah sektor-sektor dalam perekonomian Provinsi Sulawesi Barat melalui pendekatan perkembangan PDRB sebagai indikator pertumbuhan Wilayah.

Menurut Adisasmita (2005), berdasarkan perhitungan LQ hasilnya dapat dianalisis dengan menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$LQ = \frac{V_{ik}/V_k}{V_{ip}/V_p}$$

LQ > 1 : Merupakan sektor basis, artinya tingkat spesialisasinya provinsi lebih tinggi dari tingkat nasional.

LQ < 1 : sektor non-basis yaitu sektor yang tingkat spesialisasinya lebih rendah dari tingkat nasional

LQ = 1 : sektor non-basis yaitu sektor yang tingkat spesialisasinya sama dengan tingkat nasional.

Perhitungan analisis LQ dengan menggunakan PDRB Provinsi Sulawesi Barat (Tabel 4.3) dan PDRB Nasional (Tabel 4. 4) hasilnya adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.4**  
**LQ Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Sulawesi Barat terhadap Nasional, 2016**

NO	Laporan Usaha (Industri)	LQ			Rata-Rata LQ	Keterangan
		2014	2015	2016		
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.982	2.950	2.930	2.954	Sektor Basis
2	Pertambangan dan Penggalian	0.224	0.244	0.264	0.244	Sektor Non Basis
3	Industri Pengelolaan	0.497	0.514	0.474	0.195	Sektor Non Basis
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0.053	0.056	0.062	0.057	Sektor Non Basis
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.967	1.948	1.971	1.962	Sektor Basis
6	Konstruksi	0.772	0.767	0.797	0.779	Sektor Non Basis
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0.721	0.719	0.716	0.719	Sektor Non Basis

8	Transportasi dan Pergudangan	0.416	0.406	0.394	0.405	Sektor Non Basis
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.079	0.077	0.079	0.079	Sektor Non Basis
10	Informasi dan Komunikasi	0.932	0.915	0.905	0.917	Sektor Non Basis
11	Jasa Keuangan	0.517	0.491	0.500	0.506	Sektor Non Basis
12	Real Estate	0.925	0.906	0.904	0.911	Sektor Non Basis
13	Jasa Perusahaan	0.054	0.052	0.050	0.052	Sektor Non Basis
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.324	2.394	2.587	2.435	Sektor Basis
15	Jasa Pendidikan	1.677	1.612	1.698	1.662	Sektor Basis
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.825	1.760	1.846	1.810	Sektor Basis
17	Jasa Lainnya	1.171	1.127	1.121	1.139	Sektor Basis
Produk Domestik Regional Bruto						

Sumber : Hasil Pengolahan Data Tim, 2017

Hasil analisis LQ ini menunjukkan beberapa hal sebagai berikut:

- Ada 5 sektor yang memiliki nilai LQ >1,00 yang menunjukkan bahwa ke-5 sektor ini merupakan sektor basis yang mempunyai keunggulan komparatif relatif terhadap sektor yang sama diantara Provinsi secara Nasional.
- Industri Pengolahan belum menjadi sektor basis karena LQ<1, menunjukkan bahwa sektor ini masih terkategori sektor non-basis yang relatif tidak mempunyai keunggulan komparatif terhadap sektor yang sama diantara Provinsi di Tingkat Nasional

## ii) Analysis Shift Share

Analysis ini pertama kali diperkenalkan oleh Perloff, et al *dalam* Kusuma, (2009). Analysis *Shift Share* merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis struktur perekonomian di suatu wilayah. Selain itu, dapat juga digunakan untuk melihat pertumbuhan sektor-sektor perekonomian suatu wilayah dalam periode waktu tertentu. Analysis ini dapat dilakukan pada tingkat provinsi, provinsi maupun nasional. Selain itu, melalui analisis ini juga dapat diketahui sektor mana saja yang mengalami pertumbuhan yang paling cepat, juga dapat diketahui sektor-sektornya yang memberikan kontribusi paling besar terhadap pertumbuhan di tingkat provinsi.

Secara umum terdapat 3 (tiga) Komponen Pertumbuhan wilayah dalam analisis *Shift Share*, yaitu: Komponen Pertumbuhan Regional, Komponen Pertumbuhan Proporsional, dan Komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah (Priyarsono, Sahara dan M. Firdaus *dalam* Kusuma, 2009). Komponen Pertumbuhan Nasional/Regional (Pr) adalah perubahan kebijakan ekonomi nasional atau perubahan dalam hal-hal yang mempengaruhi perekonomian semua ector dan wilayah. Contohnya antara lain kecenderungan inflasi, pengangguran dan kebijakan perpajakan.

Komponen Pertumbuhan Proporsional (Pp) timbul karena perbedaan ector dalam permintaan produk akhir, perbedaan dalam ketersediaan bahan mentah, perbedaan dalam kebijakan industri seperti kebijakan perpajakan, subsidi dan *price support* serta perbedaan dalam struktur dan keragaman pasar. Komponen pertumbuhan pangsa wilayah (Ppw) timbul karena peningkatan atau penurunan PDRB atau kesempatan kerja dalam suatu wilayah dibandingkan dengan wilayah lainnya. Cepat lambatnya pertumbuhan suatu wilayah dibandingkan dengan wilayah lainnya ditentukan oleh keunggulan komparatif, akses pasar, dan dukungan kelembagaan. Prasarana sosial ekonomi serta kebijakan ekonomi regional pada wilayah tersebut. Apabila  $Pp + Ppw \geq 0$  maka dapat dikatakan bahwa pertumbuhan sektor ke i di wilayah ke j termasuk ke dalam kelompok *progresif* (maju).

Sementara itu,  $Pp + Ppw < 0$  menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor  $i$  pada wilayah  $j$  tergolong lambat. Adapun persamaan analisis *Shift Share* disajikan sebagai berikut :

$$PPW = ri (ri'/ri - nt'/nt) \quad PP = ri (nt'/nt - Nt'/Nt) \quad PB = PP + PPW$$

Dengan penilaian:

- PP>0** = komoditas  $i$  pada region  $j$  pertumbuhannya cepat.
- PP<0** = komoditas  $i$  pada region  $j$  pertumbuhannya lambat.
- PPW>0** = daya saing baik
- PPW<0** = tidak dapat bersaing dengan baik
- PB≥0** = pertumbuhan komoditas termasuk progresif (maju).
- PB<0** = pertumbuhan komoditas termasuk lamban.

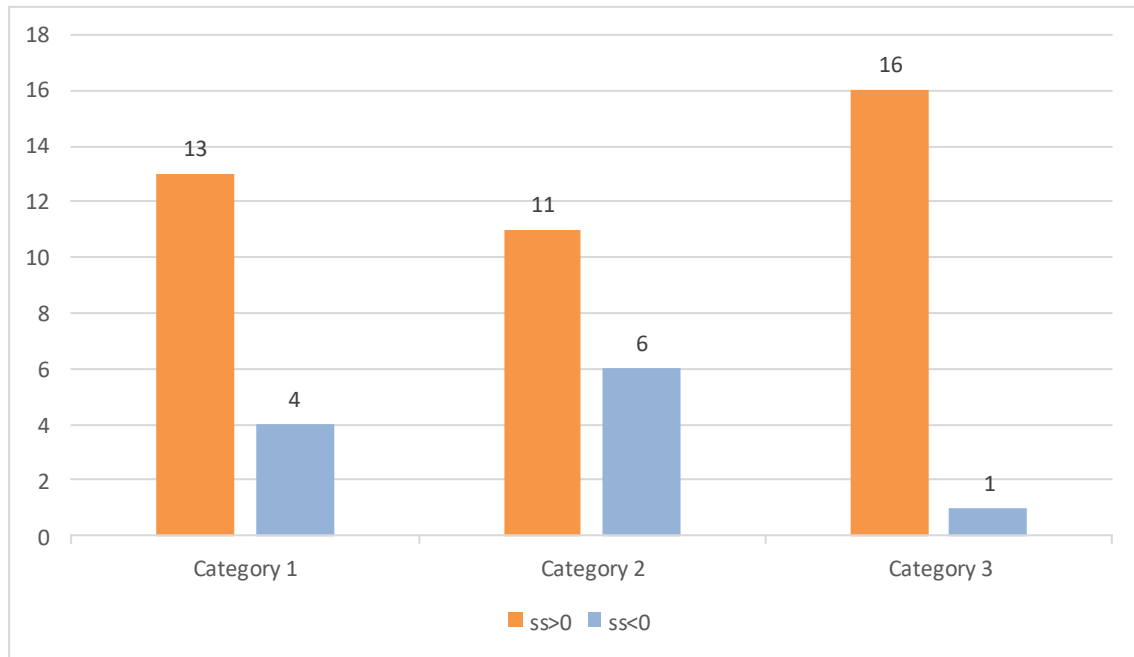
Perhitungan analisis *Shift Share* dengan menggunakan PDRB Provinsi Sulawesi Barat dan PDRB Nasional hasilnya adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.5**  
**Analysis Shift Share PDRB Provinsi Sulawesi Barat terhadap Nasional (2014/2016)**

No	Lapangan Usaha (Industri)	KPN	KPP	KPPW	PE
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,089	-0,017	0,028	0,101
2	Pertambangan dan Penggalian	0,089	-0,114	0,223	0,198
3	Industri Pengolahan	0,089	-0,002	-0,004	0,084
4	Pengadaan Listrik, Gas	0,089	-0,026	0,232	0,296
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,089	0,020	0,051	0,160
6	Konstruksi	0,089	0,030	0,087	0,206
7	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,089	-0,023	0,038	0,105
8	Transportasi dan Pergudangan	0,089	0,057	-0,013	0,134
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,089	0,008	0,048	0,145
10	Informasi dan Komunikasi	0,089	0,105	0,017	0,211
11	Jasa Keuangan	0,089	0,093	0,038	0,221
12	Real Estate	0,089	0,001	0,023	0,113
13	Jasa Perusahaan	0,089	0,067	-0,030	0,126
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	0,089	-0,010	0,176	0,255
15	Jasa Pendidikan	0,089	0,025	0,064	0,179
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,089	0,032	0,064	0,185
17	Jasa lainnya	0,089	0,078	-0,001	0,167
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>					



**Grafik 4.1**  
**Nilai PPW, PP, PB Sektor Lapangan Usaha**  
**di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017**



Sumber: Hasil Pengelolaan Data Tim, 2017

### **PPW (Tingkat Daya Saing)**

Berdasarkan hasil analisis, maka nilai lapangan usaha yang positif berarti  $PPW > 0$  dan nilai lapangan usaha yang negatif berarti  $PPW < 0$ . Lapangan usaha persektor yang memiliki tingkat daya saing positif yang baik sebanyak 13 usaha diantaranya, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Sektor Konstruksi dan Perdagangan Besar dan Eceran.

Sedangkan lapangan usaha persektor yang memiliki tingkat daya saing negative diantaranya, Pengolahan, Transportasi dan Pergudangan dan Jasa lainnya. Profil secara detail berkaitan dengan tingkat daya saing (PPW) sebagaimana disajikan pada Tabel 4.6 dan Grafik 4.1

### **PP (Tingkat Pertumbuhan)**

Berdasarkan hasil analisis, lapangan usaha dengan pertumbuhan proporsional yaitu dengan nilai  $PP > 0$  sebanyak 11 lapangan usaha diantaranya, Pengadaan Listrik, Gas, Konstruksi dan Jasa lainnya artinya lapangan usaha tersebut termasuk sektor dengan pertumbuhan yang cepat di Provinsi Sulawesi Barat.

Sedangkan untuk lapangan usaha lainnya memiliki nilai  $PP < 0$  sebanyak 6 sektor diataranya, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan Industri Pengolahan artinya lapangan usaha termasuk sektor yang pertumbuhannya lambat. Profil secara detail berkaitan dengan tingkat pertumbuhan (PP) sebagaimana disajikan pada Tabel 4.6 dan Grafik 4.1

### **PB (Tingkat Progresif)**

Berdasarkan hasil analisis, lapangan usaha yang paling banyak memiliki nilai  $PB > 0$  terdapat pada 16 sektor diantaranya, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Pertambangan dan Penggalian dan Jasa lainnya. Sedangkan sektor usaha yang memiliki nilai  $PB < 0$  terdapat pada 1 yaitu Industri Pengolahan. Dengan demikian, dapat disimpulkan semua sektor lapangan usaha yang memiliki nilai  $PB > 0$  termasuk progresif (maju di Provinsi Sulawesi Barat. Profil



secara detail berkaitan dengan tingkat progresif (PB) sebagaimana disajikan pada Tabel 4.6 dan Grafik 4.1

### Resume

Setelah dilakukan perhitungan melalui SSA, maka hasil dari perhitungannya dikompilasikan dengan hasil analisis LQ sebelumnya. Dengan membandingkan kedua tahap analisis tersebut dapat diketahui sektor lapangan usaha yang memenuhi kriteria sebagai sektor unggulan, berkembang, potensial dan keterbelakang, yaitu dengan mengacu pada Tipologi Klassen sebagaimana disajikan pada Gambar 4.1

**Gambar 4.1**  
**Pengklasifikasian Tipologi Klassen**

Tipologi Klassen	
<p style="text-align: center;"><b>Kuadran II</b></p> <p style="text-align: center;">Sektor Berkembang <math>LQ \leq 1, PB &gt; 0</math></p>	<p style="text-align: center;"><b>Kuadran I</b></p> <p style="text-align: center;">Sektor Unggulan <math>LQ &gt; 1, PB &gt; 0</math></p>
<p style="text-align: center;"><b>Kuadran IV</b></p> <p style="text-align: center;">Sektor Terbelakang <math>LQ \leq 1, PB \leq 0</math></p>	<p style="text-align: center;"><b>Kuadran III</b></p> <p style="text-align: center;">Sektor Potensial <math>LQ &gt; 1, PB \leq 0</math></p>
<p>Sumber:</p> <p>Yuda, D. K., &amp; Navitas, P. (2014). Arahana Pengembangan Ekonomi Kabupaten Lamongan Berdasarkan Sektor Unggulan (Studi Kasus: Sektor Pertanian). <i>Jurnal Teknik ITS</i>, 3(2), C136-C141.</p>	

Berdasarkan pengklasifikasian dilakukan untuk menentukan sektor unggulan dengan kriteria sektor yang merupakan basis, memiliki daya saing baik, pertumbuhannya cepat dan progresif terhadap provinsi. Sedangkan untuk kriteria ke dua yaitu sektor potensial, yaitu memiliki kriteria sebagai komoditas basis dan memiliki salah satu saja komponen pertumbuhan wilayah dari hasil analisis SSA, sebagaimana disajikan pada Tabel 4.6

**Tabel 4.6**  
**Analysis LQ dan Shift Share PDRB Provinsi Sulawesi Barat terhadap Tingkat Nasional (2014/2016)**

No	Lapangan Usaha (Industri)	LQ	Shift Share			Keterangan
			PPW	PP	PB	
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,954	273.298,79	-164.097,96	109.200,83	Unggulan
2	Pertambangan dan Penggalian	0,244	115.249,56	-59.045,62	56.203,94	Berkembang
3	Industri Pengolahan	0,495	-9.631,61	-4.443,89	-14.075,50	Terbelakang
4	Pengadaan Listrik, Gas	0,057	3.378,00	-377,33	3.000,67	Berkembang
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,962	2.008,62	781,01	2.789,63	Unggulan
6	Konstruksi	0,779	161.716,23	54.948,02	216.664,25	Berkembang
7	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,719	94.621,09	-55.909,68	38.711,42	Berkembang
8	Transportasi dan Pergudangan	0,405	-4.951,24	22.543,18	17.591,94	Berkembang
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,079	2.828,76	453,09	3.281,85	Berkembang
10	Informasi dan Komunikasi	0,917	17.677,35	109.044,81	126.722,16	Berkembang
11	Jasa Keuangan	0,506	18.227,00	44.728,13	62.955,14	Berkembang
12	Real Estate	0,911	15.534,72	383,81	15.918,54	Berkembang
13	Jasa Perusahaan	0,052	-646,83	1.431,88	785,05	Berkembang
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,435	350.111,17	-19.162,48	330.948,69	Unggulan

15	Jasa Pendidikan	1,662	82.306,31	32.242,45	114.548,76	Unggulan
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,810	30.695,93	15.694,60	46.390,53	Unggulan
17	Jasa lainnya	1,139	-268,60	35.471,55	35.202,95	Unggulan
LQ > 1		6	13	11	16	SS > 0
LQ < 1		11	4	6	1	SS < 0

Sumber: Hasil Pengolahan Data Tim, 2017

Berdasarkan Tabel 4.7 dapat dilihat klasifikasi sektor lapangan usaha sesuai PDRB unggulan, berkembang, potensial dan keterbelakang yang terdapat di Provinsi Sulawesi Barat. Sektor lapangan usaha yang termasuk kategori unggulan adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan Pengadaan Listrik, Gas. Kemudian, sektor lapangan usaha yang termasuk kategori berkembang adalah Pertambangan dan Penggalan, Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan Jasa lainnya.

Sedangkan sektor lapangan usaha yang termasuk kategori keterbelakang adalah Industri Pengolahan.

Dengan demikian, setelah adanya analisis LQ dan SS berkaitan dengan penentuan sektor lapangan usaha berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 PDRB, maka sektor unggulan yang menjadi fokus dalam penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sulawesi Barat 2020-2040 berbasis komoditas unggulan sektor agro adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.

#### **b) Tahap-2: Analisis Komoditas Unggulan Provinsi**

Untuk memunculkan komoditas industri unggulan provinsi, yang pertama dilakukan adalah menggali komoditas unggulan dari sektor/ sub-sektor unggulan utama. Sebagaimana hasil analisis sektoral di atas, Perkebunan dan Pertanian Tanaman Pangan adalah sub-sektor unggulan utama Provinsi Sulawesi Barat. Maka, komoditas-komoditas dari sub-sektor Perkebunan dan Pertanian Tanaman Pangan ini dianalisis potensinya (untuk pengembangan industri) dan dipilih diantaranya yang paling potensial.

Berikutnya, untuk memastikan seberapa potensial komoditas-komoditas dari sektor/ sub-sektor lainnya yang bukan merupakan sektor/ sub-sektor unggulan utama seperti sektor/ sub-sektor Kehutanan, Perikanan, Pertambangan dan lainnya, maka yang kedua dilakukan adalah menganalisis komoditas-komoditas dari masing-masing sektor/ sub-sektor tersebut, dianalisis potensinya (untuk pengembangan industri) dan dipilih diantara komoditas-komoditas tersebut yang paling diunggulkan dan paling potensial.

Analisis dalam memilih komoditas-komoditas yang paling diunggulkan dan paling potensial untuk pengembangan industri ini dilakukan dengan analisis dasar terhadap volume produksi dan pertumbuhan produksi serta komparasi dalam skala regional atau nasional terhadap komoditas-komoditas dari masing-masing sektor/ sub-sektor tersebut.

#### **c) Long List Komoditas Unggulan**

Dalam faktanya, Provinsi Sulawesi Barat memiliki banyak sumber bahan baku dan beragam potensi yang dapat dikembangkan untuk membangun industri serta pemilihan berbagai peluang industri yang akan dikembangkan. Pemilihan daftar panjang komoditas unggulan juga didasarkan pada fakta data dan juga wawancara khusus dengan institusi OPD terkait, Bappeda dan stakeholder terkait lainnya, serta melalui FGD yang melibatkan semua stakeholder tersebut.

Dari semua analisis dan proses di atas, dapat diperoleh *long-list* komoditas unggulan Provinsi Sulawesi Barat yaitu sebagai berikut:

**Tabel 4.7.**  
**Long List Komoditas Unggulan Provinsi Sulawesi Bar**

Sektor/ Sub-sektor	Long List Komoditas Unggulan	Existing Industri	Peluang Pengembangan Industri	Skala Industri
Perkebunan	Kelapa Dalam	Kopra, Minyak Kelapa Dalam	1. Minyak kelapa Dalam 2. Tepung kelapa Dalam 3. Kelapa parut, 4. Santan dalam Kemasan, 5. VCO, 6. Nata de Coco, 7. Konsentrat Air Kelapa Dalam, 8. Arang Batok, 9. Meubel kayu kelapa Dalam Carbon Active	IKM hingga besar
	Sawit	CPO, Minyak Makan Curah	Industri margarine; Industri minyak makan kelapa sawit/ CPO; Industri minyak goreng kelapa sawit; Oleochemical	IKM hingga besar
	Kakao		1. Cocoa Liquor 2. Butter, 3. Cocoa Cake, 4. Cocoa Powder 5. Biji coklat fermentasi 6. Makanan dan minuman berbasis coklat 7. Suplemen dan pangan fungsional berbasis kakao	IKM hingga besar
	Gula aren		Industri Olahan Gula Aren dan Gula Semut skala menengah Industri Olahan Gula Aren Gula Semut skala besar bagi ekspor Industri minuman penyegar Industri gula rendah	IKM
	Kopi	Kopi dekafeinasi Aneka pangan olahan berbasis kopi organik Suplemen dan pangan fungsional berbasis kopi	1. Kopi bubuk 2. Roasted Coffee 3. kopi instan 4. kopi dekafein 5. kopi Mix 6. kopi beraroma 7. Makanan dan minuman berbasis kopi 8. Suplemen dan pangan fungsional berbasis Kopi	IKM hingga besar
Tanaman	Jagung	-	Bahan baku pakan ternak	Besar
Pangan	Ubi kayu	Aneka Makanan dan Minuman	Aneka Makanan dan Minuman	IKM hingga

				besar
Kehutanan	Murbei	1. Benang 2. Tenun mandar, 3. Tenun sekomandi dan 4. Tenun sambuk	1. Benang 2. Tenun mandar, 3. Tenun sekomandi dan 4. Tenun sambuk	IKM hingga besar
Perikanan	Ikan		1. Ikan awet dan fillet 2. Surimi 3. Pengalengan ikan 4. Pengasapan ikan 5. Tepung ikan 6. Makanan berbasis ikan 7. Suplemen dan pangan fungsional berbasis ikan	IKM hingga besar

Dari *long list* komoditas unggulan ini berikutnya dipilih diantaranya *short list* komoditas unggulan prioritas untuk pembangunan industri Provinsi Sulawesi Barat.

#### d) Tahap-3: Penentuan Komoditas Unggulan Prioritas

Komoditas unggulan Provinsi Sulawesi Barat (*long list*), dianalisis eksistensinya dan dibandingkan satu sama lain dengan menggunakan beberapa pertimbangan umum atau indikator untuk pengembangan industri, sehingga diperoleh komoditas unggulan prioritas (*short list* komoditas unggulan). Dengan kata lain, untuk menilai suatu komoditas seberapa potensial dapat dikembangkan industrinya maka harus dilihat dengan memperhitungkan berbagai faktor yang terkait.

Kriteria untuk menentukan *short list* ini ditetapkan dengan menggunakan pertimbangan pemilihan komoditas-komoditas basis industri yang didasarkan pada berbagai kriteria dan sub-kriteria/faktor yang dimunculkan melalui sebagian pendekatan dari metode *Pairwise* yang sudah umum digunakan dalam analisis pengembangan industri. Melalui analisis yang dilakukan, muncul 3 kriteria pokok dan darinya ditetapkan 10 sub-kriteria (faktor).

Penetapan industri unggulan Provinsi secara keseluruhan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagaimana tabel berikut ini:

**Tabel 4.8.**  
**Faktor-faktor yang Digunakan untuk Menentukan Industri Unggulan Provinsi.**

No.	Faktor	Penjelasan
1.	Nilai Tambah Ekonomis/Peningkatan Pendapatan Daerah	Komoditas calon terpilih dinilai mampu memberikan sumbangan aspek ekonomi daerah sehingga memberikan peningkatan pendapatan daerah. Akan dipetakan pada subkriteria/faktor ini adalah: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penciptaan nilai tambah komoditas</li> <li>- Ketersediaan teknologi yang menunjang pengolahan rantai panjang komoditas dimaksud</li> <li>- Dorongan inovasi komoditas</li> <li>- Ketersediaan sumber energy</li> </ul>
2.	Nilai Tambah Sosial/Penyerapan TK dan peningkatan kesejahteraan	Komoditas calon terpilih dinilai mampu memberikan sumbangan aspek sosial daerah sehingga memberikan peningkatan pada kesejahteraan masyarakat. Akan dipetakan pada subkriteria/faktor ini adalah:

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyerapan tenaga kerja</li> <li>- Peranan terhadap peningkatan pengetahuan masyarakat</li> <li>- Peranan terhadap peningkatan kesehatan masyarakat</li> <li>- Peranan terhadap pelestarian lingkungan hidup</li> </ul>
3.	Ketersediaan dan Kontinuitas Bahan Baku/Dukungan Sumber Daya Alam	<p>Komoditas calon terpilih akan dinilai dari sisi ketersediaan dan kontinuitas bahan baku/dukungan sumber daya alam sehingga memberikan jaminan kelangsungan industri hilir. Akan dipetakan pada subkriteria/faktor ini adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stabilitas ketersediaan bahan baku (domestik atau lintas daerah)</li> <li>- Volume Bahan Baku yang mencukupi</li> <li>- Kontinuitas pasok bahan baku</li> <li>- Kemungkinan Intensifikasi/Ekstensifikasi</li> <li>- Rantai pasok</li> <li>- Perubahan dari setiap titik rantai dan nilai</li> <li>- Ketersediaan bahan-bahan penolong</li> <li>- Dukungan letak geografis bagi komoditas</li> <li>- Dukungan kondisi iklim lokal terhadap komoditas</li> </ul>
4.	Aspek Pemasaran/Akses dan Volume Pasar	<p>Akan dipetakan bagaimana permintaan dan saluran pemasaran dari komoditas ini telah berfungsi sehingga komoditas tersebut dapat menjadi komoditas unggulan daerah. Beberapa indikator dari faktor ini adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jangkauan/akses pasar regional</li> <li>- Jangkauan/akses pasar nasional</li> <li>- Jangkauan/akses pasar internasional</li> <li>- Kondisi persaingan</li> <li>- Dukungan infrastruktur pemasaran</li> </ul>
5.	Dukungan Kebijakan dan Kelembagaan Pemerintah	<p>Di sini ingin dipetakan bagaimana pemerintah telah berperan serta dalam mendukung kesinambungan dan peningkatan potensi yang dapat dihasilkan dari komoditas ini. Indikator- indikator dari faktor ini mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Posisi komoditas dalam renstra daerah</li> <li>- Posisi komoditas dalam peraturan daerah terkait</li> <li>- Dukungan lembaga pemerintah bagi pengembangan komoditas</li> </ul>
6.	Dukungan Sumber Daya Manusia	<p>Akan dipetakan daya dukung sumber daya manusia terdiri dari ketersediaan dan kualitas. Indikator-indikator dari faktor ini mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kompetensi SDM daerah</li> <li>- Ketersediaan institusi pendidikan dan pelatihan profesi</li> <li>- Sertifikasi</li> </ul>
7.	Prestise Daerah	<p>Komoditas calon terpilih yang hendak diteruskan menjadi produk industri diharapkan mampu memberikan sumbangan citra/<i>image</i> daerah ditinjau dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kekhasan/keunikan</li> <li>- Kemampuan mengangkat kebanggaan daerah</li> </ul>
8.	Kesiapan dan Kesediaan Masyarakat	<p>Komoditas calon terpilih akan dinilai sejauh mana masyarakat menerima dan tidak menimbulkan konflik atau resiko yang bertentangan. Faktor ini ditinjau dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Respon positif masyarakat terhadap komoditas terpilih yang akan dilanjutkan menjadi produk industry</li> <li>- Kesiapan psikologis masyarakat</li> </ul>
9.	Kesiapan dan Kesediaan Pemerintah	<p>Komoditas calon terpilih akan dinilai sejauh mana instansi teknis pemerintah di daerah (aparatur birokrasi siap dan memberikan respon positif terhadap komoditas terpilih)</p>
10.	Kesiapan dan Kesediaan Pelaku Usaha	<p>Komoditas calon terpilih akan dinilai sejauh mana pelaku usaha di daerah siap dan menerima komoditas dilanjutkan menjadi produk hilir dengan faktor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Respon pelaku usaha</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kesiapan teknologi</li> <li>- Kompetensi pengusaha</li> <li>- Peta kekuatan dan kelemahan pelaku usaha</li> </ul>
--	--	--

Masing-masing komoditas yang masuk dalam *long list* di atas kemudian ditimbang dan selanjutnya dengan pendekatan “*comparison analysis*” pertama dan dipilih berdasarkan pada fakta eksistensinya masing-masing dalam sepuluh faktor di atas. Bagaimanapun tidak semua komoditas unggulan dapat dimasukkan sebagai komoditas basis yang dimungkinkan dikembangkan sebagai komoditas basis industri provinsi. Berbagai fakta eksistensi masing-masing komoditas ini kemudian di-*summary* dan dimasukkan dalam *Matrix of Assessment* sebagai bahan dalam proses *Comparison Analysis* untuk menggambarkan potensi, keunggulan dan daya saing masing-masing komoditas untuk ditentukan diantaranya sebagai komoditas unggulan prioritas Provinsi Sulawesi Barat. Faktor yang digunakan adalah faktor ke-1 hingga ke-4.

Matriks di bawah ini telah menunjukkan secara kualitatif, kakao, kelapa dalam, kopi, gula aren, tekstil dan ikan memiliki penilaian tertinggi sebagai komoditas unggulan prioritas provinsi (*short list* komoditas unggulan provinsi).

Komoditas *Short List* adalah:

- a. Kakao
- b. Kelapa Dalam
- c. Kopi
- d. Gula Aren
- e. Tekstil
- f. Ikan

Dari *short list* komoditas unggulan ini berikutnya ditentukan diantaranya, komoditas unggulan prioritas ‘terpilih’ untuk pembangunan industri Provinsi Sulawesi Barat yang masuk dalam RPIP ini:

**Tabel 4.9.**

**Matrix of Assessment Seleksi *Short List* Komoditas Unggulan Provinsi Sulawesi Barat**

<b>Bahan Baku</b>	<b>Existing Industri</b>	<b>Variasi Produk</b>	<b>Type Industri</b>	<b>DRC* PAM</b>	<b>Ekonomi Daerah</b>	<b>Ekonomi Masyarakat</b>
<b>Kakao</b>  Besar, volume produksi tahun 2016: (>83.566,48 ton)		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Cocoa Liquor</i>,</li> <li>2. <i>Cocoa Butter</i>,</li> <li>3. <i>Cocoa Cake</i>,</li> <li>4. <i>Cocoa Powder</i></li> <li>5. Biji coklat fermentasi</li> <li>6. Makanan dan minuman berbasis coklat</li> <li>7. Suplemen dan pangan fungsional berbasis kak</li> </ol>	IKM hingga Besar	Lokal	Besar	Medium, sebagian dalam bentuk Estate (perusahaan besar), dapat menjadi trigger ekonomi
<b>Kopi</b>  Besar, volume produksi tahun 2016: (>537,41 ton)		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kopi bubuk</li> <li>2. Roasted Coffee</li> <li>3. kopi instan</li> <li>4. kopi dekafein</li> <li>5. kopi Mix</li> <li>6. kopi beraroma</li> <li>7. Makanan dan minuman berbasis kopi</li> <li>8. Suplemen dan pangan fungsional berbasis Kopi</li> </ol>	IKM hingga Besar	Lokal	Besar	Medium, sebagian dalam bentuk Estate (perusahaan besar), dapat menjadi trigger ekonomi
<b>Kelapa Dalam</b>	1. Minyak kelapa	1. Minyak kelapa	IKM hingga Besar	Lokal-	Besar	Besar (dari industri



Besar, volume produksi tahun 2016: (>35 540,24 ton)	2. Kelapa parut, Santan dalam	2. Tepung kelapa, 3. Kelapa parut, 4. Santan dalam Kemasan, 5. VCO, 6. <i>Nata de Coco</i> , 7. Konsentrat Air Kelapa, 8. Arang Batok, 9. Meubel kayu kelapa 10. <i>Carbon Active</i>		Non Lokal		dan bahan baku) dan dapat menjadi trigger ekonomi
<b>Nira</b> Besar, volume produksi tahun 2016: (>412,16 ton)	Gula Aren	1. Olahan Gula Aren dan Gula Semut skala menengah 2. Olahan Gula Aren Gula Semut skala besar bagi ekspor 3. Industri minuman penyegar 4. Industri gula rendah kalori 5. Industri obat-obatan	IKM hingga Besar	Lokal-Non Lokal	Besar	Besar (dari industri dan bahan baku) dan dapat menjadi trigger ekonomi
<b>Murbei</b> Besar, volume produksi tahun 2016: (>450.000 ton)	1. Benang 2. Tenun mandar, 3. Tenun sekondi dan Tenun sambuk	1. Benang 2. Tenun mandar, 3. Tenun sekondi dan Tenun sambuk	IKM hingga Besar	Lokal-Non Lokal	Besar	Besar (dari penyediaan bahan baku) dan dapat menjadi trigger ekonomi
<b>Perikanan</b>		1. Ikan awet dan fillet	IKM hingga Besar	Lokal-	Besar	Besar (dari penyediaan bahan

<p><b>Tangkap</b> besar volume produksi tahun 2016: (&gt;929.700 ton)</p>		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Surimi</li> <li>3. Pengalengan ikan</li> <li>4. Pengasapan ikan</li> <li>5. Tepung ikan</li> <li>6. Makanan berbasis ikan</li> <li>7. Suplemen dan pangan fungsional berbasis ikan</li> </ol>		Non Lokal		baku) dan dapat menjadi trigger ekonomi
---	--	---	--	-----------	--	---

#### e) Tahap-4: Penetapan Industri Unggulan Prioritas Provinsi

Berbagai analisis hingga terpilihnya Komoditas Unggulan Pilihan ini sebagai komoditas basis Kompetensi Industri (KID) Provinsi Sulawesi Barat 2012-2015 sesuai dengan Permen Perindustrian Nomor 134 Tahun 2010 yang menetapkan memiliki industri unggulan perikanan. Pengembangan Industri pengolah berbasis perikanan tersebut menjadi prioritas nasional, dan melalui pendekatan *bottom-up* serta roadmap-nya telah ditetapkan dalam Permen Perindustrian Nomor 134 Tahun 2010.

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 134/2010 tentang Peta Jalan Kompetensi Industri (KID) Provinsi Sulawesi Barat 2012-2015 telah menetapkan Komoditi Unggulan Provinsi Sulawesi Barat adalah kakao, kelapa dalam, kopi, gula aren, tekstil dan ikan untuk dikembangkan industrinya untuk kurun waktu 2010-2025.

Berdasarkan factor-faktor tersebut, maka ditetapkan Industri Unggulan Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana disajikan pada Tabel 4.10.

**Tabel 4.10.**

#### **Industri Unggulan Provinsi Sulawesi Barat, 2020-204**

No.	Industri Unggulan	Jenis Industri
1.	Pengolahan Kakao	1. Cocoa Liquor, 2. Cocoa Butter, 3. Cocoa Cake, 4. Cocoa Powder 5. Biji coklat fermentasi 6. Makanan dan minuman berbasis coklat 7. Suplemen dan pangan fungsional berbasis kakao
2.	Pengolahan Kelapa Dalam	1. Minyak kelapa dalam 2. Tepung kelapa dalam, 3. Kelapa parut, 4. Santan dalam Kemasan, 5. VCO, 6. Nata de Coco, 7. Konsentrat Air Kelapa, 8. Arang Batok, 9. Meubel kayu kelapa 10. Carbon Active
3.	Pengolahan kopi	1. Kopi bubuk 2. Roasted Coffee 3. kopi instan 4. kopi dekafein 5. kopi Mix 6. kopi beraroma 7. Makanan dan minuman berbasis Kopi 8. Suplemen dan pangan berbasis kopi
4.	Gula aren	1. Gula Aren dan Gula Semut skala menengah 2. Industri Olahan Gula Aren Gula Semut skala ekspor 3. Industri minuman penyegar 4. Industri gula rendah kalor. 5. Industri obat-obatan
5.	Tekstil	1. Benang 2. Tenun mandar, 3. Tenun sekomandi dan Tenun sambuk

6.	Pengolahan ikan	1. Ikan awet dan fillet 2. Surimi 3. Pengalengan ikan 4. Pengasapan ikan 5. Tepung ikan 6. Makanan berbasis ikan 7. Suplemen dan pangan fungsional berbasis ikan
----	-----------------	--

Dalam rangka mendisain sampai pada penentuan program-program pembangunan industri unggulan prioritas terpilih ini, maka dilakukan analisis mendalam untuk masing- masing komoditas dan industri sebagaimana diuraikan pada tabel 4.11.

#### f) Pentahapan Industri Unggulan Provinsi Sulawesi Barat

**Tabel 4.11.**

#### **Pentahapann Industri Unggulan Provinsi Sulawesi Barat, 2020-2040**

Industri Unggulan Provinsi	Jenis Indutri				Lokasi (Kabupaten)
	2020-2025	2005-2030	2030-2035	2035-2040	
1. Pengolahan Kakao	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <i>Cocoa Liquor,</i></li> <li>✓ <i>Cocoa Butter,</i></li> <li>✓ <i>Cocoa Cake,</i></li> <li>✓ <i>Cocoa Powder</i></li> <li>✓ Biji coklat fermentasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <i>Cocoa Liquor,</i></li> <li>✓ <i>Cocoa Butter,</i></li> <li>✓ <i>Cocoa Cake,</i></li> <li>✓ <i>Cocoa Powder</i></li> <li>✓ Biji coklat fermentasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Makanan dan minuman berbasis coklat</li> <li>✓ Suplemen dan pangan fungsional berbasis kakao</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Makanan dan minuman berbasis coklat</li> <li>✓ Suplemen dan pangan fungsional berbasis kakao</li> </ul>	Polewali Mandar, Mamuju, Mamuju Tengah, Majene, Mamasa, dan Pasangkayu
2. Pengolahan Kelapa Dalam	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Minyak kelapa dalam</li> <li>✓ Tepung kelapa dalam,</li> <li>✓ Kelapa parut,</li> <li>✓ Santan dalam Kemasan,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Minyak kelapa dalam</li> <li>✓ Tepung kelapa dalam,</li> <li>✓ kelapa parut,</li> <li>✓ Santan dalam Kemasan,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ VCO,</li> <li>✓ <i>Nata de Coco,</i></li> <li>✓ Konsentrat Air</li> <li>✓ Kelapa dalam,</li> <li>✓ Arang Batok,</li> <li>✓ Meubel kayu kelapa dalam</li> <li>✓ <i>Carbon Active</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ VCO,</li> <li>✓ <i>Nata de Coco,</i></li> <li>✓ Konsentrat Air Kelapa dalam,</li> <li>✓ Arang Batok,</li> <li>✓ Meubel kayu kelapa dalam</li> <li>✓ <i>Carbon Active</i></li> </ul>	Polewali Mandar dan Majene
3. Pengolahan Kopi	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Kopi bubuk</li> <li>✓ Roasted Coffee</li> <li>✓ kopi instan</li> <li>✓ kopi dekafein</li> <li>✓ kopi Mix</li> <li>✓ kopi beraroma</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Kopi bubuk</li> <li>✓ Roasted Coffee</li> <li>✓ kopi instan</li> <li>✓ kopi dekafein</li> <li>✓ kopi Mix</li> <li>✓ kopi beraroma</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Makanan dan minuman berbasis kopi</li> <li>✓ Suplemen dan Pangan</li> <li>✓ fungsional berbasis</li> <li>✓ Kopi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Makanan dan minuman berbasis kopi</li> <li>✓ Suplemen dan pangan fungsional berbasis Kopi</li> </ul>	Kabupaten Mamasa, Kabupaten Polewali Mandar
4. Pengolahan Gula Aren	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Gula Aren, dan</li> <li>✓ Gula Semut skala menengah</li> <li>✓ Minuman penyegar.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Gula rendah kalor.</li> <li>✓ Obat-obatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Gula Aren dan Gula Semut skala ekspor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Gula Aren dan Gula Semut skala ekspor</li> </ul>	Polewali Mandar, Mamasa dan Majene
5. Tekstil	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Benang</li> <li>✓ Tenun mandar,</li> <li>✓ Tenun sekomandi dan Tenun sambuk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Benang</li> <li>✓ Tenun mandar,</li> <li>✓ Tenun sekomandi dan Tenun sambuk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Benang</li> <li>✓ Tenun mandar,</li> <li>✓ Tenun sekomandi dan</li> <li>✓ Tenun sambuk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Benang</li> <li>✓ Tenun mandar,</li> <li>✓ Tenun sekomandi dan Tenun sambuk</li> </ul>	Polewali Mandar, Mamasa, Mamuju dan Mamuju Utara
6. Pengolahan Ikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Ikan awet</li> <li>✓ Fillet</li> <li>✓ Surimi</li> <li>✓ Pengasapan ikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pengalengan ikan</li> <li>✓ Tepung ikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Makanan berbasis ikan</li> <li>✓ Suplemen dan pangan fungsional berbasis ikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Makanan berbasis ikan</li> <li>✓ Suplemen dan pangan fungsional berbasis ikan</li> </ul>	Polewali Mandar, Mamuju, Pasangkayu dan Majene

#### g) Sasaran, Strategi Induk, Rencana Aksi dan Lokasi Pengembangan Industri

Sasaran, Strategi Induk dan Rencana Aksi Pengembangan Industri Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

## (1) Industri Pengolahan Kakao

**Tabel 4.12.**  
**Sasaran, Strategi dan Rencana Aksi**  
**Pengembangan Industri Pengolahan Kakao**

<b>Sasaran</b>			
<b>2020 – 2025</b>	<b>2025 – 2030</b>	<b>2030 – 2035</b>	<b>2035 – 2040</b>
<p>a) Tercapai peningkatan produksi biji kakao fermentasi melalui intensifikasi dan ekstensifikasi perkebunan kakao;</p> <p>b) Terjaminnya ketersediaan bahan baku dan penolong;</p> <p>c) Peningkatan peran perguruan tinggi dalam implementasi pengembangan hasil penelitian tentang pengolahan biji kakao; dan</p> <p>d) Peningkatan kemitraan antara industri pengolah biji kakao dengan petani kebun kakao baik langsung maupun tidak langsung</p>	<p>a) Peningkatan sumber daya manusia ahli bidang industri pengolahan kakao;</p> <p>b) Terpenuhinya pengolahan biji kakao yang bergizi dan aman dikonsumsi;</p> <p>c) Peningkatkan nilai tambah produk olahan biji kakao; dan</p> <p>e) d) Peningkatan penerapan sertifikasi standarisasi (SNI), halal, dan merek.</p>	<p>a) Tercapainya diferensiasi produk olahan biji kakao;</p> <p>b) Meningkatnya pangsa pasar produk olahan kakao baik dalam negeri maupun ekspor;</p> <p>c) Terkoordinasinya interaksi jaringan kerja yang saling mendukung dan menguntungkan serta peran aktif antara pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, lembaga penelitian dan perguruan tinggi; dan</p> <p>d) Berkembangnya industri pengolahan biji kakao hemat energi dan ramah lingkungan</p>	<p>a) Tercapainya diferensiasi produk olahan biji kakao;</p> <p>b) Meningkatnya pangsa pasar produk olahan kakao baik dalam negeri maupun ekspor;</p> <p>c) Terkoordinasinya interaksi jaringan kerja yang saling mendukung dan menguntungkan serta peran aktif antara pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, lembaga penelitian dan perguruan tinggi; dan</p> <p>d) Berkembangnya industri pengolahan biji kakao hemat energi dan ramah lingkungan.</p>
<b>Strategi</b>			
<p>a) Penguatan Kelembagaan ;</p> <p>b) Penguatan penyediaan bahan baku;</p> <p>c) Penguatan sumber daya manusia;</p> <p>d) Penguatan Jejaring Pasokan dan Pemasaran;</p> <p>e) Penguatan Proses.</p>			
<b>Rencana Aksi</b>			
<b>2010-2025</b>	<b>2025-2030</b>	<b>2030-2035</b>	<b>2035-2040</b>
<p>a) Dukungan Pemerintah Pusat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyelesaikan perangkat regulasi;</li> <li>• Memetakan kajian potensi pengolahan biji kakao yang terintegrasi dari hulu ke hilir;</li> <li>• Memperkuat jaringan antara kelompok petani dengan para pengelola industri pengolahan biji kakao.</li> </ul> <p>b) Ketersediaan bahan baku yang berkualitas dan berkelanjutan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ektensifikasi perkebunan kakao</li> <li>• Intensifikasi perkebunan kakao melalui penggunaan pupuk yang tepat dan berkualitas untuk peningkatan</li> </ul>	<p>a) Melakukan upaya penumbuhan wirausaha baru di bidang industri pengolahan biji kakao melalui kegiatan magang di beberapa pabrik pengolahan biji kakao;</p> <p>b) Penguatan Jejaring Pasokan dan Pemasaran</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperkuat pasokan dan kontinuitas bahan baku;</li> <li>• Menyederhanakan rantai penyaluran bahan baku sehingga dapat memangkas biaya;</li> <li>• Meningkatkan mutu kemasan Membangun Lembaga pemasaran secara bersama</li> <li>• Mengembangkan jejaring pemasaran melalui kerjasama dengan distributor</li> </ul>	<p>a) Penguatan Proses</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kemampuan penyediaan mesin dan peralatan pendukung usaha pengolahan biji kakao berkelanjutan;</li> <li>• Mengembangkan dan penerapan teknologi proses untuk menghasilkan produk yang higienis berkelanjutan;</li> <li>• Meningkatkan kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi proses/rekayasa produk industri pengolahan kakao serta diversifikasinya melalui sinergi kegiatan litbang dan diklat; dan</li> <li>• Meningkatkan kualifikasi, kapasitas, dan kemampuan laboratorium uji mutu produk olahan</li> </ul>	<p>a) Penguatan Proses</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kemampuan penyediaan mesin dan peralatan pendukung usaha pengolahan biji kakao berkelanjutan;</li> <li>• Mengembangkan dan penerapan teknologi proses untuk menghasilkan produk yang higienis berkelanjutan;</li> <li>• Meningkatkan kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi proses/rekayasa produk industri pengolahan kakao serta diversifikasinya melalui sinergi kegiatan litbang dan diklat; dan</li> <li>• Meningkatkan kualifikasi, kapasitas,</li> </ul>

<p>produksi biji kakao;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemantapan klaster industri pengolahan biji kakao;</li> <li>• Perketat standarisasi biji kakao; dan Mengoptimalkan masa produktif tanaman kakao.</li> </ul> <p>c) Penguatan sumber daya manusia</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan pelatihan mengenai manajemen dan operasionalisasi Pengolahan biji kakao;</li> <li>• Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia tentang teknologi proses produksi dan manajerial bagi aparat pembina dan pengusaha melalui diklat industri dan, magang.</li> <li>• Meningkatkan penyuluhan kepada petani untuk meningkatkan kualitas bahan baku industri pengolahan kakao</li> </ul>	<p>maupun pasar modern; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan jejaring sumber pembiayaan dengan lembaga keuangan, seperti perbankan.</li> </ul> <p>c) Penguatan proses</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kuantitas serta mutu dari pengolahan biji kakao;</li> <li>• Meningkatkan kemampuan penyediaan mesin dan peralatan pendukung usahapengolahan biji;</li> <li>• Mengembangkan dan penerapan teknologi proses untuk menghasilkan produk yang higienis.</li> </ul>	<p>kakao.</p> <p>b) Penguatan Jejaring Pemasaran</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan mutu kemasan berkelanjutan</li> <li>• Meningkatkan lembaga pemasaran secara bersama;</li> <li>• Meningkatkan jejaring pemasaran melalui kerjasama dengan distributor maupun pasar modern berkelanjutan</li> <li>• Meningkatkan kemampuan market untuk penetrasi dan perluasan pasar global serta memiliki daya saing dengan <i>competitive advantage</i>;</li> </ul>	<p>dan kemampuan laboratorium uji mutu produk olahan kakao.</p> <p>b) Penguatan Jejaring Pemasaran</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan mutu kemasan berkelanjutan</li> <li>• Meningkatkan lembaga pemasaran secara bersama;</li> <li>• Meningkatkan jejaring pemasaran melalui kerjasama dengan distributor maupun pasar modern berkelanjutan</li> <li>• Meningkatkan kemampuan market untuk penetrasi dan perluasan pasar global serta memiliki daya saing dengan <i>competitive advantage</i>;</li> </ul>
---	--	---	---

**(2) Industri Pengolahan Kelapa Dalam**

**Tabel 4.13.  
Sasaran, Strategi dan Rencana Aksi  
Pengembangan Industri Pengolahan Kelapa Dalam**

Sasaran			
2020 – 2025	2025 – 2030	2030 – 2035	2035 – 2040
<p><b>a)</b> Tercapainya peningkatan produksi kelapa dalam melalui intensifikasi dan ekstensifikasi perkebunan kelapa dalam;</p> <p><b>b)</b> Terjaminnya ketersediaan bahan baku dan penolong;</p> <p><b>c)</b> Meningkatnya peran perguruan tinggi dalam implementasi pengembangan hasil penelitian tentang pengolahan kelapa dalam; dan</p> <p><b>d)</b> Peningkatan kemitraan antara industri pengolah kelapa dalam dengan petani kebun kelapa</p>	<p>a) Meningkatnya sumber daya manusia ahli bidang industri pengolahan kelapa dalam;</p> <p>b) Terpenuhinya pengolahan kelapa dalam yang bergizi dan aman dikonsumsi;</p> <p>c) Meningkatnya nilai tambah produk olahan kelapa dalam Peningkatan penerapan sertifikasi standarisasi (SNI), halal, dan merek.</p>	<p>a) Tercapainya diferensiasi produk olahan kelapa dalam;</p> <p>b) Peningkatan pangsa pasar produk olahan kelapa dalam baik dalam negeri maupun ekspor;</p> <p>c) Terkoordinasinya interaksi jaringan kerja yang saling mendukung dan menguntungkan serta peran aktif antara pemerintah pusat dan Provinsi, dunia usaha, lembaga penelitian dan perguruan tinggi; dan</p> <p>d) Pengembangan industri pengolahan kelapa dalam hemat energi dan ramah</p>	<p>a) Tercapainya diferensiasi produk olahan kelapa dalam;</p> <p>b) Peningkatan pangsa pasar produk olahan kelapa dalam baik dalam negeri maupun ekspor;</p> <p>c) Terkoordinasinya interaksi jaringan kerja yang saling mendukung dan menguntungkan serta peran aktif antara pemerintah pusat dan Provinsi, dunia usaha, lembaga penelitian dan perguruan tinggi; dan</p> <p>d) Pengembangan industri pengolahan kelapa dalam hemat energi dan ramah lingkungan</p>
Strategi			
<p>a) Penguatan Kelembagaan ;</p>			

<ul style="list-style-type: none"> <li>b) Penguatan penyediaan bahan baku;</li> <li>c) Penguatan sumber daya manusia;</li> <li>d) Penguatan Jejaring Pasokan dan Pemasaran;</li> <li>e) Penguatan Proses.</li> </ul>			
<b>Rencana Aksi</b>			
<b>2010-2025</b>	<b>2025-2030</b>	<b>2030-2035</b>	<b>2035-2040</b>
<p>a) Dukungan Pemerintah Pusat Menyelesaikan perangkat regulasi;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memetakan kajian potensi pengolahan kelapa dalam yang terintegrasi dari hulu ke hilir;</li> <li>• Memperkuat jaringan kelompok petani dengan manajemen Industri pengolahan kelapa dalam.</li> <li>• Ketersediaan bahan baku yang berkualitas dan berkelanjutan</li> <li>• Menggunakan pupuk yang berkualitas untuk peningkatan produksi kelapa dalam;</li> <li>• Pemantapan klaster industri pengolahan kelapa dalam;</li> <li>• Perketat standarisasi biji kelapa dalam; dan</li> <li>• Mengoptimalkan masa produktif tanaman kelapa dalam.</li> </ul> <p>b) Penguatan sumber daya manusia</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan pelatihan mengenai manajemen dan operasionalisasi pengolahan kelapa dalam;</li> <li>• Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia tentang teknologi proses produksi dan manajerial bagi aparat pembina dan pengusaha melalui diklat dan, magang; dan</li> <li>• Meningkatkan penyuluhan kelapa dalam petani untuk meningkatkan kualitas bahan baku industri pengolahan kelapa dalam.</li> </ul>	<p>a) Melakukan upaya penumbuhan wirausaha baru di bidang industri pengolahan kelapa dalam melalui kegiatan magang;</p> <p>b) Penguatan Jejaring Pasokan dan Pemasaran</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperkuat pasokan dan kontinuitas bahan baku;</li> <li>• Menyederhanakan rantai penyaluran bahan baku sehingga dapat memangkas biaya; Meningkatkan mutu kemasan;</li> <li>• Membangun lembaga pemasaran secara bersama;</li> <li>• Mengembangkan jejaring pemasaran kerjasama dengan distributor dan pasar modern; dan</li> <li>• Meningkatkan jejaring sumber pembiayaan dengan lembaga keuangan, seperti perbankan.</li> </ul> <p>c) Penguatan Proses</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kuantitas serta mutu dari pengolahan kelapa dalam;</li> <li>• Meningkatkan kemampuan penyediaan mesin dan peralatan pendukung usaha pengolahan kelapa dalam ;</li> <li>• Mengembangkan dan penerapan teknologi proses untuk menghasilkan produk yang higienis;</li> </ul>	<p>a) Penguatan Proses</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kemampuan penyediaan mesin dan peralatan pendukung usaha pengolahan kelapa dalam berkelanjutan;</li> <li>• Mengembangkan dan penerapan teknologi proses untuk menghasilkan produk yang higienis berkelanjutan;</li> <li>• Meningkatkan kegiatan litbang dan diklat; dan</li> <li>• Meningkatkan kualifikasi, kapasitas, dan kemampuan laboratorium uji mutu produk olahan kelapa dalam</li> <li>• Meningkatkan kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi proses/rekayasa produk industri pengolahan kelapa dalam serta diversifikasinya melalui sinergi.</li> </ul> <p>b) Penguatan Jejaring Pemasaran</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan mutu kemasan berkelanjutan</li> <li>• Meningkatkan lembaga pemasaran secara bersama;</li> <li>• Meningkatkan jejaring pemasaran melalui kerjasama dengan distributor maupun pasar modern berkelanjutan</li> <li>• Meningkatkan kemampuan market untuk penetrasi dan perluasan pasar global serta memiliki daya saing dengan <i>competitive advantage</i>;</li> </ul>	<p>a) Penguatan Proses</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kemampuan penyediaan mesin dan peralatan pendukung usaha pengolahan kelapa dalam berkelanjutan;</li> <li>• Mengembangkan dan penerapan teknologi proses untuk menghasilkan produk yang higienis berkelanjutan;</li> <li>• Meningkatkan kegiatan litbang dan diklat; dan</li> <li>• Meningkatkan kualifikasi, kapasitas, dan kemampuan laboratorium uji mutu produk olahan kelapa dalam</li> <li>• Meningkatkan kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi proses/rekayasa produk industri pengolahan kelapa dalam serta diversifikasinya melalui sinergi.</li> </ul> <p>b) Penguatan Jejaring Pemasaran</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan mutu kemasan berkelanjutan</li> <li>• Meningkatkan lembaga pemasaran secara bersama;</li> <li>• Meningkatkan jejaring pemasaran melalui kerjasama dengan distributor maupun pasar modern berkelanjutan</li> <li>• Meningkatkan kemampuan market untuk penetrasi dan perluasan pasar global serta memiliki daya saing dengan <i>competitive advantage</i>;</li> </ul>



### (3) Industri Pengolahan Kopi

**Tabel 4.14.**  
**Sasaran, Strategi dan Rencana Aksi**  
**Pengembangan Industri Pengolahan Kopi**

<b>Sasaran</b>			
<b>2020 – 2025</b>	<b>2025 – 2030</b>	<b>2030 – 2035</b>	<b>2035 – 2040</b>
<p>a) Tercapainya peningkatan produksi biji kopi melalui intensifikasi dan ekstensifikasi perkebunan kopi;</p> <p>b) Terjaminnya ketersediaan bahan baku dan penolong;</p> <p>c) Meningkatnya peran perguruan tinggi dalam implementasi pengembangan hasil penelitian tentang pengolahan biji kopi; dan</p> <p>d) Peningkatan kemitraan antara industri pengolah biji kopi dengan petani kebun kopi baik langsung maupun tidak langsung.</p>	<p>a) Meningkatnya sumber daya manusia ahli bidang industri pengolahan kopi;</p> <p>b) Terpenuhinya pengolahan biji kopi yang bergizi dan aman dikonsumsi;</p> <p>c) Peningkatkan nilai tambah produk olahan biji kopi; dan</p> <p>d) Peningkatan penerapan sertifikasi standarisasi (SNI), halal, dan merek.</p>	<p>a) Tercapainya diferensiasi produk olahan biji kopi;</p> <p>b) Meningkatnya pangsa pasar produk olahan kopi baik dalam negeri maupun ekspor;</p> <p>c) Terkoordinasinya interaksi jaringan kerja yang saling mendukung dan menguntungkan serta peran aktif antara pemerintah pusat dan Provinsi, dunia usaha, lembaga penelitian dan perguruan tinggi; dan</p> <p>d) Pengembangan industri pengolahan biji kopi hemat energi dan ramah lingkungan.</p>	<p>a) Tercapainya diferensiasi produk olahan biji kopi;</p> <p>b) Peningkatan pangsa pasar produk olahan kopi baik dalam negeri maupun ekspor;</p> <p>c) Terkoordinasinya interaksi jaringan kerja yang saling mendukung dan menguntungkan serta peran aktif antara pemerintah pusat dan Provinsi, dunia usaha, lembaga penelitian dan perguruan tinggi; dan</p> <p>d) Pengembangan industri pengolahan biji kopi hemat energi dan ramah lingkungan</p>
<b>Strategi</b>			
<p>a) Penguatan Kelembagaan ;</p> <p>b) Penguatan penyediaan bahan baku;</p> <p>c) Penguatan sumber daya manusia;</p> <p>d) Penguatan Jejaring Pasokan dan Pemasaran;</p> <p>e) Penguatan Proses.</p>			
<b>Rencana Aksi</b>			
<b>2010-2025</b>	<b>2025-2030</b>	<b>2030-2035</b>	<b>2035-2040</b>
<p>a) Dukungan Pemerintah Pusat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyelesaikan perangkat regulasi;</li> <li>• Memetakan kajian potensi pengolahan biji kopi yang terintegrasi dari hulu ke hilir;</li> <li>• Memperkuat jaringan kelompok petani dengan manajemen industri pengolahan biji kopi.</li> </ul> <p>b) Ketersediaan bahan baku yang berkualitas dan berkelanjutan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menggunakan pupuk yang berkualitas untuk</li> </ul>	<p>a) Melakukan upaya penumbuhan wirausaha baru di bidang industri pengolahan biji kopi melalui kegiatan magang di beberapa pabrik pengolahan biji kopi;</p> <p>b) Penguatan Jejaring Pasokan dan Pemasaran</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperkuat pasokan dan kontinuitas bahan baku;</li> <li>• Menyederhanakan rantai penyaluran bahan baku sehingga dapat memangkas biaya;</li> </ul>	<p>a) Penguatan Proses</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kemampuan penyediaan mesin dan peralatan pendukung usaha pengolahan biji kopi;</li> <li>• Mengembangkan dan penerapan teknologi proses untuk menghasilkan produk yang higienis berkelanjutan;</li> <li>• Meningkatkan kualifikasi, kapasitas, dan kemampuan laboratorium uji mutu produk</li> </ul>	<p>a) Penguatan Proses</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kemampuan penyediaan mesin dan peralatan pendukung usaha pengolahan biji kopi;</li> <li>• Mengembangkan dan penerapan teknologi proses untuk menghasilkan produk yang higienis berkelanjutan;</li> <li>• Meningkatkan kualifikasi, kapasitas, dan kemampuan laboratorium uji</li> </ul>

<p>peningkatan produksi biji kopi;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemantapan klaster industri pengolahan biji kopi;</li> <li>• Perketat standarisasi biji kopi; dan</li> <li>• Mengoptimalkan masa produktif tanaman kopi..</li> </ul> <p>c) Penguatansumber daya manusia</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan pelatihan mengenai manajemen dan operasionalisasi pengolahan biji kopi;</li> <li>• Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia tentang teknologi proses produksi dan manajerial bagi aparat pembina dan pengusaha melalui diklat dan, magang; dan</li> <li>• Meningkatkan penyuluhan kepada petani untuk meningkatkan kualitas bahan baku industri pengolahan kopi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan mutu kemasan;</li> <li>• Membangun lembaga pemasaran secara bersama;</li> <li>• Mengembangkan jejaring pemasaran kerja sama dengan distributor dan pasar modern; dan</li> <li>• Meningkatkan jejaring sumber pembiayaan dengan lembaga keuangan, seperti perbankan.</li> </ul> <p>C) Penguatan Proses</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kuantitas serta mutu dari pengolahan biji kopi;</li> <li>• Mengembangkan dan penerapan teknologi proses untuk menghasilkan produk yang higienis</li> </ul>	<p>olahan kopi.</p> <p>b) Penguatan Proses</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kemampuan penyediaan mesin dan peralatan pendukung usaha pengolahan biji kopi;</li> <li>• Mengembangkan dan penerapan teknologi proses untuk menghasilkan produk yang higienis berkelanjutan;</li> <li>• Meningkatkan kualifikasi, kapasitas, dan kemampuan laboratorium uji mutu produk olahan kopi.</li> </ul>	<p>mutu produk olahan kopi.</p> <p>b) Penguatan Proses</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kemampuan penyediaan mesin dan peralatan pendukung usaha pengolahan biji kopi;</li> <li>• Mengembangkan dan penerapan teknologi proses untuk menghasilkan produk yang higienis berkelanjutan;</li> <li>• Meningkatkan kualifikasi, kapasitas, dan kemampuan laboratorium uji mutu produk olahan kopi.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi proses/ rekayasa produk industri pengolahan kopi serta diversifikasinya melalui sinergi kegiatan litbang dan diklat.</li> </ul> <p>c) Penguatan Jejaring Pemasaran</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan mutu kemasan berkelanjutan</li> <li>• Meningkatkan lembaga pemasaran secara bersama;</li> <li>• Meningkatkan jejaring pemasaran melalui kerja sama dengan distributor maupun pasar modern berkelanjutan</li> <li>• Meningkatkan kemampuan market</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi proses/ rekayasa produk industri pengolahan kopi serta diversifikasinya melalui sinergi kegiatan litbang dan diklat.</li> </ul> <p>c) Penguatan Jejaring Pemasaran</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan mutu kemasan berkelanjutan</li> <li>• Meningkatkan lembaga pemasaran secara bersama;</li> <li>• Meningkatkan jejaring pemasaran melalui kerja sama dengan distributor</li> </ul>

		untuk penetrasi dan perluasan pasar global serta memiliki daya saing dengan competitive advantage	maupun pasar modern berkelanjutan • Meningkatkan kemampuan market untuk penetrasi dan perluasan pasar global serta memiliki daya saing dengan competitive advantage
--	--	---	--

#### (4) Pengolahan Gula Aren

**Tabel 4.15.  
Sasaran, Strategi dan Rencana Aksi  
Pengembangan Industri Pengolahan Gula Aren**

<b>Sasaran</b>			
<b>2020 – 2025</b>	<b>2025 – 2030</b>	<b>2030 – 2035</b>	<b>2035 – 2040</b>
a) Tercapainya peningkatan produksi aren melalui intensifikasi dan ekstensifikasi perkebunan aren; b) Terjaminnya ketersediaan bahan baku dan penolong; c) Peningkatan peran perguruan tinggi dalam implementasi pengembangan hasil penelitian tentang pengolahan aren; dan d) Peningkatan kemitraan antara industri pengolah arendengan petani kebun aren baik langsung maupun tidak langsung	a. Meningkatnya sumber daya manusia ahli bidang industri pengolahan aren; b. Terpenuhinya pengolahan aren yang bergizi dan aman dikonsumsi; c. Meningkatnya nilai tambah produk olahan aren Peningkatan penerapan sertifikasi standarisasi (SNI), halal, dan merek.	a) Tercapainya diferensiasi produk olahan aren; b) Peningkatan pangsa pasar produk olahan aren baik dalam negeri maupun ekspor; c) Terkoordinasinya interaksi jaringan kerja yang saling mendukung dan menguntungkan serta peran aktif antara pemerintah pusat dan Provinsi, dunia usaha, lembaga penelitian dan perguruan tinggi; dan d) Pengembangan industri pengolahan aren hemat energi dan ramah lingkungan	a) Tercapainya diferensiasi produk olahan aren; b) Peningkatan pangsa pasar produk olahan aren baik dalam negeri maupun ekspor; c) Terkoordinasinya interaksi jaringan kerja yang saling mendukung dan menguntungkan serta peran aktif antara pemerintah pusat dan Provinsi, dunia usaha, lembaga penelitian dan perguruan tinggi; dan d) Pengembangan industri pengolahan aren hemat energi dan ramah lingkungan
<b>Strategi</b>			
a) Penguatan Kelembagaan ; b) Penguatan penyediaan bahan baku; c) Penguatan sumber daya manusia; d) Penguatan Jejaring Pasokan dan Pemasaran; e) Penguatan Proses.			
<b>Rencana Aksi</b>			
<b>2010-2025</b>	<b>2025-2030</b>	<b>2030-2035</b>	<b>2035-2040</b>
a) Dukungan Pemerintah Pusat <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menyelesaikan perangkat regulasi;</li> <li>• Memetakan kajian potensi pengolahan aren</li> </ul>	a) Melakukan upaya penumbuhan wirausaha baru di bidang industri pengolahan aren melalui kegiatan magang;	a) Penguatan Proses <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kemampuan penyediaan mesin dan peralatan pendukung usaha pengolahan aren</li> </ul>	a) Penguatan Proses <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kemampuan penyediaan mesin dan peralatan pendukung usaha</li> </ul>

<p>yang terintegrasi dari hulu ke hilir;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperkuat jaringan kelompok petani dengan manajemen Industri pengolahan aren.</li> <li>• Ketersediaan bahan baku yang berkualitas dan berkelanjutan</li> <li>• Menggunakan pupuk yang berkualitas untuk peningkatan produksi aren;</li> <li>• Pematapan klaster industri pengolahan aren;</li> <li>• Perketat standarisasi aren; dan</li> <li>• Mengoptimalkan masa produktif tanaman aren.</li> </ul>	<p>b) Penguatan Jejaring Pasokan dan Pemasaran</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperkuat pasokan dan kontinuitas bahan baku;</li> <li>• Menyederhanakan rantai penyaluran bahan baku sehingga dapat memangkas biaya;</li> <li>• Meningkatkan mutu kemasan;</li> <li>• Membangun lembaga pemasaran secara bersama;</li> <li>• Mengembangkan jejaring pemasaran kerjasama dengan distributor dan pasar modern; dan</li> <li>• Meningkatkan jejaring sumber pembiayaan dengan lembaga keuangan, seperti perbankan.</li> </ul>	<p>berkelanjutan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengembangkan dan penerapan teknologi proses untuk menghasilkan produk yang higienis berkelanjutan;</li> <li>• Meningkatkan kegiatan litbang dan diklat; dan</li> <li>• Meningkatkan kualifikasi, kapasitas, dan kemampuan laboratorium uji mutu produk olahan aren</li> <li>• Meningkatkan kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi proses/rekayasa produk industri pengolahan aren serta diversifikasinya melalui sinergi.</li> </ul>	<p>pengolahan aren berkelanjutan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengembangkan dan penerapan teknologi proses untuk menghasilkan produk yang higienis berkelanjutan;</li> <li>• Meningkatkan kegiatan litbang dan diklat; dan</li> <li>• Meningkatkan kualifikasi, kapasitas, dan kemampuan laboratorium uji mutu produk olahan aren</li> <li>• Meningkatkan kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi proses/rekayasa produk industri pengolahan aren serta diversifikasinya melalui sinergi.</li> </ul>
<p>b) Penguatan sumber daya manusia</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan pelatihan mengenai manajemen dan operasionalisasi pengolahan aren;</li> <li>• Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia tentang teknologi proses produksi dan manajerial bagi aparat pembina dan pengusaha melalui diklat dan, magang; dan</li> <li>• Meningkatkan penyuluhan kepada petani untuk meningkatkan kualitas bahan baku industri pengolahan aren.</li> </ul>	<p>c) Penguatan Proses</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kuantitas serta mutu dari pengolahan aren;</li> <li>• Meningkatkan kemampuan penyediaan mesin dan peralatan pendukung usaha pengolahan aren ;</li> <li>• Mengembangkan dan penerapan teknologi proses untuk menghasilkan produk yang higienis;</li> </ul>	<p>b) Penguatan Jejaring Pemasaran</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan mutu kemasan berkelanjutan;</li> <li>• Meningkatkan lembaga pemasaran secara bersama;</li> <li>• Meningkatkan jejaring pemasaran melalui kerja sama dengan distributor maupun pasar modern berkelanjutan;</li> <li>• Meningkatkan kemampuan market untuk penetrasi dan perluasan pasar global serta memilikindaya saing dengan <i>competitive advantage</i>;</li> </ul>	<p>c) Penguatan Jejaring Pemasaran</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan mutu kemasan berkelanjutan;</li> <li>• Meningkatkan lembaga pemasaran secara bersama;</li> <li>• Meningkatkan jejaring pemasaran melalui kerjasama dengan distributor maupun pasar modern berkelanjutan;</li> <li>• Meningkatkan kemampuan market untuk penetrasi dan perluasan pasar global serta memiliki daya saing dengan <i>competitive advantage</i>;</li> </ul>

**(5) Industri Tekstil**

**Tabel 4.16.  
Sasaran, Strategi dan Rencana Aksi  
Pengembangan Industri Tekstil**

<b>Sasaran</b>			
<b>2020 – 2025</b>	<b>2025 – 2030</b>	<b>2030 – 2035</b>	<b>2035 – 2040</b>
<p>a) Terealisasinya Surat Edaran Gubernur Tentang Nomor 3201-01-02/222/SET, Tanggal 25 Januari 2019, tentang Penggunaan Poduk Lokal</p> <p>b) Tercapainya Nota Kesepahaman (MoU) dengan pemasok serat untuk kelancaran pengadaan bahan baku di dalam negeri; dan</p> <p>c) Tercapainya kontinuitas perbaikan kualitas produk. Tekstil Produk Tekstil dan Tenun dengan konsentrasi pada desain kain warna dan motif moderen dan sistem produksi berwawasan lingkungan.</p>	<p>b) Tercapainya perluasan pasar domestik dan ekspor dengan konsentrasi pada peningkatan daya saing produk dan kemampuan pemasaran; dan</p> <p>c) Terbukanya akses permodalan yang terjangkau oleh industri Produk Tekstil dan Tenun.</p>	<p>a) Terwujudnya produk Tekstil dan Tenun diterima di rumah mode Internasional;</p> <p>b) Tercapainya peningkatan pertumbuhan industri kreatif dan nilai kontribusi ekonomi Kabupaten, Provinsi dan Nasional.</p>	<p>a) Terwujudnya Produk Tekstil dan Tenun diterima di rumah mode Internasional;</p> <p>b) Tercapainya peningkatan pertumbuhan industri kreatif dan nilai kontribusi ekonomi Kabupaten, Provinsi dan Nasional.</p>
<b>Strategi</b>			
<p>a) Konektivitas rantai pemasok – pemasaran (pendekatan <i>Key Investor Information Document</i>, klaster);</p> <p>b) penguatan proses produksi;</p> <p>c) penguatan kompetensi sumber daya manusia;</p> <p>d) diversifikasi produk dan inovasi ;</p> <p>e) penguatan kelembagaan; dan</p> <p>f) perluasan pasar ekspor (masuk pasar khusus "niche").</p>			
<b>Rencana Aksi</b>			
<b>2010-2025</b>	<b>2025-2030</b>	<b>2030-2035</b>	<b>2035-2040</b>
<p>a) Implementasi Surat Edaran Gubernur Tentang Nomor 3201-01-02/222/SET, Tanggal 25 Januari 2019, Tentang Penggunaan Poduk Lokal</p> <p>b) Penguatan jaringan Pemasok-pemasar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menguatkan rantai pasok dengan menjalin kerjasama pemasok bahan baku (MoU) dan pemanfaatan petani sutra lokal;</li> <li>Menguatkan</li> </ul>	<p>a) Penguatan kelembagaan dengan mendorong Investasi melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fasilitasi membangun Kemitraan usaha dengan eksportir; dan</li> <li>Fasilitasi akses modal asing (PMA).</li> </ul> <p>b) Penguatan Kompetensi sumber daya manusia</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam produk bersih berstandar SNI – SPSM/ISO 9000;</li> </ul>	<p>a) Pengembangan produk dan inovasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Diversifikasi produk kerajinan Tekstil dan Tenun lanjutan sesuai permintaan pasar baru (dunia fashion moderen dan cover peralatan RT dengan desain Sulbar moderen); dan</li> <li>Penerapan standar <i>Ekolabeling</i>.</li> </ul> <p>b) Perluasan Pasar Ekspor</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyiapkan</li> </ul>	<p>a) Pengembangan produk dan inovasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Diversifikasi produk kerajinan Produk Tekstil dan Tenun lanjutan sesuai permintaan pasar baru (dunia fashion moderen dan cover peralatan RT dengan desain Sulbar moderen); dan</li> <li>Penerapan standar. <i>Ekolabeling</i>.</li> </ul> <p>b) Perluasan Pasar Ekspor</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyiapkan</li> </ul>

<p>konektivitas industri penunjang, inti dan terkait dengan saluran pemasaran;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperluas saluran pemasaran; dan</li> <li>• Membuka akses permodalan dan investasi.</li> </ul> <p>c) Penguatan Proses Produksi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengembangkan desain Sulbar moderen.</li> <li>• Memperbaiki mutu; produk dan proses; dan</li> <li>• Meningkatkan efisiensi dengan peremajaan mesin dan peralatan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia desain ;</li> <li>• Meningkatkan kemampuan SDM dalam teknologi proses produksi Produk Tekstil dan Tenun; dan</li> <li>• Meningkatkan kemampuan manajemen Ekspor.</li> </ul>	<p>infrastruktur sistem informasi pemasaran yang terhubung dengan sistem pasokan, produksi dan pembiayaan/ perbankan; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperbaiki infrastruktur produksi Produk Tekstil dan Tenun terhubung dengan rumah mode dan Pariwisata.</li> </ul> <p>c) Masuk pasar khusus "Niche" pasar produk seragam dan butik khusus desain fashion modern.</p>	<p>infrastruktur sistem informasi pemasaran yang terhubung dengan sistem pasokan, produksi dan pembiayaan/ perbankan; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperbaiki infrastruktur produksi Produk Tekstil dan Tenun terhubung dengan rumah mode dan Pariwisata.</li> </ul> <p>c) Masuk pasar khusus "Niche" pasar produk seragam dan butik khusus desain fashion modern.</p>
---	---	---	---

## (6) Industri Pengolahan Ikan

**Tabel 4.17.**  
**Sasaran, Strategi, Rencana Aksi dan Pengembangan Industri Pengolahan Ikan**

Sasaran			
2020 - 2025	2025 - 2030	2030 - 2035	2035 - 2040
<p>a) Meningkatnya ketersediaan bahan baku dan penolong;</p> <p>b) Terpenuhi standarasi produk hasil laut;</p> <p>c) Terbentuknya klaster industri pengolahan ikan</p> <p>d) Meningkatnya sumber daya manusia ahli bidang industri pengolahan ikan yang siap pakai;</p> <p>e) Meningkatnya peran perguruan tinggi dalam implementasi hasil penelitian dan pengembangan;</p> <p>f) Meningkatnya ketersediaan bahan baku dan penolong;</p> <p>g) Terpenuhi standarasi produk hasil laut;</p> <p>h) Terbentuknya klaster industri pengolahan ikan</p> <p>i) Meningkatnya sumber daya manusia ahli bidang industri pengolahan ikan yang siap pakai; dan</p>	<p>a) Berkembangannya industri pendukung untuk kontinuitas sumber bahan penolong industri pengolahan ikan;</p> <p>b) Meningkatnya utilitas kapasitas;</p> <p>c) Tercapainya pembatasan ekspor ikan segar</p> <p>d) Terpenuhi sertifikasi sumber daya manusia dan produk;</p> <p>e) Terdiversifikasnyai produk dan peningkatan nilai tambah;</p> <p>f) Terkoordinasinya interaksi jaringan kerja yang saling mendukung dan menguntungkan serta peran aktif antara pusat dan Provinsi, dunia usaha, lembaga penelitian dan perguruan tinggi;</p>	<p>a) Terbangunnya industri pengolahan ikan modern</p> <p>b) Berkembangannya klaster perikanan modern dalam rangka percepatan pertumbuhan industri perikanan di sentra produksi terpilih;</p> <p>c) Berkembangannya industri pengolahan ikan hemat energy dan ramah lingkungan;</p> <p>d) Berkembangannya penguatan penelitian dan pengembangan di kawasan industri pengolahan ikan;</p> <p>e) Berkembangannya teknologi pengolahan ikan yang lebih modern dalam rangka meningkatkan produk perikanan yang sesuai dengan standar internasional;</p>	<p>a) Terbangunnya industri pengolahan ikan modern</p> <p>b) Berkembangannya klaster perikanan modern dalam rangka percepatan pertumbuhan industri perikanan di sentra produksi terpilih;</p> <p>c) Berkembangannya industry pengolahan ikan</p> <p>d) hemat energi dan ramah lingkungan;</p> <p>f) Berkembangannya penguatan penelitian dan pengembangan di kawasan industri pengolahan ikan;</p> <p>g) Berkembangannya teknologi pengolahan ikan yang lebih modern dalam rangka meningkatkan produk perikanan yang</p>

j) Meningkatkan peran perguruan tinggi dalam implementasi hasil penelitian dan pengembangan			sesuai dengan standard internasional;
<b>Strategi</b>			
Menumbuhkembangkan industri pengolahan Ikan melalui ketersediaan jaminan pasokan bahan baku, peningkatan teknologi proses dan produk, kemasan, penguatan kelembagaan serta pengembangan kemitraan dan pemasaran.			
<b>Rencana Aksi</b>			
<b>2010-2025</b>	<b>2025-2030</b>	<b>2030-2035</b>	<b>2035-2040</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Meningkatkan kemitraan dan integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir dalam rangka meningkatkan jaminan pasokan bahan baku ikan;</li> <li>b) Mengadakan <i>workshop</i> pembangunan klaster pengolahan industri ikan dalam rangka sosialisasi klaster industri pengolahan ikan; dan</li> <li>c) Melengkapi sarana dan prasarana industri pengolahan ikan melalui bantuan mesin/ peralatan pengolahan hasil laut ke daerah- daerah yang potensial dengan berkoordinasi dengan instansi terkait.</li> <li>d) Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang teknologi pascapanen dan pengolahan ikan serta manajerial usaha melalui diklat.</li> <li>e) Melakukan upaya penumbuhan wirausaha baru di bidang industri pengolahan ikan melalui kegiatan magang di beberapa pabrik pengolahan ikan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Membatasi ekspor ikan segar dalam rangka meningkatkan pasokan bahan baku ikan segar untuk industri pengolahan ikan dalam negeri;</li> <li>b) Meningkatkan kemampuan penyediaan mesin dan peralatan pendukung usaha pengolahan ikan;</li> <li>c) Memperkuat industri pengolahan ikan berorientasi ekspor;</li> <li>d) Meningkatkan peran perguruan tinggi dalam diversifikasi produk;</li> <li>e) Meningkatkan kerjasama dalam penelitian dan pengembangan teknologi proses dan teknologi produk antara sektor industri dengan lembaga/balai penelitian dan perguruan tinggi;</li> <li>f) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk penanganan pencemaran limbah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Membangun pusat informasi industri hasil laut di lokasi klaster pembangunan industri pengolahan ikan;</li> <li>b) Meningkatkan kerjasama dalam penelitian dan pengembangan teknologi proses dan teknologi produk antara sektor industri dengan lembaga/ balai penelitian dan perguruan tinggi;</li> <li>c) Mendorong investasi industri pengolahan ikan secara modern;</li> <li>d) Meningkatkan kemampuan uji mutu laboratorium untuk produk hasil perikanan melalui bantuan alat dan bantuan teknis;</li> <li>e) Membangun pusat informasi industri hasil laut di lokasi klaster pembangunan industri pengolahan ikan;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Membangun pusat informasi industri hasil laut di lokasi klaster pembangunan industri pengolahan ikan;</li> <li>b) Meningkatkan kerjasama dalam penelitian dan pengembangan teknologi proses dan teknologi produk antara sektor industri dengan lembaga/ balai penelitian dan perguruan tinggi;</li> <li>c) Mendorong investasi industri pengolahan ikan secara modern;</li> <li>d) Meningkatkan kemampuan uji mutu laboratorium untuk produk hasil perikanan melalui bantuan alat dan bantuan teknis;</li> <li>e) Membangun pusat informasi industri hasil laut di lokasi klaster pembangunan industri pengolahan ikan;</li> </ul>

### **h) Program Pembangunan Industri Unggulan Provinsi Sulawesi Barat**

Program-program dari masing-masing industri unggulan provinsi di atas dijabarkan sebagai berikut:



**Tabel 4.18.**  
**Program Pengembangan Industri Pengolahan Kakao Tahun 2020 – 2040**

No.	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun			
		Pusat	Daerah	Swasta	Lain-Lain	2025	2030	2035	2040
<b>I. Program Pengembangan SDM Kelapa Kakao</b>									
<b>A</b>	Peningkatan kemampuan SDM petani								
1	Training/ diklat intensifikasi petani	Kementan	Dis-Bun	Petani		√	√		
2	Workshop/ short course standar pasca panen	Kementan	Dis-Bun, DisDagperin kop-UKM	Petani		√	√		
<b>B</b>	Peningkatan kemampuan SDM industri pengolahan Kakao								
1	Workshop/ short course QC, pembinaan produksi dan pengawasan untuk pelaku industry	Kemenprin	Dis-Indag	Industri Kakao		√	√		
2	Pendidikan industri kakao bagi aparat daerah atau Training of trainers (TOT) aparat pemerintah daerah terkait dalam teknis dan manajemen industri	Kemenprin	DisDagperin kop-UKM			√	√		
<b>II. Program Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam Kakao</b>									
<b>A</b>	Penguatan pasokan dan kontinuitas bahan baku Kakao dengan dukungan untuk program intensifikasi (peningkatan produktifitas), rejuvenasi dan ekstensifikasi yang berwawasan lingkungan								
1	Intensifikasi, rehabilitasi dan ekstensifikasi kakao (Sosialisasi intensif, penyuluhan dan pendampingan menuju implementasi penerapan teknologi budidaya intensif)	Kementan	Dis-Bun	Petani	Balitbang	√	√	√	√
2	Fasilitasi alsintan, bibit unggul dan pupuk	Kementan	Dis-Bun	Petani		√			
<b>B</b>	Peningkatan kualitas produksi pasca panen sesuai kebutuhan industri								

No.	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun			
		Pusat	Daerah	Swasta	Lain-Lain	2025	2030	2035	2040
1	Sosialisasi intensif, penyuluhan dan pendampingan implementasi penerapan teknologi pasca panen	Kementan	Dis-Bun	Petani	Balitbang	√	√	√	√
2	Fasilitasi sarana/ peralatan pasca panen	Kementan	Dis-Bun	Petani		√			
<b>III. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri Kakao</b>									
A	Penerapan standar mutu (SNI/ ISO/ HACCP dengan GMP dan SOP atau standar lainnya yang relevant)	Kemenprin	DisDagperin kop-UKM	Industri Kakao		√	√	√	√
B	Fasilitasi alat industri maju	Kemenprin	DisDagperin kop-UKM	IKM		√			
C	Kerjasama Riset dan Pengembangan industri dan teknologi pengolahan (khususnya untuk industri hilir Kakao)	Kemenprin	DisDagperin kop-UKM	Industri Kakao, Investor	Balitri, Batan, BPPT	√	√	√	√
<b>IV. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi Industri Kakao</b>									
A	Pemanfaatan media informatika dan e-smart ,e-market secara professional	Kemenprin	DisDagperin kop-UKM	Industri Kakao		√	√	√	√
B	Kerjasama pengembangan products dan market	Kemenprin	DisDagperin kop-UKM	Industri Kakao	Asosiasi perkebunan, BBHIP, Batan, BPPT	√	√	√	√
C	Pengembangan 'branded' produk	Kemenprin	DisDagperin kop-UKM	Industri Kakao		√	√		
<b>V. Program Penyediaan Sumber Pembiayaan Industri Kakao</b>									
A	Fasilitasi, promosi dan investasi (khususnya untuk industri hilir Kakao)		Dis-PM, DisDagperin	Industri Kakao,		√	√	√	√



No.	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun			
		Pusat	Daerah	Swasta	Lain-Lain	2025	2030	2035	2040
			kop-UKM, Ba-Perijinan	Investor					
<b>B</b>	Fasilitasi kerjasama pembiayaan dengan lembaga financial/ bank	Kemenkeu	DisDagperin kop-UKM	Industri kakao	Perbankan	√	√	√	√
<b>C</b>	Bimbingan management financial	Kemenkeu	DisDagperin kop-UKM	Industri Kakao	Perbankan	√			
<b>VI. Program-program Dukungan Lainnya/untuk Pengembangan Industri Kakao</b>									
<b>A</b>	Program Pembangunan Infrastruktur/ Pengelolaan Lingkungan	Bappenas	Dis-PU, PLN, PDAM, dll.			√	√	√	√
<b>B</b>	Program Peningkatan Kerjasama (antar institusi pemerintah terkait; Kerjasama riset maupun special study dalam pengembangan industri maupun teknologi pengolahan Kakao)	Bappenas	DisDagperin kop-UKM	Industri Kakao, IKM	Donor	√	√	√	√
<b>C</b>	Program Pengembangan Perwilayahan Industri (KPI, KI, Sentra IKM)	Kemenprin	Dis-PU, DisDagperin kop-UKM	Industri (Investor)		√	√	√	√
<b>D</b>	Program Pemberdayaan IKM	Kemenprin	DisDagperin kop-UKM	IKM		√	√	√	√
<b>E</b>	Program Perijinan dan Pajak Daerah yang Menunjang Pembangunan Industri (khususnya untuk industri hilir Kakao)	Kemenkeu	Dis-PM, DisDagperin kop-UKM, Ba-Perijinan			√	√	√	√

**Tabel 4.19**  
**Program Pengembangan Industri Pengolahan Kelapa Dalam Tahun 2020 – 2040**

No.	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun			
		Pusat	Daerah	Swasta	Lain-Lain	2025	2030	2035	2040
<b>I. Program Pengembangan SDM Kelapa Dalam</b>									
<b>A</b>	Peningkatan kemampuan SDM petani								
1	Training/ diklat intensifikasi petani	Kementan	Dis-Bun	Petani		√	√		
2	Workshop/ short course standar pasca panen		DisDagperin kop-UKM	Petani		√	√		
<b>B</b>	Peningkatan kemampuan SDM industri pengolahan Kelapa Dalam								
1	Workshop/ short course QC, pembinaan produksi dan pengawasan untuk pelaku industry	Kementan	DisDagperin kop-UKM	Industri Kelapa		√	√		
2	Pendidikan industri kelapa dalam bagi aparat daerah atau Training of trainers (TOT) aparat pemerintah daerah terkait dalam teknis dan manajemen industri	Kementan	DisDagperin kop-UKM			√	√		
<b>II. Program Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam Kelapa Dalam</b>									
<b>A</b>	Penguatan pasokan dan kontinuitas bahan baku kelapa dalam dengan dukungan untuk program intensifikasi (peningkatan produktifitas), rejuvenasi dan ekstensifikasi yang berwawasan lingkungan								
1	Intensifikasi, rehabilitasi dan ekstensifikasi kelapa dalam (Sosialisasi intensif, penyuluhan dan pendampingan menuju implementasi penerapan teknologi budidaya intensif)	Kementan	Dis-Bun	Petani	Balitbang	√	√	√	√
2	Fasilitasi alsintan, bibit unggul dan pupuk	Kementan	Dis-Bun	Petani		√			
<b>B</b>	Peningkatan kualitas produksi pasca panen sesuai kebutuhan industri								
1	Sosialisasi intensif, penyuluhan dan	Kementan	Dis-Bun	Petani	Balitbang	√	√	√	√



No.	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun			
		Pusat	Daerah	Swasta	Lain-Lain	2025	2030	2035	2040
			Perijinan						
B	Fasilitasi kerjasama pembiayaan dengan lembaga financial/ bank	Kemenkeu	DisDagperin kop-UKM	Industri Kelapa	Perbankan	√	√	√	√
C	Bimbingan management financial	Kemenkeu	DisDagperin kop-UKM	Industri Kelapa	Perbankan	√			
<b>VI. Program-program Dukungan Lainnya/untuk Pengembangan Industri Kelapa Dalam</b>									
A	Program Pembangunan Infrastruktur/ Pengelolaan Lingkungan	Bappenas	Dis-PU, PLN, PDAM, dll.			√	√	√	√
B	Program Peningkatan Kerjasama (antar institusi pemerintah terkait; Kerjasama riset maupun special study dalam pengembangan industri maupun teknologi pengolahan)	Bappenas	DisDagperin kop-UKM	Industri Kelapa, IKM	Donor	√	√	√	√
C	Program Pengembangan Perwilayahan Industri (KPI, KI, Sentra IKM)	Kemenprin	Dis-PU, DisDagperin kop-UKM	Industri (Investor)		√	√	√	√
D	Program Pemberdayaan IKM	Kemenprin	DisDagperin kop-UKM	IKM		√	√	√	√
E	Program Perijinan dan Pajak Daerah yang Menunjang Pembangunan Industri (khususnya untuk industri hilir kelapa dalam)		Dis-PM, DisDagperin kop-UKM, Ba-Perijinan			√	√	√	√

No.	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun			
		Pusat	Daerah	Swasta	Lain-Lain	2025	2030	2035	2040
	pendampingan implementasi penerapan teknologi pasca panen								
2	Fasilitasi sarana/ peralatan pasca panen	Kementan	Dis-Bun	Petani		√			
<b>III. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri Kelapa</b>									
A	Penerapan standar mutu (SNI/ ISO/ HACCP dengan GMP dan SOP atau standar lainnya yang relevant)	Kemenprin	DisDagperin kop-UKM	Industri Kelapa		√	√	√	√
B	Fasilitasi alat industri maju	Kemenprin	DisDagperin kop-UKM	IKM		√			
C	Kerjasama Riset dan Pengembangan industri dan teknologi pengolahan (khususnya untuk industri hilir kelapa dalam)	Kemenprin	DisDagperin kop-UKM	Industri Kelapa, Investor	Balitri, Batan, BPPT	√	√	√	√
<b>IV. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi Industri Kelapa Dalam</b>									
A	Pemanfaatan media informatika dan e-smart ,e-market secara professional	Kemenprin	DisDagperin kop-UKM	Industri Kelapa		√	√	√	√
B	Kerjasama pengembangan products dan market	Kemenprin	DisDagperin kop-UKM	Industri Kelapa	Asosiasi perkebunan, BBHIP, Batan, BPPT	√	√	√	√
C	Pengembangan 'branded' produk	Kemenprin	DisDagperin kop-UKM	Industri Kelapa		√	√		
<b>V. Program Penyediaan Sumber Pembiayaan Industri Kelapa Dalam</b>									
A	Fasilitasi, promosi dan investasi (khususnya untuk industri hilir kelapa dalam )	Kemenprin	Dis-PM, DisDagperin-UKM, Ba-	Industri Kelapa, Investor		√	√	√	√



**Tabel 4.20**  
**Program Pengembangan Industri Pengolahan Kopi Tahun 2020 – 2040**

No.	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun			
		Pusat	Daerah	Swasta	Lain-Lain	2025	2030	2035	2040
<b>I. Program Pengembangan SDM Kopi</b>									
<b>A</b>	Peningkatan kemampuan SDM petani								
1	Training/ diklat intensifikasi petani	Kementan	Dis-Bun	Petani		√	√		
2	Workshop/ short course standar pasca panen		DisDagperin kop-UKM	Petani		√	√		
<b>B</b>	Peningkatan kemampuan SDM industri pengolahan Kopi								
1	Workshop/ short course QC, pembinaan produksi dan pengawasan untuk pelaku industri	Kementan	DisDagperin kop-UKM	Industri Kopi		√	√		
2	Pendidikan industri kopi bagi aparat daerah atau Training of trainers (TOT) aparat pemerintah daerah terkait dalam teknis dan manajemen industri	Kementan	DisDagperin kop-UKM			√	√		
<b>II. Program Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam Kopi</b>									
<b>A</b>	Penguatan pasokan dan kontinuitas bahan baku kopi dengan dukungan untuk program intensifikasi (peningkatan produktifitas), rejuvenasi dan ekstensifikasi yang berwawasan lingkungan								
1	Intensifikasi, rehabilitasi dan ekstensifikasi kopi (Sosialisasi intensif, penyuluhan dan pendampingan menuju implementasi penerapan teknologi budidaya intensif)	Kementan	Dis-Bun	Petani	Balitbang	√	√	√	√
2	Fasilitasi alsintan, bibit unggul dan pupuk	Kementan	Dis-Bun	Petani		√			
<b>B</b>	Peningkatan kualitas produksi pasca panen sesuai kebutuhan industri								
1	Sosialisasi intensif, penyuluhan dan	Kementan	Dis-Bun	Petani	Balitbang	√	√	√	√



No.	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun			
		Pusat	Daerah	Swasta	Lain-Lain	2025	2030	2035	2040
	pendampingan implementasi penerapan teknologi pasca panen								
2	Fasilitasi sarana/ peralatan pasca panen	Kementan	Dis-Bun	Petani		√			
<b>III. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri Kopi</b>									
A	Penerapan standar mutu (SNI/ ISO/ HACCP dengan GMP dan SOP atau standar lainnya yang relevant)	Kemenprin	DisDagperin kop-UKM	Industri Kopi		√	√	√	√
B	Fasilitasi alat industri maju	Kemenprin	DisDagperin kop-UKM	IKM		√			
C	Kerjasama Riset dan Pengembangan industri dan teknologi pengolahan (khususnya untuk industri hilir kopi)	Kemenprin	DisDagperin kop-UKM	Industri Kopi, Investor	Balitri, Batan, BPPT	√	√	√	√
<b>IV. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi Industri Kopi</b>									
A	Pemanfaatan media informatika dan e-smart ,e-market secara professional	Kemenprin	DisDagperin kop-UKM	Industri Kopi		√	√	√	√
B	Kerjasama pengembangan products dan market	Kemenprin	DisDagperin kop-UKM	Industri Kopi	Asosiasi perkebunan, BBHIP, Batan, BPPT	√	√	√	√
C	Pengembangan 'branded' produk	Kemenprin	DisDagperin kop-UKM	Industri Kopi		√	√		
<b>V. Program Penyediaan Sumber Pembiayaan Industri Kopi</b>									
A	Fasilitasi, promosi dan investasi (khususnya untuk industri hilir kopi)	Kemenprin	Dis-PM, DisDagperin-UKM, Ba-	Industri Kopi, Investor		√	√	√	√

No.	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun			
		Pusat	Daerah	Swasta	Lain-Lain	2025	2030	2035	2040
			Perijinan						
<b>B</b>	Fasilitasi kerjasama pembiayaan dengan lembaga financial/ bank	Kemenkeu	DisDagperin kop-UKM	Industri Kopi	Perbankan	√	√	√	√
<b>C</b>	Bimbingan management financial	Kemenkeu	DisDagperin kop-UKM	Industri Kopi	Perbankan	√			
<b>VI. Program-program Dukungan Lainnya/untuk Pengembangan Industri Kopi</b>									
<b>A</b>	Program Pembangunan Infrastruktur/ Pengelolaan Lingkungan	Bappenas	Dis-PU, PLN, PDAM, dll.			√	√	√	√
<b>B</b>	Program Peningkatan Kerjasama (antar institusi pemerintah terkait; Kerjasama riset maupun special study dalam pengembangan industri maupun teknologi pengolahan)	Bappenas	DisDagperin kop-UKM	Industri Kopi, IKM	Donor	√	√	√	√
<b>C</b>	Program Pengembangan Perwilayahan Industri (KPI, KI, Sentra IKM)	Kemenprin	Dis-PU, DisDagperin kop-UKM	Industri (Investor)		√	√	√	√
<b>D</b>	Program Pemberdayaan IKM	Kemenprin	DisDagperin kop-UKM	IKM		√	√	√	√
<b>E</b>	Program Perijinan dan Pajak Daerah yang Menunjang Pembangunan Industri (khususnya untuk industri hilir kopi)		Dis-PM, DisDagperin kop-UKM, Ba-Perijinan			√	√	√	√



**Tabel 4.21**  
**Program Pengembangan Industri Pengolahan Gula Aren Tahun 2020 – 2040**

No.	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun			
		Pusat	Daerah	Swasta	Lain-Lain	2025	2030	2035	2040
<b>I. Program Pengembangan SDM Gula Aren</b>									
<b>A</b>	Peningkatan kemampuan SDM petani								
1	Training/ diklat intensifikasi petani	Kementan	Dis-Bun	Petani		√	√		
2	Workshop/ short course standar pasca panen		Dis-Bun DisDagperin kop-UKM	Petani		√	√		
<b>B</b>	Peningkatan kemampuan SDM industri pengolahan Gula Aren								
1	Workshop/ short course QC, pembinaan produksi dan pengawasan untuk pelaku industry	Kementan	DisDagperin kop-UKM	Industri Gula Aren		√	√		
2	Pendidikan industri gula aren bagi aparat daerah atau Training of trainers (TOT) aparat pemerintah daerah terkait dalam teknis dan manajemen industri	Kementan	DisDagperin kop-UKM			√	√		
<b>II. Program Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam Gula Aren</b>									
<b>A</b>	Penguatan pasokan dan kontinuitas bahan baku gula aren dengan dukungan untuk program intensifikasi (peningkatan produktifitas), rejuvenasi dan ekstensifikasi yang berwawasan lingkungan								
1	Intensifikasi, rehabilitasi dan ekstensifikasi gula aren (Sosialisasi intensif, penyuluhan dan pendampingan menuju implementasi penerapan teknologi budidaya intensif)	Kementan	Dis-Bun	Petani	Balitbang	√	√	√	√

No.	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun			
		Pusat	Daerah	Swasta	Lain-Lain	2025	2030	2035	2040
<b>A</b>	Fasilitasi, promosi dan investasi (khususnya untuk industri hilir gula aren )	Kemenprin	Dis-PM, DisDagperin kop-UKM, Ba-Perijinan	Industri Gula Aren, Investor		√	√	√	√
<b>B</b>	Fasilitasi kerjasama pembiayaan dengan lembaga financial/ bank	Kemenkeu	DisDagperin kop-UKM	Industri Gula Aren	Perbankan	√	√	√	√
<b>C</b>	Bimbingan management financial	Kemenkeu	DisDagperin kop-UKM	Industri Gula Aren	Perbankan	√			
<b>VI. Program-program Dukungan Lainnya/untuk Pengembangan Industri Gula Aren</b>									
<b>A</b>	Program Pembangunan Infrastruktur/ Pengelolaan Lingkungan	Bappenas	Dis-PU, PLN, PDAM, dll.			√	√	√	√
<b>B</b>	Program Peningkatan Kerjasama (antar institusi pemerintah terkait; Kerjasama riset maupun special study dalam pengembangan industri maupun teknologi pengolahan)	Bappenas	DisDagperin kop-UKM dan Dis-Indag Provinsi	Industri Gula Aren, IKM	Donor	√	√	√	√
<b>C</b>	Program Pengembangan Perwilayahan Industri (KPI, KI, Sentra IKM)	Kemenprin	Dis-PU, DisDagperin kop-UKM	Industri (Investor)		√	√	√	√
<b>D</b>	Program Pemberdayaan IKM	Kemenprin	DisDagperin kop-UKM	IKM		√	√	√	√
<b>E</b>	Program Perijinan dan Pajak Daerah yang Menunjang Pembangunan Industri (khususnya untuk industri hilir gula aren)		Dis-PM, Disagperinko p-UKM, Ba-			√	√	√	√



No.	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun			
		Pusat	Daerah	Swasta	Lain-Lain	2025	2030	2035	2040
2	Fasilitasi alsintan, bibit unggul dan pupuk	Kementan	Dis-Bun	Petani		√			
<b>B</b>	Peningatan kualitas produksi pasca panen sesuai kebutuhan industri								
1	Sosialisasi intensif, penyuluhan dan pendampingan implementasi penerapan teknologi pasca panen	Kementan	Dis-Bun	Petani	Balitbang	√	√	√	√
2	Fasilitasi sarana/ peralatan pasca panen	Kementan	Dis-Bun	Petani		√			
<b>III. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri Gula Aren</b>									
<b>A</b>	Penerapan standar mutu (SNI/ ISO/ HACCP dengan GMP dan SOP atau standar lainnya yang relevant)	Kemenprin	DisDagperin kop-UKM	Industri Gula Aren		√	√	√	√
<b>B</b>	Fasilitasi alat industri maju	Kemenprin	DisDagperin kop-UKM	IKM		√			
<b>C</b>	Kerjasama Riset dan Pengembangan industri dan teknologi pengolahan (khususnya untuk industri hilir gula aren)	Kemenprin	DisDagperin kop-UKM	Industri Gula Aren, Investor	Balitri, Batan, BPPT	√	√	√	√
<b>IV. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi Industri Gula Aren</b>									
<b>A</b>	Pemanfaatan media informatika dan e-smart ,e-market secara professional	Kemenprin	DisDagperin kop-UKM	Industri Gula Aren		√	√	√	√
<b>B</b>	Kerjasama pengembangan products dan market	Kemenprin	DisDagperin kop-UKM	Industri Gula Aren	Asosiasi perkebunan, BBHIP, Batan, BPPT	√	√	√	√
<b>C</b>	Pengembangan 'branded' produk	Kemenprin	DisDagperin kop-UKM	Industri Gula Aren		√	√		
<b>V. Program Penyediaan Sumber Pembiayaan Industri Gula Aren</b>									

**Tabel 4.22**  
**Program Pengembangan Industri Tekstil Tahun 2020 – 2040**

No.	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun			
		Pusat	Daerah	Swasta	Lain-Lain	2025	2030	2035	2040
<b>I. Program Pengembangan SDM Industri Tekstil</b>									
<b>A</b>	Peningkatan kemampuan SDM petani								
1	Training/ diklat intensifikasi petani	Kementan	Dis-Hut	Petani		√	√		
2	Workshop/ short course standar pasca panen		Dis-Hut DisDagperin kop-UKM	Petani		√	√		
<b>B</b>	Peningkatan kemampuan SDM industri Tekstil								
1	Workshop/ short course QC, pembinaan produksi dan pengawasan untuk pelaku Industri	Kementan	DisDagperin kop-UKM	Industri Tekstil dan Sutera		√	√		
2	Pendidikan industri tekstil bagi aparat daerah atau Training of trainers (TOT) aparat pemerintah daerah terkait dalam teknis dan manajemen industri	Kementan	DisDagperin kop-UKM			√	√		
<b>II. Program Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam Bahan Baku Industri Tekstil</b>									
<b>A</b>	Penguatan pasokan dan kontinuitas bahan baku tekstil dengan dukungan untuk program intensifikasi (peningkatan produktifitas) dan ekstensifikasi yang berwawasan lingkungan								



No.	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun			
		Pusat	Daerah	Swasta	Lain-Lain	2025	2030	2035	2040
1	Intensifikasi, rehabilitasi dan ekstensifikasi bahan baku tekstil (Sosialisasi intensif, penyuluhan dan pendampingan menuju implementasi penerapan teknologi budidaya intensif)	Kementan	Dis-Hut	Petani	Balitbang	√	√	√	√
2	Fasilitasi alsintan, bibit unggul dan pupuk bahan baku industri tekstil	Kementan	Dis-Hut	Petani		√			
<b>III. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri Tekstil</b>									
A	Penerapan standar mutu (SNI/ ISO/ HACCP dengan GMP dan SOP atau standar lainnya yang relevant)	Kemenprin	DisDagperin kop-UKM	Industri Tekstil dan Sutera		√	√	√	√
B	Fasilitasi alat industri maju	Kemenprin	DisDagperin kop-UKM	IKM		√			
C	Kerjasama Riset dan Pengembangan industri dan teknologi pengolahan (khususnya untuk industri hilir tekstil)	Kemenprin	DisDagperin kop-UKM	Industri Tekstil dan Sutera, Investor	Balitri, Batan, BPPT	√	√	√	√
<b>IV. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi Industri Tekstil</b>									
A	Pemanfaatan media informatika dan e-smart ,e-market secara professional	Kemenprin	DisDagperin kop-UKM	Industri Tekstil dan Sutera		√	√	√	√
B	Kerjasama pengembangan products dan market	Kemenprin	DisDagperin kop-UKM	Industri Tekstil dan Sutera	Asosiasi perkebunan, BBHIP, Batan, BPPT	√	√	√	√



No.	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun				
		Pusat	Daerah	Swasta	Lain-Lain	2025	2030	2035	2040	
<b>II. Program Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam Ikan</b>										
<b>A</b>	Penguatan pasokan dan kontinuitas bahan baku perikanan dengan dukungan untuk program intensifikasi (peningkatan produktifitas), dan ekstensifikasi yang berwawasan lingkungan									
<b>1</b>	Intensifikasi, rehabilitasi dan ekstensifikasi perikanan tangkap (Sosialisasi intensif, penyuluhan dan pendampingan menuju implementasi penerapan teknologi budidaya intensif)	Kemen K&P	Dinas KP	Nelayan	Balitbang		√	√	√	√
<b>III. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri Pengolahan Ikan</b>										
<b>A</b>	Penerapan standar mutu (SNI/ ISO/ HACCP dengan GMP dan SOP atau standar lainnya yang relevant)	Kemenprin	DisDagperin kop-UKM	Industri Pengolahan Ikan			√	√	√	√
<b>B</b>	Fasilitasi alat industri maju	Kemenprin	DisDagperin kop-UKM	IKM			√			
<b>C</b>	Kerjasama Riset dan Pengembangan industri dan teknologi pengolahan (khususnya untuk industri hilir ikan)	Kemenprin	DisDagperin kop-UKM	Industri Pengolahan Ikan,	Balitri, Batan, BPPT		√	√	√	√

No.	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun			
		Pusat	Daerah	Swasta	Lain-Lain	2025	2030	2035	2040
			kop-UKM, Ba-Perijinan	Sutera, Investor					
<b>B</b>	Fasilitasi kerjasama pembiayaan dengan lembaga financial/ bank	Kemenkeu	DisDagperin kop-UKM	Industri Tekstil dan Sutera	Perbankan	√	√	√	√
<b>C</b>	Bimbingan management financial	Kemenkeu	DisDagperin kop-UKM	Industri Tekstil dan Sutera	Perbankan	√			
<b>VI. Program-program Dukungan Lainnya/untuk Pengembangan Industri Tekstil</b>									
<b>A</b>	Program Pembangunan Infrastruktur/ Pengelolaan Lingkungan	Bappenas	Dis-PU, PLN, PDAM, dll.			√	√	√	√
<b>B</b>	Program Peningkatan Kerjasama (antar institusi pemerintah terkait; Kerjasama riset maupun special study dalam pengembangan industri maupun teknologi pengolahan)	Bappenas	DisDagperin kop-UKM dan Dis- Indag Provinsi	Industri Tekstil dan Sutera, IKM	Donor	√	√	√	√
<b>C</b>	Program Pengembangan Perwilayahan Industri (KPI, KI, Sentra IKM)	Kemenprin	Dis-PU, DisDagperin kop-UKM	Industri (Investor)		√	√	√	√
<b>D</b>	Program Pemberdayaan IKM	Kemenprin	DisDagperin kop-UKM	IKM		√	√	√	√
<b>E</b>	Program Perijinan dan Pajak Daerah yang Menunjang Pembangunan Industri (khususnya untuk industri hilir tekstil dan sutera)		Dis-PM, Disagperinko p-UKM, Ba- Perijinan			√	√	√	√

**Tabel 4.23**  
**Program Pengembangan Industri Pengolahan Ikan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 – 2040**

No.	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun			
		Pusat	Daerah	Swasta	Lain-Lain	2025	2030	2035	2040
<b>I. Program Pengembangan SDM Perikanan</b>									
<b>A</b>	Peningkatan kemampuan SDM nelayan								
1	Training/ diklat intensifikasi nelayan	Kemen K&P	Dinas KP	Nelayan		√	√		
2	Workshop/ short course standar pasca panen	Kemenprin	Dinas KP, DisDagperin kop-UKM	Nelayan		√	√		
<b>B</b>	Peningkatan kemampuan SDM industri Pengolahan Ikan								
1	Workshop/ short course QC, pembinaan produksi dan pengawasan untuk pelaku industri	Kemenprin	DisDagperin kop-UKM	Industri Pengolahan Ikan		√	√		
2	Pendidikan industri ikan bagi aparat daerah atau Training of trainers (TOT) aparat pemerintah daerah terkait dalam teknis dan manajemen industri	Kemenprin	DisDagperin kop-UKM			√	√		



No.	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun				
		Pusat	Daerah	Swasta	Lain-Lain	2025	2030	2035	2040	
<b>II. Program Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam Ikan</b>										
<b>A</b>	Penguatan pasokan dan kontinuitas bahan baku perikanan dengan dukungan untuk program intensifikasi (peningkatan produktifitas), dan ekstensifikasi yang berwawasan lingkungan									
<b>1</b>	Intensifikasi, rehabilitasi dan ekstensifikasi perikanan tangkap (Sosialisasi intensif, penyuluhan dan pendampingan menuju implementasi penerapan teknologi budidaya intensif)	Kemen K&P	Dinas KP	Nelayan	Balitbang		√	√	√	√
<b>III. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri Pengolahan Ikan</b>										
<b>A</b>	Penerapan standar mutu (SNI/ ISO/ HACCP dengan GMP dan SOP atau standar lainnya yang relevant)	Kemenprin	DisDagperin kop-UKM	Industri Pengolahan Ikan			√	√	√	√
<b>B</b>	Fasilitasi alat industri maju	Kemenprin	DisDagperin kop-UKM	IKM			√			
<b>C</b>	Kerjasama Riset dan Pengembangan industri dan teknologi pengolahan (khususnya untuk industri hilir ikan)	Kemenprin	DisDagperin kop-UKM	Industri Pengolahan Ikan,	Balitri, Batan, BPPT		√	√	√	√

No.	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun			
		Pusat	Daerah	Swasta	Lain-Lain	2025	2030	2035	2040
				Investor					
<b>IV. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi Industri Pengolahan Ikan</b>									
<b>A</b>	Pemanfaatan media informatika dan e-smart ,e-market secara professional	Kemenprin	DisDagperin kop-UKM	Industri Pengolahan Ikan		√	√	√	√
<b>B</b>	Kerjasama pengembangan products dan market	Kemenprin	DisDagperin kop-UKM	Industri Pengolahan Ikan	Asosiasi perikanan, Batan, BPPT	√	√	√	√
<b>C</b>	Pengembangan 'branded' produk	Kemenprin	DisDagperin kop-UKM	Industri Pengolahan Ikan		√	√		
<b>V. Program Penyediaan Sumber Pembiayaan Industri Pegolahan Ikan</b>									
<b>A</b>	Fasilitasi, promosi dan investasi (khususnya untuk industri hilir ikan)	Kemenprin Kemen P&K	DisDagperin kop-UKM Dis-PM, Ba-Perijinan	Industri Pengolahan Ikan, Investor		√	√	√	√

No.	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun			
		Pusat	Daerah	Swasta	Lain-Lain	2025	2030	2035	2040
B	Fasilitasi kerjasama pembiayaan dengan lembaga financial/ bank	Kemenprin	DisDagperin kop-UKM	Industri Pengolahan Ikan	Perbankan	√	√	√	√
C	Bimbingan management financial	BI	DisDagperin kop-UKM	Industri Pengolahan Ikan	Perbankan	√			
<b>VI. Program-program Dukungan Lainnya/untuk Pengembangan Industri Pengolahan Ikan</b>									
A	Program Pembangunan Infrastruktur/ Pengelolaan Lingkungan	Bappenas	Dis-PU, PLN, PDAM, BLH			√	√	√	√
B	Program Peningkatan Kerjasama (antar institusi pemerintah terkait; Kerjasama riset maupun special study dalam pengembangan industri maupun teknologi pengolahan Perikanan Tangkap)	Bappenas	DisDagperin kop-UKM	Industri Pengolahan Ikan, IKM	Donor	√	√	√	√
C	Program Pengembangan Perwilayahan Industri (KPI, KI, Sentra IKM)	Kemenprin	Dis-PU, DisDagperin-UKM	Industri (Investor)		√	√	√	√



No.	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun			
		Pusat	Daerah	Swasta	Lain-Lain	2025	2030	2035	2040
D	Program Pemberdayaan IKM	Kemenprin	DisDagperin kop-UKM	IKM		√	√	√	√
E	Program Perijinan dan Pajak Daerah yang Menunjang Pembangunan Industri (khususnya untuk industri hilir ikan)	Kemenku	Dis-PM, DisDagperin-UKM, Ba-Perijinan			√	√	√	√

## 1. Pengembangan Perwilayahan Industri

Pengembangan perwilayahan industri dilakukan dengan pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Industri, dan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah di Provinsi Sulawesi Barat.

**Tabel 4.24.**

### **Program Pengembangan Perwilayahan Industri Tahun 2020-2040**

No.	Program	Tahun			
		2025	2030	2035	2040
<b>A.</b>	<b>Pengembangan KPI</b>				
1	Evaluasi KPI yang sudah ditentukan dalam RTRW Provinsi Sulawesi Barat tahun 2014-2034, untuk dikaji menurut fokus pada industri prioritas daerah yang akan dikembangkan.	√	√	√	√
<b>B.</b>	<b>Kawasan Industri (KI)</b>				
<b>1</b>	Pengadaan tanah hanya dapat disediakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat atau investor untuk pembangunan sentra KI	√	√	√	√
<b>2.</b>	Pembangunan infrastruktur untuk mendukung KI	√	√	√	√
<b>C.</b>	<b>Pembangunan Sentra IKM</b>				
1	Survey dan pemetaan potensi pembangunan sentra IKM, dengan prioritas di kecamatan-kecamatan sentra produksi.	√	√	√	√
2	Penyusunan rencana pembangunan sentra IKM Pangan dan Sentra IKM Kreatif	√	√	√	√
3	Pembentukan kelembagaan sentra IKM Pangan dan IKM Kreatif oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	√	√	√	√

Dalam dalam rangka menunjang Pengembangan Perwilayahan Industri di Provinsi Sulawesi Barat, maka sampai saat ini belum tersedia peta pada Kawasan Peruntukan Industri (KPI) di Provinsi dan masing-masing Kabupaten beserta dengan luas lahan KPI sesuai dengan Perda RTRW Provinsi maupun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) masing-masing Kabupaten. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten sementara melakukan review terhadap KPI pada RTRW masing-masing Pemerintah. Adapun informasi berkaitan dengan keragaan Perda RTRW Provinsi dan Kabupaten di wilayah Provinsi Sulawesi Barat disajikan sebagai berikut :

#### **a. Provinsi Sulawesi Barat**

Berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2014, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014-2034, terdapat kawasan peruntukan industri merupakan kawasan yang potensial dimanfaatkan untuk kegiatan industri yang meliputi :

- (1) skala besar berupa agroindustri pengolahan komoditi hasil-hasil pertanian, perkebunan dan peternakan direncanakan pengembangannya di Belang Belang, dan industri pengolahan hasil tambang batubara dan besi di Kambunong;
- (2) industri skala menengah berupa agroindustri pengolahan hasil-hasil perkebunan kakao direncanakan pengembangannya di Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamuju Tengah, dan Kabupaten Mamuju;
- (3) kawasan aglomerasi industri skala menengah pengolahan kelapa sawit di Kabupaten Mamuju Utara, Kabupaten Mamuju Tengah, dan Kabupaten Mamuju; dan
- (4) industri perikanan berupa pengolahan komoditas hasil perikanan direncanakan pengembangannya di Palipi Kabupaten Majene dan Kabupaten Polewali Mandar.

Pemerintah saat ini telah berupaya untuk melakukan pengembangan Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus yang berada di Belang-Belang, Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju seiring dengan RTRWP Sulawesi Barat 2014-2034 yang telah menentukan Matabe sebagai kawasan strategis pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Posisi strategis Matabe di selat Makassar sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), serta penetapan kawasan Belangbelang sebagai kawasan terpadu pelabuhan, Bandar udara, stasiun KA barang, industri, perdagangan, pergudangan dan petikemas. Inti sentra pertumbuhan ekonomi Matabe nantinya adalah *Eco-Industrial-Park* (EIP) dan *Special Economic Zone* (SEZ/KEK) Belang-Belang.

Strategi pengembangan penataan ruang dengan memperhatikan apa yang dituangkan dalam kebijakan penataan ruang, terdiri atas :

- a. mengembangkan agro industri terutama yang berbasis hasil komoditi sektor- sektor kehutanan, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan;
- b. mengembangkan industri manufaktur;
- c. mengembangkan kawasan industri skala besar yang terpadu dengan pengembangan pelabuhan Belang-Belang;
- d. mengembangkan kawasan agro-industri skala menengah di PKW, PKWp dan PKL; dan
- e. mengembangkan usaha industri kecil yang tidak mengganggu kehidupan di kawasan permukiman.

#### **b. Kabupaten Majene**

Kawasan Peruntukan Industri (KPI) Kabupaten Majene belum dilengkapi dengan peta, sehingga Pemerintah Daerah akan melakukan review terhadap KPI pada Perda Kabupaten Majene No. 12 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Majene Tahun 2011-2031. Adapun KPI Kabupaten Majene berdasarkan Perda RTRW Kabupaten Majene tersebut, adalah sebagai berikut :

- a. Industri sedang berupa Pengolahan Ikan di Palipi Kecamatan Sendana;
- b. Industri sedang berupa pembuatan es balok di Palipi Kecamatan Sendana, di Lingkungan Rangas Kelurahan Totoli Kecamatan Banggae dan di Lingkungan Tamo Kelurahan Baurung Kecamatan Banggae Timur;
- c. Industri sedang berupa Penggaraman dan Pengeringan Ikan di Palipi Kecamatan Sendana;
- d. Industri Sedang berupa Batu Bata dari Tanah liat di Lingkungan Leppe Kecamatan Banggae Timur;

- e. Industri Sedang berupa gula Merah di Kecamatan Banggae, Kecamatan Pamboang, Kecamatan Sendana, Kecamatan Tubo Sendana dan Kecamatan Malunda;
- f. Industri sedang pengolahan hasil pertanian di Kecamatan Malunda dan Ulumanda;
- g. Industri sedang berupa Pembuatan Perahu di Kecamatan Sendana, Kecamatan Pamboang dan di Lingkungan Rangas Kelurahan Totoli Kecamatan Banggae;
- h. Industri sedang berupa Pupuk Alam di Kecamatan Sendana dan Kecamatan Malunda;
- i. Industri Sedang berupa pengolahan Minyak Kelapa di Kecamatan Banggae Timur; dan
- j. Industry sedang berupa Penggilingan dan pembersihan Padi-Padian di Kecamatan Malunda.
- k. Industri Pengolahan Minyak Kelapa di Kecamatan Banggae Timur, Kecamatan Banggae, Kecamatan Sendana dan Kecamatan Malunda;
- l. Industri Pembuatan Perahu di Kecamatan Banggae Timur Kecamatan Pamboang, Kecamatan Sendana dan Kecamatan Banggae;
- m. Industri Pengolahan Tebu di Kecamatan dan Kelapa di Kecamatan Banggae Timur;
- n. Industri Meubel di Kecamatan Banggae dan Banggae Timur;
- o. Industri Pandai Besi di Desa Pamboborang Kecamatan Banggae;
- p. Industri Pengupasan hasil-hasil Pertanian di Kecamatan Banggae, Kecamatan Pamboang, Kecamatan Sendana, Kecamatan Tammero'do, Kecamatan Tubo, Kecamatan Ulumanda dan Kecamatan Malunda;
- q. Industry Bahan Kimia berupa Arang Aktif di Kecamatan Banggae, Kecamatan Pamboang, Kecamatan Tammero'do, dan Kecamatan Malunda;
- r. Industry Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga di Kecamatan Banggae, Kecamatan Tubo, dan Kecamatan Ulumanda
- s. Industri Barang-Barang dari Semen dan Kapur untuk Konstruksi di Kecamatan Banggae, Kecamatan Pamboang, Kecamatan Tubo, dan Kecamatan Malunda; dan
- t. Industri Makanan di Kecamatan Banggae Timur, Kecamatan Banggae, Kecamatan Pamboang, Kecamatan Sendana, Kecamatan Tammero'do, dan Kecamatan Malunda.

### **c. Kabupaten Polewali Mandar**

Kawasan Peruntukan Industri (KPI) Kabupaten Polewali Mandar belum dilengkapi dengan peta, sehingga Pemerintah Daerah akan melakukan review terhadap KPI pada Perda Kabupaten Polewali Mandar No. 2 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012-2032. Adapun KPI Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan Perda RTRW Kabupaten Polewali Mandar tersebut, adalah sebagai berikut :

- (1) industri pengolahan hasil pertanian di Kecamatan: Polewali, Wonomulyo dan Binuang;
- (2) industri pengolahan hasil peternakan di Kecamatan: Matakali, Polewali dan Binuang; dan

- (3) industri pengolahan hasil perikanan di Kecamatan: Wonomulyo, Binuang dan Polewali.

**d. Kabupaten Mamasa**

Kawasan Peruntukan Industri (KPI) Kabupaten Mamasa belum dilengkapi dengan peta, sehingga Pemerintah Daerah akan melakukan review terhadap KPI pada Perda Kabupaten Mamasa No. 1 Tahun 2015 tentang RTRW Kabupaten Mamasa Tahun 2015-2035. Adapun KPI Kabupaten Mamasa berdasarkan Perda RTRW Kabupaten Mamasa tersebut, adalah sebagai berikut :

a. agroindustri terdiri atas:

- (1) industri penggilingan padi dan kakao di Kecamatan Mambi dan Kecamatan Aralle;
- (2) industri pengolahan jambu biji di Kecamatan Sesena Padang dan Kecamatan Balla;
- (3) industri pengolahan buah markisa di Kecamatan Nosu dan Kecamatan Sesena Pandang;
- (4) industri pengolahan kopi bubuk di Kecamatan Sumarorong, Kecamatan Bambang, Kecamatan Tabang, Kecamatan Tanduk Kalua, dan Kecamatan Mamasa; dan
- (5) industri pengolahan ikan air tawar

b. industri kecil terdiri atas:

- (1) industri tenun tradisional di Kecamatan Balla dan Kecamatan Nosu; dan
- (2) industri batu bata di Kecamatan Mamasa, Kecamatan Balla, Kecamatan Sumarorong, Kecamatan Mambi, dan Kecamatan Tabulahan.
- (3) industri rumah tangga tersebar di seluruh kecamatan.

**e. Kabupaten Mamuju**

Kawasan Peruntukan Industri (KPI) Kabupaten Mamuju belum dilengkapi dengan peta, sehingga Pemerintah Daerah akan melakukan review terhadap KPI pada Perda Kabupaten Mamuju No 10 Tahun 2019 tentang RTRW Kabupaten Mamuju Tahun 2019-2039. Adapun KPI Kabupaten Mamasa berdasarkan Perda RTRW Kabupaten Mamuju tersebut.

Adapun KPI Kabupaten Mamuju berupa Kawasan Industri seluas kurang lebih 1,314 (seribu tiga ratus empat belas) hektar, yang terdapat di Kecamatan Belang-Belang terpadu dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Belang-Belang.

**f. Kabupaten Mamuju Utara**

Kawasan Peruntukan Industri (KPI) Kabupaten Mamuju Utara belum dilengkapi dengan peta, sehingga Pemerintah Daerah sementara melakukan diriview terhadap KPI Perda RTRW Perda No. 1 Tahun 2014, Tahun 2014-2034. Adapun KPI Kabupaten Mamuju Utara sebagai berikut :

- (1) industri besar dikembangkan di Kecamatan Sarudu, Kecamatan Baras, Kecamatan Pasangkayu, Kecamatan Tikke Raya, dan Kecamatan Sarjo.
- (2) Industri menengah dikembangkan di Kecamatan Sarjo, Kecamatan Bambalamotu, Kecamatan Sarudu, Kecamatan Baras, Kecamatan Pasangkayu, dan Kecamatan Tikke Raya.
- (3) industri kecil dan rumah tangga dikembangkan di seluruh kecamatan.



### g. Kabupaten Mamuju Tengah

Kawasan Peruntukan Industri (KPI) Kabupaten Mamuju Tengah belum dilengkapi dengan peta, sehingga Pemerintah Daerah akan melakukan review terhadap KPI pada Perda Kabupaten Mamuju Tengah No. 3 Tahun 2017 tentang RTRW Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2013-2037. Adapun KPI Kabupaten Mamuju Tengah berdasarkan Perda RTRW Kabupaten Mamuju Tengah tersebut, adalah sebagai berikut :

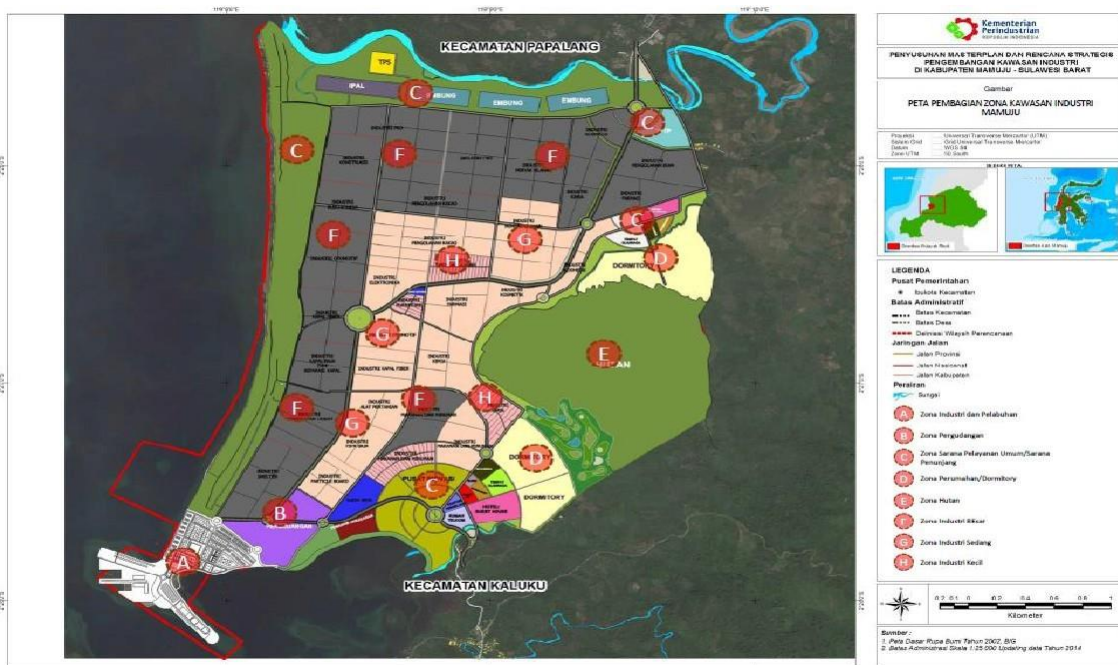
- (1) industri Besar terdapat di Kecamatan Karossa;
- (2) industri sedang terdapat di Kecamatan Budong-Budong; dan
- (3) industri industri kecil dan mikro tersebar di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten.

Selanjutnya informasi berkaitan dengan Kawasan Industri dari aspek Peta Pembagian Zona Kawasan Industri Mamuju (baru tahap AMDAL, sudah dibuat Master Plan Kawasan Industri Belang-Belang, namun sampai saat ini belum ada izin pengelolaanya), Peta Kesesuaian Lahan Kawasan Industri Mamuju, Peta Analisis Topografi Tapak Kawasan Industri Mamuju, Peta Kemampuan Lahan Kawasan Industri Mamuju, Peta Distribusi Bahan Baku Industri Agro Kegiatan Industri, Peta Struktur Ruang Kawasan Industri Belang-Belang di Kabupaten Mamuju, Peta Pola Distribusi Produksi Industri Pengolahan dan Peta Sistem Konektivitas sebagaimana disajikan sebagai berikut :

#### a. Peta Pembagian Zona Kawasan Industri Mamuju

Berdasarkan jenis dari kawasan industri dan memperhatikan bentuk dan skala industri yang dapat dikembangkan di Kawasan Industri Belang-Belang di Mamuju, luasan kapling pada Kawasan Industri ditetapkan secara fleksibel, dimana luasan kapling akan ditentukan sesuai permintaan pembeli/penyewa berdasarkan kebutuhan ruang kegiatan industri yang akan dikembangkan. Pengembangan peruntukkan Kawasan Industri Belang-Belang ditetapkan berdasarkan peruntukkan dari masing-masing kawasan. Adapun luasan dari peruntukkan kawasan industri pengolahan yang akan dikembangkan di Kabupaten Mamuju mencapai 1.255 Ha sebagaimana disajikan pada Peta 4.1, yang terdiri dari 3 kelompok industri berdasarkan karakteristik pengolahan antara lain :

**Gambar 4.2.**  
**Peta Pembagian Zona Kawasan Industri Mamuju**



Sumber : Penyusunan Master Plan dan Rencana Strategis Pengembangan Kawasan Industri Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, 2016

1. Industri Besar seluas 454.21 Ha.
2. Industri Menengah seluas 211.87 Ha
3. Industri Kecil seluas 51.38 Ha.

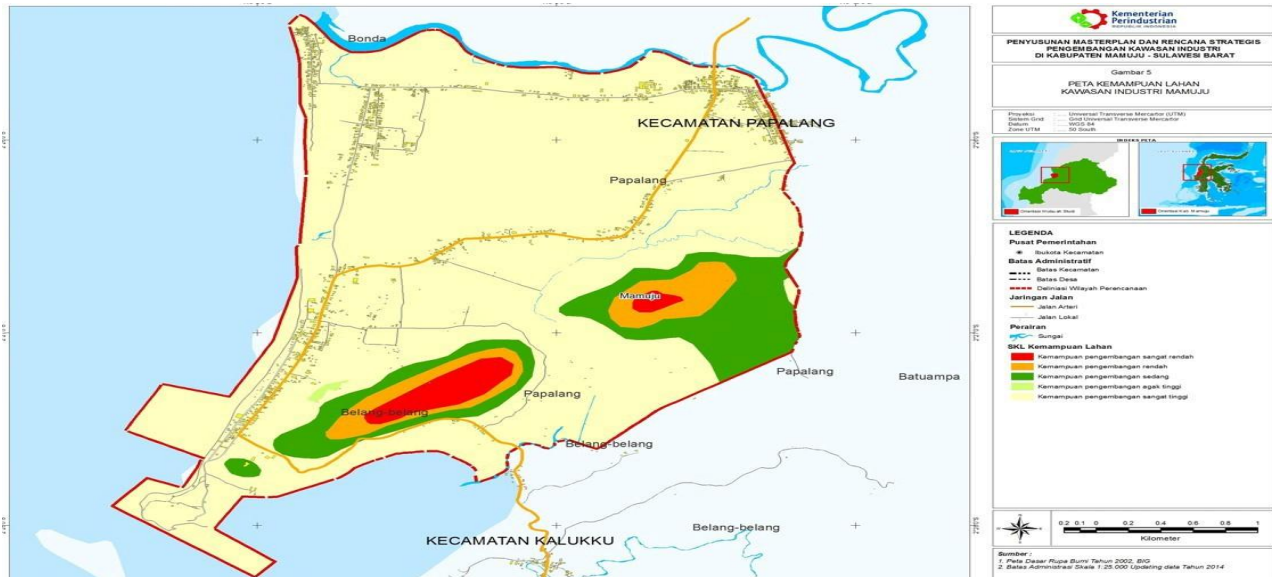
Keragaman aktivitas yang ada di dalam Kawasan Industri menjadi hal pokok dalam menentukan proses perencanaan berikutnya. Berikut ini adalah beberapa jenis aktifitas yang akan ditampung di kawasan ini :

1. Komponen utama kegiatan industri meliputi :
  - a. Kelompok industri Besar
  - b. Kelompok industri Menengah
  - c. Kelompok industri Kecil
2. Komponen pelengkap (ruang terbuka) meliputi :
  - a. Open space (green area)
  - b. Jalur Hijau (greenbelt)
3. Komponen Penunjang meliputi :
  - a. Pergudangan; merupakan lahan yang disediakan untuk penyimpanan dan penyediaan bahan baku pabrik dan barang produksi jadi (stock yard). Di lokasi ini juga biasanya disediakan alat berat yang bisa disewa untuk pengangkutan barang di lahan stock yard.
  - b. Pemadam kebakaran; fasilitas pemadam kebakaran harus disediakan dalam suatu kawasan industri. Hal ini bertujuan untuk menanggulangi secara dini bila terjadi kebakaran di kawasan ini, meskipun masing-masing pabrik sudah dilengkapi dengan fasilitas pemadam kebakaran sesuai dengan kebutuhannya.
  - c. Kantor Badan Pengelola Kawasan; merupakan fasilitas perkantoran bagi badan yang mengelola kawasan industri secara keseluruhan.
  - d. Area Perkantoran (Komersil); unit-unit perkantoran merupakan fasilitas utama bagi suatu kawasan industri, karena dari perkantoran ini berbagai program kegiatan industri dikomandokan. Unti perkantoran harus ditata sedemikian rupa sehingga memberikan kenyamanan tinggal dan bekerja bagi para karyawannya.
  - e. Area inovasi; merupakan area yang digunakan sebagai lokasi pusat pengembangan inovasi baik SDM maupun inovasi produk indusri yang pelayanan kawasan, berupa area sekolah, akademi, universitas maupun traning center serta pusat riset.
  - f. Lingkungan Permukiman; disediakan bagi para pegawai yang bekerja di kawasan industri ini. Jarak tempuh dan waktu yang diperlukan bagi para pekerja menjadi pertimbangan utama penyediaan perumahan karyawan ini.
  - g. Fasilitas umum dan Fasilitas Sosial; suatu kawasan industri harus menyediakan berbagai sarana umum lainnya seperti sarana komersial, rumah sakit/klinik, tempat peribadatan, hotel, perekonomian/pujasera, lapangan olahraga dan lainnya. Fasilitas-fasilitas ini nantinya
4. Sarana dan Prasarana pendukung lainnya meliputi :
  - a. Jaringan jalan
  - b. Jaringan air bersih Dan Pengolahan Air Bersih
  - c. Jaringan pengolah air limbah
  - d. IPAL

- e. Drainase
- f. Jaringan listrik dan Powerplan / Gardu Induk
- g. Jaringan telepon dan Rumah Telpon

**b. Peta Kemampuan Lahan Kawasan Industri Mamuju**

**Gambar 4.3.**  
**Peta Kemampuan Lahan Kawasan Industri Mamuju**



Sumber : Penyusunan Master Plan dan Rencana Strategis Pengembangan Kawasan Industri Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, 2016

Berdasarkan peta 4.2, dimana dari potensi sumberdaya alam yang ada di Kabupaten Mamuju dan di Provinsi Sulawesi Barat pada umumnya, maka industri yang dapat dikembangkan di dalam kawasan adalah sebagai berikut :

**1. Agro**

Pertumbuhan agro khususnya perkebunan di Kabupaten Mamuju khususnya dan di Provinsi Sulawesi Barat pada umumnya memiliki perkembangan yang cukup baik dan merupakan salah satu pengembangan usaha yang dicanangkan oleh Provinsi Sulawesi Barat. Produk-produk yang coba dikembangkan yang nantinya juga sebagai bahan baku dalam industri pengolahan antara lain :

- a) Kakao
- b) Kelapa sawit
- c) Kelapa dalam / minyak kelapa
- d) Pisang
- e) Jagung
- f) Rumput laut
- g) Lada
- h) Kemiri
- i) Cengkeh
- j) Pala

Komoditas pertanian atau agro ini nantinya menjadi dasar bagi pengembangan industri di Kabupaten Mamuju dimana bukan hanya sebagai komoditi tetapi sudah menjadi kehidupan bagi masyarakat Kabupaten Mamuju dan di Provinsi Sulawesi Barat, sehingga sektor pertanian menjadi potensial bagi pengembangan industri berbasis agro di Kabupaten Mamuju dan Provinsi Sulawesi Barat.

## 2. Perikanan

Perikanan Kabupaten Mamuju maupun di Provinsi Sulawesi Barat memiliki potensi baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Perikanan yang sudah dikembangkan saat ini meliputi perikanan laut, tambak dan perikanan darat dengan produksi yang relatif meningkat tiap tahunnya. Perdagangan ikan yang terjadi bukan hanya skala lokal saja akan tetapi hingga nasional Perikanan bukan hanya sebagai komoditi tetapi sudah menjadi kehidupan bagi masyarakat Kabupaten Mamuju dan Provinsi Sulawesi Barat dengan produksi perikanan budidaya mencapai 89.729,96 ton, sehingga sektor perikanan menjadi potensial bagi pengembangan industri berbasis perikanan di Kabupaten Mamuju.

## 3. Pertambangan

Selain hasil pertanian dan perikanan tersebut, Kabupaten Mamuju dan Provinsi Sulawesi Barat juga memiliki potensi pertambangan seperti Tembaga, Nikel dan biji besi, dimana hasil- hasil pertambangan tersebut masih dikelola dan diupakan dalam skala yang masih relatif kecil, dikarenakan masih dilakukan proses eksplorasi ataupun hipotesa pencarian kadar. Dengan keberadaan potensi pertambangan tersebut dan keberadaan daerah sekitar yang memiliki hasil pertambangan tersebut serta adanya permintaan akan biji besi, tembaga dan nikel, sehingga sektor pertambangan khususnya tembaga, nikel dan bijibesi memiliki potensi untuk dikembangkan industri pengolahannya di kawasan industri Mamuju.

### c. Peta Distribusi Bahan Baku Industri Agro Kegiatan Industri

**Gambar 4.4.**  
**Peta Distribusi Bahan Baku Industri Agro Kegiatan Industri**



Sumber : Penyusunan Master Plan dan Rencana Strategis Pengembangan Kawasan Industri Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, 2016

Pola distribusi pada kegiatan industri terdiri dari kegiatan distribusi bahan baku yang akan digunakan pada kawasan industri mamuju, baik dari jenis komoditi dengan jenis industri agro, pertambangan ataupun jenis komoditi lainnya, pola distribusi yang selanjutnya adalah melihat pola aliran barang hasil

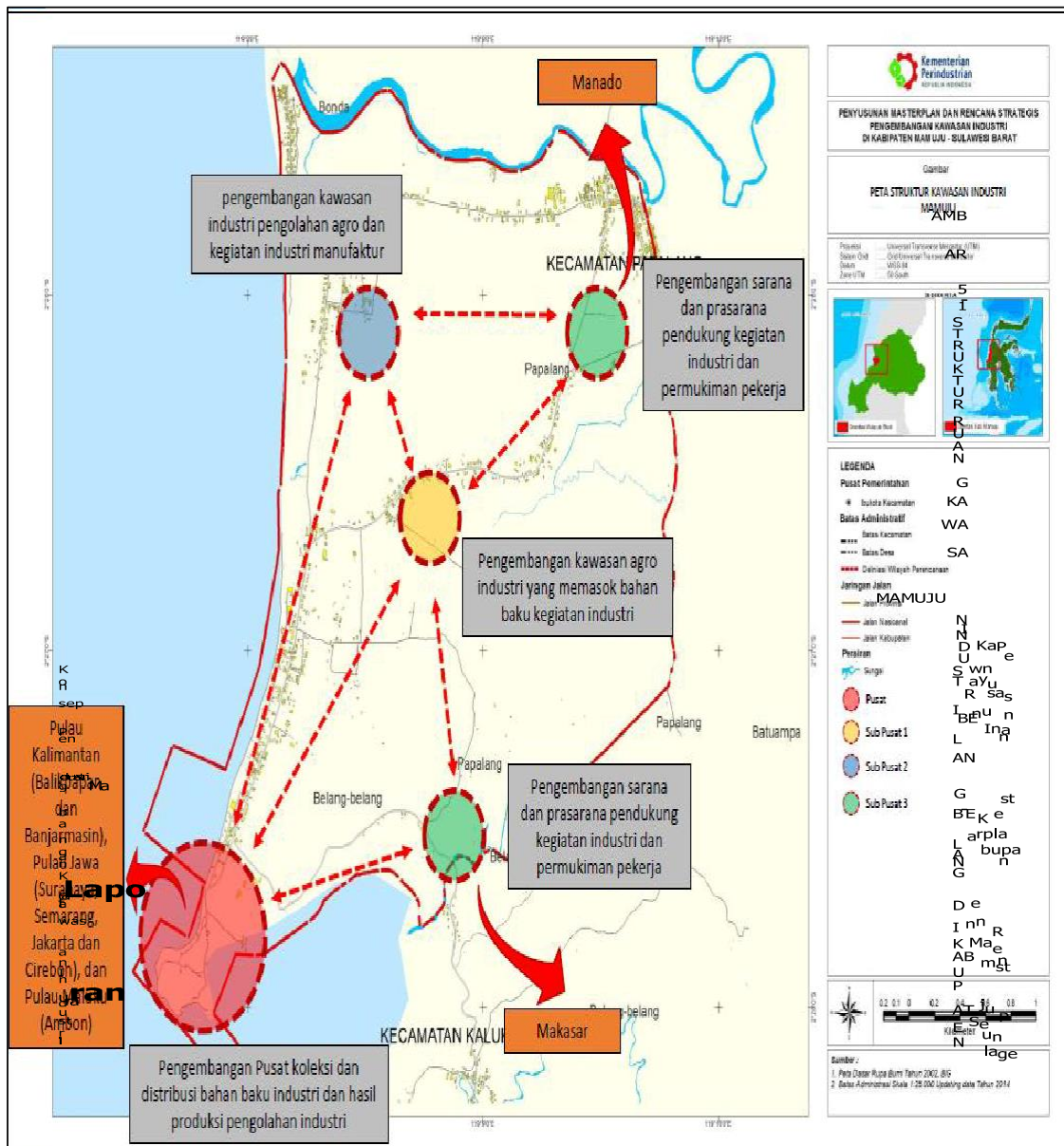


dari pengolahan industri pada kawasan industri mamuju menuju pada wilayah baik sebagai wilayah regional, nasional dan juga untuk memenuhi kebutuhan internasional melalui kegiatan ekspor- impor .

Sumber bahan baku kegiatan industri mamuju terdiri dari beberapa jenis komoditas yang selanjutnya akan dilakukan kegiatan pengolahan pada kawasan industri mamuju. Berikut adalah jenis bahan baku dan lokasi sumber bahan baku industri pada kegiatan Kawasan Industri Mamuju.

**d. Peta Struktur Ruang Kawasan Industri Belang-Belang di Kabupaten Mamuju**

**Gambar 4.5.**  
**Peta Struktur Ruang Kawasan Industri Mamuju di Kabupaten Mamuju**

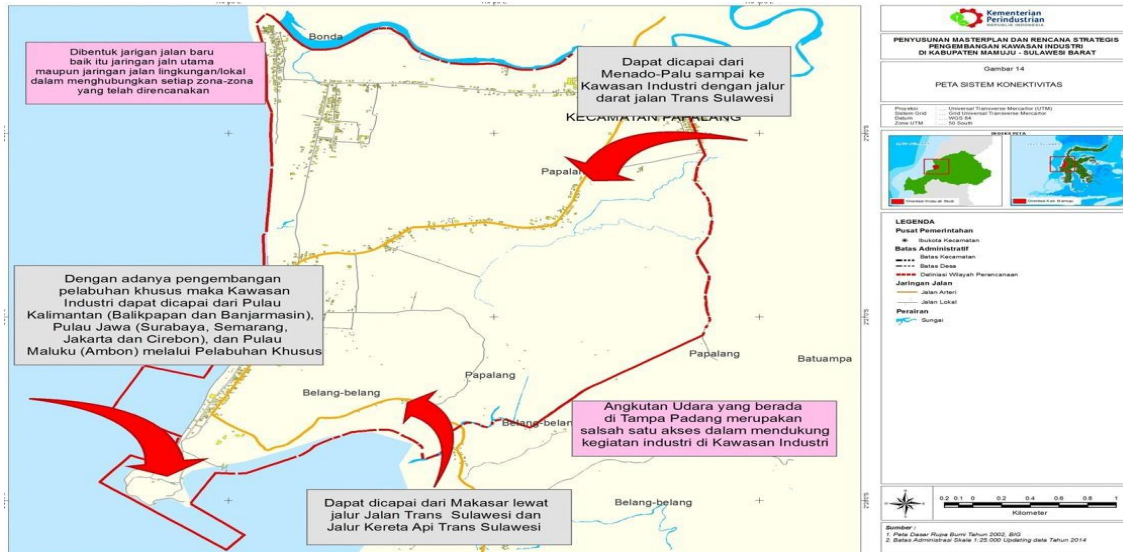


Sumber : Penyusunan Master Plan dan Rencana Strategis Pengembangan Kawasan Industri Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, 2016



## e. Peta Sistem Konektivitas

**Gambar 4.6.**  
**Peta Sistem Konektivitas**



Sumber : Penyusunan Master Plan dan Rencana Strategis Pengembangan Kawasan Industri Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, 2016

Berdasar Peta 4.4. dan 4.5., maka konsep struktur ruang lainnya dalam pengembangan kawasan industri Belang-Belang di Kabupaten Mamuju, dapat dilakukan dengan skenario pengembangan kawasan berawal dari ketersediaan infrastruktur khususnya energi, akses dan air baku, apa yang ada dimanfaatkan se efisien mungkin, ini menjadi awal pengembangannya yang dikonvert ke dalam luasan lahan. Ilustrasi skenario pengembangan kawasan, adalah :

### a. Konektivitas

Sistem transportasi yang menuju Kawasan Industri mempunyai aksesibilitas yang cukup baik, karena berada dekat dengan jalan nasional yaitu Jalan Trans Sulawesi, selain itu lokasi industri direncanakan akan dilalui oleh jaringan Kereta Api Trans Sulawesi. Sarana pergerakan baik barang dan penumpang dari wilayah Mamuju dilakukan melalui transportasi darat. Dengan keberadaan kawasan yang dilakului oleh dua jaringan transportasi tersebut memiliki kemudahan terkait infrastruktur sehingga dapat memudahkan pergerakan orang dan barang dari dan ke kawasan industri. Keberadaan infrastruktur ini direncanakan akan membelah kawasan industri sehingga jaringan transportasi tersebut berada di tengah-tengah kawasan.

Transportasi dan sarana/prasarana penunjang sangat memperlancar hubungan antara kawasan peruntukan industri ini dengan kota-kota lain baik di tingkat kabupaten maupun dengan kota-kota lain misalnya: akses ke Mamuju, Palu, Makassar, Manado, Bitung, sehingga arus lalu-lintas perdagangan dan jasa serta berbagai kegiatan ekonomi dapat berjalan lancar. Selain itu juga dengan keberadaan pelabuhan laut yang ada juga memudahkan akses pergerakan dari laut sehingga memudahkan pergerakan antar pulau seperti dari dan ke Kalimantan Timur dan pulau-pulau lain seperti ke Pulau Jawa, Sumatera maupun ke Pulau Maluku dan Papua.

Angkutan kereta api merupakan bagian dari lintasan kereta api trans sulawesi. Bila dilihat dari konteks industri maka jaringan kereta api adalah jaringan yang paling murah dan sangat potensial sebagai pemicu dan pendukung pertumbuhan perindustrian. Dengan adanya jalur ini akan menjadi titik tumbuh yang dapat diandalkan terutama untuk proses lalu-lintas barang yang sangat dibutuhkan oleh industri.

Angkutan Udara merupakan bagian dari sistem kawasan industri Belang-Belang yang berada di Tampa Padang. Bila dilihat dari konteks industri maka jaringan transportasi udara merupakan salah satu alternatif aksesibilitas dar dan keluar kawasan yang potensial sebagai pemicu dan pendukung pertumbuhan perindustrian. Dengan adanya jalur ini akan menjadi titik tumbuh yang dapat diandalkan terutama untuk proses lalu-lintas barang yang sangat dibutuhkan oleh industri.

Penggunaan sistem konektivitas yang ada juga memiliki beberapa kendala yang perlu diperhitungkan dalam penggunaannya sehingga dapat mendukung kegiatan kawasan, untuk itu perlu menjadi pertimbangan dalam menggunakan sistem jaringan yang ada dengan alasan :

- 1) Jalan Trans Sulawesi harus dapat memiliki lebar jalan yang memadai sehingga tidak menimbulkan dampak kepada pengguna yang lain. Lebar yang disarankan sekitar 14 meter, sistem perkerasan jalan juga menjadi factor penting dikarenakan beban muatan dalam proses distribusi hingga mencapai 60 - 80 ton.
- 2) Bila kondisi perkerasan jalan tidak memungkinkan, maka perlu dibatasi penggunaan jalan bagi industrihanya sekitar 30 ton, hal ini dapat dimungkinkan hanya untuk distribusi dari kawasan industri sekitar dalam memasok bahan baku.
- 3) Perlu dikembangkan jaringan jalan bagi proses distribusi bagi kendaraan tonase besar yang mencapai sekitar 60 - 80 ton. Untuk itu perlu dikembangkan pelabuhan yang berlokasi didekat kawasan atau dalam kawasan, sehingga penggunaan lahan dan jalan dapat dikembangkan khusus bagi kebutuhan industri.
- 4) Penggunaan sarana kereta api dalam melakukan distribusi hasil produksi industri juga merupakan bukan sebagai faktor utama dalam pendistribusian barang. Hal ini dikarenakan keterbatasan prasarana kereta api yang dapat memungkinkan untuk mengangkut tonase yang lebih besar, untuk itu sarana kereta api dapat dipergunakan bagi peruntukkan aneka industri yang akan melakukan distribusi ataupun industri agro dan aneka industri dengan tonase antara 10 -30 ton.

#### **b. Energi / Listrik**

tenaga listrik di Kabupaten Mamuju berasal dari PLN yang ada di Kabupaten Mamuju. Jaringan listrik ini dapat dikatakan telah cukup menjangkau daerah yang agak terpencil. Akan tetapi kebutuhan akan listrik bagi kepentingan industri tidak dapat bersumber dari PLN saja dikarenakan kapasitas yang ada tidak memenuhi kebutuhan industri.

Pihak pemerintah telah mencanangkan pembangunan pembangkit energy listrik sebesar 2 X 25 MW sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan listrik di Kabupaten Mamuju dan Provinsi Sulawesi Barat. Pembangunan pembangkit ini sejalan dengan adanya rencana pengembangan berbagai kegiatan di kabupaten Mamuju dan Provinsi Sulawesi Barat diantaranya adalah kawasan industri, bandara dan lain sebagainya. Pembangkit listrik yang dikembangkan berupa PLTU Belang- Belang dan listrik bersumber energi terbarukan. Adapun lokasi PLTU Belang-Belang ini tidak terlalu jauh lokasinya dengan kawasan industri yang direncanakan, sehingga kebutuhan akan listrik untuk Kawasan Industri Belang-Belang ini dapat dipasok dari PLTU Belang-Belang

#### **c. Air Bersih / Air Baku**

Peruntukkan sumber air baku bagi kawasan industri tergolong besar dan tidak memungkinkan menggunakan air pengolahan milik Negara maupun masyarakat. Dengan keberadaan Sungai Papalang yang memiliki debit yang relatif kecil sekitar 60 - 100 m<sup>3</sup>/detik yang berada di sekitar Industri, maka

penggunaan sumber air baku dapat menggunakan dari Sungai Papalang yang terlebih dahulu dilakukan bendung untuk dapat memenuhi kapasitas air yang dibutuhkan. Pengembangan sumber air ini yang di ambil dari Sungai Papalang dilakukan dengan sistem perpipaan yang dibantu dengan mesin pendorong untuk dapat masuk ke dalam sistem pengolahan air bersih didalam kawasan industri yang kemudian didistribusikan ke masing-masing water intake tiap kawasan.

## 2. Pembangunan Sumberdaya Industri

Pembangunan sumberdaya industri daerah adalah merupakan syarat bertumbuhnya industri di suatu daerah. Tanpa sumberdaya ini maka industri tentu tidak akan tumbuh. Sumberdaya bukanlah semata kekayaan alam (SDA), melainkan juga sumberdaya manusia (SDM), sumberdaya permodalan, teknologi tepat guna dan pendukung lainnya. Oleh karena itu, pembangunan sumberdaya industri ini dilakukan melalui pengembangan sumberdaya manusia industri; pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sumberdaya alam; pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri; pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi; penyediaan sumber pembiayaan.

### a) Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri

Pelaku pelaksana industri adalah sumberdaya manusia, sehingga untuk membangun industri yang kuat, industri yang tumbuh dan berkembang, pasti diperlukan sumberdaya manusia industri yang kuat juga, dalam arti para pelaku industri memenuhi kebutuhan pembangunan industri itu sendiri baik secara kualitas maupun kuantitas. Selanjutnya, harus ada program-program yang disusun untuk bisa memastikan tersedianya sumberdaya manusia industri dimaksud.

**Tabel 4.25.**

#### **Program Pengembangan SDM Industri Tahun 2020 – 2040**

No	Program	Tahun			
		2025	2030	2035	2040
1	Peningkatan kemampuan SDM petani/nelayan khususnya kakao, kelapa dalam, kopi, gula aren, tekstil dan ikan kerjasama dengan instansi terkait.				
a.	Training/ diklat intensifikasi kerjasama dengan instansi terkait	√	√	√	√
b.	Workshop/ short course standar pasca panen kerjasama dengan instansi terkait	√	√	√	√
2	Fasilitasi peningkatan kemampuan SDM industri				
a	Workshop/ short course QC, pembinaan produksi dan pengawasan untuk pelaku industri kerjasama dengan instansi terkait	√	√	√	√
b	Pendidikan industri khususnya kakao, kelapa dalam, kopi, gula aren, tekstil dan ikan bagi aparat daerah/ Training of trainers (TOT) aparat pemerintah daerah terkait dalam teknis dan manajemen industri kerjasama dengan instansi terkait	√	√	√	√
3	Pengembangan balai/ sentral pelatihan industri/ lembaga pendidikan komoditas dan industri unggulan kerjasama dengan instansi terkait	√	√	√	√

4	Monitoring dan Evaluasi	√	√	√	√
---	-------------------------	---	---	---	---

## b) Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumberdaya Alam

Sumberdaya alam merupakan basis pengembangan industri dalam RPIP ini, sehingga berbagai hal terkait dengan pemanfaatannya, penyediaannya dan penyaluran sumberdaya alam ini sangat menentukan keberhasilan pembangunan industri dan pencapaian sasaran-sasaran yang telah dirumuskan dalam RPIP ini.

Dengan demikian, disamping sumberdaya alam lainnya, sumberdaya 2 komoditas ini haruslah dapat dimanfaatkan secara optimal, disediakan dan disalurkan secara pasti dan kontinue (baik kuantitasnya maupun kualitasnya) untuk tumbuh dan berkembangnya industri daerah. Oleh karena itu harus ada program-program yang disusun untuk bisa memastikan tersedianya sumberdaya manusia industri dimaksud.

**Tabel 4.26.**  
**Program Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam**  
**Tahun 2020 – 2040**

No	Program	Tahun			
		2025	2030	2035	2040
A	Penguatan pasokan dan kontinuitas bahan baku dengan dukungan untuk program intensifikasi (peningkatan produktifitas), rejuvenasi dan ekstensi yang berwawasan lingkungan, khususnya kakao, kelapa dalam, kopi, gula aren, tekstil dan ikan.				
1	Penguatan pasokan dan kontinuitas bahan baku industri pengolahan ikan melalui program Intensifikasi, rehabilitasi dan ekstensifikasi perikanan tangkap (Sosialisasi intensif, penyuluhan dan pendampingan menuju implementasi penerapan teknologi budidaya intensif)	√	√	√	√
2	Penguatan pasokan dan kontinuitas bahan baku tekstil (murbei) melalui program intensifikasi (peningkatan produktifitas) dan ekstensifikasi (Sosialisasi intensif, penyuluhan dan pendampingan menuju implementasi penerapan teknologi budidaya intensif).	√	√	√	√
3	Program intensifikasi, dan ekstensi perkebunan (Sosialisasi intensif, penyuluhan dan pendampingan menuju implementasi penerapan teknologi budidaya intensif)	√	√	√	√
B	Fasilitasi alsintan, bibit unggul dan pupuk	√	√	√	√
C	Pengendalian hama dan penyakit tanaman	√	√	√	√
1	Peningkatan jalan usaha tani (ke sumber- sumber bahan baku industri)	√	√	√	√
2	Peningkatan kualitas produksi pasca panen sesuai kebutuhan industri				

a.	Sosialisasi intensif, penyuluhan dan pendampingan implementasi penerapan teknologi pasca panen	√	√	√	√
b.	Fasilitasi sarana/ peralatan pasca panen	√	√	√	√
c.	Monitoring hasil dan standarisasi	√	√	√	√

### c) Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri

Pembangunan industri tentu membutuhkan pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri agar terpenuhi standarisasi produk dan proses produksi, juga efisiensi dan efektifitas produksi. Maka harus ada program-program yang disusun untuk bisa memastikan pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri dimaksud.

**Tabel 4.27.**

#### **Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri, 2020-2040**

No	Program	Tahun			
		2025	2030	2035	2040
1	Penerapan standar mutu (SNI/ ISO/ HACCP dengan GMP dan SOP atau standar lainnya yang relevant)	√	√	√	√
2	Fasilitasi alat industri maju (untuk IKM potensial) dan alat industri sederhana (untuk <i>home industri</i> )	√	√	√	√
3	Kerjasama Riset dan Pengembangan (R&D) industri dan teknologi pengolahan (seperti dengan Balitri Puslitbun, Batan, BPPT, Balai Besar Penelitian kakao, kelapa dalam, kopi, gula aren, tekstil dan ikan.	√	√	√	√
4	Monitoring dan Evaluasi	√	√	√	√

### d. Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi

Untuk meningkatkan daya saing dan agresifitas pasar dibutuhkan kreatifitas dan inovasi yang terus-menerus. Maka harus ada program-program yang disusun untuk bisa memastikan berkembangnya kreatifitas dan inovasi industri dimaksud.

**Tabel 4.28.**

#### **Program Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi, 2020-2040**

No	Program	Tahun			
		2025	2030	2035	2040
1	Pemanfaatan media informatika dan e-market secara professional (termasuk informasi harga untuk petani, dll.)	√	√	√	√
2	Kerjasama pengembangan products dan market (dengan lembaga penelitian assosiasi,				



	dll.)	√	√	√	√
3	Pengembangan 'branded' produk Provinsi Sulawesi Barat	√	√	√	√
4	Monitoring dan Evaluasi	√	√	√	√

Melalui program 1 diharapkan semua stakeholders/ petani/ pelaku industri yang relevant termasuk IKM dapat memanfaatkan media informatika/ internet secara professional. Pemerintah daerah harus mendorong agar penyediaan layanan media informatika/ internet yang dibutuhkan dapat terpenuhi secara baik. Kreatifitas dan inovasi dapat muncul melalui kerjasama-kerjasama pengembangan, seperti program Dengan kreatifitas dan inovasi ini akan diperoleh suatu tataran produk dan proses produksi yang relative berdaya saing spesifik, maka dalam tataran ini pengembangan 'branded' produk dalam program 3 menjadi langkah strategis untuk memunculkan image positif produk daerah dan daya saing produk. Namun, kreatifitas dan inovasi ini tidak boleh berhenti dikembangkan dan harus paling tidak untuk terus dipertahankan agar image tersebut juga tetap terjaga.

#### e) Penyediaan Sumber Pembiayaan

Pembiayaan sering merupakan permasalahan yang menjadi kendala tumbuh- berkembangnya industri. Maka harus ada program-program yang disusun untuk bisa memastikan pembiayaan industri dimaksud tidak menjadi masalah.

**Tabel 4.29.**

#### **Program Penyediaan Sumber Pembiayaan Tahun 2020 – 2040**

No	Program	Tahun			
		2025	2030	2035	2040
1	Fasilitasi akses pembiayaan yang kompetitif bagi industri pengolahan untuk perluasan kapasitas ;	√	√	√	√
2	Fasilitasi kerjasama kemitraan pembiayaan (khususnya untuk IKM) dengan lembaga financial/ bank	√	√	√	√
3	Bimbingan/ training management financial	√	√	√	√
4	Bekerjsama dengan lembaga keuangan internasional untuk dukungan pembiayaan ekonomi kerakyatan di Provinsi Sulawesi Barat.	√	√	√	√
5	Fasilitasi akses terhadap sumber pembiayaan yang kompetitif untuk meningkatkan kinerja ekspor;	√	√	√	√
6	Monitoring dan Evaluasi	√	√	√	√

Pembiayaan/modal terkadang dapat diperoleh dari pihak kedua yaitu lembaga financial atau bank, namun terkadang juga langsung datang dari pihak pertama yaitu pelaku usaha itu sendiri dalam bentuk investasi maupun dalam bentuk kerjasama investasi. Oleh karena itu program 1 dan program 2, haruslah menjadi perhatian pemerintah untuk sungguh-sungguh difasilitasi secara berkelanjutan. Bagaimanapun permodalan dalam pembangunan apapun termasuk pembangunan industri adalah aspek yang bersifat pasti diperlukan dan juga menentukan.

Hanya saja permasalahan permodalan terkadang bukan semata pada ada atau tidaknya modal, namun pada pengelolaan atau management financial-nya. Lemahnya management financial permodalan yang tersedia (khususnya pada IKM)

menjadikan pengembangan sering berujung pada kegagalan. Oleh karena itu, dibutuhkan program 3 untuk memastikan efektifitas permodalan berujung pada pembangunan yang diharapkan.

### 3. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Selain pembangunan sumberdaya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri juga merupakan penentu keberhasilan pembangunan industri, bahkan selalu menjadi isu strategis yang dalam faktanya berhubungan secara langsung dengan keberhasilan pembangunan industri. Oleh karena itu penting disusun perencanaan pembangunan sarana dan prasarana industri ini yang integrated dengan Rencana Aksi Pengembangan Industri Prioritas di atas. Penting juga untuk memperhatikan isu dan perencanaan terkait yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Barat

Pembangunan sarana dan prasarana industri paling tidak dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana transportasi; jaringan air, listrik, dan telekomunikasi; dan infrastruktur/ pengelolaan lingkungan. Detailnya sebagai berikut.

#### a) Pengelolaan Lingkungan

Penjabaran program-program dalam infrastruktur pengelolaan lingkungan di Provinsi Sulawesi Barat disajikan pada Tabel 4.30.

**Tabel 4.30.**

#### **Program Pembangunan Infrastruktur/ Pengelolaan Lingkungan di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2040**

No	Program	Tahun			
		2025	2030	2035	2040
1	Perencanaan sistem pengelolaan limbah industri dengan penerapan sistem produksi bersih ( <i>reduce, re-use, recycle</i> ) berbasis teknologi ramah lingkungan	√	√	√	√
2	Kampanye produk industri sebagai green product melalui media masa, leaflet, inflight magazine (LN dan DN)	√	√	√	√
3	Sosialisasi berkala kepada masyarakat dan dunia usaha pentingnya pengelolaan lingkungan hidup dunia usahapentingnya pengelolaan lingkungan hidup	√	√	√	√
4	Monitoring dan Evaluasi	√	√	√	√

Sumber : Dihimpun dan dianalisis dari berbagai sumber antara lain RPJMD Provinsi Sulawesi Barat dan BPS, 2017

#### b) Lahan

Lahan sering kali menjadi permasalahan yang dihadapi dan menjadi penghambat dalam pengembangan industri. Untuk itu, harus ada program-program yang disusun untuk bisa memastikan lahan dimaksud tidak menjadi masalah.

Khusus untuk Kawasan Industri (KI), pembebasan lahan sangat menentukan progress implementasi KI, namun pada umumnya pengembangan KI terkait lahan terbagi dalam paling tidak 2 pendekatan yaitu lahan utama dan lahan pengembangan. Dalam masalah lahan ini, pembebasan lahan utama pada semua KI yang dikembangkan di Provinsi Sulawesi Barat harus tuntas dalam periode 2017- 2020 hingga proses implementasi KI juga bisa berjalan. Pengembangan berikutnya (lahan pengembangan) dituntaskan keseluruhan pada periode berikutnya.

**Tabel 4.31.**

**Program Penyediaan Lahan untuk Industri Tahun 2020- 2040**

No	Program	Tahun			
		2025	2030	2035	2040
1	Review terhadap pengembangan KPI di dalam RTRW Provinsi Sulawesi Barat, untuk disesuaikan dengan pengembangan Sentra IKM.	√	√	√	√
2	Survey dan pemetaan potensi pembangunan sentra IKM Pangan.	√	√	√	√
3	Penyusunan rencana pembangunan, termasuk analisis kelayakan dan penyusunan rencana induk (masterplan) Sentra Industri Kecil Menengah.	√	√	√	√
4	Review terhadap pelaksanaan Sentra IKM, untuk rencana lebih lanjut pengembangan kawasan industri	√	√	√	√
5	Survey dan pemetaan potensi pembangunan kawasan industri	√	√	√	√
6	Penyusunan rencana pembangunan, termasuk analisis kelayakan dan penyusunan rencana induk (masterplan) kawasan industri	√	√	√	√
7	Monitoring dan Evaluasi	√	√	√	√

Sangat penting dijalankan dalam masalah lahan ini, bagaimana pembangunan industri tidak memberikan dampak buruk bagi masyarakat.

**c) Jaringan Energi dan Kelistrikan**

Kebutuhan listrik di Provinsi Sulawesi Barat terus meningkat dan belum dapat memenuhi kebutuhan daerah apalagi untuk pengembangan industri. sementara Pembangkit Listrik: Potensi sumberdaya listrik yang dapat dikembangkan di Provinsi Sulawesi Barat disamping menggunakan diesel adalah menggunakan batu bara, tenaga surya, tenaga uap, tenaga air, tenaga angin, biodiesel, biomassa, biogas.

Dalam hal energi atau listrik, juga telah dilakukan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan listrik di Provinsi Sulawesi Barat. Untuk sumber energi, saat ini akan dikembangkan energi listrik yang bersumber dari tenaga air dan pembangkit listrik tenaga Uap.

Dalam aspek pembangunan industri yang diarahkan pengembangannya melalui Kawasan Industri, maka penyediaan energy listrik ini di kawasan tersebut harus menjadi bagian dari program pengembangan kawasan industri itu sendiri. Program pembangunan jaringan listrik dan energi di Provinsi Sulawesi Barat tahun 2020-2040 ditampilkan pada Tabel 4.32.

**Tabel 4.32.**

**Program Pengembangan Jaringan Energi dan Kelistrikan Tahun 2020 – 2040**

No.	Program	Tahun			
		2025	2030	2035	2040
1	Perencanaan dan Koordinasi: a) pembangunan dan pengembangan jaringan transmisi dan distribusi; b) pengembangan sumber energi yang terbarukan; c) diversifikasi dan konservasi energi; untuk mendukung rencana pembangunan industri provinsi.	√	√	√	√
2	Pelaksanaan a) Pembangunan dan pengembangan jaringan transmisi dan distribusi b) pengembangan sumber energy yang terbarukan; c) diversifikasi dan konservasi energy; d) pengembangan industri pendukung pembangkit energi	√	√	√	√
3	Monitoring dan evaluasi	√	√	√	√

**d) Jaringan Telekomunikasi**

Disamping media komunikasi tulisan (surat kabar, majalah, bulletin, dan lain- lain) maupun dengan sarana audio-visual (radio, televise, dan jaringan lainnya) yang relative sudah memiliki jangkauan yang luas, Pengembangan aspek telekomunikasi yang sangat penting saat ini adalah media komunikasi telepon (khususnya telepon seluler) dan internet. Peningkatan layanan komunikasi telepon ini dan internet harus terus ditingkatkan. Industri saat ini sangat dipengaruhi perkembangannya oleh layanan komunikasi ini.

Berikut ini diantara program-program prioritas pengembangan jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi di Provinsi Sulawesi Barat yang diuraikan diatas yang berhubungan dengan pembangunan sektor industri.

Program pembangunan jaringan telekomunikasi di Provinsi Sulawesi Barat tahun 2020-2040 ditampilkan pada Tabel 4.33.

**Tabel 4.33.**

**Program Pengembangan Jaringan Telekomunikasi Tahun 2020 – 2040**

No.	Program	Tahun			
		2025	2030	2035	2040
1	Perencanaan dan Koordinasi : Antar Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat, Asosiasi Provider Telepon Seluler, PT Telkom Provinsi Sulawesi Barat, dalam penyusunan rencana penyediaan telekomunikasi, berupa sarana komunikasi dan transmisi data, untuk mendukung pembangunan industri baik pada sentra IKM maupun industri besar.	√	√		
2	Pembangunan infrastruktur Telekomunikasi untuk mendukung pembangunan industri baik pada sentra IKM maupun industri besar.	√	√	√	√

3	Peningkatan kualitas jaringan komunikasi dan transmisi data baik di area sentra IKM maupun industri besar.	√	√	√	√
4	Monitoring dan Evaluasi	√	√	√	√

#### e) Jaringan Sumber Daya Air

Dalam pembangunan sarana air bersih di Provinsi Sulawesi Barat memanfaatkan sumber air baku dengan pengelolaan membagi wilayah layanan berdasarkan zonasi pengembangan dari hulu, hingga ke wilayah pesisir. Dalam aspek pembangunan industri yang diarahkan pengembangannya melalui Kawasan Industri maka penyediaan air bersih di kawasan tersebut harus menjadi bagian dari program pengembangan kawasan industri itu sendiri.

**Tabel 4.34.**

#### **Program Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air Tahun 2020-2040**

No.	Program	Tahun			
		2025	2030	2035	2040
1	Perencanaan dan Koordinasi antar Dinas Binamarga, Dinas Pengairan, BPLH, PDAM Provinsi Sulawesi Barat, dalam penyusunan rencana penyediaan sumber daya air, untuk mendukung pembangunan sentra IKM	√	√		
2	Pembangunan sumber daya air untuk mendukung pembangunan industri di Sentra IKM.		√	√	√
3	Pembangunan konservasi sumber daya air.		√	√	√
4	Peningkatan kualitas jaringan sumber daya air terutama di area sentra IKM		√	√	√
5	Monitoring dan Evaluasi		√	√	√

#### f. Jaringan Sanitasi

Penjabaran program-program dalam infrastruktur pengelolaan lingkungan di Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut.

Instalasi pengolahan air limbah

**Tabel 4.35.**

#### **Program Pembangunan Infrastruktur/Sanitasi di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2040**

No	Program	Tahun			
		2025	2030	2035	2040
1.	Perencanaan dan Koordinasi : Antar BPLH,Dinas Binamarga Provinsi Sulawesi Barat ,Bapeda, Dinas Pengairan dan Dinas Kesehatan dalam penyusunan rencana penyediaan jaringan sanitasi : a) saluran buangan air hujan (drainase), b) saluran buangan air kotor ( <i>sewerage</i> ) dan c) Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) baik pada sentra IKM maupun industri besar.	√	√		
2.	Pembangunan jaringan sanitasi untuk mendukung pembangunan industri baik pada sentra IKM maupun industri besar.		√	√	√
3.	Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) baik pada sentra IKM maupun industri besar.				



			√	√	√
4.	Peningkatan kualitas jaringan sanitasi di area industri baik pada sentra IKM maupun industri besar.		√	√	√
5.	Sosialisasi berkala kepada masyarakat dan dunia usaha pentingnya sanitasi		√	√	√
6.	Monitoring dan Evaluasi	√	√	√	√

Sumber : Dihimpun dan dianalisis dari berbagai sumber antara lain RPJMD Provinsi Sulawesi Barat dan BPS

### g) Jaringan Transportasi

Sebagaimana telah dimaklumi bahwa aspek transportasi khususnya berupa jaringan jalan dan pelabuhan sangat menentukan kuat dan lemahnya pembangunan industri. Oleh karena itu dalam pembangunan industri provinsi ini, pengembangan aspek transportasi ini khususnya jaringan jalan dan pelabuhan harus secara sinergi dituangkan dalam program-program untuk diupayakan secara maksimal diwujudkan. Aspek transportasi di Provinsi Sulawesi Barat secara umum mencakup Jalan, Pelabuhan, dan ASDP.

Berikut ini diantara program-program prioritas pengembangan aspek transportasi di Provinsi Sulawesi Barat yang telah diuraikan di atas yang berhubungan dengan pembangunan sektor industri.

**Tabel 4.36.**

#### **Prioritas Program Pembangunan Transportasi Tahun 2020-2040**

No	Program	Tahun			
		2025	2030	2035	2040
1	Peningkatan Jaringan Jalan				
a.	Pengawasan dan Koordinasi : antar Dinas Binamarga, BPLH, Dinas Perhubungan, Asperindo, DLLAJR, Organda dalam penyusunan rencana penyediaan prasarana transportasi untuk mendukung konektivitas dan sistem logistik di area sentra IKM Provinsi Sulawesi Barat.	√	√	√	√
b.	Percepatan Pembangunan Jalan-jalan Baru (Khususnya yang menghubungkan lokasi IKM dengan sumber-sumber produksi bahan baku industri)	√	√	√	√
2	Peningkatan Kapasitas Pelabuhan				
a.	Pembangunan Pelabuhan dan Terminal	√	√	√	√
3	Monitoring dan Evaluasi	√	√	√	√

Sumber : Dihimpun dan dianalisis dari berbagai sumber antara lain RPJMD Provinsi Sulawesi Barat dan BPS

### h) Sistem Informasi Industri

Dengan semakin berkembangnya industri di Provinsi Sulawesi Barat, dibutuhkan dukungan yang kuat akan adanya arus informasi industri yang dapat memberikan arahan yang tepat dan akurat bagi para pelaku usaha dalam menjalankan usaha industrinya. Sebuah sistem informasi industri yang mudah diakses, sesuai kebutuhan industri dan ter-update informasinya sangat strategis dibangun. Sistem informasi ini jika akurat akan menjadi stimulus pengembangan industri di Provinsi Sulawesi Barat.

**Tabel 4.37.**

**Program Pembangunan Sistem Informasi Industri Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2040**

No.	Program	Tahun			
		2025	2030	2035	2040
1	Penyusunan Rencana Induk (Master Plan) Pengembangan Sistem Informasi Industri Provinsi Sulawesi Barat.	0			
2	Penetapan standard mengenai jenis data dan struktur database industri daerah Provinsi Sulawesi Barat.	√			
3	Menyiapkan data dasar pada database industri daerah Provinsi Sulawesi Barat.	√			
4	a. Penyiapan data center, b. Penyiapan perangkat keras, c. Pengembangan perangkat lunak, d. Penyelenggaraan sosialisasi e. Penyelenggaraan diklat peningkatan kompetensi SDM pengelola.	√ √ √ √ √	√ √ √ √ √	√ √ √ √ √	√ √ √ √ √
5	a. Pengembangan model sistem industri, b. Pengembangan decision support system, expert system, business intellegence, dan knowledge management industri nasional, c. Penyusunan laporan hasil analisis industri secara periodik, d. Publikasi laporan hasil analisis industri.		√ √ √ √	√ √ √ √	√ √ √ √
6	a. Kerjasama interkoneksi dengan badan dan dinas b. Kerjasama interkoneksi dengan pemerintah provinsi. c. Kerjasama interkoneksi dengan pusat.		√ √ √	√ √ √	√ √ √
7	Monitoring dan Evaluasi	√	√	√	√

Sumber : Dihimpun dan dianalisis dari berbagai sumber antara lain RPJMD Provinsi Sulawesi Barat dan BPS

**i) Infrastruktur Penunjang Standarisasi Industri**

Daya saing produk industri saat ini dan kedepan sangat dipengaruhi oleh kualitas produksi dan konsistensinya. Untuk menjaga konsistensi ini, maka diperlukan pengembangan standarisasi industri yang mampu memenuhi tuntutan terjaganya kualitas produk secara konsisten.

**Tabel 4.38.**

**Program Pembangunan Infrastruktur Penunjang Standarisasi Industri Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2040**

No	Program	Tahun			
		2025	2030	2035	2040
1	Penyediaan dan pengembangan lab pengujian standar industri untuk IKM di wilayah Provinsi Sulawesi Barat bila memungkinkan.	√	√	√	√
2	Kerjasama pengujian produk IKM Provinsi				

	Sulawesi Barat dengan Balai Riset dan Standardisasi Industri.	√	√	√	√
3	Monitoring dan Evaluasi	√	√	√	√

Sumber : Dihimpun dan dianalisis dari berbagai sumber antara lain RPJMD Provinsi Sulawesi Barat dan BPS

#### 4. Pemberdayaan Industri

Pembangunan industri daerah harus mewujudkan pengembangan IKM daerah. Untuk itu, harus ada program-program pemberdayaan yang disusun untuk bisa memastikan berkembangnya IKM dimaksud.

**Tabel 4.39.**

**Program Pemberdayaan IKM Tahun 2020-2040**

No.	Program	Tahun			
		2025	2030	2035	2040
1	Pembinaan kemitraan dengan industri besar Provinsi Sulawesi Barat untuk dapat melibatkan IKM dalam rantai nilai industrinya;	√	√	√	
2	Meningkatkan akses IKM Provinsi Sulawesi Barat terhadap pembiayaan, termasuk fasilitasi pembentukan pembiayaan bersama (modal ventura) IKM;	√	√	√	
3	Mendorong tumbuhnya kekuatan bersama sehingga terbentuk kekuatan kolektif untuk menciptakan skala ekonomis melalui standardisasi, procurement dan pemasaran bersama;	√	√	√	
4	Perlindungan dan fasilitasi terhadap inovasi baru dengan mempermudah pengurusan hak kekayaan intelektual bagi kreasi baru yang diciptakan IKM;	√	√	√	√
5	Diseminasi informasi dan fasilitasi promosi dan pemasaran di pasar domestik dan ekspor;	√	√	√	√
6	Menghilangkan bias kebijakan yang menghambat dan mengurangi daya saing industri kecil;	√	√	√	√
7	Peningkatan kemampuan kelembagaan sentra IKM dan sentra industri kreatif, serta UPT, TPL;	√	√	√	√
8	Kerjasama kelembagaan dengan lembaga pendidikan dan lembaga penelitian dan pengembangan;	√	√	√	√
9	Kerjasama kelembagaan dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) dan/atau asosiasi industri, serta asosiasi profesi;	√	√	√	√

10	Pemberian fasilitas bagi IKM yang mencakup:				
	a. peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan sertifikasi kompetensi;	√	√	√	√
	b. bantuan dan bimbingan teknis;				
	c. bantuan bahan baku dan bahan penolong, serta mesin atau peralatan;	√	√	√	√
	d. pengembangan produk;	√	√	√	√
	e. bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup untuk mewujudkan industri hijau;	√	√		
	f. bantuan informasi pasar, promosi, dan pemasaran;	√	√	√	√
	g. penyediaan kawasan industri untuk IKM	√	√		
	h. pengembangan dan penguatan keterkaitan dan hubungan kemitraan	√	√	√	
11	Peningkatan akses IKM terhadap sumber lainnya yang mencakup:	√	√	√	√
	a. peningkatan akses IKM terhadap sumber pembiayaan;	√		√	√
	b. menggalakkan promosi pemasaran produk berbasis <i>e-smart</i> dan <i>e-commerce</i> ;	√	√	√	√
	c. memfasilitasi pengurusan HAKI produk;		√		
	d. Inovasi dan teknologi produk;	√		√	√
	e. pengembangan standardisasi dan pemasaran produk;	√	√	√	√
	f. penggunaan produk lokal berbasis IKM	√		√	√
12	Monitoring dan Evaluasi	√	√	√	√

Kebijakan Afirmatif Industri Kecil dan Menengah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah menyiapkan beberapa langkah guna mendorong peran Industri Kecil Menengah (IKM) untuk berpartisipasi dalam penguatan sektor industri Provinsi Sulawesi Barat dan nasional sebagai berikut :

- Peningkatan akses IKM terhadap sumber pembiayaan dengan mendorong pihak perbankan untuk menciptakan sistem pembiayaan yang lebih fleksibel bagi IKM, selain memfasilitasi terbentuknya Pembiayaan Bersama (Modal Ventura) oleh industri besar.
- Meningkatkan keterkaitan antar IKM di Indonesia dalam rantai nilai atau *value chain* industri besar. Langkah lain dalam mendorong upaya tersebut adalah mendorong tumbuhnya kekuatan kolektif melalui standardisasi, *procurement* dan pemasaran bersama IKM.
- Perlindungan dan fasilitasi terhadap inovasi baru dengan mempermudah pengurusan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi inovasi baru yang diciptakan oleh IKM.
- Meningkatkan kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi proses/rekayasa produk bagi IKM serta diversifikasinya melalui sinergi kegiatan litbang dan diklat

- e. Desiminasi informasi dan fasilitasi promosi dengan pemasaran di pasar domestik dan ekspor.
- f. Mendorong tumbuh berkembangnya kekuatan bersama, sehingga terbentuknya kekuatan kolektif untuk menciptakan skala ekonomi melalui standarisasi dan pemasaran.
- g. Peningkatan kemampuan kelembagaan sentra IKM.
- h. Pemberian fasilitasi bagi IKM (bantuan Peralatan dan bimbingan teknis, bantuan bahan baku dan bahan penolong serta mesin/peralatan, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan sertifikasi kompetensi, pengembangan produk, pengembangan dan penguatan keterkaitan dan hubungan kemitraan, penyediaan sentra industri untuk IKM yang berpotensi dan bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup untuk mewujudkan industri hijau.
- i. Kebijakan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat melalui Surat Edaran Nomor 3201-01-02/222/SET, Tanggal 25 Januari 2019, Tentang Penggunaan Poduk Lokal berbasis IKM.

Langkah kebijakan tersebut di atas, merupakan bentuk konkret dari penerapan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang mengharuskan pemerintah mendorong perang IKM dalam menguatkan sektor industri nasional.

Komitmen terhadap pencapaian program pembangunan industri komoditi industri unggulan yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sulawesi Barat 2020-2040 seharusnya menjadi perhatian serius semua *stakeholder*, terutama OPD Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebuanan, Dinas Kelautan dan Perikanan dan Dinas Peternakan Provinsi Sulawesi Barat.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Dokumen Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Sulawesi Barat Tahun 2020-2040 mengacu dan berpedoman pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 dan Kebijakan Industri Nasional (KIN) dalam rangka mewujudkan visi pembangunan industri nasional “Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh”.

Dokumen RPIP Sulawesi Barat Tahun 2020-2040 ini sangat relevan dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sulawesi Barat dan merupakan pedoman bagi Pemerintah Provinsi dan pemangku kepentingan industri dalam perencanaan dan pembangunan industri di Provinsi Sulawesi Barat.

RPIP Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2040 dijadikan referensi dan acuan bagi :

- a. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi dalam merumuskan dan menformulasi kebijakan sektoral yang terkait dengan bidang perindustrian yang dituangkan dalam dokumen rencana strategis di bidang tugas masing-masing sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten; dan
- b. Bupati dalam penyusunan rencana pembangunan industri kabupaten.

Dokumen RPIP Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2040 ini juga disesuaikan dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022, terutama yang terkait dengan pembangunan industri.

Akhirnya, Dokumen RPIP ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi DPRD Provinsi Sulawesi Barat dalam melaksanakan fungsi pengawasan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sektor industri di Provinsi Sulawesi Barat sejalan dengan aspirasi masyarakat.

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

M. ALI BAAL MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

ARIANTO,AP,MM

Pangkat: Pembina Utama Muda IV/c

NIP.: 19740112 199311 1 001